

DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	v
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN.....	
3. NERACA.....	
4. LAPORAN OPERASIONAL.....	
5. LAPORAN ARUS KAS.....	
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	
Bab I Pendahuluan.....	1-4
Bab II Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi.....	5-19
Bab III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	20-25
Bab IV Kebijakan Akuntansi.....	26-72
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.....	
▪ Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran.....	73-138
▪ Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	139
▪ Penjelasan Laporan Neraca.....	140-186
▪ Penjelasan Laporan Operasional.....	187-200
▪ Penjelasan Laporan Arus Kas.....	201-203
▪ Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	204-206
Bab VI Informasi Tambahan.....	207-212
Bab VII Penutup.....	213
LAMPIRAN	
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	viii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.4.1	SKPD di Kabupaten Klaten	7
Tabel 2.4.2	Badan Layanan Masyarakat	8
Tabel 2.4.3	Desa dan Kelurahan Tiap Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	9
Tabel 2.5.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2016	10
Tabel 2.6.1	Jumlah Sarana Pendidikan Setingkat SD/MI; SMP/MTs dan SMA/MA Negeri dan Swasta di Kabupaten Klaten Tahun 2016	11
Tabel 2.6.2	Jumlah Sarana Kesehatan Negeri dan Swasta di Kabupaten Klaten Tahun 2016	12
Tabel 2.6.3	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016	13
Tabel 2.6.4	Kondisi Prasarana Jalan dan Jembatan	13
Tabel 2.6.5	Prasarana Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2016	15
Tabel 2.8.1	Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2014-2019	16
Tabel 2.8.2	Pimpinan SKPD	17
Tabel 2.8.3	Pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016	19
Tabel 3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per SKPD	22
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD	24
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset Tetap	62
Tabel 5.4.1	Rincian Aset	140
Tabel 5.4.1.1	Rincian Aset Lancar	141
Tabel 5.4.1.4	Rincian Dana Cadangan	171
Tabel 5.4.2.1	Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2016	182
Tabel 5.4.2.1.1	Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2016	182
Tabel 5.4.2.1.4	Rincian Utang Beban Per 31 Desember 2016	183
Tabel 5.4.2.1.5	Rincian Utang Bagi Hasil Pendapatan Per 31 Desember 2016	186
Tabel 5.5.1	Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2016	187
Tabel 5.5.1.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2016	187
Tabel 5.5.1.2	Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2016	189
Tabel 5.5.1.3	Realisasi Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2016	189
Tabel 5.5.2	Realisasi Beban Tahun 2016	190
Tabel 5.5.2.1	Realisasi Beban Pegawai Tahun 2016	191
Tabel 5.5.2.2	Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2016	192
Tabel 5.5.2.3	Realisasi Beban Hibah Tahun 2016	193
Tabel 5.5.2.4	Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2016	194
Tabel 5.5.2.5	Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016	194
Tabel 5.5.2.6	Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2016	196
Tabel 5.5.2.7	Realisasi Beban Lain-lain Tahun 2016	196
Tabel 5.5.2.8	Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2016	196
Tabel 5.5.2.9	Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Hasil Pendapatan Lainnya Tahun 2016	197
Tabel 5.5.2.10	Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun 2016	197
Tabel 5.5.2.11	Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2016	197
Tabel 5.5.3.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2016	198
Tabel 5.5.3.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2016	198
Tabel 5.5.3.3	Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2016	199
Tabel 5.5.3.4	Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2016	199
Tabel 5.5.3.5	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2016	200
Tabel 5.5.3.6	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2016	200
Tabel 5.6.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2016	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Klaten

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Ikhtisar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016
Lampiran 2	Laporan Keuangan BUMD
Lampiran 3	Laporan Keuangan BLUD



BUPATI KLATEN

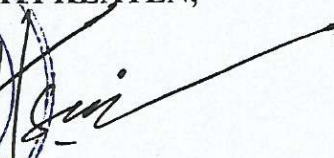
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2016

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bersama ini kami sajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten, terdiri dari, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca per 31 Desember 2016, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran (TA) 2016. Laporan Keuangan tersebut kami sajikan secara komparatif dengan laporan keuangan Tahun Anggaran 2015, dilampiri dengan laporan keuangan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD).

Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten TA 2016 dan penyusunan laporan keuangannya telah kami selenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten tersebut, telah kami lakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Informasi tentang posisi keuangan, pelaksanaan anggaran, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut merupakan tanggungjawab kami.

Akhirnya, kami berharap semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terlampir dapat bermanfaat bagi semua pihak, dalam rangka perbaikan pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten pada tahun-tahun mendatang.

Klaten, Maret 2017
Plt. BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rubiah)

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2015 (AUDITED)
4	PENDAPATAN - LRA	A.1	2.174.550.555.820,00	2.258.604.630.605,19	103,87	2.177.820.724.857,45
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	A.1.a	203.699.708.000,00	224.197.408.481,19	110,06	190.622.670.128,45
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	A.1.a.1)	69.315.000.000,00	75.574.747.729,00	109,03	68.201.277.234,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	A.1.a.2)	21.690.212.000,00	22.559.038.217,00	104,01	21.894.721.448,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	A.1.a.3)	9.025.118.500,00	9.025.861.668,00	100,01	7.477.951.040,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	A.1.a.4)	103.669.377.500,00	117.037.760.867,19	112,90	93.048.720.406,45
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	A.1.b	1.721.984.422.820,00	1.790.540.797.124,00	103,98	1.876.743.453.129,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	A.1.b.1)	1.482.193.569.820,00	1.573.615.108.481,00	106,17	1.279.990.558.283,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	A.1.b.1.(a)	46.515.490.000,00	48.990.111.797,00	105,32	37.426.203.558,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	A.1.b.1.(b)	2.029.814.000,00	1.285.821.476,00	63,35	988.786.715,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	A.1.b.1.(c)	1.103.476.363.320,00	1.204.344.586.098,00	109,14	1.164.196.398.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	A.1.b.1.(d)	97.567.824.000,00	89.256.225.610,00	91,48	77.379.170.000,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	A.1.b.1.(e)	232.604.078.500,00	229.738.363.500,00	98,77	
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	A.1.b.2)	0,00	0,00	0,00	413.181.317.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA		0,00	0,00	0,00	413.181.317.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	A.1.b.3)	162.745.373.000,00	143.325.208.643,00	88,07	142.333.018.338,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		162.745.373.000,00	143.325.208.643,00	88,07	142.333.018.338,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	A.1.b.4)	77.045.480.000,00	73.600.480.000,00	95,53	41.238.559.508,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		77.045.480.000,00	73.600.480.000,00	95,53	41.238.559.508,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	A.1.c	248.866.425.000,00	243.866.425.000,00	97,99	110.454.601.600,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	A.1.c.1)	5.000.000.000,00	0,00	0,00	1.779.632.600,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	A.1.c.2)	243.866.425.000,00	243.866.425.000,00	100,00	108.674.969.000,00
5	BELANJA	A.2	2.060.405.778.757,00	1.784.595.702.994,03	86,61	1.807.513.027.820,45
5.1	BELANJA OPERASI	A.2.a	1.797.783.801.540,00	1.563.576.411.511,03	86,97	1.501.440.716.957,45
5.1.1	Belanja Pegawai	A.2.a.1)	1.415.014.046.949,00	1.239.843.399.717,00	87,62	1.181.884.746.884,45
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	A.2.a.2)	306.713.136.351,00	255.081.046.746,03	83,17	227.261.915.734,00
5.1.5	Belanja Hibah	A.2.a.3)	63.551.118.240,00	56.841.540.048,00	89,44	82.119.979.339,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	A.2.a.4)	12.505.500.000,00	11.810.425.000,00	94,44	10.174.075.000,00
5.2	BELANJA MODAL	A.2.b	260.134.243.017,00	220.759.237.283,00	84,86	306.072.310.863,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	A.2.b.1)	5.050.000.000,00	4.601.391.750,00	91,12	6.131.345.500,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	A.2.b.2)	106.996.803.857,00	93.767.955.597,00	87,64	78.890.526.208,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	A.2.b.3)	46.597.554.160,00	37.655.211.146,00	81,24	115.018.525.491,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.2.b.4)	88.540.613.000,00	72.641.123.070,00	82,04	86.217.166.164,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	A.2.b.5)	12.949.272.000,00	11.893.555.720,00	91,85	19.814.747.500,00

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2015 (AUDITED)
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	A.2.c	2.487.734.200,00	260.054.200,00	10,45	0,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga		2.487.734.200,00	260.054.200,00	10,45	0,00
6	TRANSFER	A.3	507.043.640.956,00	497.735.068.505,00	98,16	270.272.968.227,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	A.3.a	9.597.406.700,00	5.826.321.071,00	60,71	613.004.277,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		8.718.000.000,00	4.230.712.899,00	62,99	
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		2.881.406.700,00	1.595.608.172,00	55,38	613.004.277,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	A.3.b	497.446.234.256,00	491.908.747.434,00	98,89	269.659.963.950,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	A.3.b	498.358.301.500,00	490.948.721.084,00	98,91	268.970.035.600,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	A.3.b	1.087.932.756,00	960.028.350,00	88,24	689.928.350,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	A.4	(392.898.863.893,00)	(23.726.140.893,84)	6,04	100.034.728.810,00
7	PEMBIAYAAN	A.5				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	A.5.a	406.198.863.893,00	406.262.095.580,00	100,02	311.125.135.083,00
7.1.1	Penggunaan SILPA	A.5.a	404.879.640.718,00	406.198.863.893,00	100,33	286.555.911.908,00
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan	A.5.a	942.938.777,00	0,00	0,00	22.442.938.777,00
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	A.5.a	0,00	63.231.687,00	0,00	
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang	A.5.a	376.284.398,00	0,00	0,00	2.126.284.398,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	A.5.b	13.300.000.000,00	8.304.000.000,00	62,44	4.961.000.000,00
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	A.5.b	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	60,00	0,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	A.5.b	8.300.000.000,00	5.304.000.000,00	63,90	4.961.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	A.5.b	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO		392.898.863.893,00	397.958.095.580,00	101,29	306.164.135.083,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	A.6	0,00	374.231.954.686,16	0,00	406.198.863.893,00

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

Klaten, Mei 2017

PR. BUPATI KLATEN,





NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

REKENING	URAIAN	REF	2016 (AUDITED)	2015 (AUDITED)
1	ASET	C.1		
1.1	ASET LANCAR	C.1.1		
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	C.1.1.1	211.729.586.874,00	205.896.502.244,00
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.3	12.835.975.913,00	15.316.006.262,00
1.1.1.04	Kas di BLUD	C.1.1.4	4.681.693.714,16	0,00
1.1.1.05	Kas Lainnya	C.1.1.5	2.814.072.349,00	1.235.383.053,00
1.1.1.06	Setara Kas	C.1.1.6	145.000.000.000,00	185.000.000.000,00
1.1.2.07	Investasi Jangka Pendek	C.1.1.7	0,00	0,00
1.1.3.01	Piutang Pajak	C.1.1.8	30.748.784.734,00	27.563.667.758,00
1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Pajak		(23.847.884.772,00)	(16.934.311.212,00)
	Piutang Pajak Netto		6.900.899.962,00	10.629.356.546,00
1.1.3.02	Piutang Retribusi	C.1.1.9	209.345.931,00	224.443.114,00
1.1.5.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi		(181.404.287,00)	(145.660.852,20)
	Piutang Retribusi Netto		27.941.644,00	78.782.261,80
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	C.1.1.10	4.002.480.940,00	11.168.350,00
1.1.5.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(21.031.335,00)	(79.190,00)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		3.981.449.605,00	11.089.160,00
1.1.4.01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	C.1.1.11	3.520.434.114,00	3.580.194.114,00
1.1.5.02.01	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		(2.945.479.435,00)	(2.780.209.775,00)
	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Netto		574.954.679,00	799.984.339,00
1.1.4.04	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	C.1.1.12	456.674.500,00	530.324.500,00
1.1.5.02.04	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		(456.674.500,00)	(530.324.500,00)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto		0,00	0,00
1.1.6.03	Beban Dibayar Dimuka	C.1.1.13	321.124.429,00	318.774.872,00
1.1.7	Persediaan	C.1.1.14	21.515.178.997,45	18.480.900.137,20
	JUMLAH ASET LANCAR		410.382.878.166,61	437.766.778.875,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	C.1.2		
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	C.1.2.1		
1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Bergulir		0,00	0,00
1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00

REKENING	URAIAN	REF	2016 (AUDITED)	2015 (AUDITED)
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	C.1.2.2		
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		123,767,913,031.00	115,598,635,885.14
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya			0.00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		123,767,913,031.00	115,598,635,885.14
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		123,767,913,031.00	115,598,635,885.14
1.3	ASET TETAP	C.1.3		
1.3.1	Tanah		1,291,905,063,673.00	1,286,583,891,923.00
1.3.2	Peralatan dan Mesin		746,367,762,112.43	632,039,193,432.44
1.3.3	Gedung dan Bangunan		761,362,497,206.18	724,530,954,478.00
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		888,503,282,799.00	863,965,853,421.00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya		260,590,146,677.63	242,538,567,597.62
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		88,444,314,356.00	80,027,889,411.00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan		-1,200,717,606,916.43	(1,548,046,330,138.64)
	JUMLAH ASET TETAP		2,836,455,459,907.81	2,281,640,020,124.42
1.4	DANA CADANGAN	C.1.4		
1.4.1	Dana Cadangan		3,019,210,084.00	0.00
	JUMLAH DANA CADANGAN		3,019,210,084.00	0.00
1.5	ASET LAINNYA	C.1.5		
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang		0.00	0.00
	Penyisihan Tagihan Jangka Panjang		0.00	0.00
	Tagihan Jangka Panjang Netto		0.00	0.00
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		10,138,665,074.00	10,138,665,074.00
1.5.3	Aset Tidak Berwujud		11,884,989,509.00	8,497,172,140.00
1.5.3.6	Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(4,126,994,748.00)	(4,453,498,173.20)
	Aset Tidak Berwujud Netto		7,757,994,761.00	4,043,673,966.80
1.5.4	Aset Lain-lain		172,957,223,419.51	127,747,418,780.51
1.5.4.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(80,891,363,212.51)	(64,614,838,488.51)
	Aset Lain-lain Netto		92,065,860,207.00	63,132,580,292.00
	JUMLAH ASET LAINNYA		109,962,520,042.00	77,314,919,332.80
	JUMLAH ASET		3,483,587,981,231.42	2,912,320,354,217.36
2	KEWAJIBAN	C.2		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.1		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	C.2.1.1	15,301,815.00	13,644,613.00
2.1.2	Utang Bunga		0.00	0.00
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.1.2	0.00	0.00
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.1.3	853,383,637.00	698,946,645.00
2.1.5	Utang Beban	C.2.1.4	3,924,461,621.00	3,443,178,289.00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.1.5	3,257,239,077.00	112,794,165.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		8,050,386,150.00	4,268,563,712.00

REKENING	URAIAN	REF	2016 (AUDITED)	2015 (AUDITED)
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	C.2.2		
2.2.1	Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		8.050.386.150,00	4.268.563.712,00
3	EKUITAS	C.3		
3.1	EKUITAS			
3.1.1	Ekuitas	C.3	3.475.537.595.081,42	2.908.051.790.505,36
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.483.587.981.231,42	2.912.320.354.217,36

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2016 (AUDITED)	2015 (AUDITED)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	E.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	A.1.a.1)	75.574.747.729,00	68.201.277.234,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	A.1.a.2)	22.559.038.217,00	21.894.721.448,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	A.1.a.3)	9.025.861.668,00	7.477.951.040,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	A.1.a.4), E.1	116.863.573.267,19	94.870.291.584,45
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	A.1.b.1)	1.573.615.108.481,00	1.279.990.558.283,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	A.1.b.2)	0,00	413.181.317.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	A.1.b.3)	143.325.208.643,00	142.333.018.338,00
Bantuan Keuangan - LRA	A.1.b.4)	73.600.480.000,00	41.238.559.508,00
Pendapatan Hibah - LRA	A.1.c.1)	0,00	1.779.632.600,00
Pendapatan Lainnya - LRA	A.1.c.2)	243.866.425.000,00	108.674.969.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.258.430.443.005,19	2.179.642.296.035,45
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai	A.2.a.1)	1.239.843.399.717,00	1.181.884.746.884,45
Belanja Barang dan Jasa	A.2.a.2)	255.081.046.746,03	266.207.508.255,00
Belanja Hibah	A.2.a.3)	56.841.540.048,00	43.174.386.818,00
Belanja Bantuan Sosial	A.2.a.4)	11.810.425.000,00	10.174.075.000,00
Belanja Tak Terduga	A.2.c	260.054.200,00	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		4.230.712.899,00	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	A.3.a	1.595.608.172,00	613.004.277,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	A.3.b	490.948.721.084,00	268.970.035.600,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	A.3.b	960.026.350,00	689.928.350,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.061.571.534.216,03	1.771.713.685.184,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		196.858.908.789,16	407.928.610.851,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	E.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	A.1.a.4), E.2	109.937.600,00	294.713.220,00
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		0,00	-
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	A.1.a.4), E.2	64.250.000,00	10.000.000,00
Pencaliran Dana Cadangan	A.5.a, E.2	-	22.442.938.777,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		63.231.687,00	-
Jumlah Arus Kas Masuk		237.419.287,00	22.747.651.997,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah	A.2.b.1)	4.601.391.750,00	6.131.345.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	A.2.b.2)	93.767.955.597,00	78.890.526.208,00

URAIAN	REF	2016 (AUDITED)	2015 (AUDITED)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	A.2.b.3)	37.855.211.146,00	115.018.525.491,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.2.b.4)	72.641.123.070,00	86.217.166.164,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	A.2.b.5)	11.893.555.720,00	19.814.747.500,00
Pembentukan Dana Cadangan	A.5.b	3.000.000.000,00	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	A.5.b	5.304.000.000,00	4.961.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		229.063.237.283,00	311.033.310.863,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(228.825.817.996,00)	(288.285.658.866,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	E.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya	E.3	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	E.3	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	E.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.4	178.429.252.776,00	108.865.325.203,40
Jumlah Arus Kas Masuk		178.429.252.776,00	108.865.325.203,40
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.4	178.427.595.574,00	108.892.881.490,40
Jumlah Arus Kas Keluar		178.427.595.574,00	108.892.881.490,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		1.657.202,00	(27.556.287,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(31.965.252.004,84)	119.615.395.698,00
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran		406.212.508.506,00	286.597.112.808,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran		374.247.256.501,16	406.212.508.506,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas Lainnya		16.827.830.053,00	1.235.383.053,00
Saldo Akhir Kas		391.075.086.554,16	407.447.891.559,00

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	REF	SALDO 2016 (AUDITED)	SALDO 2015 (AUDITED)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL						
8	PENDAPATAN - LO	D.1	2.179.758.785.750,23	2.356.015.613.720,45	(176.256.827.970,22)	(7,48)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	D.1.1	233.639.324.203,05	207.861.407.887,45	25.777.916.315,60	12,40
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO		78.605.427.213,00	85.601.607.254,00	(6.996.180.041,00)	(8,17)
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		22.006.365.687,00	21.926.879.886,00	79.485.801,00	0,36
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		11.981.169.664,86	7.477.951.040,00	4.503.218.624,86	60,22
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO		121.046.361.638,19	92.854.969.707,45	28.191.391.930,74	30,36
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	D.1.2	1.790.540.797.124,00	1.876.743.453.129,00	(86.202.656.005,00)	(4,59)
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		1.573.615.108.481,00	1.279.990.558.283,00	293.624.550.198,00	22,94
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		0,00	413.181.317.000,00	(413.181.317.000,00)	(100,00)
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		143.325.208.643,00	142.333.018.338,00	992.190.305,00	0,70
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO		73.600.480.000,00	41.238.559.508,00	32.361.920.492,00	78,47
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	D.1.3	155.578.664.423,18	271.410.752.704,00	(115.832.088.280,82)	(42,68)
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO		155.578.663.423,18	162.735.783.704,00	(7.157.120.280,82)	(4,40)
8.3.2	Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO		1.000,00	108.674.969.000,00	(108.674.968.000,00)	(100,00)
9	BEBAN	D.2	2.062.295.717.701,58	2.439.470.115.332,45	(377.174.397.630,87)	(15,46)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	D.2.1	1.238.950.544.052,00	1.181.016.784.318,45	57.933.759.733,55	4,91
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	D.2.2	382.445.336.704,28	350.817.498.862,59	31.627.837.841,69	9,02
9.1.3	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	D.2.3	56.542.054.914,00	81.083.884.277,00	(24.541.829.363,00)	(30,27)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	D.2.4	11.810.425.000,00	10.174.075.000,00	1.636.350.000,00	16,08
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.5	107.618.940.197,00	536.009.998.785,21	(428.391.058.588,21)	(79,92)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	D.2.6	7.195.298.799,80	10.132.591.334,70	(2.937.292.534,90)	(28,99)
9.1.9	Beban Lain-lain		720.028.617,50	0,00	720.028.617,50	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		4.230.712.899,00	0,00	4.230.712.899,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	D.2.7	4.740.053.084,00	575.318.804,50	4.164.734.279,50	723,90
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	D.2.7	247.082.297.084,00	268.970.035.600,00	(21.887.738.516,00)	(8,14)
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	D.2.7	960.026.350,00	689.928.350,00	270.098.000,00	39,15
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI			117.463.068.048,65	(83.454.501.612,00)	200.917.569.660,65	(240,75)

NO. URUT	URAIAN	REF	SALDO 2016 (AUDITED)	SALDO 2015 (AUDITED)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	D.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	D.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	D.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	D.3.4	71.768.313,00	0,00	71.768.313,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	D.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	D.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON	D.3	(71.768.313,00)	0,00	(71.768.313,00)	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		117.391.299.735,65	(83.454.501.612,00)	200.845.801.347,65	(240,67)
	POS LUAR BIASA	D.4				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	D.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	D.4.2	260.054.200,00	0,00	260.054.200,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(260.054.200,00)	0,00	(260.054.200,00)	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO		117.131.245.535,65	(83.454.501.612,00)	200.585.747.147,65	(240,35)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini



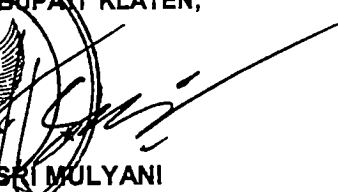


PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2016 (AUDITED)	2015 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal	B.1	406.198.863.893,00	286.555.911.908,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	B.2	406.198.863.893,00	286.555.911.908,00
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	B.3	374.231.954.686,16	406.198.863.893,00
Sub Total		374.231.954.686,16	406.198.863.893,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	B.4	0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		374.231.954.686,16	406.198.863.893,00

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

Klaten, Mei 2017
Pit. BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2016 (AUDITED)	2015 (AUDITED)
EKUITAS AWAL	F.1	2.908.051.790.505,36	6.530.222.521.810,67
SURPLUS/DEFISIT-LO		117.131.245.535,65	(83.454.501.612,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	F.2		
Koreksi Nilai Persediaan	F.2	-	18.917.300,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	F.2	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	F.2	450.354.559.040,41	(3.538.735.146.993,31)
EKUITAS AKHIR	F.3	3.475.537.595.081,42	2.908.051.790.505,36

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini

Klaten, Mei 2017
PIL. BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI



BAB I PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (permda bersangkutan);
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten.

c. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- a. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas.
- b. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya.
- c. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

Bab III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- a. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- b. Kebijakan Keuangan
- c. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- a. Entitas Pelaporan
- b. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- a. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.a.1 Pendapatan - LRA
 - 5.a.2 Belanja
 - 5.a.3 Pembayaan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

- b. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.c.1 Pendapatan - LO
 - 5.c.2 Beban
 - 5.c.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.c.4 Akun Luar Biasa
- d. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.e.1 Aset
 - 5.e.2 Kewajiban
 - 5.e.3 Ekuitas
- f. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.f.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.f.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.f.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.f.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bab VI Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

Bab VII Penutup



BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Sebagaimana disyaratkan dalam PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan pada Paragraf 55, pada bagian ini kami sajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, sebagai tambahan informasi yang belum disajikan dalam bagian sebelumnya.

A. KONDISI UMUM

1. Pembentukan Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Klaten berkedudukan tetap di Jl. Pemuda Nomor 294 Klaten, Jawa Tengah.

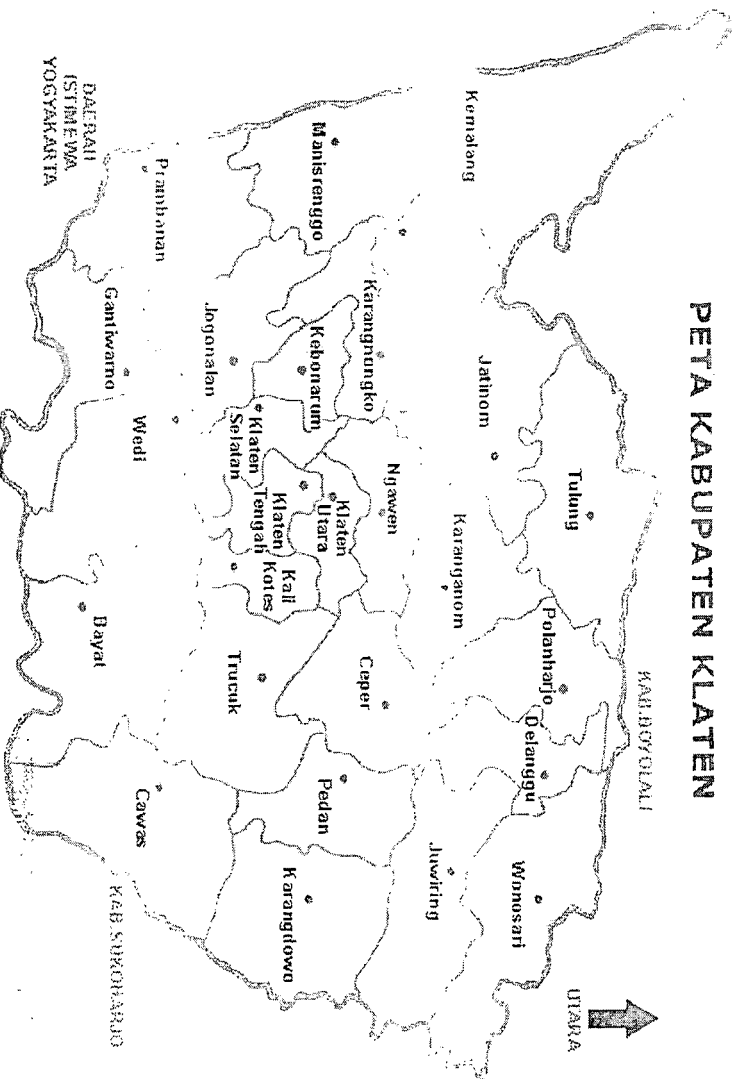
2. Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 Ha yang secara administratif terbagi menjadi 26 Kecamatan meliputi 391 Desa dan 10 Kelurahan. Secara astronomis terletak di antara 07° 32' 23" LS – 07° 48' 30" LS dan 110° 26' 46" BT – 110° 48' 00" BT dengan ketinggian wilayah antara 100 – 400 m diatas permukaan air laut (dpal). Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY) di sebelah selatan dan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY) di sebelah barat.

Kabupaten Klaten berada di antara tiga kota besar, yaitu Yogyakarta (30 km), Surakarta atau Solo (30 km), dan Semarang (100 km). Ketiga kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan Kabupaten Klaten, baik dari aspek penduduk, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya maupun aspek lain. Tersedianya jalur transportasi darat yang menghubungkan tiga kota tersebut, fasilitas Bandara Internasional Adisumarmo di Solo, Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Laut Tanjung Mas di Semarang serta Bandara Adi Sucipto dan status Yogyakarta sebagai kota pendidikan mempunyai implikasi terhadap perkembangan Kabupaten Klaten.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015



3. Kondisi Topografis

Berdasarkan ketinggian tempat, Kabupaten Klaten terbagi menjadi empat wilayah, yaitu:

1. Wilayah dengan ketinggian <100 m dpal, meliputi sebagian Kecamatan Juwiring, Karangdowo, dan Cawas;
2. Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpal, meliputi Kecamatan : Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (barat), Trucuk, Kalkikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonharum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Cepher, Pedan, Karangnom (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), dan Wonosari (barat);
3. Wilayah dengan ketinggian 200-400 m dpal, meliputi Kecamatan : Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnungko, Kebonharum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karangnom (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat);
4. Wilayah dengan ketinggian 400-1000 m dpal, meliputi Kecamatan : Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil), dan Tulung (sebagian kecil).



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), yang dapat menjadi kendala dalam hal komunikasi dan transportasi. Namun demikian dapat mendatangkan keuntungan dalam hal pengembangan diversifikasi tanaman pangan dan keberadaan sumberdaya air untuk irigasi, drainase, *domestic use* maupun kebutuhan air minum. Dalam hal ini Kabupaten Klaten dapat memasok kebutuhan air minum masyarakat Kota Solo.

4. Organisasi Pemerintahan

Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki 60 Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) SKPD berbentuk sekretariat, yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah; 5 (lima) SKPD berbentuk Badan; 10 (sepuluh) SKPD berbentuk Dinas; Satu (1) SKPD Inspektorat setingkat Badan/Dinas, Satu (1) SKPD Satuan setingkat Badan/Dinas, 5 (lima) SKPD berbentuk Kantor; dan 26 Kecamatan, 10 Kelurahan, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Untuk SKPD setingkat Sekretariat, Badan dan Dinas dipimpin oleh Pejabat Eselon II, untuk Kantor dan Kecamatan dipimpin oleh Pejabat Eselon IV. Sekretaris Daerah membantu untuk Kelurahan dipimpin oleh Pejabat Eselon IV. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang membawahi 8 (delapan) Kepala Bagian, sedang Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
SKPD di Kabupaten Klaten

No	SKPD	KETERANGAN
1	Sekretariat DPRD	
2	Sekretariat Daerah	
3	Dinas Pendidikan	
4	Dinas Kesehatan	
5	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
6	Dinas Perhubungan	
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
8	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
9	Dinas Pekerjaan Umum	
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	
11	Dinas Pertanian	
12	DPPKAD	
13	Inspektorat Kab. Klaten	
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
15	Badan Kepegawaian Daerah	
16	Kantor Kesatuan Bangsa Politik	
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

18	Badan Lingkungan Hidup	
19	Badan Pemberdayaan Masyarakat.	
20	Kantor Ketahanan Pangan	
21	Kantor Arsip dan Perpustakaan	
22	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
23	Satuan Polisi Pamong Praja	
24	Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
25	Rumah Sakit Umum Daerah	
26	Kecamatan	26 Kecamatan
27	Kelurahan	10 Kelurahan

Sumber: *Bagian Organisasi Selda Kab. Klaten Tahun 2015*

Perkembangan keorganisasian daerah Kabupaten Klaten sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.4.2
Badan Layanan Masyarakat

Organisasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2016	Jumlah					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Sekretariat Dewan	1	1	1	1	1	1
2. Sekretariat Daerah	1	1	1	1	1	1
3. Badan	6	4	5	5	5	5
4. Dinas	10	9	10	10	10	10
5. Kantor	5	5	5	5	5	5
6. Kecamatan	26	26	26	26	26	26
7. Kelurahan	10	10	10	10	10	10
8. Satuan Setingkat Badan	1	1	1	1	1	1
9. Inspektorat	1	1	1	1	1	1
10. RSUD	-	-	-	1	1	1
Jumlah	60	58	60	61	61	61

Sumber : *Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, Tahun 2016*

Selain itu terdapat 391 Pemerintahan Desa dan 10 Kelurahan yang tersebar di 26 Kecamatan, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 2.4.3
Desa dan Kelurahan Tiap Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016

Kecamatan	Luas(Ha)	Desa	Kelurahan
1	2	3	4
1. Prambanan	2.443	16	-
2. Gantiwarno	2.564	16	-
3. Wedi	2.438	19	-
4. Bayat	3.943	18	-
5. Cawas	3.447	20	-
6. Trucuk	3.381	18	-
7. Kalikotes	1.298	7	-
8. Kebonarum	967	7	-
9. Jogonalan	2.670	18	-
10. Manisrenggo	2.696	16	-
11. Karangnongko	2.674	14	-
12. Ngawen	1.697	13	-
13. Cepur	2.445	18	-
14. Pedan	1.917	14	-
15. Karangdowo	2.923	19	-
16. Juwiring	2.979	19	-
17. Wonosari	3.114	18	-
18. Delanggu	1.878	16	-
19. Polanharjo	2.384	18	-
20. Karanganom	2.406	19	-
21. Tulung	3.200	18	-
22. Jatinom	3.553	17	1
23. Kemalang	5.166	13	-
24. Klaten Selatan	1.443	11	1
25. Klaten Tengah	892	3	6
26. Klaten Utara	1.038	6	2
Jumlah	65.556	391	10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten 2015

Kecamatan Cawas merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 20 Desa dan terkecil di Kecamatan Klaten Utara yaitu sebanyak 6 (enam) Desa dan 2 (dua) Kelurahan.

5. Demografi

Kecamatan Karangdowo, Juwiring dan Karanganom merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 19 Desa dan terkecil di Kecamatan Kalikotes dan Kebonarum. yaitu sebanyak 7 Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 2.5.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Klaten Tahun 2016

	Luas(Ha)	Desa	Kelurahan
1	2	3	4
1. Prambanan	244,3	16	-
2. Gantiwarno	256,4	16	-
3. Wedi	243,8	19	-
4. Bayat	394,3	18	-
5. Cawas	344,7	20	-
6. Trucuk	338,1	18	-
7. Kalikotes	129,8	7	-
8. Kebonarum	96,7	7	-
9. Jogonalan	267,0	18	-
10. Manisrenggo	269,6	16	-
11. Karangnongko	267,4	14	-
12. Ngawen	169,7	13	-
13. Ceper	244,5	18	-
14. Pedan	191,7	14	-
15. Karangdowo	292,3	19	-
16. Juwiring	297,9	19	-
17. Wonosari	311,4	18	-
18. Delanggu	187,8	16	-
19. Polanharjo	238,4	18	-
20. Karanganyom	240,6	19	-
21. Tulung	320,0	18	-
22. Jatinom	355,3	17	1
23. Kemalang	516,6	13	-
24. Klaten Selatan	144,3	11	1
25. Klaten Tengah	89,2	3	6
26. Klaten Utara	103,8	6	2
Jumlah	6555,6	391	10

Sumber : Data dari Dinas Dukcapil Tahun 2016

6. Sarana dan Prasarana Pokok

a. Sarana dan Tenaga Pendidikan

Sarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi di Kabupaten Klaten Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 2.6.1
Jumlah Sarana Pendidikan Setingkat SD/MI; SMP/MTs dan SMA/MA
Negeri dan Swasta di Kabupaten Klaten Tahun 2016

Kecamatan	Sekolah Negeri					Sekolah Swasta				
	TK	SD /MI	SMP /MTs	SM A /MA /SM K	Jml	TK	SD /MI	SMP /MTs	SMA /MA /SMK	Jml
1. Prambanan	-	31	3	2	36	31	2	1	3	37
2. Gantiwarno	-	23	4	2	29	26	3	2	2	33
3. Wedi	-	29	2	1	32	32	5	4	2	43
4. Bayat	-	34	3	2	39	37	7	3	2	49
5. Cawas	-	42	4	1	47	43	3	2	3	51
6. Trucuk	-	39	4	1	44	59	11	3	0	73
7. Kalikotes	-	21	1	-	22	19	3	0	0	22
8. Kebonarum	-	11	1	-	12	18	2	2	1	23
9. Jogonalan	-	28	2	2	32	38	2	1	1	42
10. Manisrenggo	-	28	3	-	31	30	5	1	1	37
11. Karangnongko	-	25	2	1	28	27	1	1	0	29
12. Ngawen	1	24	1	1	27	38	7	3	0	48
13. Ceper	-	31	4	1	36	49	11	2	3	65
14. Pedan	-	24	4	1	29	34	4	2	4	44
15. Karangdowo	-	33	4	1	38	32	5	1	1	39
16. Juwiring	-	35	2	1	38	41	9	3	1	54
17. Wonosari	-	38	4	1	43	48	2	2	2	54
18. Delanggu	-	28	5	-	33	30	5	1	4	40
19. Polanharjo	-	29	3	1	33	30	6	0	0	36
20. Karanganom	-	31	6	1	38	48	7	3	1	59
21. Tulung	-	29	4	1	34	39	8	1	0	48
22. Jatinom	-	37	4	1	42	48	2	1	2	53
23. Kemalang	-	25	2	-	27	19	0	3	0	22
24. Klaten Selatan	-	20	1	3	24	26	2	1	7	36
25. Klaten Tengah	-	20	4	-	24	34	9	3	8	54
26. Klaten Utara	-	15	4	5	24	33	7	5	13	58
Jumlah	1	730	81	30	842	909	128	51	61	1.149

Sumber : Data Dinas Pendidikan, Tahun 2016

Jumlah guru TK sebanyak 585 guru; sekolah negeri tingkat pendidikan SD sebanyak 4.289 guru, guru; SLTP Negeri: 2.232 guru; SMA dan SMK 1.448 guru.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Selain itu terdapat 7 (tujuh) Perguruan Tinggi, baik tingkat Diploma Tiga (D3) maupun Sarjana Strata Satu (S1) dengan 301 pengajar/dosen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana sarana pendidikan di Kabupaten Klaten cukup lengkap.

b. Sarana dan Tenaga Kesehatan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten baik negeri maupun swasta dalam rangka pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan, sebagai berikut:

Tabel 2.6.2
Jumlah Sarana Kesehatan Negeri dan Swasta di Kabupaten Klaten
Tahun 2016

Keterangan	Jumlah Tahun 2016 (Unit)			
	Negeri	Swasta	Jumlah	
1	2	3	4=2+3	
1) Rumah Sakit Umum	1	6	7	
2) Rumah Sakit Jiwa	1	-	1	
3) Rumah Bersalin	-	-	-	
4) Puskesmas :				
a) Induk	34	-	34	
b) Pembantu (Pustu)	84	-	84	
c) Rawat Inap	15	-	15	
d) Keliling (Pusling)	34	-	34	
5) Balai Pengobatan Paru-paru	1	-	1	
6) Poliklinik/Balai Pengobatan	34	63	97	
7) Apotek	1	37	32	
8) Toko Obat Berjin	-	2	-	
9) Dokter Praktik	202	-	200	
10) Gudang Farmasi	1	-	1	

Sumber : Data Dinas Kesehatan Tahun 2016

Selain itu terdapat Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebanyak 2.249 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 2.6.3
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016

Tenaga Kesehatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1) Dokter Umum	114	136	218	138	146	51	55
2) Dokter Spesialis	59	51	48	38	27	27	23-
3) Dokter Gigi	49	27	36	24	29	34	33
4) Bidan	499	484	484	613	566	470	344

Sumber : Data Dinas Kesehatan Tahun 2016

c. Prasarana Jalan dan Jembatan

Prasarana jalan Kabupaten Klaten Tahun 2016 sepanjang 769,63 kilometer
(km) sebagai berikut :

Tabel 2.6.4
Kondisi Prasarana Jalan dan Jembatan

Keadaan	Status Jalan								
	Jalan Negara			Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten			
	2014	2015	2016	2014	2015	2014	2015	2016	
(1)	(2)			(3)			(4)		
I Jenis Permukaan									
a. Aspal/Hotmix /Lapen /sandsheet	33,52	33,52		41,36	41,36		754,00	753,94	739,90
b. Batu /Macadam							1,63	3,16	
c. Hotmix									
d. Kerikil									2,90
e. Tanah/Jalan Belum Tembus							21,37	12,53	
f. beton									26,83
Jumlah - I	33,52	33,52		1,36	41,36		777,00	769,63	769,63



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

II Kondisi Jalan									
a. Baik	3,90	3,90		25,76	25,76		550,57	381,08	432,91
b. Sedang	29,6 2	29,6 2		15,61	15,61		86,63	206,61	190,92
c. Rusak							-	68,00	63,51
d. Rusak Berat							132,44	113,94	82,29
Jumlah - II	33,5 2	33,5 2	-	41,37	41,37	-	769,64	769,63	769,63
III Kelas Jalan									
a. Kelas I				-	-				
b. Kelas II				-	-				
c. Kelas III	33,5 2			41,36 0	41,36 0	41,3 60			
d. Kelas IIIA		33,5 2	33,5 2	-	-				
e. Kelas IIIB				-	-				
f. Kelas IIIC				-	-		777	777	769,63
g. Kelas IV				-	-		754	754	
h. Kelas Tidak Dirinci	33,5 2			-	-		1,63	1,63	
Jumlah - III	33,5 2	33,5 2	33,5 2	41,36	41,36	41,3 6	777	777	769,63

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, Tahun 2016

Jalan tersebut di atas merupakan jalan kabupaten. Sedangkan jalan nasional dan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Klaten masing-masing sepanjang 33.52 km dan 41.36 km. Jalan desa/lokal dan jalan lingkungan masing-masing sepanjang 2.171.006 km.

Jumlah jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2016 sebanyak 321 buah, seluruhnya sepanjang 3.490,79 km. Kondisi jembatan pada umumnya baik, dan untuk jembatan di jalan nasional merupakan jembatan baru.

d. Prasarana Irigasi/Pengairan

Jumlah prasarana irigasi/pengairan di Kabupaten Klaten, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 2.6.5
Prasarana Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2016

Keterangan	Satuan	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1) Sumber Air	buah	174	174	174	174	174	174
2) Waduk	unit	1	1	1	1	1	1
3) Sarana Pengairan Teknis :							-
a) Saluran Primer	km	144.586	144.586	144.586	144.586	144.586	43.076
b) Saluran Sekunder	km	635.993	635.993	635.993	635.993	635.490	
c) Saluran Tersier	km	734.471	734.471	734.471	734.471	734.471	482.97

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, Tahun 2016

7. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan

Visi Pemerintah Kabupaten Klaten tertuang dalam Perda No.22 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Klaten*, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batasbatas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Maju*, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. *Mandiri*, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. *Berdaya saing*, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa Kabupaten Klaten kedepan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan keunggulan kompetitif sehingga mampu dan dapat bersaing di segala bidang.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah untuk mengimplementasikan Visi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
3. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

8. Personalia

a. Pimpinan Daerah

1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kd/ WKD)

Kabupaten Klaten dipimpin seorang Bupati, yang untuk periode Tahun 2015-2020 dijabat oleh Hj. Sri Hartini, SE selaku Kepala Daerah dan Hj. Sri Mulyani selaku wakilnya.

2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Klaten terdiri dari 50 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Klaten periode 2014-2019, sebagai berikut:

Tabel 2.8.1

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2014-2019

Nama	Jabatan
a) Agus Riyanto	Ketua DPRD
b) Yoga Hardaya, SH, MH	Wakil Ketua I DPRD
c) H. Haryanto, S.pd	Wakil Ketua II DPRD
d) H. Sudibyo, SE, MM	Wakil Ketua III DPRD
e) Drs. Sriyanto	Ketua Komisi I
f) Ir. H. Tugiman	Ketua Komisi II
g) Hengky Asnari Salim, SH, M.Hum	Ketua Komisi III
h) Andi Purnomo	Ketua Komisi IV

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

b. Pimpinan SKPD

Pimpinan SKPD yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah meliputi Pejabat Eselon II yang memimpin Sekretariat, Badan dan Dinas, serta Pejabat Eselon III yang memimpin unit organisasi setingkat Kantor dan Kecamatan.

Tabel 2.8.2
Pimpinan SKPD

Nama Unit Organisasi (SKPD)	Nama Pimpinan
1	2
1) Sekretariat Daerah	Joko Sawaldi, MM
2) Sekretariat DPRD	Drs. Sugiharjo Sapto Aji, MM
3) Badan Kepegawaian Daerah	Edi Hartanto, SH., MM
4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Surti Hartini, SH. Cn
5) Inspektorat Kabupaten Klaten	Syahrana, SH
6) Badan Lingkungan Hidup	Ir. Tajudin Akbar
7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Plt.H.Bambang Sujarwa, SE.MM
8) Badan Pemberdayaan Masyarakat	Herlambang Jaka Santoso, SE, Msi
9) Dinas Perindag, Koperasi dan UMKM	Drs. Sartiyasto, MM
10) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sugeng Haryanto, SE, MM
11) Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Sunarna, SH.
12) Dinas Pendidikan	Drs. Pantoro, MM
13) Dinas Kesehatan	Plt. Edi Hartanto, SH., MM.
14) Dinas Pekerjaan Umum	Ir. Abdul Mursyid, MT
15) Dinas Pertanian	Ir. Wahyu Presetyo
16) Dinas Perhubungan	Bambang Giyanto, S.Sos, MM
17) Dinas Dukcapil	Drs. Widya Sutrisna, M.Si
18) Dinas Budparpora	H. Joko Wiyono. S,Sos, MM
19) Satpol PP	Drs. Slamet Widojo, MM
20) Kantor Arsip Dan Perpustakaan	Drs. Hadi Saputro, MM
21) Kantor Pelayanan Terpadu	Tri Koniantini, SE, MM
22) Kantor Ketahanan Pangan	Ir. Anna Fajria Hidayati, MSI
23) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	Siti Aisyah Agustien, SE, M.Si
24) Kantor Kesbangpol	Drs. Hadi Saputra, MM
25) Kecamatan Klaten Tengah	Widayatna, SE, M.Si
26) RSUD Bagas Waras	Dr. H. Limawan Budiwbowo, M.Kes.
27) Kecamatan Klaten Selatan	Joko Hendrawan,SH, MM
28) Kecamatan Klaten Utara	Endang Widowati, S.Sos., MH
29) Kecamatan Wedi	Kukuh Riyadi, SH,MH
30) Kecamatan Kebonarum	Joko Purwanto, SH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

31) Kecamatan Ngawen	Anang Widiatmoko, SH, MM
32) Kecamatan Kalikotes	Agus Sukoco, SH, MM
33) Kecamatan Jogonalan	Drs. Agus Salim
34) Kecamatan Gantiwarno	Hari Purnomo, S.IP, M.Si
35) Kecamatan Prambanan	Drs. Suhardi
36) Kecamatan Manisrenggo	Purnomo Hadi, SH, M.Si
37) Kecamatan Kemalang	Ir. Pri Harsanto, MSI
38) Kecamatan Karangnongko	Drs. Jaka Supriyanto
39) Kecamatan Jatinom	Sip Anwar, SE, MSI
40) Kecamatan Tulung	M. Rohmad Sugiyarto SIP
41) Kecamatan Karangnom	Drs. Slamet Samodra Karyadi, MM
42) Kecamatan Polanharjo	Drs. Milias Dwi Ariana, M.Si
43) Kecamatan Delanggu	Sri Wahyuni, SH, MH
44) Kecamatan Wonosari	Pandiyanto, SE, MM
45) Kecamatan Ceper	Supriyono SE MM
46) Kecamatan Juwiring	Drs Triyanto, MM
47) Kecamatan Pedan	Dra. Sri Wahyuni Rahayu, M.Si
48) Kecamatan Karangdowo	Agus Suprpto, S.Sos, M.Si
49) Kecamatan Trucuk	Bambang Haryoko, S.Sos, MM
50) Kecamatan Bayat	Edi Purnomo, SE
51) Kecamatan Cawas	Drs. Muhammad Nazir, MM
52) Kelurahan Gayamprit	Tentrem, S.Sos
53) Kelurahan Klaten	Aris Fitrianto, SIP, M.Si.
54) Kelurahan Kabupaten	Hartini, SIP
55) Kelurahan Bareng	Harjono, S.Sos, MM
56) Kelurahan Tonggalan	Yatimin
57) Kelurahan Buntalan	Bambang Sumadi
58) Kelurahan Mojayan	Sarwadi, S.Sos
59) Kelurahan Gergunung	Seniwati, SE
60) Kelurahan Barenglor	Sholikhatun Marsiti, SIP, MM
61) Kelurahan Jatinom	Murtaqi, SE

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, Tahun 2016

c. Pegawai Daerah

Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2016,
sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 2.8.3
Pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016

Keterangan	Jumlah (Orang)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1) Pegawai Negeri Sipil						
a) Golongan I	536	427	321	221	238	208
b) Golongan II	2.532	2.385	2.273	2.066	2.090	1680
c) Golongan III	6.069	5.653	5.271	5.280	5.136	5371
d) Golongan IV	6.859	6.583	6.178	5.891	6.264	5721
2) Pejabat Struktural						
a) Eselon I	-	-	-	-	-	-
b) Eselon II	18	24	23	21	21	21
c) Eselon III	125	140	140	146	147	144
d) Eselon IV	532	582	535	580	583	574
e) Eselon V	66	69	75	73	71	65
Jumlah	15.996	15.048	14.043	13.458	13.728	12.980



BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. EKONOMI MAKRO

Perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten tahun 2016 sangat dipengaruhi kondisi dan perkembangan perekonomian nasional. Hubungan perekonomian ini terkait dengan aliran dana dari Pemerintah Pusat ke daerah sebagai bentuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Aliran dana ini menjadi bagian investasi pembangunan di daerah, selain investasi yang bersumber dari dunia usaha.

Kondisi umum perekonomian Kabupaten Klaten tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten, secara makro dapat dilihat dari indikator yang berpengaruh yaitu Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Investasi, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Estimasi pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten atas dasar harga berlaku tahun 2015 sebesar 12.97% dan harga konstan 2000 sebesar 5,82%.

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa di wilayah tersebut. Struktur yang terbentuk berasal dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor dalam suatu wilayah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran masih merupakan sektor yang menjadi andalan terbesar di Kabupaten Klaten dengan kontribusi sebesar 30.11 persen, ini lebih rendah dibanding tahun 2015 yang sebesar 30.11 persen tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain.

Jika dilihat dari estimasi pertumbuhan PDRB tersebut menunjukkan bahwa terdapat rentang yang besar antara pertumbuhan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh inflasi. Pertumbuhan PDRB tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB terbanyak pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 30.11%

B. KEBIJAKAN KEUANGAN

1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk:

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang Sah) melalui perbaikan sistem dan prosedur;
- Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah agar seluruh potensinya dapat masuk ke Kas Daerah;
- Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
- Peningkatan kembali terhadap Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan asli daerah untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.



2. Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah Tahun 2016 diproyeksikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan Proporsi Belanja Modal dan Investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat, serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui sinkronisasi program dan kegiatan antar urusan dan bidang yang menjadi kewenangan daerah, serta melakukan pengawasan secara intensif serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat;
- c. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap SKPD dan pengendalian kegiatan setiap Pimpinan SKPD;
- d. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Kebijakan Umum Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2016 diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam keadaan berimbang;
- b. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal pada BUMD dan Bank Jateng.

4. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan umum perubahan pendapatan daerah diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

5. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah Tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah diarahkan antara lain untuk:

- a. Meningkatkan Proporsi Belanja Modal dan Investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat, serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui penyusunan Standar Analisis Belanja, Standar Harga dan Tolok Ukur Kinerja serta intensifikasi pengawasan, baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap SKPD dan pengendalian kegiatan setiap Pimpinan SKPD;
 - d. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah**
- Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan di bidang pembiayaan meliputi:
- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam keadaan seimbang;
 - b. Mengembangkan penyertaan modal dan memenuhi kewajiban pada pihak ketiga.

7. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2016 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2016 Sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp 2.282.330.771.499,33 atau 103,87% dari anggaran sebesar Rp 2.174.550.555.820,00 SKPD yang mengelola pendapatan sebanyak 10 SKPD dari 62 SKPD yang ada di Kabupaten Klaten. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 10 SKPD tersebut.

Tabel 3.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per SKPD

SKPD	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
Sekretariat Daerah	16.915.118.500,00	16.962.389.172,00	47.270.672,00	100,28	18.431.262.470,00
Dinas Kesehatan	55.381.402.000,00	55.161.796.875,00	(219.605.125,00)	99,60	50.806.669.609,00
DPU	2.934.902.500,00	4.131.468.367,00	1.196.565.867,00	140,77	4.263.300.619,00
Disbudparpora	1.000.550.000,00	1.071.879.500,00	71.329.500,00	107,13	977.685.500,00
DPPKAD	2.064.885.262.820,00	2.152.705.142.160,00	87.819.879.340,00	104,25	2.096.573.860.622,45
Dinas Pertanian	292.469.000,00	202.493.000,00	(89.976.000,00)	69,24	200.917.000,00
Disperindagkop	4.306.750.000,00	3.839.844.430,00	(466.905.570,00)	89,16	3.526.143.425,00
RSUD	25.000.000.000,00	20.449.072.890,19	(4.550.927.109,81)	81,80	735.557.434,00
Dinas Perhubungan	2.421.375.000,00	2.300.478.148,00	(120.896.852,00)	95,01	2.290.919.178,00
Dinsosnakertrans	200.000.000,00	103.053.000,00	(96.947.000,00)	51,53	-
BPBD	12.726.000,00	6.300.000,00	(6.426.000,00)	49,50	0
BLH	1.200.000.000,00	1.733.944.750,00	533.944.750,00	144,50	0



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh 62 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD DPPKAD selain sebagai SKPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga terdapat 62 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten. Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp2.060.405.778.757,00 dan terealisasi sebesar Rp1.784.595.702.994,03 atau 86,61%.

Rincian belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)¹
1	DINAS PENDUKUKAN	647.266.948.924,00	444.192.405.580,45	(203.094.543.343,55)	68,62	462.788.694.116,00
2	TK Negeri	259.436.000,00	24.453.223,00	(11.982.777,00)	95,38	228.808.971,00
3	SD Negeri	301.817.549.000,00	283.767.283.957,00	(18.050.265.043,00)	94,02	278.919.141.952,00
4	SMP Negeri se Kabupaten	162.796.394.000,00	163.697.522.853,00	(3.088.871.147,00)	94,41	143.405.158.778,00
5	SMA Negeri se Kabupaten	53.914.617.000,00	50.749.985.707,00	(3.164.631.293,00)	94,13	48.157.119.468,00
6	SMK Negeri se Kabupaten	39.732.120.000,00	37.243.894.096,00	(2.488.235.904,00)	93,74	30.790.738.925,00
7	SKB	1.737.132.000,00	1.659.319.831,00	(77.812.169,00)	95,52	1.477.542.782,00
8	Dinas Pendidikan Kecamatan	7.089.750.000,00	7.037.497.800,00	(52.252.200,00)	99,26	7.150.046.100,00
9	Dinas Kesehatan	113.378.052.500,00	108.547.595.565,00	(4.830.456.935,00)	95,74	97.060.141.214,00
10	Rustekmas	54.400.393.480,00	38.000.730.115,00	(16.399.663.345,00)	69,85	27.444.432.540,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah	44.371.000.000,00	34.494.952.176,00	(9.876.147.824,00)	77,74	
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Esdn	286.176.703.000,00	250.218.506.074,00	(34.958.196.926,00)	87,74	280.059.014.052,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.662.886.000,00	9.860.132.307,00	(802.733.693,00)	92,47	10.375.444.146,00
14	Dinas Perhubungan	12.020.315.000,00	11.554.034.466,00	(466.280.504,00)	96,12	9.411.483.584,00
15	Badan Lingkungan Hidup	12.084.816.500,00	10.380.030.427,00	(1.704.786.073,00)	85,89	4.644.659.549,00
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.253.399.000,00	5.300.474.399,00	(952.914.611,00)	84,76	5.526.610.753,00
17	Kantor Pemberdayaan Pemupuan Dan Kelangka Berencana	10.740.584.000,00	9.950.704.143,00	(789.879.857,00)	92,65	8.744.870.050,00
18	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transigrasi	8.796.541.000,00	7.756.333.507,00	(1.040.207.493,00)	88,17	8.411.956.972,00
19	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Urtm	29.669.650.000,00	26.894.845.261,00	(2.774.004.739,00)	90,65	19.822.930.248,00
20	Dinas Kebudayaan Pariwisata Penda Dan Olahraga	9.077.083.000,00	8.825.951.299,00	(251.131.701,00)	97,23	6.960.376.600,00
21	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.632.427.000,00	2.437.611.808,00	(194.815.192,00)	92,60	1.948.733.629,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	7.240.167.000,00	6.935.140.356,00	(305.046.642,00)	95,79	5.859.100.648,00
23	DPD	10.685.817.000,00	9.685.461.374,00	(1.000.355.626,00)	90,64	9.021.880.032,00
24	Bupati Dan Wakil Bupati	834.720.000,00	755.784.504,00	(78.935.096,00)	90,64	755.555.865,00
25	Sekretariat Daerah	45.045.508.500,00	38.335.663.146,00	(6.709.845.354,00)	85,10	40.160.960.204,00
26	Sekretariat DPRD	20.927.501.000,00	14.391.341.848,00	(6.536.159.152,00)	68,77	15.204.816.828,00
27	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	111.046.092.024,00	83.641.678.847,00	(27.404.513.177,00)	75,32	240.721.581.539,00
28	Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu	2.423.703.000,00	2.214.422.523,00	(215.280.377,00)	91,14	2.040.577.822,00
29	Inspektorat Kabupaten Katen	7.815.826.000,00	6.912.177.587,00	(903.648.413,00)	88,44	4.447.862.237,00
30	Badan Kepegawatan Daerah	9.205.720.000,00	8.060.603.293,00	(1.155.116.707,00)	87,45	5.459.394.587,00
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.624.737.000,00	7.440.316.514,00	(1.084.420.086,00)	87,28	7.477.417.170,00
32	Kecamatan Klaten Utara	2.265.540.000,00	2.160.283.812,00	(108.256.188,00)	95,23	1.744.223.516,00
33	Kecamatan Klaten Tengah	1.680.547.000,00	1.597.190.381,00	(83.356.619,00)	95,04	1.340.949.539,00
34	Kecamatan Klaten Selatan	1.730.629.000,00	1.627.443.307,00	(103.185.093,00)	94,04	1.405.012.594,00
35	Kecamatan Kalikotes	1.862.533.000,00	1.678.564.567,00	(183.968.433,00)	90,12	1.474.909.424,00
36	Kecamatan Ngawen	2.301.566.000,00	2.172.949.515,00	(128.616.486,00)	94,41	2.009.288.560,00
37	Kecamatan Kebonarum	1.813.546.000,00	1.700.037.155,00	(113.508.846,00)	93,74	1.567.449.582,00
38	Kecamatan Wedi	2.382.547.000,00	2.250.209.734,00	(122.337.266,00)	94,87	1.950.720.879,00
39	Kecamatan Jogoralan	2.403.410.000,00	2.229.616.071,00	(173.793.929,00)	92,77	1.806.806.284,00
40	Kecamatan Gantiwarno	2.320.256.000,00	2.149.355.177,00	(170.902.823,00)	92,63	1.872.621.295,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

41	Kecamatan Prambanan	2.300.330.000,00	2.185.995.322,00	(114.333.678,00)	95,03	1.783.069.634,00
42	Kecamatan Manisrenggo	2.214.360.000,00	2.065.956.234,00	(148.383.766,00)	93,30	1.635.814.655,00
43	Kecamatan Kemalang	2.315.283.000,00	2.167.507.116,00	(127.775.884,00)	94,48	1.740.993.732,00
44	Kecamatan Karangponoko	2.078.895.000,00	1.947.529.182,00	(131.365.816,00)	93,68	1.669.469.932,00
45	Kecamatan Jatimom	2.498.177.000,00	2.325.559.910,00	(172.617.090,00)	93,09	1.892.766.667,00
46	Kecamatan Karanganyom	1.940.231.000,00	1.795.404.821,00	(143.826.179,00)	92,59	1.616.066.041,00
47	Kecamatan Tulung	2.393.784.000,00	2.168.615.773,00	(225.168.227,00)	90,59	2.033.670.409,00
48	Kecamatan Polanharjo	2.434.928.000,00	2.310.955.435,00	(123.972.564,00)	94,91	1.865.021.802,00
49	Kecamatan Delanggu	2.356.812.000,00	2.194.043.866,00	(164.768.132,00)	93,01	1.866.631.754,00
50	Kecamatan Juwiring	2.414.141.000,00	2.269.038.690,00	(145.102.310,00)	93,99	1.957.000.361,00
51	Kecamatan Monosari	2.828.880.000,00	2.699.981.562,00	(128.898.438,00)	95,44	2.116.693.913,00
52	Kecamatan Cepur	2.280.391.000,00	2.175.884.881,00	(104.506.119,00)	95,42	1.917.084.743,00
53	Kecamatan Pedan	2.261.446.000,00	2.154.434.802,00	(107.011.198,00)	95,27	1.767.744.313,00
54	Kecamatan Karangdowo	2.300.548.000,00	2.185.770.589,00	(114.777.411,00)	95,01	1.861.402.079,00
55	Kecamatan Cawas	2.431.568.000,00	2.303.162.478,00	(128.405.522,00)	94,72	1.839.280.356,00
56	Kecamatan Trucuk	2.409.388.000,00	2.196.832.484,00	(212.555.516,00)	91,16	1.900.975.908,00
57	Kecamatan Bayat	2.231.872.000,00	2.082.478.402,00	(149.393.598,00)	93,31	1.944.334.510,00
58	Kelurahan Kabupaten	777.891.000,00	653.898.465,00	(123.992.534,00)	84,08	652.993.554,00
59	Kelurahan Klaten	968.290.000,00	912.392.125,00	(55.897.875,00)	94,23	1.024.461.388,00
60	Kelurahan Tonggalan	819.370.500,00	779.610.402,00	(39.760.098,00)	95,15	687.397.111,00
61	Kelurahan Mojayan	603.846.000,00	535.715.131,00	(68.130.869,00)	88,72	518.066.373,00
62	Kelurahan Buntalan	900.630.500,00	821.391.935,00	(79.238.565,00)	91,20	641.753.907,00
63	Kelurahan Bareng	868.157.000,00	818.995.528,00	(49.161.472,00)	94,34	680.955.895,00
64	Kelurahan Barendlor	790.322.000,00	710.950.489,00	(79.371.511,00)	89,96	638.415.705,00
65	Kelurahan Gergunung	1.007.263.000,00	931.504.299,00	(75.758.701,00)	92,48	813.083.718,00
66	Kelurahan Gayampit	987.431.000,00	937.919.564,00	(49.511.436,00)	94,99	616.106.529,00
67	Kelurahan Jatimom	783.310.000,00	713.905.914,00	(69.404.086,00)	91,14	625.470.411,00
68	Kantor Ketahanan Pangan	3.232.954.000,00	2.595.090.096,00	(637.863.904,00)	80,27	3.267.311.683,00
69	Badan Pemberdayaan Masyarakat	7.986.960.000,00	6.499.107.035,00	(1.487.852.965,00)	81,37	4.184.629.363,00
70	Kantor Arsip Dan Perpustakaan	2.814.050.000,00	2.592.229.090,00	(221.820.910,00)	92,12	2.677.868.092,00
71	Dinas Pertanian	55.405.888.000,00	52.005.059.369,00	(4.400.828.631,00)	92,20	36.344.901.968,00

C. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan APBD TA 2016 mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang direncanakan, dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan. Penyusunan anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran yang direncanakan dan prakiraan satu tahun ke depan bagi program yang bersangkutan.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Klaten yang terdiri dari 62 SKPD selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dlanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Klaten menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2014 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

c. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

1) KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

A. UMUM

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LRA sesuai dengan Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima sater/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan



- terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

A. UMUM

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LO sesuai dengan Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1.1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 - 1.2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
 - Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
 - Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
 - Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
- Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

2. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang memberikan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.



C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

3) KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. UMUM

Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

Definisi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

2. **Belanja** merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. **Belanja** terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4. **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
5. **Belanja pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7. **Belanja Bunga** merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. **Belanja Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. **Belanja Hibah** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. **Belanja Bantuan Sosial** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
12. **Belanja Tak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

13. **Belanja Transfer** adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

14. **Belanja daerah** diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

1. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.



4) KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/laporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. **Beban** merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
3. **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. **Beban Operasi** terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
5. **Beban pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. **Beban Barang dan Jasa** merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7. **Beban Bunga** merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. **Beban Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.



9. **Beban Hibah** merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. **Beban Penyusutan dan amortisasi** adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutian/berlalu waktu.
12. **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait keteragihan piutang.
13. **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
14. **Beban Transfer** merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16. **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Klasifikasi

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban sebagaimana tercantum dalam Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui padasaat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui padasaat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutian/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
9. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.



- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

C. PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa
- 2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- 3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



5) KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/laporan pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Transfer diklasifikasi menurut sumber dan entitas penerima, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
7. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar

B. PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

C. PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

D. PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak



dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

E. PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu

6) KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
 - Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
 - Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
 - Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

C. KLASIFIKASI PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggung-jawaban, terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
2. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
3. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



D. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

E. PENGUKURAN

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

F. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

7) PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniaikan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejalinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.



8) TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

9) PEMBIAYAAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

10) KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengukuran, pengungkapan dan pengungkapan aset.

Definisi

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Klasifikasi

1. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
2. Setara kas pada pemerintah daerah ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

3. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BLUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

4. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Tiipian
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Tiipian
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Tiipian BLUD
	Kas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dana hibah masyarakat untuk korban gempa/ musibah lainnya
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

B. PENGAKUAN

1. Secara umum pengakuan aset dilakukan:

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.
2. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/ dibayarkan.



C. PENGUKURAN

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b. kebijakan manajemen setara kas;
- c. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPH yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/ Tapertum yang belum disetorkan dan lain-lain.

11) KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Definisi

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
3. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.



4. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
5. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Klasifikasi

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.



2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

D. PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

E. PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PANJANG:

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
- a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
- b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyelamatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyesuaian perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 3) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
- a) Metode biaya



Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

4) Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- 5) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;



- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

12) KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
4. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

B. PENGAKUAN

1. Piutang diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur;



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
11. Piutang Perikatan timbul karena adanya perikatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang tertutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang tertutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengukuran yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal
Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
6. Pemberhentian pengukuran piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
9. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak selain PBB-P2 dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
11. Penggolongan Kualitas Piutang retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 12 (dua) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.
13. Penggolongan Kualitas Piutang Perikatan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;



- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
- d. kualitas macet apabila:
 - 1) dalam dalam jangka waktu lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

D. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

- 1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 30% dari Piutang dengan kualitas lancar ;
 - b. 50% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 80% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, serta Piutang Perikatan ditetapkan sebesar:
 - a. 5%_{oo} (lima permil) dari Piutang dengan kualitas lancar ;
 - b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 3. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

E. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

- 1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).
- 3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
- 4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
8. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD
9. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menunjukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeding dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.



- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *ekstrakomplabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitor menunjukkan gejala mulai mencili teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircu* mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomplabel*.

F. PENGUNGKAPAN

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengukuran dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitor, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
3. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/retribusi atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

13) KEBIYAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan



barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

2. Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam Bagan Akun Standar

B. PENGAKUAN

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

C. PENGUKURAN

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
2. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.



14) KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
 2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
 3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources).
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non-regenerative natural resources).
- Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercatat dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

B. DEFINISI

1. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. **Masa manfaat** adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
4. **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. **Nilai tercatat** adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang



bersangkutan.

8. **Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
10. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. **Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
13. **Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
14. **Retensi** adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
15. **Termin** (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja,
16. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
17. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
18. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
19. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
20. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
21. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
22. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses



pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

23. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. PENGAKUAN ASET TETAP

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang harus diuruskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi,



- renovasi, perbaikan atau restorasi.
2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - a) Peralatan dan Mesin adalah Rp. 500.000,- ;
 - b) Gedung dan Bangunan adalah Rp. 20.000.000,- ;
 - c) Batas minimal kapitalisasi aset tetap dicecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

D. PENGUKURAN ASET TETAP

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 35 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

- d. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - e. biaya pemasangan (instalation cost);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
 4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
 6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
 7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 8. Biaya administrasi dan umum lainnya **bukan** merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut **tidak dapat** diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut **dapat diatribusikan** pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
 9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.
 10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
 11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan



dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.



2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungankan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar **memperindah atau mempercantik suatu aset tetap**.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan Rp 20.000.000,00 ke atas.
 - b) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp 500.000,00 ke atas.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
3. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	10
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	5
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	5
Alat Bengkel Tak Bermesin	3
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	3
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	5
Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	3
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Monomen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	10
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	50
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
6. Penyusutan **tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :**
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.



2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpanan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpanan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

- A. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a) penambahan;
 - b) pelepasan;
 - c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) mutasi aset tetap lainnya.
 3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 5. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
 6. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,



jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaian dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah ditingkatkan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antaralain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan hubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyalia
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.



7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan Retensi

15) KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.



- b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Definisi

1. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur
3. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur
4. **Kewajiban jangka panjang** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
5. **Kewajiban jangka pendek** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
6. **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
7. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
8. **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
9. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah

Klasifikasi

Klasifikasi atas kewajiban sesuai dengan Bagan Akun Standar

B. PENGAKUAN

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat tandatangannya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

5. Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
 6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
 7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 8. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
 9. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
 10. Utang Beban, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
 11. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
 12. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar..
 13. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
 14. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN**
1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
 2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut



4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bungayangberlaku;
 - d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (1) Pengurangan pinjaman;
 - (2) Modifikasi persyaratan utang;
 - (3) Pengurangan tingkat bungapinjaman;
 - (4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - 3) Biaya pinjaman:
 - (1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

- bersangkutan; dan
(3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perhitungan realisasi APBD untuk mengetahui Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) selama satu periode pelaporan atau satu tahun anggaran. Perhitungan dimulai dari penentuan surplus (defisit) anggaran, yaitu jumlah realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja daerah. Selanjutnya dilakukan perhitungan pembiayaan netto, yaitu jumlah realisasi penerimaan pembiayaan dikurangi jumlah pengeluaran pembiayaan. SILPA/SIKPA dihitung dengan cara menambahkan surplus (defisit) dengan pembiayaan netto. Jika diperoleh nilai positif, maka merupakan SILPA dan sebaliknya merupakan SIKPA.

Perhitungan SILPA/SIKPA atas realisasi APBD Kabupaten Klaten TA 2016 dibanding anggarannya dan realisasi TA 2015 adalah sebagai berikut:

Perhitungan APBD:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Daerah	2.174.550.555.820,00	2.258.604.630.605,19	103,87	2.177.820.724.857,45
2. Belanja Daerah dan Transfer	2.567.449.419.713,00	2.282.330.771.499,03	88,89	2.077.785.996.047,45
3. Surplus (Defisit) Anggaran	(392.898.863.893,00)	(23.726.140.893,84)	6,02	100.034.728.810,00
4. Penerimaan Pembiayaan	406.198.863.893,00	406.262.095.580,00	100,00	311.125.135.083,00
5. Pengeluaran Pembiayaan	13.300.000.000,00	8.304.000.000,00	62,44	4.961.000.000,00
6. Pembiayaan Bersih (Neto)	392.898.863.893,00	397.958.095.580,00	101,27	306.164.135.083,00
SILPA	0,00	374.231.954.686,16	-	406.198.863.893,00

Realisasi APBD TA 2016 menunjukkan SILPA sebesar Rp374.231.954.686,16 dari anggaran nihil, dan turun sebesar Rp31.966.909.206,84 (7,87%) dibandingkan realisasi SILPA TA 2015 sebesar Rp406.198.863.893,00 yang dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pendapatan - LRA

Pendapatan Kabupaten Klaten yang menjadi sumber penerimaan APBD dibedakan menurut jenisnya, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba PD/BUMD atau kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis objek, subjek dan besaran tarif pajak/retribusi daerah selanjutnya ditetapkan dalam Perda.

[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, serta Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Penerimaan dari Pemerintah Pusat dialokasikan dalam APBN yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan RI d.h.i. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan ditransfer ke Rekening Umum Kas Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan daerah baik berasal dari Pemerintah Pusat berupa dana otonomi khusus dan bantuan lainnya, maupun dari Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil pajak dan bantuan keuangan lainnya.

Realisasi pendapatan daerah TA 2016 dibandingkan dengan anggarannya dan realisasi TA 2015 menurut jenisnya, adalah sebagai berikut:

Pendapatan:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	203.699.708.000,00	224.197.408.481,19	110,09	190.622.670.128,45
b. Pendapatan Transfer	1.721.984.422.820,00	1.790.540.797.124,00	103,98	1.876.743.453.129,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	248.866.425.000,00	243.866.425.000,00	97,99	110.454.601.600,00
Jumlah	2.174.550.555.820,00	2.258.604.630.605,19	103,87	2.177.820.724.857,45

Realisasi pendapatan daerah TA 2016 sebesar Rp2.258.604.630.605,19 atau 103,87% dari anggaran sebesar Rp2.174.550.555.820,00 dan naik sebesar Rp80.783.905.747,74 (3,71%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp2.177.820.724.857,45.

Realisasi pendapatan daerah TA 2016 dibandingkan dengan anggarannya dan realisasi TA 2015 menurut objeknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Realisasi PAD Kabupaten Klaten menurut objeknya untuk periode TA 2016 dibandingkan dengan target anggarannya dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD):	TA 2016			TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1) Pajak Daerah	69.315.000.000,00	75.574.747.729,00	109,03	68.201.277.234,00	
2) Retribusi Daerah	21.690.212.000,00	22.559.038.217,00	104,01	21.894.721.448,00	
3) Bagian Laba Perusa	9.025.118.500,00	9.025.861.668,00	100,01	7.477.951.040,00	
4) Lain-lain PAD yang Sah	103.669.377.500,00	117.037.760.867,19	112,96	93.048.720.406,45	
Jumlah	203.699.708.000,00	224.197.408.481,19	110,09	190.622.670.128,45	



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Realisasi PAD TA 2016 sebesar Rp224.197.408.481,19 atau 110,09% dari anggaran sebesar Rp203.699.708.000,00 dan meningkat sebesar Rp3.574.738.352,74 (17,37%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp190.622.670.128,45.

Realisasi masing-masing objek PAD TA 2016 dibandingkan dengan anggaran dan realisasi 2015 menurut rincian objeknya dapat disajikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda yang berlaku dalam tahun anggaran berkenaan sebagai berikut:

Objek Pajak	Perda		Pengenaan Pajak	
	Nomor	Tahun	Tarif	Dasar Pengenaan
1	2	3	4	5
a) Hotel	16	2012	10%	Pembayaran dari Pengunjung
b) Restoran	16	2012	10%	Pembayaran dari Pengunjung
c) Hiburan	16	2012	5-20%	Kegiatan (event)
d) Reklame	16	2012	25%	Nilai Sewa (NIOPR dan NSPR)
e) Penerangan Jalan	16	2012	1,5-9 %	Nilai Jual Tenaga Listrik (PLN)
f) Parkir	16	2012	30%	Pembayaran dari Pengunjung
g) Mineral Bukan Logam & Batuan	16	2012	25%	Nilai Jual (Harga x Volume/Tonase)
h) Sarang Burung Walet	16	2012	10%	Nilai Jual Sarang Burung Walet
i) PBB P2	17	2012	0,100% & 0,20%	NIOP

Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2016 dibandingkan anggarannya dan realisasi TA 2015 menurut rincian objeknya, sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Hotel	845.000.000,00	854.458.795,00	101,12	799.163.643,00
b) Restoran	2.190.000.000,00	3.008.136.618,00	135,50	3.016.358.884,00
c) Hiburan	500.000.000,00	598.945.211,00	119,79	546.132.592,00
d) Reklame	2.800.000.000,00	3.322.015.902,00	118,64	2.727.401.807,00
e) Pajak Penerangan Jalan	30.000.000.000,00	31.511.746.370,00	105,04	29.629.973.048,00
f) Parkir	550.000.000,00	885.120.050,00	160,93	412.392.575,00
g) Pajak Air Tanah	1.130.000.000,00	1.350.714.200,00	119,53	1.322.846.896,00
h) Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Bahan Galian Gol.C	2.850.000.000,00	3.703.442.750,00	129,95	2.209.399.500,00
j) Pajak Bumi & bangunan	19.250.000.000,00	20.828.717.348,00	108,20	17.570.441.603,00
k) Pajak BPHTB	9.200.000.000,00	9.511.450.485,00	103,39	9.967.166.686,00
Jumlah	69.315.000.000,00	75.574.747.729,00	109,03	68.201.277.234,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2016 sebesar Rp75.574.747.729,00 atau 109,03% dari anggarannya sebesar Rp69.315.000.000,00 dan meningkat sebesar Rp7.373.470.495,00 (10,81%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp68.201.277.234,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2016 sebesar Rp854.458.795,00 atau 101,12% dari anggarannya sebesar Rp845.000.000,00 dan naik sebesar Rp55.295.152,00 (6,92%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp799.163.643,00 yang berasal dari wajib pajak Hotel melalui III dan Hotel Bintang III

b) Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2016 sebesar Rp3.008.136.618,00 atau 135,30% dari anggarannya sebesar Rp2.190.000.000,00 meningkat sebesar Rp2.909.914.352,00 (96,47%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp3.016.358.884,00 yang berasal dari wajib pajak sebagai berikut:

	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Restoran	0,00	,00	0,00	1.129.678.187,00
(2) Rumah Makan	1.150.000.000,00	1.214.172.245,00	97,75	0,00
(3) Katering	1.000.000.000,00	1.750.689.373,00	175,07	1.839.653.697,00
(4) Kantin /warung	0,00	0,00		0,00
(5) PKL/Lesehan	40.000.000,00	43.275.000,00	108,19	47.027.000,00
Jumlah	2.190.000.000,00	3.008.136.618,00	135,30	3.016.358.884,00

c) Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2016 sebesar Rp598.945.211,00 atau 119,79% dari anggarannya sebesar Rp500.000.000,00 dan naik sebesar Rp52.812.619,00 (9,67%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp546.132.592,00 yang berasal dari sumber sebagai berikut:

	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Pagelaran Kesenian/Musik	190.000.000,00	130.008.311,00	68,43	162.889.642,00
(2) Permainan Ketangkasan	170.000.000,00	247.735.850,00	145,73	166.673.800,00
(3) Pertandingan Olah Raga	140.000.000,00	221.201.050,00	158,00	216.569.150,00
(4) Persewaan VCD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	500.000.000,00	598.945.211,00	119,60	546.132.592,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

- d) Realisasi penerimaan Pajak Reklame TA 2016 sebesar Rp3.322.015.902,00 atau 118,64% dari anggarannya sebesar Rp2.800.000.000,00 dan turun sebesar Rp594.614.095 (21,80%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp2.727.401.807,00

Pajak Reklame:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Papan/Billboard ^d	1.100.000.000,00	1.203.668.709,00	109,42	1.037.414.697,00
(2) Insidentil	1.700.000.000,00	2.118.347.193,00	124,61	1.689.987.110,00
<i>Jumlah</i>	2.800.000.000,00	3.322.015.902,00	118,64	2.727.401.807,00

- e) Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) TA 2016 sebesar Rp31.511.746.370,00 atau 105,04% dari anggarannya sebesar Rp30.000.000.000,00 dan naik sebesar Rp1.881.773.322,00 (6,35%) dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp29.629.973.048,00.

Pemungutan PPJU dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Klaten sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan Pemkab Klaten No.14 Tahun 2004 dan No.024/PJ-061/APJ-KLT/2004 tentang Pemungutan, Penyetoran dan Pembayaran Rekening Listrik PPI Pemkab Klaten.

Pajak Penerangan Jalan:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	30.000.000.000,00	31.511.746.370,00	105,04	29.629.973.048,00
<i>Jumlah</i>	30.000.000.000,00	31.511.746.370,00	105,04	29.629.973.048,00

- f) Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2016 sebesar Rp885.120.050,00 atau 160,93% dari anggarannya sebesar Rp550.000.000,00 dan naik sebesar Rp472.727.475,00 (114,63%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp412.392.575,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pajak Parkir:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) TWC Prambanan	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) Luar Badan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Parkir	550.000.000,00	885.120.050,00	160,93	412.392.575,00
<i>Jumlah</i>	550.000.000,00	885.120.050,00	160,93	412.392.575,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

- g) Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah (AT) TA 2016 sebesar Rp1.350.714.200,00 atau 119,53% dari anggarannya sebesar Rp1.130.000.000,00. Naik sebesar Rp27.867.304,00 (2,11%) dibandingkan realisasi TA2015 sebesar Rp1.322.846.896,00.

Pajak Air Bawah Tanah:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Pajak Air Bawah Tanah (ABT)	1.130.000.000,00	1.350.714.200,00	119,53	1.322.846.896,00
Jumlah	1.130.000.000,00	1.350.714.200,00	119,53	1.322.846.896,00

- h) Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pendapatan Galian Gol.C.)

Sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 16 Tahun 2011, pajak bahan galian golongan C dikenakan untuk kegiatan pengambilan dan pengolahan. Namun dalam pelaksanaannya pajak ini hanya dikenakan pada kegiatan pengambilan, dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp3.703.442.750,00 atau 129,95% dari anggaran sebesar Rp2.850.000.000,00 naik sebesar Rp1.494.043.250,00 (67,62%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp2.209.399.500,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Batu Kapur	1.500.000,00	1.167.000,00	83,80	1.257.000,00
(2) Pasir (Kaliworo)	2.248.500.000,00	2.866.765.000,00	144,28	1.082.090.000,00
(3) Proyek APBD	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) Mineral Bukan Logam dan Lainnya	600.000.000,00	835.570.750,00	102,37	1.126.052.500,00
Jumlah	2.850.000.000,00	3.703.442.750,00	129,95	2.209.399.500,00

- i) Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2016 sebesar Rp20.828.717.348,00 atau 108,20% dari anggarannya sebesar Rp19.250.000.000,00, Naik sebesar Rp3.258.275.745,00 (18,54%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp17.570.441.603,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Pajak PBB :	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) PBB Perdesaan & Perkotaan	19.250.000,00	20.828.717.348,00	108,20	17.570.441.603,00
<i>Jumlah</i>	19.250.000,00	20.828.717.348,00	108,20	17.570.441.603,00

j) Realisasi Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2016 sebesar Rp9.511.450.485,00 atau 103,39% dari anggarannya sebesar Rp9.200.000,00, turun sebesar Rp 455.716.201,00 atau 4,57% dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp9.967.166.686,00

Pajak BPHTB :	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) BPHTB	9.200.000.000,00	9.511.450.485,00	103,39	9.967.166.686,00
<i>Jumlah</i>	9.200.000.000,00	9.511.450.485,00	103,39	9.967.166.686,00

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2011 maka pada tahun 2012 pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten.

2) *Pendapatan Retribusi Daerah - LRA*

Retribusi Daerah merupakan jenis PAD yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui masing-masing SKPD, meliputi jasa umum, jasa usaha dan jasa perijinan tertentu. Tarif retribusi ditetapkan melalui Perda, antara lain sebagai berikut:

Objek Retribusi	Peraturan Daerah (Perda)		
	Nomor	Tanggal	
1	2	3	
a) Retribusi Jasa Umum			
(1) Pelayanan Kesehatan	18 Tahun 2011	30 Desember 2011	
(2) Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18 Tahun 2011	30 Desember 2011	
(3) Penggantian Penggantian Biaya Cetak, KTP dan Akta Catatan	18 Tahun 2011	30 Desember 2011	
(4) Pelayanan Pemakaman dan Pengubuan Mayat	18 Tahun 2011	30 Desember 2011	
(5) Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	18 Tahun 2011	30 Desember 2011	
(6) Pelayanan Pasar	18 Tahun 2011	30 Desember 2011	
(7) Pengujian Kendaraan Bermotor	18 Tahun 2011	30 Desember 2011	



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Objek Retribusi	Peraturan Daerah (Perda)	
	Nomor	Tanggal
1	2	3
(8) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	18 Tahun 2011	30 Desember 2011
(9) Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	18 Tahun 2011	30 Desember 2011
(10) Pengendalian Menara Telekomunikasi	18 Tahun 2011	30 Desember 2011
b) Retribusi Jasa Usaha		
(1) Pemakaian Kekayaan Daerah	19 Tahun 2011	30 Desember 2011
(2) Pasar Grosir/Pertokoan	19 Tahun 2011	30 Desember 2011
(3) Terminal	19 Tahun 2011	30 Desember 2011
(4) Tempat Khusus Parkir	19 Tahun 2011	30 Desember 2011
(5) Rumah Potong Hewan	19 Tahun 2011	30 Desember 2011
(6) Tempat Rekreasi dan Olah Raga	19 Tahun 2011	30 Desember 2011
(7) Penjualan Produksi Usaha Daerah	19 Tahun 2011	30 Desember 2011
c) Retribusi Perizinan Tertentu		
(1) Ijin Mendirikan Bangunan	20 Tahun 2011	30 Desember 2011
(2) Ijin Gangguan/Keramaian	20 Tahun 2011	30 Desember 2011
(3) Ijin Trayek	20 Tahun 2011	30 Desember 2011
(4) Ijin Usaha Perikanan	20 Tahun 2011	30 Desember 2011

Realisasi penerimaan retribusi TA 2016 dibandingkan dengan anggarannya dan realisasi TA 2015 menurut objeknya, adalah sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Jasa Umum	15.475.445.000,00	14.465.078.551,00	93,47	14.399.285.715,00
b) Jasa Usaha	2.512.767.000,00	3.097.770.224,00	123,28	2.795.437.684,00
c) Perizinan Tertentu	3.702.000.000,00	4.996.189.442,00	134,96	4.699.998.049,00
Jumlah	21.690.212.000,00	22.559.038.217,00	104,01	21.894.721.448,00

Realisasi pendapatan retribusi TA 2016 sebesar Rp22.559.038.217,00 atau 104,01% dari anggaran sebesar Rp21.690.212.000,00, naik sebesar Rp664.316.769,00 (3,03%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp21.894.721.448,00

Realisasi masing-masing objek pendapatan retribusi daerah TA 2016 dan 2015 sesuai dengan rincian objeknya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum

Penerimaan Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Umum:				
(1) Kesehatan	9.152.477.000,00	9.004.577.875,00	98,38	9.257.574.034,00
(2) Sampah/Kebersihan	390.332.000,00	399.448.130,00	102,34	391.833.760,00
(3) KTP & Akta Capil	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) Pemakaman/Penguburan	5.785.000,00	2.840.000,00	49,09	4.650.000,00
(5) Parkir di Tepi Jalan	817.125.000,00	872.782.000,00	106,82	862.425.000,00
(6) Pasar	3.665.750.000,00	3.207.417.176,00	87,50	2.913.013.681,00
(7) Pengujian Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
(8) Pemeriksaan PMK	12.726.000,00	6.300.000,00	49,50	0,00
(9) Penyedotan kakus	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
(11) Penggantian IJUK	0,00	0,00	0,00	0,00
(12) Retribusi PKB Mobil Barang/ Beban - Truck	931.250.000,00	971.713.370,00	104,35	969.789.240,00
Jumlah	15.475.445.000,00	14.465.078.551,00	93,47	14.399.285.715,00

Realisasi retribusi pelayanan umum TA 2016 sebesar Rp14.465.078.551,00 atau 93,47% dari anggarannya sebesar Rp15.475.445.000,00 namun naik sebesar Rp65.729.836,00 (0,45%) dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp14.399.285.715,00.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang terkait dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah, sebagai berikut:

	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Usaha:				
(1) Pemakaian Kayuayan Daerah	635.619.000,00	936.892.100,00	147,40	779.848.200,00
(2) Pasar Grosir/Pertokoan	456.000.000,00	448.718.124,00	98,40	438.272.984,00
(3) Terminal dan Tempat Khusus Parkir	171.000.000,00	449.515.500,00	262,87	409.356.000,00
(4) Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	38.468.000,00	41.600.000,00	108,14	40.100.000,00
(5) Rumah Potong Hewan	84.930.000,00	84.865.000,00	99,92	84.930.000,00
(6) Tempat Rekreasi&OR	1.000.550.000,00	1.071.879.500,00	107,13	977.685.500,00
(7) Penjualan Produk	126.200.000,00	64.300.000,00	50,95	65.245.000,00
Jumlah	2.512.767.000,00	3.097.770.224,00	123,28	2.795.437.684,00

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha TA 2016 sebesar Rp3.097.770.224,00 atau 123,28% dari anggarannya sebesar Rp2.512.767.000,00 meningkat sebesar Rp302.000.000,00 (10,80%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp2.795.437.684,00. Pencapaian target anggaran paling rendah terjadi pada retribusi penjualan produksi usaha daerah, yaitu 50,59% dari anggarannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

c) Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi perijinan tertentu merupakan PAD yang terkait dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan ijin atas kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Perijinan Tertentu:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Ijin Mendirikan Bangunan	2.300.000.000,00	3.156.636.692,00	137,25	3.415.565.549,00
(2) Ijin Gangguan/Keramaian	1.200.000.000,00	1.733.944.750,00	144,50	1.279.782.500,00
(3) Ijin Trayek	2.000.000,00	2.555.000,00	127,75	4.650.000,00
(4) Pemerian Perpanjangan IMTA	200.000.000,00	103.053.000,00	51,53	
<i>Jumlah</i>	3.702.000.000,00	4.996.189.442,00	134,96	4.699.998.049,00

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Perijinan Tertentu TA 2016 sebesar Rp4.996.189.442,00 atau 134,96% dari anggaran sebesar Rp3.702.000.000,00, dan naik sebesar Rp296.191.393,00 (6,30%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp4.699.998.049,00.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Bagian Laba Perusahaan Daerah merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada PD/BUMD meliputi PD Air Minum (PDAM) dan PD Aneka Usaha, Lembaga Keuangan Bank (PT Bank Jateng/BPD dan PD BPR Bank Klaten), Lembaga Keuangan Non Bank (PD BKK), dan pihak ketiga. Hak Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berkenaan ditetapkan berdasarkan laba bersih tahun buku sebelumnya setelah taksiran pajak penghasilan badan, sesuai Perda yang mengatur tentang masing-masing PD dan/atau perjanjian kerjasama. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Bagian Perencanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

Realisasi penerimaan bagian laba Perusahaan TA 2016 dibandingkan anggarannya dan realisasi TA 2015 adalah sebagai berikut:

Bagian Laba Perusahaan:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) PD Air Minum (PDAM)	2.443.636.000,00	2.443.636.000,00	100,00	2.415.026.000,00
b) PD Aneka Usaha	,00	0,00	0,00	0,00
c) PD BPR Bank Klaten	1.487.394.500,00	1.487.394.500,00	100,00	709.646.000,00
d) PD BPR-BKK/BKK	159.088.000,00	159.088.672,00	100,00	118.754.284,00
e) PT Bank Jateng (BPD)	4.935.000.000,00	4.935.742.496,00	100,02	4.234.524.756,00
<i>Jumlah</i>	9.025.118.500,00	9.025.861.668,00	100,01	7.477.951.040,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Realisasi penerimaan bagian laba Perusda TA 2016 sebesar Rp9.025.861.668,00 atau 100,01% dari anggarannya sebesar Rp9.025.118.500,00, naik sebesar Rp1.547.910.628,00 (20,69%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp7.477.951.040,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten, Pasal 20 ayat (2) ditetapkan penggunaan laba PDAM untuk dana pembangunan daerah sebesar 30% dan untuk anggaran belanja daerah sebesar 25%. Dengan demikian bagian laba PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah adalah sebesar 55% (30% + 25%) dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan.
- b) Sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Pasal 41 ayat (1) huruf a ditetapkan penggunaan laba PD Aneka usaha untuk bagian laba Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar 45% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan. Pada tahun 2015 PD Aneka Usaha tidak ada setoran ke Kas Daerah.
- c) Tahun 2010 PD BPR Bank Pasar mengalami perubahan nama dari Bank Pasar menjadi PD BPR Bank Klaten sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang PD BPR Bank Klaten yang ditetapkan tanggal 22 Oktober 2010 sesuai ketentuan perda yang baru pasal 54 ayat 1 huruf a bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten Klaten ditetapkan sebesar 50% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan. PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten berubah nama menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten sesuai dengan Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Solo Nomor: 13/2/KEP.PBI/Slo/2011 Tanggal 9 Februari 2011 tentang Perubahan Nama PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten. Pada tahun 2016 Bank Klaten setor ke Kas Daerah sebesar Rp1.487.394.500,00
- d) Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada BPR BKK dan PD BKK TA 2016 sebesar Rp159.088.672,00. Realisasi Bagian Laba dari masing-masing Perusda/BU/MD adalah realisasi dari Laba Perusda/BU/MD pada tahun sebelumnya.
- e) Bagian laba dari PT Bank Jateng yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Klaten ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Pemerintah Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah. Realisasi deviden PT Bank Jateng Tahun 2016 yang dilaksanakan dalam TA 2016 sebesar Rp4.935.742.496,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

4) Lain-lain PAD yang Sah-LRA

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Perda, dengan realisasi TA 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Lain-lain PAD yang Sah:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	64.250.000,00	642,50	10.000.000,00
b) Hasil Penjualan Aset Lainnya	180.000.000,00	109.937.600,00	60,55	294.713.220,00
c) Jasa Giro	8.000.000.000,00	18.132.107.135,00	226,65	16.888.469.102,00
d) Bunga Deposito	11.100.000.000,00	13.003.287.637,00	117,15	13.626.198.564,00
e) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Denda Keterlambatan	0,00	82.492.797,00	0,00	363.277.259,00
g) Pendapatan Denda Pajak	0,00	413.630.832,00	0,00	382.315.617,00
h) Pendapatan Denda Retribusi	0,00	3.912.278,00	0,00	44.698.938,00
i) Pengembalian Belanja	0,00	54.607.532,00	0,00	346.732.737,45
j) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	86.452.500,00	251.937.975,00	291,42	98.460.650,00
k) Pendapatan BLUD	25.000.000.000,00	20.449.072.890,19	81,80	
l) Penerimaan Lain-lain	13.079.000.000,00	17.483.789.862,00	134,57	17.974.625.473,00
m) Dana JKN	46.213.925.000,00	46.988.734.329,00	101,68	43.019.228.856,00
Jumlah	103.669.377.500,00	117.037.760.867,19	112,96	93.048.720.406,45

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2016 sebesar Rp117.037.760.867,19 atau 112,96% dari anggarannya sebesar Rp103.669.377.500,00 dan naik sebesar Rp23.989.040.460,74 (25,78%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp93.048.720.406,45 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil Penjualan Barang Daerah:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Kendaraan Roda 4	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) Drum Bekas	30.000.000,00	33.950.000,00	110,00	18.450.000,00
(3) Penebangan Pohon	10.000.000,00	64.250.000,00	642,50	10.000.000,00
(4) Bekas Bangunan	150.000.000,00	75.987.600,00	50,60	218.963.220,00
Jumlah	190.000.000,00	174.187.600,00	91,57	247.413.220,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

- (1) Penjualan kendaraan dinas roda empat pada TA 2016 Nihil.
- (2) Penjualan drum bekas dikelola DPU, dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp33.950.000,00 atau 61,50% dari anggarannya sebesar Rp30.000.000,00 dan Naik sebesar Rp15.500.000,00 (84,01%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp18.450.000,00;
- (3) Penjualan hasil penebangan pohon dikelola DPU, dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp64.250.000,00 atau 642,50% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00 ada Naik Rp54.250.000,00 (542,5%) dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp10.000.000,00;
- (4) Penjualan bahan bekas bangunan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp75.987.600,00 atau 50,60% dari anggarannya sebesar Rp150.000.000,00 dan Naik sebesar Rp142.975.620,00 (64,67%) dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp218.963.220,00.

- a) Realisasi Penerimaan Jasa Giro Bank TA 2016 sebesar Rp18.132.107.135,00 atau 196,46% dari anggarannya sebesar Rp8.000.000.000,00 dan naik sebesar Rp5.768.396.683,00 (46,65%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp12.363.710.452,00
- Penerimaan Jasa Giro atas rekening Kas Daerah dan rekening Pemegang Kas TA 2016 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

Periode Bulan Penerimaan Jasa Giro	Kasda (Rp)	Pemegang Kas (Rp)	Jumlah (Rp)
1) Januari	798.814.260,00	5.692.171,00	804.506.431,00
2) Februari	965.143.230,00	8.493.960,00	973.637.190,00
3) Maret	1.226.227.320,00	6.087.522,00	1.232.314.842,00
4) April	1.727.426.310,00	5.298.840,00	1.732.725.150,00
5) Mei	2.267.878.532,00	3.948.067,00	2.271.826.599,00
6) Juni	2.043.008.400,00	4.548.120,00	2.047.556.520,00
7) Juli	1.564.930.860,00	4.888.110,00	1.569.818.970,00
8) Agustus	1.790.293.376,00	7.025.404,00	1.797.318.780,00
9) September	1.575.545.430,00	5.262.030,00	1.580.807.460,00
10) Oktober	1.684.712.980,00	5.333.366,00	1.690.046.346,00
11) Nopember	1.445.722.830,00	5.939.670,00	1.451.662.500,00
12) Desember	970.054.039,00	9.832.208,00	979.886.247,00
Jumlah	18.059.757.667,00	72.349.468,00	18.132.107.135,00

- a) Realisasi Penerimaan bunga deposito TA 2016 sebesar Rp13.003.287.637,00 atau 117,15% dari pagu APBD sebesar Rp11.100.000.000,00, turun sebesar Rp622.910.927,00 (4,56%) dari tahun 2015 sebesar Rp13.626.198.564,00. Realisasi penerimaan bunga deposito TA 2016 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Penerimaan Bunga Deposito	TA. 2016 (Rp)	TA. 2015 (Rp)
Bank Jateng	11.210.821.910,00	11.299.075.337,00
Bank BRI	892.054.769,00	777.123.225,00
Bank BNI	900.410.958,00	1.550.000.002,00
Bank Mandiri	0,00	0,00
Jumlah	13.003.287.637,00	13.626.198.564,00

b) Realisasi Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2016 sebesar Rp82.492.797,00, turun sebesar Rp280.784.462,00 (77,29%) dari tahun 2015 Rp363.277.259,00. Terdiri atas Bidang Pendidikan dan Bidang Pekerjaan Umum.

c) Realisasi Pendapatan Pengembalian TA 2016 sebesar Rp54.607.532, turun sebesar Rp292.125.205(84,25%) dari TA 2015 sebesar Rp346.732.737,45,00. Terdiri atas pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

d) Penerimaan Lain-lain meliputi sumbangan pihak ketiga dan penerimaan lainnya yang tidak dianggarkan, dengan realisasi TA 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Penerimaan Lain-lain:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Sumbangan Pihak III	12.640.000.000,00	12.665.000.000,00	100,20	13.724.453.686,00
(2) Lainnya	0,00	4.818.789.862,00	0,00	4.250.171.787,00
(2) Arnu Jateng	Bank 439.000.000,00	0,00	0,00	
Jumlah	13.079.000.000,00	17.483.789.862,00	133,68	17.974.625.473,00

Realisasi penerimaan lain-lain TA 2016 sebesar Rp17.483.789.862,00 atau 133,68% dari anggarannya sebesar Rp13.079.000.000,00 dan turun sebesar Rp890.835.611,00 (4,95%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp17.974.625.473,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(1) Realisasi sumbangan Pihak III TA 2016 sebesar Rp12.665.000.000,00 atau 100,20% dari anggarannya sebesar Rp12.640.000.000,00. Sumbangan pihak ketiga terdiri dari dari PT. Tirta Investama atas penggunaan/pengambilan air dari sumber mata air Cokro di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, sesuai Kesepakatan Bersama tanggal 20 Maret 2002 yang telah diubah tanggal 12 Mei 2005 sebesar Rp13.724.453.686,00 dan penerimaan dari Perusahaan lain.

(2) Realisasi penerimaan lainnya sebesar Rp4.818.789.862,00, naik Rp568.618.075,00 (13,36%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp4.250.171.787,00

e) Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2016 sebesar Rp46.988.734.329,00 lebih besar Rp774.809.329,00 (101,68%) dari anggaran Rp46.213.925.000,00

b) Pendapatan Transfer - LRA

1) Transfer pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan realisasi dalam TA 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan:		TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
(a) Bagi Hasil Pajak – Pusat	46.515.490.000,00	48.990.111.797,00	105,32	37.426.203.568,00	
(b) Bagi Hasil Bukan Pajak	2.029.814.000,00	1.285.821.476,00	63,35	988.786.715,00	
(c) Dana Alokasi Umum	1.103.476.363.320,00	1.204.344.586.098,00	109,14	1.164.196.398.000,00	
(d) Dana Alokasi Khusus	97.567.824.000,00	89.256.225.610,00	91,48	77.379.170.000,00	
Jumlah	1.482.193.569.820,00	1.573.615.108.481,00	106,17	1.279.990.558.283,00	

Realisasi Penerimaan Transfer - Dana Perimbangan TA 2016 sebesar Rp1.573.615.108.481,00 atau 106,17% dari anggaran sebesar Rp1.482.193.569.820,00 dan naik sebesar Rp293.624.550.198,00 (22,94%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp1.279.990.558.283,00 yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

(Signature)



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(a) Bagi Hasil Pajak – LRA

Bagi Hasil Pajak dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Penerimaan ini ditransfer melalui KPPN Klaten, ditampung dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak perorangan termasuk PPh Pasal 21, dengan realisasi penerimaan TA 2016 sebagai berikut:

Dana Perimbangan: Bagi Hasil Pajak	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(a) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
(b) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 WP OPDN dan PPh pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00
(c) Bagi hasil PDB sector Pertambangan	10.111.880.000,00	12.082.496.472,00	119,49	10.269.795.168,00
(d) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	22.245.199.000,00	22.362.510.335,00	100,53	10.211.483.400,00
(e) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	0,00	60.352.550,00	0,00	1.776.323.000,00
(f) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	14.158.411.000,00	14.484.752.440,00	102,30	15.168.602.000,00
Jumlah	46.515.490.000,00	48.990.111.797,00	105,32	37.426.203.568,00

Realisasi penerimaan bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat TA 2016 sebesar Rp48.990.111.797,00 atau 105,32% dari anggaran sebesar Rp46.515.490.000,00 naik sebesar Rp11.563.908.229,00 (30,90%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp37.426.203.568,00

Penerimaan BPHTB mulai tahun anggaran 2012 pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Klaten. Pengalihan tersebut didasarkan atas Berita Acara Serah Terima No. BA-01/WPJ.32/KP.05/2011 tanggal 14 Januari 2012 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Klaten.

(b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA

Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat adalah bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA), meliputi provisi sumber daya hutan, pungutan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan umum dan cukai tembakau. Realisasi bagi hasil bukan pajak dari Pemerintah Pusat TA 2016 dan 2015, dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Bagi Hasil Bukan Pajak – Pusat:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Provisi Sumber Daya Hutan	176.683.000,00	88.636.384,00	50,17	167.414.899,00
(2) Iuran Royalti	0,00	37.200,00	0,00	0,00
(3) Pungutan Pengusaha Perikanan	1.089.194.000,00	0,00	0,00	0,00
(4) Pungutan Hasil Perikanan	0,00	452.025.539,00	0,00	703.264.033,00
(5) Pertambangan Minyak Bumi	71.465.000,00	36.187.500,00	50,64	57.172.500,00
(6) Pertambangan Gas Bumi	676.688.000,00	690.804.958,00	102,09	22.463.700,00
(7) Pertambangan Panas Bumi	15.498.000,00	17.945.050,00	115,79	12.398.897,00
(8) Pertambangan Umum	286.000,00	184.845,00	64,63	26.072.686,00
(9) Cukai Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.029.814.000,00	1.285.821.476,00	63,35	988.786.715,00

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat TA 2016 sebesar Rp1.285.821.476,00 atau 63,35% dari anggarannya sebesar Rp2.029.814.000,00 dan naik sebesar Rp297.034.761,00 (30,04%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp988.786.715,00

(c) Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat TA 2016 sebesar Rp1.204.344.586.098,00 atau 109,14% dari anggarannya Rp1.103.476.363.320, naik sebesar Rp40.148.188.098,00 (3,45%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp1.164.196.398.000,00.

(d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA

Realisasi penerimaan DAK TA 2016 sebesar Rp89.256.225.610,00 atau 91,48% dari anggaran Rp97.567.824.000,00 dan naik sebesar Rp11.877.055.610,00(15,35%) dibanding realisasi DAK TA 2015 sebesar Rp77.379.170.000,00.

Penerimaan DAK TA 2016 dengan realisasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Penerimaan DAK :	TA 2016			TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
(1) DAK Pendidikan	0,00	0,00	0,00	20.974.200.000,00	
(2) DAK Kesehatan	14.811.230.000,00	11.669.229.000,00	78,79	2.884.430.000,00	
(3) DAK Infrastruktur jalan	0,00	0,00	0,00	7.782.400.000,00	
(4) DAK Infrastruktur Irigasi	0,00	0,00	0,00	8.096.938.000,00	
(5) DAK Infrastruktur Air Minum	1.007.410.000,00	1.218.058.000,00	120,91	2.873.690.000,00	
(6) DAK Infrastruktur Sanitasi	824.260.000,00	247.278.000,00	30,00	1.656.460.000,00	
(7) DAK Kelautan & Perikanan	2.333.295.000,00	1.866.636.000,00	80,00	2.137.027.500,00	
(8) DAK Pertanian	7.188.449.000,00	5.750.759.000,00	80,00	24.586.322.000,00	
(9) DAK Lingkungan Hidup	1.643.989.000,00	907.624.000,00	55,21	1.116.350.000,00	
(10) DAK Keluarga Berencana	898.771.000,00	898.771.000,00	100,00	1.212.740.000,00	
(11) DAK Kehutanan	1.756.111.000,00	1.812.456.000,00	103,21	1.938.132.500,00	
(12) DAK Perdagangan	4.314.716.000,00	2.373.094.000,00	50,00	1.626.960.000,00	
(13) DAK Transportasi Darat	480.060.000,00	490.608.000,00	102,20	493.520.000,00	
(14) DAK Transportasi Pedesaan	906.300.000,00	618.480.000,00	68,24	0,00	
(15) DAK Infrastruktur Publik Daerah	61.403.233.000,00	61.403.232.610,00	100,00	0,00	
Jumlah	97.567.824.000,00	89.256.225.610,00	91,48	77.379.170.000,00	

(e) *Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik-LRA*

Realisasi penerimaan DAK TA 2016 sebesar Rp229.738.363.500,00 atau 98,77% dari anggaran Rp232.604.078.500,00

Penerimaan DAK TA 2016 dengan realisasi sebagai berikut:

DAK Non Fisik	TA 2016			TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1 Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	204.351.086.500,00	204.351.087.000,00	100,00	-	
2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	3.208.380.000,00	3.208.380.000,00	100,00	-	
3 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini - LRA	13.212.000.000,00	13.212.000.000,00	100,00	-	
4 Bantuan Operasional Kesehatan - LRA	9.010.000.000,00	8.597.146.500,00	95,42	-	



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

5	Akreditasi Puskesmas - LRA	650.512.000,00	-	-	-
6	Jaminan Persalinan - LRA	1.802.350.000,00	-	-	-
7	Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LRA	369.750.000,00	369.750.000,00	100,00	-
Jumlah		232.604.078.500,00	229.738.363.500,00	495,42	-

2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA

Penerimaan transfer lainnya dari Pemerintah Pusat TA 2016Rp0,00.

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

Penerimaan bagi hasil pajak dari Provinsi ditetapkan dengan SKO Gubernur Jawa Tengah, yang realisasinya sesuai berita/surat kawat dari Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, yang untuk TA 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Penerimaan Transfer - Provinsi:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) PKB	32.898.748.000,00	35.069.414.825,00	106,60	28.797.759.666,00
b) BBNKB	36.214.566.000,00	29.714.095.334,00	82,05	29.069.061.986,00
c) PBBKB	56.263.667.000,00	36.634.880.124,00	65,11	43.548.862.190,00
d) PPPAP	27.199.000,00	71.956.000,00	264,55	28.665.842,00
e) P Rokok	37.341.193.000,00	41.834.862.360,00	112,03	40.888.668.654,00
Jumlah	162.745.373.000,00	143.325.208.643,00	88,07	142.333.018.338,00

Realisasi penerimaan transfer dari Pemerintah Provinsi TA 2016 sebesar Rp143.325.208.643,00 atau 88,07% dari anggaran sebesar Rp162.745.373.000,00 dan naik sebesar Rp992.190.305,00 (0,70%) dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp142.333.018.338,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2016 sebesar Rp35.069.414.825,00 atau 106,60 % dari anggarannya sebesar Rp32.898.748.000,00 dan naik sebesar Rp6.271.655.169,00 (21,78%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp28.797.759.666,00

b) Realisasi penerimaan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2016 sebesar Rp29.714.095.334,00 atau 82,05% dari anggarannya sebesar Rp36.214.566.000,00 dan naik sebesar Rp645.033.348,00 (2,22%) dari realisasi TA 2015 sebesar Rp29.069.061.986,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

c) Realisasi penerimaan bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) TA 2016 sebesar Rp36.634.880.124,00 atau 65,11% dari anggarannya sebesar Rp56.263.667.000,00 dan turun sebesar Rp6.913.982.066,00 (15,88%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp43.548.862.190,00.

d) Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPAP) TA 2016 sebesar Rp71.956.000,00 atau 7.264,55% dari anggaran sebesar Rp27.199.000,00 dan naik sebesar Rp43.290.158,00 (151,02%) dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp28.665.842,00.

e) Bagi Hasil dari pajak Rokok TA 2016 sebesar Rp41.834.862.360,00 atau 112,03% dari anggaran sebesar Rp37.341.193.000,00 dan naik sebesar Rp946.193.706,00(2,31%) dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp40.888.668.654,00

4) Bantuan Keuangan - LRA

Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2016 mengalangkan Bantuan Keuangan sebesar Rp77.045.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp73.600.480.000,00

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah - LRA dan Pendapatan Lainnya - LRA TA 2016 dibandingkan anggarannya dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan yang Sah:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Pendapatan Hibah - LRA	5.000.000.000,00	0,00	0,00	1.779.632.600,00
(2) Pendapatan Lainnya - LRA	243.866.425.000,00	243.866.425.000,00	100,00	108.674.969.000,00
Jumlah	248.866.425.000,00	243.866.425.000,00	97,99	110.454.601.600,00

1) Pendapatan Hibah - LRA

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah TA 2016 berupa Dana Penyesuaian, dengan realisasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat:	TA 2016		TA2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Hibah (PDAM)	5.000.000.000,00	0,00	0,00	1.686.000.000,00
2. Hibah (WISMP)	0,00	0,00	0,00	93.632.600,00
Jumlah	5.000.000.000,00	0,00	0,00	1.779.632.600,00

2) Pendapatan Lainnya - LRA

Lain-lain Pendapatan yang Sah Lainnya – LRA dengan realisasi TA 2016 dan 2015 sebagai berikut:

	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Pendapatan Lainnya - LRA	243.866.425.000,00	243.866.425.000,00	100,00	108.674.969.000,00
Jumlah	243.866.425.000,00	243.866.425.000,00	100,00	108.674.969.000,00

Realisasi Penerimaan Lainnya–LRA TA 2016 sebesar Rp243.866.425.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp243.866.425.000,00sedangkan TA 2015sebesar Rp108.674.969.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

2. Belanja

Belanja Daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang kemudian diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek. Sedangkan penjabrannya dalam LRA diklasifikasikan menurut belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer yang merupakan gabungan dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2016 serta realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Belanja Daerah :	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Belanja Operasi (BO)	1.797.783.801.540,00	1.563.576.411.511,03	86,97	1.501.440.716.957,45
b. Belanja Modal (BM)	260.134.243.017,00	220.759.237.283,00	84,86	306.072.310.863,00
c. Belanja Tak Terduga (BTT)	2.487.734.200,00	260.054.200,00	10,45	0,00
d. Belanja Transfer (BT)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.060.405.778.757,00	1.784.595.702.994,03	86,61	1.807.513.027.820,45

Realisasi belanja daerah TA 2016 sebesar Rp1.784.595.702.994,03 atau 86,61% dari anggaran sebesar Rp2.060.405.778.757,00 turun sebesar Rp22.917.324.826,45 (1,26%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp1.807.513.027.820,45 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan dengan anggaran dan realisasi TA 2016 serta realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Belanja Operasi:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) Belanja Pegawai	1.415.014.046.949,00	1.239.843.399.717,00	87,62	1.181.884.746.884,45
2) Belanja Barang dan Jasa ..	306.713.136.351,00	255.081.046.746,03	83,17	227.261.915.734,00
3) Belanja Hibah	63.551.118.240,00	56.841.540.048,00	89,44	82.119.979.339,00
4) Belanja Bantuan Sosial	12.505.500.000,00	11.810.425.000,00	94,44	10.174.075.000,00
Jumlah	1.797.783.801.540,00	1.563.576.411.511,03	86,97	1.501.440.716.957,45

Realisasi belanja operasi TA 2016 sebesar Rp1.563.576.411.511,03 atau 86,97% dari anggaran Rp1.797.783.801.540,00 namun meningkat sebesar Rp62.135.694.553,58 (0,039%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp1.501.440.716.957,45 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi biaya gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan, belanja insentif pemungutan pajak daerah, belanja insentif pemungutan retribusi daerah, dan belanja uang lembur dengan anggaran dan realisasi TA 2016 serta realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Belanja Pegawai:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Gaji dan Tunjangan	971.893.079.964,00	877.336.557.352,00	90,27	846.942.405.611,45
b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS	432.329.809.739,00	352.368.203.015,00	81,50	325.243.845.148,00
c) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.773.120.000,00	4.747.920.000,00	99,47	4.703.820.000,00
d) Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.407.070.400,00	3.201.693.750,00	93,97	2.901.706.250,00
e) Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.084.510.600,00	1.084.510.600,00	100,00	697.623.875,00
f) Belanja Uang Lembur	1.526.456.246,00	1.104.515.000,00	72,36	1.395.346.000,00
Jumlah	1.415.014.046.949,00	1.239.843.399.717,00	87,62	1.181.884.746.884,45

Realisasi belanja pegawai TA 2016 sebesar Rp1.239.843.399.717,00 atau 87,62% dari anggarannya sebesar Rp1.415.014.046.949,00 dan meningkat sebesar Rp56.854.137.832,55 (4,81%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp1.181.884.746.884,45

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Gaji dan Tunjangan meliputi Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi dll, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Gaji dan Tunjangan:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	763.017.663.990,00	687.687.891.062,00	90,13	648.934.460.828,00
b) Belanja Tunjangan Keluarga	62.217.434.000,00	56.471.497.520,00	90,76	57.693.048.524,00
c) Belanja Tunjangan Jabatan	9.389.249.000,00	8.626.216.500,00	91,87	8.380.816.771,00
d) Belanja Tunjangan Fungsional	55.065.012.000,00	50.067.317.000,00	90,92	50.753.608.690,00
e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum	7.441.573.000,00	6.746.836.000,00	90,66	6.867.988.000,00
f) Belanja Tunjangan Beras	34.199.864.000,00	30.853.889.220,00	90,22	33.062.390.536,00
g) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.691.515.000,00	9.056.127.994,00	93,44	16.983.478.732,00
h) Belanja Pembulatan Gaji	11.430.000,00	8.033.200,00	70,28	8.361.180,00
i) Belanja Luran Jaminan	21.388.647.000,00	19.332.478.785,00	90,39	19.560.649.597,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Kesehatan				
j) Belanja Uang Paket	95.508.000,00	94.878.000,00	99,34	93.775.500,00
k) Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	35.429.275,00	31.241.700,00	88,18	31.241.700,00
l) Belanja Tunjangan Komisi	66.503.600,00	61.021.800,00	91,76	60.382.350,00
m) Belanja Tunjangan Badan Anggaran	35.429.275,00	31.150.350,00	87,92	30.236.850,00
n) Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	10.094.475,00	7.856.100,00	77,83	6.942.600,00
o) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	62.484.000,00	46.908.225,00	75,07	36.235.500,00
p) Belanja Tunjangan Pemukiman	4.277.000.000,00	3.884.500.000,00	90,82	2.963.000.000,00
q) Belanja Uang Duka Wafat/Tewas	0	0	0	848.733.800,00
r) Belanja Uang Jasa Pengabdian	58.380.000,00	0	0	3.150.000,00
s) Tunjangan Pengamanan Persandian	63.771.000,00	58.000.000,00	90,95	71.800.000,00
t) Tunjangan Badan Legislati	19.595.275,00	1.940.575,00	81,35	16.168.950,00
u) Belanja Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	4.746.497.074,00	4.254.773.321,00	89,64	535.935.503,00
Jumlah	971.893.079.964,00	877.336.557.352,00	90,27	846.942.405.611,45

Realisasi belanja gaji dan tunjangan TA 2016 sebesar Rp877.336.557.352,00 atau 90,27% dari anggaran sebesar Rp971.893.079.964,00 dan meningkat sebesar Rp30.394.151.740,55 (3,59%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp846.942.405.611,45

b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Tambahan Penghasilan PNS meliputi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Belanja Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS, dan Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Tambahan Penghasilan PNS:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	39.440.839.000,00	35.214.942.600,00	89,29	16.604.615.463,00
b) Belanja Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	9.370.813.100,00	3.985.000.000,00	42,53	2.656.250.000,00
c) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD	383.518.137.639,00	313.168.260.415,00	81,66	305.982.979.685,00
Jumlah	432.329.809.739,00	352.368.203.015,00	81,50	325.243.845.148,00

Realisasi belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2016 sebesar Rp352.368.203.015,00 atau 81,50% dari anggarannya sebesar Rp432.329.809.739,00. Dan naik sebesar 27.124.357.867,00 (8,34%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp325.243.845.148,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

c) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH meliputi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH, dan Belanja Operasional Penunjang Pimpinan DPRD, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan Anggota DPRD serta KDH/WKDH:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.754.800.000,00	99,33	3.710.700.000,00
b) Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
c) Belanja Operasional Penunjang Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
Jumlah	4.773.120.000,00	4.747.920.000,00	99,47	4.703.820.000,00

Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2016 sebesar Rp4.747.920.000,00 atau 99,47% dari anggarannya sebesar Rp4.773.120.000,00 dan naik sebesar Rp 44.100.000,00 (0,94%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar 4.703.820.000,00

d) Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah meliputi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LRA, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah – LRA	3.407.070.400,00	3.201.693.750,00	93,97	2.901.706.250,00
Jumlah	3.407.070.400,00	3.201.693.750,00	93,97	2.901.706.250,00

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2016 sebesar Rp3.201.693.750,00 atau 93,97% dari anggarannya sebesar Rp3.407.070.400,00 dan menaik sebesar Rp 299.987.500,00 (10,34%) dibandingkan realisasi TA 2015 Rp2.901.706.250,00

e) Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah meliputi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LRA, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – LRA	1.084.510.600,00	1.084.510.600,00	100,00	697.623.875,00
Jumlah	1.084.510.600,00	1.084.510.600,00	100,00	697.623.875,00

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2016 sebesar Rp1.084.510.600,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp1.084.510.600,00 dan Meningkatkan sebesar Rp386.886.725,00 (55,46%) dibandingkan realisasi anggaran TA 2015 sebesar Rp 697.623.875,00.

f) Belanja Uang Lembur

Belanja Uang Lembur meliputi Belanja Uang Lembur PNS dan Belanja Uang Lembur Non PNS, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Uang Lembur:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Uang Lembur PNS	1.319.857.526,00	1.007.290.000,00	76,32	1.310.896.000,00
b) Belanja Uang Lembur Non PNS	206.598.720,00	97.225.000,00	47,06	84.450.000,00
Jumlah	1.526.456.246,00	1.104.515.000,00	72,36	1.395.346.000,00

Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2016 sebesar Rp1.104.515.000,00 atau 72,36% dari anggarannya sebesar Rp1.526.456.246,00 dan menurun sebesar 290.831.000,00 (20,84%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp1.395.346.000,00.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa meliputi bahan dan material, jasa pihak ketiga dan lain-lain dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Bahan Pakai Habis	25.717.823.179,00	21.200.809.781,00	82,44	18.311.418.680,00
b) Belanja Bahan/Material	23.095.058.770,00	17.828.757.416,00	77,20	13.641.113.463,00
c) Belanja Jasa Kantor	60.999.816.092,00	57.366.991.063,00	94,04	74.254.640.967,00
d) Belanja Premi Asuransi	9.281.328.000,00	9.265.525.311,00	99,83	341.652.678,00
e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.046.066.645,00	3.093.510.814,00	76,46	2.942.248.546,00
f) Belanja Cetak dan Penggandaan	9.193.210.123,00	8.133.329.791,00	88,47	10.025.381.754,00
g) Belanja Sewa Rumah/Cedung/Gudang/Parkir	895.240.000,00	714.595.200,00	79,82	1.134.864.095,00
h) Belanja Sewa Sarana Mobilitas	894.561.250,00	719.706.000,00	80,45	924.990.000,00
i) Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Belanja Sewa Perlengkapan dan	2.397.061.020,00	2.134.498.310,00	89,05	2.577.261.820,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Peralatan Kantor					
k) Belanja Makanan dan Minuman	22.242.760.748,00	18.284.220.469,00	82,20	19.007.526.525,00	
l) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	397.925.000,00	361.794.500,00	90,92	683.979.620,00	
m) Belanja Pakaian Kerja	702.932.636,00	634.136.170,00	90,21	807.917.795,00	
n) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	442.218.500,00	420.934.500,00	95,19	725.177.500,00	
o) Belanja Perjalanan Dinas	48.234.476.202,00	36.778.501.757,00	76,25	29.725.508.978,00	
p) Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00		0,00	
q) Belanja Pemeliharaan	27.114.119.104,00	22.479.964.415,00	82,91	19.020.383.173,00	
r) Belanja Jasa Konsultansi	1.965.370.000,00	1.688.952.706,00	85,94	5.385.581.532,00	
s) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	492.500.000,00	448.000.000,00	90,96	1.162.000.000,00	
t) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.086.042.000,00	1.872.075.669,00	89,74	1.398.102.902,00	
u) Belanja Honorarium Non Pegawai	14.945.125.750,00	12.529.358.395,00	83,84	263.405.000,00	
v) Belanja Honorarium PNS	10.303.385.880,00	8.594.910.850,00	83,42	9.107.748.250,00	
w) Belanja Honorarium Non PNS	15.895.314.212,00	14.485.269.453,00	91,13	14.351.521.456,00	
x) Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	100,00	6.500.000,00	
y) Belanja Barang dan Jasa Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana	370.801.240,00	277.825.000	74,93	566.891.000,00	
z) Belanja Pegawai BLUD	4.355.689.000,00	3.236.532.518,20	74,31	0,00	
aa) Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.644.311.000,00	12.530.846.657,83	60,70	0,00	
Jumlah	306.713.136.351,00	255.081.046.746,03	83,17	227.261.915.734,00	

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2016 sebesar Rp255.081.046.746,03 atau 83,17% dari anggarannya sebesar Rp306.713.136.351,00Naik sebesar Rp27.819.131.012,03 (12,2%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp227.261.915.734,00

a) Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Bahan Pakai Habis meliputi Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Dokumen/Administrasi Tender, dll, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Bahan Pakai Habis:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Alat Tulis Kantor	10.192.699.576,00	9.312.397.998,00	91,36	7.859.720.097,00
b) Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.562.000,00	962.000,00	37,55	17.300.240,00
c) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.151.765.595,00	1.990.719.299,00	92,52	1.067.166.887,00
d) Belanja Perangko, Materiail dan Benda Pos Lainnya	140.492.100,00	115.239.090,00	82,03	107.250.618,00
e) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.822.048.078,00	1.711.265.111,00	93,92	1.181.434.885,00
f) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.665.021.482,00	2.798.067.931,00	76,35	3.647.324.877,00
g) Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	79.724.100,00	57.275.850,00	71,84	61.297.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

h) Belanja Pengisian Tabung Gas	104.515.000,00	35.160.000,00	33,64	81.898.913,00
i) Belanja Hadiah	1.390.402.000,00	1.118.585.000,00	80,45	1.701.470.500,00
j) Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	494.195.100,00	423.943.400,00	85,78	521.730.200,00
k) Belanja Bahan Pelatihan	1.539.054.120,00	1.039.829.300,00	67,56	414.650.138,00
l) Belanja Bahan Habis Pakai Alat Medis	3.763.279.528,00	2.251.104.352,00	59,82	1.600.196.575,00
m) Belanja Bahan Kearsipan / Perpustakaan	73.661.000,00	68.134.950,00	92,50	43.847.750,00
n) Belanja Linen	298.403.500,00	278.125.500,00	93,20	6.130.000,00

Jumlah	25.717.823.179,00	21.200.809.781,00	82,44	18.311.418.680,00
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2016 sebesar Rp21.200.809.781,00 atau 82,44% dari anggarannya sebesar Rp25.717.823.179,00 naik sebesar Rp7.406.404.499,00 (40,44%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp18.311.418.680,00

b) Belanja Bahan/Material

Belanja Bahan/Material meliputi Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Bahan/Bibit Tanaman, dll, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Bahan/Material:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Bahan Baku Bangunan	2.016.120.598,00	1.769.486.034,00	87,77	1.578.025.452,00
b) Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.181.549.885,00	2.377.794.898,00	74,74	1.076.152.454,00
c) Belanja Bibit Ternak	990.840.000,00	642.619.000,00	64,86	192.753.000,00
d) Belanja Bahan obat-obatan	11.970.683.230,00	9.014.918.970,00	75,31	7.424.143.234,00
e) Belanja Bahan Kimia	44.259.755,00	33.459.775,00	75,60	13.779.400,00
f) Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.248.455.176,00	990.513.114,00	79,34	574.403.896,00
g) Belanja Bahan Laboratorium	2.612.378.126,00	2.115.635.477,00	80,99	1.269.660.757,00
h) Belanja Pakan Ternak	127.004.000,00	99.256.000,00	78,15	127.988.710,00
i) Belanja Bahan Pengumuman / Promosi	856.125.000,00	755.843.000,00	113,27	1.292.772.310,00
j) Belanja Bahan Penanganan Masalah Sosial	47.643.000,00	29.231.148,00	61,35	91.434.250,00
Jumlah	23.095.058.770,00	17.828.757.416,00	77,20	13.641.113.463,00

Realisasi Belanja Bahan/Material TA 2016 sebesar Rp17.828.757.416,00 atau 77,20% dari anggarannya sebesar Rp23.095.058.770,00 dan naik sebesar Rp9.453.945,00 (69,30%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp13.641.113.463,00

c) Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor meliputi Belanja Telepon, Belanja Air, dll, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Jasa Kantor:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Telepon	1.165.571.000,00	867.168.148,00	74,40	547.902.804,00
b) Belanja Air	1.603.676.640,00	1.114.938.669,00	69,52	819.226.121,00
c) Belanja Listrik	24.823.411.500,00	23.004.492.832,00	92,67	16.862.064.613,00
d) Belanja Jasa Pengumuman	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Lelang/Pemenang Lelang					
e) Belanja Surat Kabar/Majalah	421.023.240,00	356.447.118,00	84,66	289.960.038,00	
f) Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.750.063.100,00	1.564.752.429,00	89,38	689.517.786,00	
g) Belanja Paket/Pengiriman	49.550.000,00	48.798.500,00	98,48	29.957.715,00	
h) Belanja Sertifikasi	35.000.000,00	2.400.000,00	68,57	96.000.000,00	
i) Belanja Jasa Transaksi Keuangan	182.746.000,00	151.718.289,00	83,02	141.762.093,00	
j) Belanja Pinak Ketiga non Konsultasi	0,00	0,00	0,00	259.626.000,00	
k) Belanja Jasa Uji Laboratorium	46.800.000,00	27.791.500,00	59,38	45.867.600,00	
l) Belanja Jasa Medis	30.921.974.612,00	30.228.483.578,00	97,76	25.109.761.118,00	
Jumlah	60.999.816.092,00	57.366.991.063,00	94,04	74.254.640.967,00	

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2016 sebesar Rp57.366.991.063,00 atau 94,04% dari anggarannya sebesar Rp60.999.816.092,00 dan turun sebesar Rp16.887.649.904,00 (27,26%) dibandingkan realisasi TA 2015 Rp74.254.640.967,00

d) Belanja Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi meliputi Belanja Premi Asuransi Kesehatan dan Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Premi Asuransi:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8.936.328.000,00	8.923.821.025,00	0,00	0,00
b) Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	345.000.000,00	341.704.286,00	99,04	341.652.678,00
Jumlah	9.281.328.000,00	9.265.525.311,00	99,83	341.652.678,00

Realisasi Belanja Premi Asuransi TA 2016 sebesar Rp9.265.525.311,00 atau 99,83% dari anggarannya sebesar Rp9.281.328.000,00 dan meningkat sebesar Rp8.923.872.633,00 (2611,97%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp341.652.678,00

e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor meliputi Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, dll, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Jasa Service	1.397.624.413,00	1.064.862.455,00	76,19	1.107.548.688,00
b) Belanja Penggantian Suku Cadang	1.617.349.749,00	1.365.512.471,00	84,43	1.203.216.181,00
c) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	507.817.612,00	361.843.143,00	71,25	340.751.727,00
d) Belanja Jasa KIR	35.880.000,00	2.136.020,00	5,95	17.245.375,00
e) Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	335.748.120,00	205.835.775,00	61,31	187.569.325,00
f) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	151.646.751,00	93.320.950,00	61,54	85.917.250,00
Jumlah	4.046.066.645,00	3.093.510.814,00	76,46	2.942.248.546,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2016 sebesar Rp3.093.510.814,00 atau 76,46% dari anggarannya sebesar Rp4.046.066.645,00 dan menaik sebesar Rp151.261.968,00,00 (5,14%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp2.942.248.546,00

f) Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan meliputi Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, dan Belanja Jilid, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Cetak dan Penggandaan:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Cetak	5.061.241.430,00	4.443.258.155,00	87,79	6.310.316.067,00
b) Belanja Penggandaan	4.049.451.193,00	3.626.442.136,00	89,55	3.577.235.637,00
c) Belanja Jilid	82.517.500,00	63.629.500,00	77,11	137.830.050,00
Jumlah	9.193.210.123,00	8.133.329.791,00	88,47	10.025.381.754,00

Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan TA 2016 sebesar Rp8.133.329.791,00 atau 88,47% dari anggarannya sebesar Rp9.193.210.123,00 dan menurun sebesar Rp1.892.051.963,00 (418,87%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp10.025.381.754,00

g) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir meliputi Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat, Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, dan Belanja Sewa Lahan, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	740.490.000,00	593.504.000,00	80,15	949.464.095,00
b) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	114.750.000,00	81.091.200,00	70,67	135.400.000,00
c) Belanja Sewa Lahan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	50.000.000,00
Jumlah	895.240.000,00	714.595.200,00	79,82	1.134.864.095,00

Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir TA 2016 sebesar Rp714.595.200,00 atau turun 79,82% dari anggarannya sebesar Rp895.240.000,00 dan sebesar Rp420.268.895,00 (37,03%) dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp1.134.864.095,00

h) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Sarana Mobilitas meliputi Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Sewa Sarana Mobilitas:

	TA 2016			TA 2015		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)		
a) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	894.561.250,00	719.706.000,00	80,45	924.990.000,00		
Jumlah	894.561.250,00	719.706.000,00	80,45	924.990.000,00		

Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas TA 2016 sebesar Rp719.706.000,00 atau 80,45% dari anggarannya sebesar Rp894.561.250,00 dan turun sebesar Rp205.284.000,00 (22,19%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp924.990.000,00

j) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor meliputi Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Komputer dan Printer, dll, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor:	TA 2016			TA 2015		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)		
a) Belanja Sewa Meja Kursi	584.158.000,00	518.794.310,00	88,81	558.442.400,00		
b) Belanja Sewa Komputer dan Printer	40.700.000,00	24.819.000,00	60,98	34.926.500,00		
c) Belanja Sewa Proyektor	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	1.200.000,00		
d) Belanja Sewa Generator	219.530.000,00	214.240.000,00	97,59	200.250.000,00		
e) Belanja Sewa Tenda	576.599.920,00	530.848.000,00	92,07	599.883.920,00		
f) Belanja Sewa Pakaihan Adat/Tradisional	133.050.000,00	125.250.000,00	94,14	253.300.000,00		
g) Belanja Sewa Sound System	720.139.000,00	607.164.000,00	84,31	860.559.000,00		
h) Belanja Sewa Perlengkapan Olah Raga	2.984.100,00	2.983.000,00	99,96	14.300.000,00		
i) Belanja Sewa Alat Musik	116.500.000,00	107.000.000,00	91,85	54.400.000,00		
Jumlah	2.397.061.020,00	2.134.498.310,00	89,05	2.577.261.820,00		

Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor TA 2016 sebesar Rp2.134.498.310,00 atau 89,05% dari anggarannya sebesar Rp2.397.061.020,00 dan turun sebesar Rp442.763.510,00 (17,18%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp2.577.261.820,00

k) Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman meliputi Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dll, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Makanan dan Minuman:	TA 2016			TA 2015		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)		
a) Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.129.390.219,00	856.311.100,00	75,82	1.086.612.800,00		
b) Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.608.712.429,00	11.098.914.394,00	81,56	9.863.813.925,00		
c) Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.182.370.150,00	5.315.867.725,00	85,98	6.550.914.450,00		
d) Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	1.322.287.950,00	1.013.127.250,00	76,62	1.506.185.350,00		
Jumlah	22.242.760.748,00	18.284.220.469,00	82,20	19.007.526.525,00		



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Realisasi Belanja Makanan dan Minuman TA 2016 sebesar Rp18.284.220.469,00 atau 82,20% dari anggarannya sebesar Rp22.242.760.748,00 dan turun sebesar Rp3.958.540.279,00 (17,80%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar 19.007.526.525,00

l) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya meliputi Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH, Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH), dll, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	12.075.000,00	11.240.000,00	93,08	10.820.000,00
b) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	87.000.000,00	75.127.000,00	86,35	116.630.000,00
c) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	43.500.000,00	34.665.000,00	76,69	234.544.500,00
d) Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	206.850.000,00	198.335.000,00	95,88	276.147.620,00
f) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	48.500.000,00	42.427.500,00	87,48	45.837.500,00
Jumlah	397.925.000,00	361.794.500,00	90,92	683.979.620,00

Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya TA 2016 sebesar Rp361.794.500,00 atau 90,92% dari anggarannya sebesar Rp397.925.000,00 dan turun sebesar Rp322.185.120,00 (47,10%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp683.979.620,00

m) Belanja Pakaian Kerja

Belanja Pakaian Kerja meliputi Belanja Pakaian Kerja Lapangan, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Pakaian Kerja:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Pakaian Kerja Lapangan	702.932.636,00	634.136.170,00	90,21	807.917.795,00
Jumlah	702.932.636,00	634.136.170,00	90,21	807.917.795,00

Realisasi Belanja Pakaian Kerja TA 2016 sebesar Rp634.136.170,00 atau 90,21% dari anggarannya sebesar Rp702.932.636,00 dan turun sebesar Rp173.781.625,00 (21,50%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp807.917.795,00

n) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu meliputi Belanja Pakaian KORPRI, Belanja Pakaian adat daerah, dll, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Pakaian KORPRI	1.200.000,00	1.100.000,00	91,67	1.120.000,00
b) Belanja Pakaian adat daerah	63.548.500,00	63.148.500,00	118,22	132.250.000,00
c) Belanja Pakaian Batik Tradisional	143.130.000,00	125.110.000,00	24,22	130.879.000,00
d) Belanja Pakaian Olahraga	234.340.000,00	231.576.000,00	193,67	453.853.500,00
e) Belanja Pakaian Seragam Siswa	0,00	0,00	0,00	7.075.000,00
Jumlah	442.218.500,00	420.934.500,00	95,19	725.177.500,00

Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu TA 2016 sebesar Rp420.934.500,00 atau 95,19% dari anggarannya sebesar Rp442.218.500,00 dan menurun sebesar Rp304.243.000,00 (41,95%) dibandingkan dengan realisasi Ta 2015 sebesar Rp725.177.500,00

o) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas meliputi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.466.086.897,00	14.344.989.781,00	73,69	12.215.128.249,00
b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.767.789.305,00	22.433.511.976,00	77,98	17.510.380.729,00
Jumlah	48.234.476.202,00	36.778.501.757,00	76,25	29.725.508.978,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2016 sebesar Rp36.778.501.757,00 atau 76,25% dari anggarannya sebesar Rp48.234.476.202,00 dn naik sebesar Rp7.052.992.779,00 (23,73%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp29.725.508.978,00

p) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan meliputi Belanja Pakaian KORPRI, Belanja Pemeliharaan Tanah Danau / Rawa, Belanja Pemeliharaan Tanah Untuk Bangunan Gedung, dll, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Pemeliharaan:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Pemeliharaan Tanah Danau / Rawa	0,00	0,00	0,00	1.166.162.000,00
b) Belanja Pemeliharaan Tanah Pertanian	47.542.000,00	13.380.000,00	28,14	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

c)	Belanja Pemeliharaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
d)	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Besar Darat	0,00	0,00	74,83	110.462.000,00
e)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	395.875.000,00	298.461.604,00	0,00	407.468.888,00
f)	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin	41.819.752,00	39.669.700,00	94,93	23.600.000,00
g)	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Tak Bermesin	15.000.000,00	15.000.000,00	100,0	24.950.000,00
h)	Belanja Pemeliharaan Alat Ukur	96.350.650,00	94.359.000,00	97,93	109.550.000,00
i)	Belanja Pemeliharaan Alat Pengolahan	9.997.000,00	9.997.000,00	100,00	9.961.000,00
j)	Belanja Pemeliharaan Alat Tanaman / Penyimpan	4.694.000,00	3.535.000,00	75,31	
k)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	1.863.690.248,00	1.678.981.841,00	90,09	1.213.174.960,00
l)	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	206.680.000,00	192.074.500,00	92,93	97.136.500,00
m)	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.855.320.748,00	1.717.234.270,00	92,56	839.291.740,00
n)	Belanja Pemeliharaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	212.445.800,00	204.803.200,00	96,40	202.665.000,00
o)	Belanja Pemeliharaan Alat Studio	13.750.750,00	10.943.000,00	79,58	40.302.000,00
p)	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	149.301.800,00	113.737.500,00	76,18	45.855.000,00
q)	Belanja Pemeliharaan Pemancar	75.000.000,00	72.500.000,00	96,67	
r)	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	6.280.000,00	326.000,00	5,19	0
s)	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	130.510.000,00	65.386.400,00	50,10	4.335.000,00
t)	Belanja Pemeliharaan Unit-unit Laboratorium	5.788.000,00	1.175.000,00	20,30	1.237.500,00
u)	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga / Praktek Sekolah	286.350.000,00	279.778.750,00	97,71	
v)	Belanja Pemeliharaan Alat Keamanan dan Pertindungan	2.893.200,00	2.893.200,00	100,00	2.893.200,00
w)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.831.723.835,00	2.638.674.220,00	93,18	3.813.723.535,00
x)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	455.529.200,00	437.045.200,00	95,94	69.405.200,00
y)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara	7.500.000,00	6.950.000,00	92,67	
z)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	232.575.000,00	225.990.500,00	97,17	
aa)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	60.000.000,00	57.877.000,00	96,46	94.600.000,00
bb)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Rambu-Rambu	162.456.700,00	161.073.000,00	99,15	277.221.500,00
cc)	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.065.232.274,00	12.319.466.530,00	76,68	8.221.793.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

dd) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi	148.795.760,00	148.333.000,00	99,69	519.392.300,00
ee) Belanja Pemeliharaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penganggulangan Bencana	384.000.000,00	376.853.000,00	98,14	446.687.000,00
ff) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Kotor	47.000.000,00	45.755.000,00	97,35	91.174.000,00
gg) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Minum/Bersih	1.657.150,00	0,00	0,00	3.976.350,00
hh) Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	60.475.000,00
ii) Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	223.932.971,00	212.481.000,00	94,89	103.800.000,00
jj) Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon	13.150.000,00	9.225.000,00	70,15	42.395.000,00
kk) Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	13.500.000,00	12.000.000,00	88,89	24.500.000,00
ll) Belanja Pemeliharaan Alat Olahraga Lainnya	3.590.000,00	3.588.000,00	99,94	0,00
mm) Belanja Pemeliharaan Hewan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
nn) Belanja Pemeliharaan Tanaman	243.695.166,00	231.620.000,00	95,04	108.113.000,00
oo) Pemeliharaan Amunisi	0,00	0,00	0,00	0,00
pp) Pemeliharaan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
qq) Pemeliharaan Buku	0,00	0,00	0,00	0,00
rr) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Renovasi	792.092.100,00	769.797.000,00	97,19	819.082.000,00

Jumlah

	27.114.119.104,00	22.479.964.415,00	82,91	19.020.383.173,00
--	-------------------	-------------------	-------	-------------------

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2016 sebesar Rp22.479.964.415,00 atau 82,91% dari anggarannya sebesar Rp27.114.119.104,00 dan menurun sebesar Rp4.634.154.689,00 (17,09%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar 19.020.383.173,00

q) Belanja Jasa Konsultansi

Belanja Jasa Konsultansi meliputi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, dan Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Jasa Konsultansi:

	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	284.000.000,00	277.150.000,00	97,59	233.965.250,00
b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.370.870.000,00	1.112.846.706,00	81,18	4.495.149.282,00
c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	220.500.000,00	213.200.000,00	96,69	316.174.000,00
d) Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan	90.000.000,00	85.756.000,00	95,28	340.293.000,00
Jumlah	1.965.370.000,00	1.688.952.706,00	85,94	5.385.581.532,00

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi TA 2016 sebesar Rp1.688.952.706,00 atau 85,94% dari anggarannya sebesar Rp1.965.370.000,00 dan turun sebesar Rp3.696.628.826,00 (68,64%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp5.385.581.532,00

r) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS meliputi Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	482.000.000,00	448.000.000,00	92,95	1.162.000.000,00
b) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	492.500.000,00	448.000.000,00	90,96	1.162.000.000,00

Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2016 sebesar Rp448.000.000,00 atau 90,96% dari anggarannya sebesar Rp492.500.000,00.

s) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS meliputi Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan, Belanja Sosialisasi, dan Belanja Bimbingan Teknis, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	2.065.042.000,00	1.852.575.669,00	89,71	806.402.902,00
b) Belanja Sosialisasi	21.000.000,00	19.500.000,00	92,86	17.700.000,00
c) Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	574.000.000,00
Jumlah	2.086.042.000,00	1.872.075.669,00	89,74	1.398.102.902,00

Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2016 sebesar Rp1.872.075.669,00 atau 89,74% dari anggarannya sebesar Rp2.086.042.000,00 dan naik sebesar Rp473.972.767,00 (33,90%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp1.398.102.902,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

t) Belanja Honorarium Non Pegawai

Belanja Honorarium Non Pegawai meliputi Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4.549.497.400,00	3.725.129.000,00	81,88	263.405.000,00
b) Moderator	101.600.000,00	69.500.000,00	68,41	0,00
c) Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi	10.294.028.350,00	8.734.729.395,00	84,85	0,00
Jumlah	14.945.125.750,00	12.529.358.395,00	83,84	263.405.000,00

Realisasi Belanja Honorarium Non Pegawai TA 2016 sebesar Rp12.529.358.395,00 atau 83,84% dari anggarannya sebesar Rp14.945.125.750,00 dan naik sebesar Rp12.265.953.395,00 (456,69%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp263.405.000,00

u) Belanja Honorarium PNS

Belanja Honorarium PNS meliputi Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, dll, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.774.652.280,00	6.539.603.750,00	84,11	7.062.214.000,00
b) Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	39.200.000,00	32.800.000,00	83,67	24.375.000,00
c) Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	496.600.000,00	442.225.000,00	89,05	393.450.000,00
d) Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	221.224.000,00	182.300.000,00	82,41	189.820.400,00
e) Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	399.250.000,00	321.850.000,00	80,61	334.550.000,00
f) Belanja Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa	34.020.000,00	22.500.000,00	66,58	17.050.000,00
g) Belanja Honorarium Petugas / Pengawas Lapangan	1.338.439.600,00	1.053.632.100,00	78,72	1.086.288.850,00
Jumlah	10.303.385.880,00	8.594.910.850,00	83,42	9.107.748.250,00

Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2016 sebesar Rp8.594.910.850,00 atau 83,42% dari anggarannya sebesar Rp10.303.385.880,00 dan turun sebesar Rp512.837.400,00 (6,14%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar 9.107.748.250,00

v) Belanja Honorarium Non PNS

Belanja Honorarium Non PNS meliputi Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Belanja Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

4



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Honorarium Non PNS:

	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	505.100.000,00	471.750.000,00	93,40	529.680.000,00
b) Belanja Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	15.390.214.212,00	14.013.519.453,00	91,05	13.821.841.456,00
Jumlah	15.895.314.212,00	14.485.269.453,00	91,13	14.351.521.456,00

Realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2016 sebesar Rp14.485.269.453,00 atau 91,13% dari anggarannya sebesar Rp15.895.314.212,00 dan naik sebesar Rp133.747.997,00 (0,93%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar 14.351.521.456,00

w) Belanja Barang dan Jasa Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana

Belanja Barang dan Jasa Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Barang dan Jasa Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana	370.801.240,00	277.825.000,00	74,93	566.891.000,00
Jumlah	370.801.240,00	277.825.000,00	74,93	566.891.000,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana TA 2016 sebesar Rp277.825.000,00 atau 74,93% dari anggarannya sebesar Rp370.801.240,00 dan menurun sebesar Rp289.066.000,00 (50,99%) dibandingkan dengan relaisai TA 2015 sebesar Rp566.891.000,00

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah kepada Pemerintah, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya, Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat, dan Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Hibah:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Hibah kepada Pemerintah	610.000.000,00	535.000.000,00	87,70	535.000.000,00
b) Belanja Hibah kepada Pemerintah Lainnya	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	0,00
c) Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	31.950.441.800,00	30.210.147.836,00	96,77	17.705.995.836,00
d) Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	30.290.676.440,00	25.396.392.212,00	83,33	2.037.060.000,00
e) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,0	11.782.948.727,00
Jumlah	63.551.118.240,00	56.841.540.048,00	89,44	82.119.979.339,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Realisasi belanja hibah TA 2016 sebesar Rp56.841.540.048,00 atau 89,44% dari anggaran sebesar Rp63,551.118.240,00 Sama Dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp82.119.979.339,00

4) *Belanja Bantuan Sosial*

Belanja bantuan sosial direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat dan partai politik, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Bantuan Sosial, kepada:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	-	0,00
b) Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	450.000.000,00	434.000.000,00	96,44	445.000.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	12.055.500.000,00	11.376.425.000,00	94,37	9.729.075.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>12.505.500.000,00</i>	<i>11.810.425.000,00</i>	<i>94,44</i>	<i>10.174.075.000,00</i>

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2016 sebesar Rp11.810.425.000,00 atau 94,44% dari anggarannya sebesar Rp12.505.500.000,00; dan naik sebesar Rp1.636.650.000,00 (16,08%) dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp10.174.075.000,00.

Pengguna Anggaran belanja bantuan sosial adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), namun pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD perencanaan yang meliputi: Bagian Sekretariat Daerah; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Bakesbang; Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; serta Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Belanja bantuan sosial menurut objeknya dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

a) *Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan*

Belanja bantuan sosial kemasyarakatan untuk TA 2016 tidak dianggarkan.

b) *Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan*

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dengan rincian TA 2016 dan 2015, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Bantuan Sosial kepada Pokmas:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Perekonomian	0,00	0,00	-	0,00
(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	450.000.000,00	434.000.000,00	96,44	445.000.000,00
Jumlah	450.000.000,00	434.000.000,00	96,44	445.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan TA 2016 sebesar Rp434.000.000,00 atau 96,44% dari anggaran sebesar Rp450.000.000,00, dan turun sebesar Rp11.000.000,00 (2,47%) dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp445.000.000,00.

c) Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat meliputi Belanja Bantuan Sosial Kepada Perorangan, dengan rincian TA 2016 dan 2015, sebagai berikut:

Belanja Bantuan Sosial kepada Pokmas:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Pendidikan	2.045.500.000,00	1.947.500.000,00	95,21	1.340.200.000,00
(2) Penyanggah Masalah Sosial	10.010.000.000,00	9.428.925.000,00	94,20	8.388.875.000,00
Jumlah	12.055.500.000,00	11.376.425.000,00	94,37	9.729.075.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat TA 2016 sebesar Rp11.376.425.000,00 atau 94,37% dari anggarannya Rp12.055.500.000,00 dan naik sebesar Rp1.647.350.000,00 (16,93%) dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp9.729.075.000,00.

b. Belanja Modal

Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2016 dan 2015, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Modal (BM):	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) Tanah	5.050.000.000,00	4.601.391.750,00	91,12	6.131.345.500,00
2) Peralatan dan Mesin	106.996.803.857,00	93.767.955.957,00	87,63	78.890.526.208,00
3) Gedung dan Bangunan	46.597.554.160,00	37.855.211.146,00	81,24	115.018.525.491,00
4) Jalan, Irigasi & Jaringan	88.540.613.000,00	72.641.123.070,00	82,04	86.217.166.164,00
5) Aset Tetap Lainnya	12.949.272.000,00	11.893.555.720,00	91,85	19.814.747.500,00
Jumlah	260.134.243.017,00	220.759.237.283,00	84,61	306.072.310.863,00

Realisasi Belanja Modal TA 2016 sebesar Rp220.759.237.283,00 atau 84,61% dari anggarannya sebesar Rp260.134.243.017,00

Penilaian dan penyajian belanja modal ke dalam nilai aset tetap melalui proses kapitalisasi, dengan mendebit rekening aset tetap bersangkutan dan mengkredit rekening ekuitas dana investasi, tanpa mengurangi realisasi belanja modal berkenaan (jurnal korolari). Dalam hal ini kapitalisasi ke dalam nilai aset tetap juga termasuk belanja barang/jasa yang terkait langsung dengan kegiatan pengadaan barang modal dimaksud.

Rincian dan penjelasan atas realisasi belanja modal TA 2016 dan 2015, serta kapitalisasinya ke dalam nilai aset tetap dapat disajikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Anggaran dan realisasi belanja modal tanah TA 2016 sebagai berikut:

Belanja Modal Tanah:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Hutun	50.000.000,00	49.929.000,00	99,86	136.200.000,00
c) Kolam Ikan	0,00	0,00	0,00	931.713.500,00
d) Tanah Bangunan Bukan Gedung	5.000.000.000,00	4.551.462.750,00	91,03	5.063.432.000,00
Jumlah	5.050.000.000,00	4.601.391.750,00	91,12	6.131.345.500,00

Realisasi belanja modal Tanah TA 2016 sebesar Rp4.601.391.750,00 atau 91,12% dari anggaran sebesar Rp5.050.000.000,00;

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan/direalisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Peralatan dan Mesin:	TA 2016				TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
a) Alat-Alat Besar Darat	2.799.650.000,00	2.623.253.252,00	93,70	1.210.746.600,00	
b) Alat-alat Bantu	40.000.000,00	21.211.700,00	53,03	18.920.000,00	
c) Alat Angkutan Darat Bermotor	15.892.408.000,00	15.152.711.000,00	95,35	10.036.611.400,00	
d) Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	203.623.000,00	
e) Alat Bengkel Bermesin	10.120.000,00	476.500,00	4,71	0,00	
f) Alat Bengkel Tak Bermesin	48.131.000,00	0,00	0,00	25.226.000,00	
g) Alat Ukur	9.220.000,00	6.674.000,00	72,39	97.915.000,00	
h) Alat Pengolahan	95.569.800,00	92.906.900,00	97,21	3.590.000,00	
i) Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	135.928.680,00	101.569.752,00	74,72	147.359.500,00	
j) Alat Kantor	2.775.697.525,00	2.110.906.711,00	76,05	1.813.439.600,00	
k) Alat Rumah Tangga	6.417.807.586,00	4.753.734.607,00	74,07	6.554.404.818,00	
l) Komputer	10.286.506.686,00	8.567.171.852,00	83,29	3.576.746.221,00	
m) Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	143.738.000,00	136.713.500,00	95,11	1.359.023.150,00	
n) Alat Studio	3.277.206.410,00	2.496.830.776,00	76,19	1.121.988.031,00	
o) Alat Komunikasi	36.996.000,00	28.725.000,00	77,64	100.608.000,00	
p) Peralatan Pemanca	63.300.000,00	49.800.000,00	78,67	14.000.000,00	
q) Alat Kedokteran	45.976.596.242,00	40.249.053.063,00	87,54	33.977.398.373,00	
r) Alat Kesehatan	235.385.000,00	195.700.000,00	83,14	2.532.834.664,00	
s) Unit-Unit Laboratorium	5.168.961.125,00	4.031.039.384,00	77,99	2.914.621.249,00	
t) Alat Peraga/Praktek Sekolah	10.206.273.000,00	10.125.158.100,00	99,21	12.667.654.450,00	
u) Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00	0,00	0,00	49.445.000,00	
v) Radiation Application and Non Destructive Testing Lab	3.222.732.500,00	2.968.749.500,00	92,12	0,00	
w) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10.206.300,00	9.500.000,00	93,03	52.683.900,00	
x) Persenjataan Non Senjata Api	633.040,00	0,00	0,00	573.000,00	
y) Alat Keamanan dan Perlindungan	143.670.000,00	46.070.000,00	32,07	411.114.252,00	
Jumlah	106.996.803.857,00	93.767.955.597,00	87,64	78.890.526.208,00	

Realisasi belanja peralatan dan mesin TA 2016 sebesar Rp93.767.955.597,00 atau 87,64% dari anggaran sebesar Rp106.996.803.857,00

Rincian dan penjelasan atas masing-masing objek belanja modal peralatan dan mesin TA 2016 dan 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

1



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

a) *Belanja Modal Alat Alat Besar Darat*

Belanja modal alat alat Besar Darat, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Besar darat:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Loader	0,00	0,00	0,00	1.210.746.600,00
(2) Excavator	2.000.000.000,00	1.994.027.444,00	99,70	0,00
(3) Compacting Equipment	500.000.000,00	426.256.908,00	85,25	0,00
(4) Alat Pengangkat	205.800.000,00	202.968.900,00	98,62	0,00
(5) Mesin Proses	93.850.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jumlah</i>	2.799.650.000,00	2.623.253.252,00	93,70	1.210.746.600,00

Realisasi belanja modal alat alat Besar Darat bermotor TA 2016 sebesar Rp2.623.253.252,00 atau 93,70% dari anggaran sebesar Rp2.799.650.000,00

b) *Belanja Modal Alat Alat Bantu*

Belanja modal alat bengkel meliputi mesin las/bubut dan generator, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Bantu:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Electric Generating Set	40.000.000,00	21.211.700,00	53,03	18.920.000,00
<i>Jumlah</i>	40.000.000,00	21.211.700,00	53,03	18.920.000,00

Realisasi belanja modal alat Alat Bantu TA 2016 sebesar Rp21.211.700,00 atau 53,03% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00;

c) *Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor*

Belanja modal alat pengolahan pertanian meliputi pengadaan alat pembasmi hama dan pengadaan alat-alat peternakan dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	1.577.585.000,00
(2) Kendaraan Bermotor Penumpang	12.495.450.000,00	11.968.851.000,00	95,79	4.627.884.000,00
(3) Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	276.000.000,00	253.500.000,00	0,00	0,00
(4) Kendaraan Bermotor Khusus	2.568.898.000,00	2.420.058.500,00	91,85	2.342.018.300,00
(5) Kendaraan Bermotor Beroda Dua	319.060.000,00	298.661.500,00	93,61	1.489.124.100,00
(6) Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	233.000.000,00	211.640.000,00	90,83	0,00
Jumlah	15.892.408.000,00	15.152.711.000,00	95,35	10.036.611.400,00

Realisasi belanja modal alat Angkutan Darat Bermotor TA 2016 sebesar Rp15.152.711.000,00 atau 95,35% dari anggaran sebesar Rp15.892.408.000,00.

d) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin

Belanja modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Perkakas Bengkel Service	10.120.000,00	476.500,00	4,71	0,00
Jumlah	10.120.000,00	476.500,00	4,71	0,00

Realisasi belanja modal Alat Bengkel Bermesin TA 2016 sebesar Rp476.500,00 atau 4,71% dari anggaran sebesar Rp 10.120.000,00.

e) Alat Bengkel Tak Bermesin

Belanja modal perlengkapan kantor untuk TA 2016 dan TA 2015, meliputi:

Belanja Modal Bengkel Tak Bermesin:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Perkakas Konstruksi Logam....	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) Perkakas Pengangkat	0,00	0,00	0,00	17.450.000,00
(3) Perkakas Standar (Standart Tool)	0,00	0,00	0,00	2.816.000,00
(4) Perkakas Bengkel Kerja	48.131.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00
Jumlah	48.131.000,00	0,00	0,00	25.226.000,00

Realisasi belanja Alat Bengkel Tak Bermesin TA 2016 Nihil, dari anggarannya sebesar Rp48.131.000,00.

1



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

f) Belanja Modal Alat Ukur

Belanja modal Alat Ukur TA 2016 dan realisasi TA 2015 meliputi pengadaan:

Belanja Ukur:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Alat Kalibrasi	0,00	0,00	-	0,00
(2) Alat Ukur/Pembanding	3.960.000,00	1.524.000,00	38,48	58.975.000,00
(3) Alat Ukur Lainnya	5.260.000,00	5.150.000,00	97,91	38.940.000,00
Jumlah	9.220.000,00	6.674.000,00	72,39	97.915.000,00

Realisasi belanja komputer dan printer TA 2016 sebesar Rp6.674.000,00 atau 72,39% dari anggarannya sebesar Rp9.220.000,00.

g) Belanja Modal Alat Pengolahan

Belanja modal Alat Pengolahan meliputi pengadaan meja, kursi dan lainnya dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Pengolahan :	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	95.569.800,00	92.906.900,00	97,21	3.590.000,00
Jumlah	95.569.800,00	92.906.900,00	97,21	3.590.000,00

Realisasi belanja Alat Pengolahan TA 2016 sebesar Rp92.906.900,00 atau 97,21% dari anggarannya sebesar Rp95.569.800,00.

h) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

Belanja modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Alat Laboratorium	45.434.000,00	15.315.652,00	33,71	147.359.500,00
(2) Alat Penyimpanan	86.475.000,00	86.254.100,00	99,77	0,00
(3) Alat Pemeliharaan Tanaman	4.019.680,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	135.928.680,00	101.569.752,00	74,72	147.359.500,00

Realisasi belanja peralatan rumah tangga TA 2016 sebesar Rp101.569.752,00 atau 74,72% dari anggaran sebesar Rp135.928.680,00

i) Belanja Modal Alat Kantor

Belanja modal Alat Kantor dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Modal Alat Kantor	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	6.855.000,00
(2) Mesin Hitung/Jumlah	3.500.000,00	3.300.000,00	94,29	19.000.000,00
(3) Alat Reproduksi (Penganda)	15.000.000,00	4.950.000,00	33,00	31.309.000,00
(4) Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	176.753.000,00	141.610.200,00	80,12	253.229.500,00
(5) Alat Kantor Lainnya	2.580.444.528,00	1.961.046.511,00	76,00	1.503.046.100,00
Jumlah	2.775.697.528,00	2.110.906.711,00	76,05	1.813.439.600,00

Realisasi belanja modal penghias ruangan rumah tangga TA 2016 sebesar Rp2.110.906.711,00 atau 76,05% dari anggaran sebesar Rp2.775.697.528,00.

j) Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Belanja modal alat Rumah Tangga anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Rumah Tangga:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Meubelair	4.117.271.921,00	2.799.933.707,00	68,00	3.345.176.750,00
(2) Alat Pengukur Waktu	742.500,00	0,00	0,00	0,00
(3) Alat Pembersih	140.630.000,00	132.692.400,00	94,36	204.281.023,00
(4) Alat Pendingin	720.634.550,00	642.332.700,00	89,13	508.533.100,00
(5) Alat Dapur	80.352.625,00	71.650.000,00	89,17	1.047.400.500,00
(6) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.262.409.390,00	1.064.599.100,00	84,33	1.357.961.445,00
(7) Alat Pemadam Kebakaran	95.766.600,00	42.526.700,00	44,41	91.052.000,00
Jumlah	6.417.867.586,00	4.753.734.607,00	74,07	6.554.404.818,00

Realisasi belanja modal alat Rumah Tangga TA 2016 sebesar Rp4.753.734.607,00 atau 74,07% dari anggaran sebesar Rp6.417.867.586,00.

k) Belanja Modal Komputer

Belanja modal Komputer anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

(Signature)



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Modal Alat Komputer:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Komputer Unit Jaringan	1.406.425.000,00	1.332.902.032,00	94,77	224.628.900,00
(2) Personal Komputer	7.882.903.026,00	6.426.469.820,00	81,52	1.988.563.371,00
(3) Peralatan Komputer Mainframe	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00	8.050.000,00
(4) Peralatan Mini Komputer	74.475.000,00	65.851.775,00	88,42	8.640.000,00
(5) Peralatan Personal Komputer	859.623.970,00	690.342.225,00	80,31	1.152.698.050,00
(6) Peralatan Jaringan	60.579.690,00	49.606.000,00	81,89	194.165.900,00
Jumlah	10.286.506.686,00	8.567.171.852,00	83,29	3.576.746.221,00

Realisasi belanja alat Komputer TA 2016 sebesar Rp8.567.171.852,00 atau 83,29% dari anggaran sebesar Rp10.286.506.686,00.

l) *Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat*

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Meja Kerja Pejabat	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	618.619.600,00
(2) Meja Rapat Pejabat	53.388.000,00	47.444.000,00	88,87	164.283.550,00
(3) Kursi Kerja Pejabat	2.625.000,00	2.550.000,00	97,14	290.400.000,00
(4) Kursi Rapat Pejabat	39.150.000,00	38.219.500,00	97,62	108.875.000,00
(5) Kursi Hadap depan Meja Pejabat	20.100.000,00	20.050.000,00	99,75	0,00
(6) Kursi Tamu	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	30.815.000,00
(7) Lemari&Arsip	15.725.000,00	15.700.000,00	99,84	146.030.000,00
Jumlah	143.738.000,00	136.713.500,00	95,11	1.359.023.150,00

Realisasi belanja alat Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat TA 2016 sebesar Rp136.713.500,00 atau 95,11% dari anggaran sebesar Rp 143.738.000,00.

m) *Belanja Modal Alat Studio*

Belanja modal alat Studio dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Studio:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Peralatan Studio Visual	3.159.932.610,00	2.404.127.174,00	76,08	1.045.351.531,00
(2) Peralatan Studio Video dan Film	32.782.800,00	10.072.062,00	30,72	0,00
(3) Peralatan Studio Video dan Film A	9.500.000,00	9.250.000,00	97,37	4.256.000,00
(4) Peralatan Cetak	75.000.000,00	73.381.000,00	97,84	72.380.500,00
Jumlah	3.277.206.410,00	2.496.830.776,00	76,19	1.121.988.031,00

Realisasi belanja alat visual TA 2016 sebesar Rp2.496.830.776,00 atau 76,19% dari anggarannya sebesar Rp3.277.206.410,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

n) Belanja Modal Alat Komunikasi

Belanja modal Alat Komunikasi dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015:

Belanja Modal Alat Komunikasi:	TA 2016			TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
(1) Alat Komunikasi Telepon	29.246.000,00	28.725.000,00	98,22	0,00	
(2) Alat Komunikasi Radio SSB	1.770.000,00	0,00	0,00	39.303.000,00	
(3) Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	-	0,00	
(3) Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	40.430.000,00	
(4) Alat Komunikasi Sosial	5.980.000,00	0,00	0,00	20.875.000,00	
Jumlah	36.996.000,00	28.725.000,00	77,64	100.608.000,00	

Realisasi belanja alat Komunikasi TA 2016 sebesar Rp28.725.000,00 atau 77,64% dari anggarannya sebesar Rp36.996.000,00

o) Belanja Modal Peralatan Pemancar

Belanja modal Peralatan Pemancar dengan anggaran dan realisasi TA 2016 dan realisasi 2015:

Belanja Modal Peralatan Pemancar	TA 2016			TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
(1) Peralatan Pemancar MF/MW	0,00	0,00	-	0,00	
(2) Switcher/Menara Antena	63.300.000,00	49.800.000,00	78,67	14.000.000,00	
Jumlah	63.300.000,00	49.800.000,00	78,67	14.000.000,00	

Realisasi belanja modal Peralatan Pemancar TA 2016 sebesar Rp49.800.000,00 atau 78,67% dari anggarannya sebesar Rp63.300.000,00.

p) Belanja Modal Alat Kedokteran

Belanja modal alat Kedokteran dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Kedokteran :	TA 2016			TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
(1) Alat Kedokteran Umum	16.493.638.097,00	13.479.140.663,00	81,72	15.548.371.619,00	
(2) Alat Kedokteran Gigi	1.433.590.745,00	1.140.375.517,00	79,55	1.098.886.555,00	
(3) Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00	846.900.000,00	
(4) Alat Kedokteran Keluarga Berencana	34.874.000,00	30.000.000,00	86,02	0,00	
(5) Alat Kedokteran T.H.T	183.450.000,00	157.798.000,00	86,02	568.436.000,00	
(6) Alat Farmasi	222.811.300,00	162.524.300,00	72,94	114.713.060,00	
(7) Alat-Alat Kedokteran Bedah	6.225.233.602,00	6.216.982.602,00	99,87	5.913.773.784,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(8) Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.766.437.000,00	2.725.653.057,00	98,53	1.485.947.062,00
(9) Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	4.784.740.000,00	2.848.190.500,00	59,53	40.606.486,00
(10) Mortuary	0,00	0,00	0,00	239.142.000,00
(11) Alat Kesehatan Anak	3.584.525.452,00	3.561.718.645,00	99,36	90.905.200,00
(12) Alat Kedokteran Neurologi (syarat)	0,00	0,00	0,00	12.713.886,00
(13) Alat Kedokteran Radiologi	6.603.526.000,00	6.603.193.800,00	99,99	3.411.688.620,00
(14) Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.465.770.046,00	1.429.308.979,00	97,51	4.605.314.101,00
(15) Alat Kedokteran Jantung	2.178.000.000,00	1.894.167.000,00	86,97	
Jumlah	45.976.596.242,00	40.249.053.063,00	87,54	33.977.398.373,00

Realisasi belanja modal alat Kedokteran TA 2016 sebesar Rp40.249.053.063,00 atau 87,54% dari anggaran sebesar Rp45.976.596.242,00.

q) Belanja Modal Alat Kesehatan

Belanja modal Alat Kesehatan dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Kesehatan:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Alat Kesehatan Perawatan	0,00	0,00	0,00	2.196.302.732,00
(2) Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	235.385.000,00	195.700.000,00	83,14	336.531.932,00
Jumlah	235.385.000,00	195.700.000,00	83,14	2.532.834.664,00

Realisasi belanja modal alat Kesehatan TA 2016 sebesar Rp195.700.000,00 atau 83,14% dari anggaran sebesar Rp235.385.000,00.

r) Belanja Modal Unit-Unit Laboratorium

Belanja modal alat Unit-Unit Laboratorium dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Modal Unit-Unit Laboratorium:	TA 2016			TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
(1) Alat Laboratorium Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	
(2) Alat Laboratorium Kimia Air	270.082.000,00	203.919.955,00	75,50	0,00	
(3) Alat Laboratorium Microbiologi	25.600.000,00	25.400.000,00	99,22	0,00	
(4) Alat Laboratorium Umum	1.540.324.375,00	983.858.686,00	63,87	226.709.999,00	
(5) Alat Laboratorium Kedokteran	186.341.250,00	102.593.981,00	55,06	112.605.000,00	
(6) Alat Laboratorium Kimia	319.148.500,00	209.460.955,00	65,63	268.531.450,00	
(7) Alat Laboratorium Biologi	0,00	0,00	0,00	0,00	
(8) Alat Laboratorium Patologi	290.400.000,00	117.805.000,00	40,57	0,00	
(9) Alat Laboratorium Hematologi	175.492.000,00	133.441.407,00	76,04	112.605.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(10) Laboratorium Hematologi & Urinalisis	0,00	0,00	93,89	1.261.413.800,00
(11) Alat Laboratorium Teknologi Keramik	0,00	0,00	0,00	0,00
(12) Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	
(13) Alat Laboratorium Lainnya	2.361.573.000,00	2.254.559.400,00	95,47	194.596.000,00
(14) alat-alat laboratorium perikanan	0,00	0,00	0,00	5.335.000,00
(15) alat-alat laboratorium bahasa	0,00	0,00	0,00	732.825.000,00
Jumlah.	5.168.961.125,00	4.031.039.384,00	77,99	2.914.621.249,00

Realisasi belanja modal Unit unit Laboratorium TA 2016 sebesar
Rp4.031.039.384,00 atau 77,99% dari anggaran sebesar
Rp5.168.961.125,00.

s) Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah

Belanja modal alat Alat Peraga/Praktek Sekolah dengan anggaran/realisasi
TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Bidang Studi : Bahasa Indonesia	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
(2) Bidang Studi : Matematika	0,00	0,00	0,00	2.487.470.500,00
(3) Bidang Studi : IPA Dasar	3.355.500.000,00	3.317.340.000,00	98,86	1.580.162.700,00
(4) Bidang Studi : IPA Lanjutan	3.919.500.000,00	3.888.690.000,00	99,21	4.805.340.600,00
(5) Bidang Studi : IPS	0,00	0,00	0,00	509.287.800,00
(6) Bidang Studi : Agama Islam	0,00	0,00	0,00	894.713.950,00
(7) Bidang Studi : Kesenian	0,00	0,00	0,00	172.125.000,00
(8) Bidang Studi : Olah Raga	2.921.973.000,00	2.909.253.100,00	99,56	556.488.000,00
(9) Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	10.000.000,00	9.875.000,00	98,75	1.567.065.900,00
Jumlah	10.206.973.000,00	10.125.158.100,00	99,21	12.667.654.450,00

Realisasi belanja modal Alat Peraga/Praktek Sekolah TA 2016 sebesar
Rp10.125.158.100,00 atau 99,21% dari anggaran sebesar
Rp10.206.973.000,00

t) Belanja Modal Radiation Application And Non Destructive Testing Lab

Belanja modal radiation application and non destructive testing lab dengan
anggaran dan realisasi TA 2016 dan realisasi 2015:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Modal/Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) System/Power Supply	3.222.732.500,00	2.968.749.500,00	92,12	0,00
Jumlah	3.222.732.500,00	2.968.749.500,00	92,12	0,00

Realisasi Belanja modal radiation application and non destructive testing lab TA 2016 sebesar Rp2.968.749.500,00 atau 92,12% dari anggarannya sebesar Rp3.222.732.500,00.

u) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Belanja modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup dengan anggaran dan realisasi TA 2016 dan realisasi 2015:

Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	0,00	43.998.900,00
(2) Alat Laboratorium Penunjang	10.206.300,00	9.500.000,00	93,08	8.685.000,00
Jumlah	10.206.300,00	9.500.000,00	93,08	52.683.900,00

Realisasi belanja Alat Laboratorium Lingkungan Hidup TA 2016 sebesar Rp9.500.000,00 atau 93,08% dari anggarannya sebesar Rp10.206.300,00.

v) Belanja Modal Persenjataan Non Senjata Api

Belanja modal Persenjataan Non Senjata Api dengan anggaran dan realisasi TA 2016 dan realisasi 2015:

Belanja Modal Persenjataan Non Senjata Api	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Alat Keamanan	633.040,00	0,00	0,00	573.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	573.000,00

Realisasi dan anggaran sebesar Rp.633.040,00 belanja Persenjataan Non Senjata Api TA 2016, dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp 573.000,00

w) Belanja Modal Alat Keamanan dan Perlindungan

Belanja modal Alat Keamanan dan Perlindungan dengan anggaran dan realisasi TA 2016 dan realisasi 2015:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Alat Keamanan dan Perlindungan	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Alat Bantu Keamanan	2.893.200,00	2.893.200,00	100,00	34.232.252,00
(2) Peralatan PMK	0,00	0,00	0,00	376.882.000,00
Jumlah	2.893.200,00	2.893.200,00	100,00	411.114.252,00

Realisasi belanja Alat Keamanan dan Perlindungan TA 2016 sebesar Rp2.893.200,00 atau 100,00 dari anggarannya sebesar Rp2.893.200,00

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan meliputi pembangunan konstruksi dan/atau pembelian gedung kantor, rumah dinas dan bangunan lainnya, dengan anggaran/realisasi TA 2016 serta realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan:	TA 2016			TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
a) Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.697.488.160,00	36.007.944.646,00	80,56	112.742.729.578,00	
b) Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	174.419.368,00	
c) Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan/Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	522.000.000,00	512.267.000,00	98,14	435.872.325,00	
d) Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	150.000.000,00	149.918.500,00	99,95	514.258.500,00	
e) Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	96.500.000,00	
f) Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.228.066.000,00	1.185.081.000,00	96,50	1.054.745.720,00	
Jumlah	46.597.554.160,00	37.855.211.146,00	81,24	115.018.525.491,00	

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2016 seluruhnya sebesar Rp37.855.211.146,00 atau 81,24% dari anggaran sebesar Rp46.597.554.160,00

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk pembangunan konstruksi dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana jalan, irigasi dan jaringan, dengan anggaran/ realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

(Signature)



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Jalan	48.774.580.000,00	41.032.337.370,00	80,13	51.725.998.766,00
b) Jembatan	7.950.000.000,00	6.399.805.760,00	80,50	6.465.713.239,00
c) Bangunan Air Irigasi	25.352.078.000,00	18.993.825.882,00	74,92	18.906.735.489,00
d) Bangunan Air Rawa	200.000.000,00	197.041.000,00		
e) Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	1.770.000.000,00	1.753.547.448,00	99,07	4.148.307.060,00
f) Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	517.625.000,00	484.658.000,00	93,63	
g) Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	54.279.405,00
h) Bangunan Air Kotor	250.000.000,00	243.441.000,00	97,36	200.382.000,00
i) Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	32.146.000,00
j) Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Instalasi Pengolahan Sampah	1.926.330.000,00	1.781.547.500,00	92,48	175.525.000,00
m) Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	3.568.000,00
n) Jaringan Listrik	1.800.000.000,00	1.754.919.110,00	97,50	4.465.316.205,00
o) Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	39.195.000,00
Jumlah	88.540.613.000,00	72.641.123.070,00	82,04	86.217.166.164,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2016 seluruhnya sebesar Rp72.641.123.070,00 atau 82,04% dari anggaran sebesar Rp88.540.613.000,00;

a) Belanja Modal Jalan

Belanja Modal:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Jalan Negara/Nasional	735.000.000,00	506.994.600,00	0,00	0,00
(2) Jalan Kabupaten/Kota	47.949.580.000,00	40.435.433.270,00	84,33	51.479.863.766,00
(3) Jalan Desa	90.000.000,00	89.909.500,00	99,90	246.135.000,00
Jumlah	48.774.580.000,00	41.032.337.370,00	84,13	51.725.998.766,00

Realisasi belanja modal jalan TA 2016 sebesar Rp41.032.337.370,00 atau 84,13% dari anggarannya sebesar Rp48.774.580.000,00.

b) Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Konstruksi Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) Jembatan Kabupaten/Kota	7.950.000.000,00	6.399.805.760,00	80,50	6.465.713.239,00
(3) Jembatan Desa	0,00	0,00	0,00	89.850.000,00
Jumlah	7.950.000.000,00	6.399.805.760,00	80,50	6.465.713.239,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Realisasi belanja modal jembatan TA 2016 sebesar Rp6.399.805.760,00 atau 80,50% dari anggarannya sebesar Rp7.950.000.000,00.

c) Belanja Modal Irigasi

Belanja modal irigasi meliputi konstruksi dan perlengkapan bendungan, jaringan irigasi, jaringan air bersih/minum, jaringan limbah, drainase dan kolam, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Belanja Modal Irigasi:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Waduk Irigasi	2.905.000.000,00	484.456.950,00	16,68	1.207.866.240,00
(2) Bangunan Pembawa Irigasi	20.547.078.000,00	17.145.261.932,00	83,44	14.867.396.449,00
(3) Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00	116.244.000,00
(4) Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	822.342.000,00
(5) Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.892.886.800,00
(6) Bangunan Pengambil Irigasi	1.900.000.000,00	1.364.107.000,00	71,80	0,00
Jumlah	25.352.078.000,00	18.993.825.882,00	74,92	18.906.735.489,00

Realisasi belanja modal irigasi TA 2016 sebesar Rp18.993.825.882,00 atau 74,92% dari anggarannya sebesar Rp25.352.078.000,00.

d) Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa

Belanja Modal:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Pengembang Rawa dan Poder	200.000.000,00	197.041.000,00	98,52	0,00
Jumlah	200.000.000,00	197.041.000,00	98,52	0,00

Realisasi belanja modal Pengambilan Air Rawa TA 2016 sebesar Rp197.041.000,00 atau 98,52% dari anggarannya sebesar Rp200.000.000,00.

e) Belanja Modal Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA

Belanja Modal:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Bangunan Pembuang Pengaman	50.000.000,00	46.824.800,00	93,65	47.081.000,00
(2) Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	165.773.000,00
(3) Pengaman Pengamanan Sungai	1.720.000.000,00	1.706.722.648,00	99,23	3.935.453.060,00
Jumlah	1.770.000.000,00	1.753.547.448,00	99,07	4.148.307.060,00

Handwritten signature/initials



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Realisasi belanja modal Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA TA 2016 sebesar Rp1.753.547.448,00 atau 99,07% dari anggarannya sebesar Rp1.770.000.000,00.

f) Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

Belanja Modal:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Pengembalian pengembangan sumber air	517.625.000,00	484.658.000,00	93,63	54.279.405,00
Jumlah	517.625.000,00	484.658.000,00	93,63	54.279.405,00

Realisasi belanja modal Pengadaan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah TA 2016 sebesar Rp484.658.000,00 atau 93,63% dari anggarannya sebesar Rp517.625.000,00..

g) Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

Belanja Modal:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Pengambilan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	54.279.405,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	54.279.405,00

Realisasi belanja modal Pengambilan Air Bersih/Baku TA 2016 nihil..

h) Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor

Belanja Modal:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Bangunan Pembawa Air Kotor	200.000.000,00	195.820.000,00	97,91	146.835.000,00
(2) Bangunan Pembuangan Air Kotor	50.000.000,00	47.621.000,00	95,24	53.547.000,00
Jumlah	250.000.000,00	243.441.000,00	97,38	200.382.000,00

Realisasi belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor TA 2016 sebesar Rp243.441.000,00 atau 97,38% dari anggarannya sebesar Rp250.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

i) *Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air*

Belanja Modal:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Bangunan Air Tawar	0	00	0	32.146.000,00
Jumlah	0	00	0	32.146.000,00

Realisasi belanja modal Pengadaan Bangunan Air TA 2016Nihil Dengan
Realisasi Ta 2015 Sebesar Rp 32.146.000,00

Realisasi belanja modal *Pengadaan Instalasi Air Kotor* TA 2016Nihil

j) *Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah*

Belanja Modal:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Instalasi Pengolahan Sampah Organik	1.701.330.000,00	1.678.422.500,00	98,65	78.650.000,00
(2) Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	225.000.000,00	103.125.000,00	45,83	96.875.000,00
Jumlah	1.926.330.000,00	1.781.547.500,00	92,48	175.525.000,00

Realisasi belanja *Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah* TA 2016 sebesar
Rp1.781.547.500,00 atau 92,48% dari anggarannya sebesar
Rp1.926.330.000,00.

k) *Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum*

Belanja Modal:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00	0,00	0	3.568.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0	3.568.000,00

Realisasi belanja *Pengadaan Jaringan Air Minum* TA 2016, Dengan
realisasi Ta 2015 sebesar Rp 3.568.000,00

l) *Belanja Modal Jaringan Listrik*

Belanja Modal:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0,00	291.000.000,00
(2) Jaringan Distribusi	1.800.000.000,00	1.754.919.110,00	97,50	4.174.316.205,00
Jumlah	1.800.000.000,00	1.754.919.110,00	97,50	4.465.316.205,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Realisasi belanja *Pengadaan Jaringan Listrik* TA 2016 sebesar
Rp1.754.919.110,00 atau 97,50% dari anggarannya sebesar
Rp1.800.000.000,00

m) Belanja Modal Jaringan Telepon

Belanja Modal:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Jaringan Transmisi	0	00	0	39.195.000,00
<i>Jumlah</i>	0	00	0	39.195.000,00

Realisasi belanja *Pengadaan Jaringan Telepon* TA 2016, Dengan realisasi Ta
2015 sebesar Rp 39.195.000,00

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya adalah belanja yang menimbulkan aset tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Pengadaan Buku	4.208.748.000,00	3.961.214.850,00	94,12	1.681.930.600,00
b) Pengadaan Terbitan	105.214.000,00	100.465.220,00	95,49	0
c) Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	3.017.407.000,00	2.844.882.550,00	94,28	289.358.300,00
d) Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	666.758.000,00	469.475.000,00	70,41	195.377.000,00
e) Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	591.920.000,00	589.219.000,00	99,54	3.905.000,00
f) Pengadaan Hewan	0,00	0,00	0,00	125.300.000,00
g) Pengadaan Tanaman	85.125.000,00	80.770.000,00	94,88	7.300.553.000,00
h) Pengadaan Aset Tetap Renovasi	4.274.100.000,00	3.847.529.000,00	90,03	10.218.323.600,00
i) Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jumlah</i>	12.949.272.000,00	11.893.555.720,00	91,84	19.814.747.500,00

Realisasi belanja aset tetap lainnya TA 2016 sebesar Rp11.893.555.720,00 atau 91,84% dari anggarannya sebesar Rp12.949.272.000,00; yang dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Bukumeliputi Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum, Pengadaan Buku Keamanan, dll, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Modal Buku dan Pustaka:	TA 2016				TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
(1) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	649.862.000,00	528.157.800,00	81,27	1.551.757.050,00	
(2) Pengadaan Buku Keagamaan	276.416.000,00	269.085.200,00	97,35	17.000.000,00	
(3) Pengadaan Buku Ilmu Sosial	290.229.900,00	266.398.650,00	91,79	29.601.750,00	
(4) Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	894.121.600,00	872.711.500,00	97,61	16.000.000,00	
(5) Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	759.886.100,00	721.178.300,00	94,91	16.000.000,00	
(6) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	237.265.600,00	229.526.100,00	96,74	19.571.800,00	
(7) Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	446.440.400,00	432.757.800,00	96,94	16.000.000,00	
(8) Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	654.526.400,00	641.399.500,00	97,99	16.000.000,00	
Jumlah	4.208.748.000,00	3.961.214.850,00	94,12	1.681.930.600,00	

Realisasi belanja modal buku pustakan TA 2016 sebesar Rp3.961.214.850,00 atau 94,12% dari anggaran sebesar Rp4.208.748.000,00.

b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Belanja Modal Pengadaan Terbitan	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Pengadaan Buku Laporan	105.214.100,00	100.465.220,00	95,49	0,00
Jumlah	105.214.100,00	100.465.220,00	95,49	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan TA 2016 sebesar Rp100.465.220,00 atau 95,49% dari anggarannya sebesar Rp105.214.100,00.

c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan meliputi Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip) dan Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files), dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Handwritten signature



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Modal Buku dan Pustaka:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	5.775.000,00	5.713.400,00	98,93	17.708.300,00
(2) Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	3.011.632.000,00	2.839.169.150,00	94,27	271.650.000,00
Jumlah	3.017.407.000,00	2.844.882.550,00	94,28	289.358.300,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan TA 2016 sebesar Rp2.844.882.550,00 atau 94,28% dari anggaran sebesar Rp3.017.407.000,00.

d) Belanja Modal Barang Bercorak Seni dan Budaya

Belanja modal barang bercorak seni dan budaya meliputi photo, lukisan, patung, dan barang lainnya yang memiliki nilai-nilai seni dan budaya, yang diperlukan dalam rangka memelihara cagar budaya dan/atau dalam rangka peringatan tertentu, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Belanja Modal Barang Seni dan Budaya:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	10.000.000,00	8.775.000,00	87,75	193.092.000,00
(2) Barang Bercorak Kebudayaan Alt Kesenian	600.000.000,00	422.100.000,00	70,35	0,00
(3) Barang Bercorak Kebudayaan Brg Kerajinan	56.758.000,00	38.600.000,00	68,01	0,00
(4) Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	0,00	0,00	100,00	2.285.000,00
Jumlah	666.758.000,00	469.475.000,00	70,41	195.377.000,00

Realisasi belanja barang bercorak seni dan budaya TA 2016 sebesar Rp469.475.000,00 atau 70,41% dari anggarannya sebesar Rp666.758.000,00; naik sebesar Rp274.080.000,00 (140,28%) dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp195.377.000,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	591.920.000,00	589.219.100,00	99,54	3.905.000,00
Jumlah	591.920.000,00	589.219.100,00	99,54	3.905.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya TA 2016 sebesar Rp589.219.100,00 atau 99,54% dari anggarannya sebesar Rp591.920.000,00.

f) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Pengadaan Binatang Ikan	0,00	0,00	0,00	125.300.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	125.300.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan TA 2016,Dengan realisasi TA 2015 Sebesar RP 125.300.000,00

g) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman TA 2016 meliputi belanja modal Ternak serta tanaman, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Pengadaan Tanaman Kebutanan	80.000.000,00	75.695.000,00	94,62	1.840.131.000,00
(2) Pengadaan Tanaman Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Pengadaan Tanaman Hias	5.125.000,00	5.075.000,00	99,02	5.460.422.000,00
Jumlah	85.125.000,00	80.770.000,00	94,88	7.300.553.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan TanamanTA 2016sebesar Rp80.770.000,00 (94,88%) dari anggarannya sebesar Rp85.125.000,00.

h



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

h) Belanja Modal Aset Tetap Renovasi

Belanja modal aset tetap renovasi TA 2016 meliputi pengadaan aset tetap renovasi, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Renovasi:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Aset Tetap Renovasi	4.274.100.000,00	3.847.529.000,00	90,02	10.218.323.600,00
<i>Jumlah</i>	4.274.100.000,00	3.847.529.000,00	90,02	10.218.323.600,00

Realisasi belanja modal aset tetap renovasi TA 2016 sebesar Rp3.847.529.000,00 (90,02%) dari anggarannya sebesar Rp4.274.100.000,00; turun sebesar Rp6.370.794.600,00 (63,35%) dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp10.218.323.600,00.

c. Belanja Tak Terduga

Realisasi belanja tak terduga TA 2016 sebesar Rp260.054.200,00 atau 10,45% dari anggarannya sebesar Rp2.487.734.200,00, naik sebesar Rp260.054.200,00 dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp0,00.

3. Transfer

Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 sebagai berikut:

Transfer:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan	9.597.406.700,00	5.826.321.071,00	60,71	613.004.277,00
b) Transfer Bantuan Keuangan	497.446.234.256,00	491.908.747.434,00	98,89	269.659.963.950,00
<i>Jumlah</i>	507.043.640.956,00	497.735.068.505,00	98,16	270.272.968.227,00

Realisasi Transfer TA 2016 sebesar Rp497.735.068.505,00 atau 98,16% dari anggarannya sebesar Rp507.043.640.956,00, naik sebesar Rp227.462.100.278,00 atau 84,16% dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp270.272.968.227 dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

a) *Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya*

Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2016 meliputi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Pemerintah Desa, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Transfer Bagi Hasil Pendapatan:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.716.000.000,00	4.230.712.899,00	62,99	0,00
(2) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Pemerintah Desa	2.881.406.700,00	1.595.608.172,00	55,38	613.004.277,00
Jumlah	9.597.406.700,00	5.826.321.071,00	60,71	613.004.277,00
Realisasi Transfer Bagi Hasil PendapatanTA 2016 sebesar Rp5.826.321.071,00(60,71%) dari anggarannya sebesar Rp9.597.406.700,00 naik sebesar Rp5.213.316.794,00 atau 850,45% dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp613.004.277,00.				

b) *Transfer Bantuan Keuangan*

Transfer Bantuan Keuangan TA 2016 meliputi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Pemerintah Desa, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015, sebagai berikut:

Transfer Bantuan Keuangan:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	496.358.301.500,00	490.948.721.084,00	98,91	268.970.035.600,00
(2) Transfer Bantuan Lainnya	1.087.932.756,00	960.026.350,00	88,24	689.928.350,00
Jumlah	497.446.234.256,00	491.908.747.434,00	98,89	269.659.963.950,00
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2016sebesar Rp491.908.747.434,00 (98,89%) dari anggarannya sebesar Rp497.446.234.256,00 naik sebesar Rp222.248.783.484,00 atau 82,42% dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp269.659.963.950,00.				

4. **Surplus (Defisit) Anggaran**

Surplus (defisit) anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, dimana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan diatas belanja dan defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan dibawah belanja. Pendapatan dan belanja daerah adalah seluruh pendapatan dan belanja yang telah diungkapkan pada sub bagian sebelumnya, yang dapat direkapitulasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Surplus (Defisit) Anggaran:	TA 2016			TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
a. Pendapatan Daerah	2.174.550.555.820,00	2.258.604.630.605,19	103,87	2.177.820.724.857,45	
b. Belanja dan Transfer Daerah	2.567.449.419.713,00	2.282.330.771.499,03	89,55	2.076.655.991.047,45	
Surplus (Defisit) Anggaran : a – b	(392.898.863.893,00)	(23.726.140.893,84)	6,04%	101.164.733.810,00	

Selisih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah TA 2016 menunjukkan surplus sebesar Rp23.726.140.893,84 atau 6,04% dari anggaran defisit sebesar Rp392.898.863.893,00;

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih (surplus) antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana penerimaan pembiayaan adalah penerimaan daerah yang harus dibayar kembali di kemudian hari dan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali di kemudian hari. Pembiayaan bersih (netto) adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran berkenaan.

Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah TA 2016 dan realisasi TA 2015 adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Daerah:	TA 2016			TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
a. Penerimaan Pembiayaan	406.198.863.893,00	406.262.095.580,00	100,02	311.125.135.083,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	13.300.000.000,00	8.304.000.000,00	62,44	4.961.000.000,00	
Pembiayaan Neto : a – b	392.898.863.893,00	397.958.095.580,00	101,29	306.164.135.083,00	

Selisih antara Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Netto) TA 2016 menunjukkan nilai yang positif (surplus) sebesar Rp397.958.095.580,00 atau 101,27% dari anggaran sebesar Rp392.898.863.893,00 Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, Pencairan Dana Cadangan, dan penerimaan piutang daerah, dengan anggaran/realisasi TA 2016 dan realisasi TA 2015 dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Penerimaan Pembiayaan	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	404.879.640.718,00	406.198.863.893,00	100,33	286.555.911.908,00
2) Pencairan Dana Cadangan	942.938.777,00	0	0	22.442.938.777,00
3) Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	376.284.398,00	0	0	2.126.284.398,00
4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	63.231.687,00	00	0
Jumlah	406.198.863.893,00	406.198.863.893,00	100,00	311.125.135.083,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2016 sebesar Rp406.198.863.893,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp406.198.863.893,00 dan naik sebesar Rp9.573.728.810,00 atau 30,56% dari realisasi TA 2015 sebesar Rp311.125.135.083,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan TA 2016 dan 2015 meliputi pengeluaran untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyerahan Modal Pemerintah Daerah (PMPD), Pembayaran Pokok Utang dan Pembayaran Kewajiban Daerah, dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Pengeluaran Pembiayaan Daerah:	TA 2016			TA 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	60,00	0,00
2) Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	8.300.000.000,00	5.304.000.000,00	63,90	4.961.000.000,00
3) Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
4) Pembayaran Kewajiban Daerah	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah	13.300.000.000,00	8.304.000.000,00	62,44	4.961.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2016 sebesar Rp8.304.000.000,00 atau 62,44% dari anggarannya sebesar Rp 13.300.000.000,00 naik sebesar Rp3.343.000.000,00 (67,39%) dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp4.961.000.000,00 yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Kabupaten Klaten menganggarkan Penyerahan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp8.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.304.000.000,00 (63,90%). Anggaran dan realisasi tambahan PMPD TA 2016 serta realisasi TA 2016 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Penambahan PMPD pada:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) PD Air Minum	5.000.000.000,00	3.048.000.000,00	60,96	-
b) PD Aneka Usaha	1.000.000.000,00	-	0,00	3.000.000.000,00
c) PT Bank Jateng	2.300.000.000,00	2.256.000.000,00	98,09	1.961.000.000,00
Jumlah	8.300.000.000,00	5.304.000.000,00	63,90	4.961.000.000,00

Pembayaran Kewajiban Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 tidak dianggarkan.

6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembiayaan netto dalam menutup surplus (defisit) anggaran. Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian awal, hasil akhir perhitungan APBD Kabupaten Klaten TA 2016 dan 2015 menunjukkan SILPA, yang dapat diringkas sebagai berikut:

Perhitungan APBD:	TA 2016		TA 2015	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Surplus (Defisit) Anggaran..	(392.898.863.893,00)	23.726.140.893,84	6,02	101.034.728.810,00
b. Pembiayaan Neto	392.898.863.893,00	397.958.095.580,00	101,27	306.164.135.083,00
SILPA (SIKPA) : a + b	-	374.231.954.686,16	-	406.198.863.893,00

Realisasi APBD TA 2016 menunjukkan SILPA sebesar Rp374.231.954.686,16 dari anggaran nihil, naik sebesar Rp 31.966.909.206,84 (92,13%) dibanding realisasi TA 2015 sebesar Rp406.198.863.893,00

SILPA merupakan hak Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penambah ekuitas dana lancar daerah, yang divujutkan dalam bentuk sisa uang daerah (Kas dan Setara Kas) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Bendahara Pengeluaran, seperti terinci berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Rincian SILPA :	2016	2015
a. Sisa Kas : 1.....	17.517.669.627,16	15.315.669.299,00
1) Kas di Bendahara JKN	12.815.029.132,00	-
2) Kas di BLUD	4.681.693.714,16	-
3) Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD.....	18.419.366,00	15.315.669.299,00
b. Sisa Kas di Rekening Giro Bank :.....	211.729.586.874,00	205.883.194.594,00
1) BPD Jateng A/C 1-009-00000-3 : RKUD	211.729.586.874,00	205.883.194.594,00
c. Kas di Deposito Bank Umum	145.000.000.000,00	185.000.000.000,00
1) Bank Jateng	145.000.000.000,00	145.000.000.000,00
2) Bank BRI	0,00	20.000.000.000,00
3) Bank BNI 46	0,00	20.000.000.000,00
4) Bank Mandiri	0,00	0,00
JUMLAH : a + b + c	374.231.954.686,16	406.198.863.893,00

SILPA baik tunai maupun rekening giro bank per 31 Desember 2016 sebesar Rp374.231.954.686,16 turun sebesar Rp31.966.909.206,84 (92,13%) dari saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp406.198.863.893,00. Jumlah yang menunjukkan kekayaan daerah tersebut disajikan dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp374.231.954.686,16 atau lebih besar Rp15.301.815,00. Selisih lebih uang daerah tersebut merupakan Utang PFK Lainnya Tahun 2015 yang masih ada di tahun 2016 yang terdiri dari WISMP sebesar Rp32.500,00, PNPM sebesar Rp12.741.900,00 dan utang PFK 2016 puskesmas ngawen sebesar Rp2.527.415,00.

(Signature)



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

B. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Tidak terdapat perbandingan LPSAL per 31 Desember 2016 dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

B.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp 406.198.863.893,00

B.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
Penggunaan SAL merupakan SILPA Tahun 2015 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembayaan Tahun 2016, sebesar Rp 406.198.863.893,00

B.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 374.231.954.686,16 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran	Rp(23.726.140.893.84,00)
- Pembiayaan Netto	Rp397.958.095.580,00
SILPA/SIKPA Tahun berjalan	Rp374.231.954.686,16

B.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

C. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Dalam penjelasan Akun-Akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.483.587.981.231,42 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Rincian Aset

Aset Lancar :	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	(%)
1) Aset Lancar	410.382.878.166,61	437.766.778.875,00	(27.383.900.708,39)	(6,26)
2) Investasi jangka Panjang	123.767.913.031,00	115.598.635.885,14	8.169.277.145,86	7,07
3) Aset Tetap	2.836.455.459.907,81	2.281.640.020.124,42	554.815.439.783,39	24,32
4) Dana Cadangan	3.019.210.084,00	-	3.019.210.084,00	100,00
4) Aset lainnya	109.962.520.042,00	77.314.919.332,80	32.647.600.709,20	42,23
Jumlah	3.483.587.981.231,42	2.912.320.354.217,36	571.267.627.014,06	19,62

Berdasarkan data di atas terdapat kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2016 dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2015 sebesar Rp571.267.627.14,06 (19,62%). Penjelasan lebih rinci atas perubahan tersebut disampaikan sebagai berikut:

1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas. dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan. dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 5.4.1.1 Rincian Aset Lancar

Aset Lancar :	31-Des-16	31-Des-15	Kerugian/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
1) Kas di Kasita	211.729.586.874,00	205.895.502.244,00	5.833.084.630,00	2,83
2) Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
3) Kas di Bendahara Pengeluaran	12.835.975.913,00	15.316.005.262,00	(2.480.030.349,00)	(16,19)
4) Kas di BLUD	4.881.693.714,16	-	-	-
5) Kas lainnya	2.814.072.349,00	1.235.383.053,00	1.578.689.296,00	127,79
6) Setara Kas	145.000.000.000,00	185.000.000.000,00	(40.000.000.000,00)	(21,62)
7) Investasi jangka Pendek	-	-	-	-
8) Piutang Pajak	6.900.899.962,00	10.629.355.546,00	(3.728.455.584,00)	(35,08)
9) Piutang Retribusi	27.941.644,00	78.782.261,80	(50.840.617,80)	(64,53)
10) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.981.449.605,00	11.089.160,00	3.970.360.445,00	-
11) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	574.954.679,00	799.984.339,00	(225.029.660,00)	(28,13)
12) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-
13) Beban Dibayar di Muka	321.124.429,00	318.774.872,00	2.349.557,00	0,74
14) Persediaan	21.515.178.997,45	18.480.900.137,20	3.034.278.860,25	16,42
Jumlah	410.382.878.166,61	437.765.778.875,00	(32.065.594.422,55)	(7,32)

1.1.1 Kas di Kas Daerah

Jumlah Kas Daerah per 31 Desember 2016 yang terdapat dalam rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 100900003 sebesar Rp211.729.586.874,00 atau naik sebesar Rp5.833.084.63,00 (2,83%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp205.896.502.244,00.

Kas Daerah tersebut terdiri dari hak Pemerintah Kabupaten Klaten yang berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) serta hak pihak lain berupa Utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga). berikut rinciannya :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Sumber dana Kas Daerah:	31-Des-16		31-Des-15	
	Rp		Rp	
(1) Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SilPA)	211.716.812.474,00		205.883.194.594,00	
(2) Peningtungan Filhak Ketiga (PFK)	12.774.400,00		13.307.650,00	
Jumlah	211.729.586.874,00		205.896.502.244,00	

1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan.

1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Uang daerah yang masih dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.835.975.913,00 atau naik sebesar Rp2.480.030.349,00 (16,19%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp15.316.006.262,00. Saldo Kas Daerah di Bendahara Pengeluaran tersebut terdiri atas sisa Uang Persediaan (UP) dan sisa Tambah Uang (TU). kelebihan pembayaran gaji pegawai melalui mekanisme LS. serta Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 34 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD/Sub-SKPD	LS Gaji (Rp)	Sisa UYHD/JKN (Rp)	PFK (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Puskesmas	12.817.556.547,00	2.527.415,00		12.820.083.962,00
2	DPU ESDM	432.000,00			432.000,00
3	KPPKB	52.055,00			52.055,00
4	Disperindagkop UMKM	13.754.811,00			13.754.811,00
5	Kesbangpolinnas	180.000,00			180.000,00
6	Inspektorat	500,00			500,00
7	Badan Kepegawaian Daerah	4.000.000,00			4.000.000,00
JUMLAH		-	12.835.975.913,00	2.527.415,00	12.838.503.328,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Per tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp4.681.693.714,16. untuk pertama kali Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki unit BLUD. Adapun rincian dari saldo kas di BLUD sebagai berikut:

No	Bank	Nomor Rekening	Saldo per 31 Desember 2016
1	BNI	500020303	20.765.275,00
2	BPD	1-009-00670-9	323.541.823,00
3	Bank Mandiri	1380025858585	251.752.414,16
4	Deposito Bank Jateng		4.000.000.000,00
5	Kas Tunai di Kasir		12.307.400,00
6	Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran		73.326.802,00
		JUMLAH	4.681.693.714,16

1.1.5 Kas Lainnya

Jumlah Kas Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.814.072.349,00 atau naik sebesar Rp 1.578.689.296,00 (128%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.235.383.053,00. Saldo kas tersebut berupa sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. Namun demikian terdapat keterbatasan data yang harus disajikan karena pengeluaran belanja BOS belum termasuk pengeluaran belanja BOS SMA. Rincian Saldo Dana BOS 2016 sebagai berikut:

SEKOLAH	SALDO AWAL	PENYESUAIAN	SALDO AWAL SETELAH PENYESUAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR 2016
SD	312.018.091,00	219.249.886,00	531.267.977,00	69.456.800.000,00	69.481.965.817,00	506.096.160,00
SMP	825.691.540,00	279.615.476,00	1.105.307.016,00	40.692.500.000,00	41.369.420.600,00	428.386.416,00
SMA	33.922.350,00	74.822.135,00	108.744.485,00	16.394.212.752,00	15.505.558.200,00	997.399.037,00
SMK	63.751.072,00	894.845.490,00	958.596.562,00	17.027.377.626,00	17.103.785.452,00	882.188.736,00
Jumlah	1.235.383.053,00	1.468.532.987,00	2.703.916.040,00	143.570.890.378,00	143.460.734.069,00	2.814.072.349,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

1.1.6 Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah rekening deposito milik pemerintah daerah yang berjangka waktu sampai dengan 3 bulan dan dapat dicairkan sewaktu-waktu (*deposit on call*), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank	Penambahan	
	Saldo 31-12-2015 (Rp)	Saldo 31-12-2016 (Rp)
1 Bank Jateng	145.000.000.000,00	-
2 BNI 46	20.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)
3 BRI	20.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)
Jumlah	185.000.000.000,00	(40.000.000.000,00)
		145.000.000.000,00

1.1.7 Investasi Jangka Pendek

Tidak terdapat saldo Investasi Jangka Pendek Per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

1.1.8 Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp30.748.784.734,00 dan Rp27.563.667.758,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp3.185.116.976 (11,56%). Kenaikan tersebut dijelaskan dengan rincian berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Jenis Piutang	Saldo per 31/12/2015	Penambahan SKPD Tahun 2016		Pelunasan Tahun 2016		Saldo per 31/12/2016
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1 Pajak Hotel	400.000,00	950.795.088,00	854.458.795,00	96.736.293,00		
2 Pajak Restoran	12.450.800,00	3.007.675.968,00	3.008.136.618,00	11.990.150,00		
3 Pajak Hiburan	4.732.625,00	605.418.605,00	598.945.211,00	11.206.019,00		
4 Pajak Reklame	21.036.714,00	3.346.681.539,00	3.322.015.902,00	45.702.351,00		
5 PPU	-	31.511.746.370,00	31.511.746.370,00	-		
6 Pajak Mineral	33.750,00	3.704.434.000,00	3.703.442.750,00	1.025.000,00		
7 Pajak Parkir	5.944.000,00	885.723.050,00	885.120.050,00	6.547.000,00		
8 Pajak Air Tanah	85.871.700,00	1.403.955.800,00	1.350.714.200,00	139.113.300,00		
9 PBB-P2	27.433.198.169,00	23.831.983.800,00	20.828.717.348,00	30.436.464.621,00		
10 BPHTB	-	9.511.450.485,00	9.511.450.485,00	-		
JUMLAH	27.563.667.758,00	86.304.892.299,00	97.480.732.250,00	30.748.784.734,00		

Kenaikan piutang sejumlah Rp3.185.116.976,00 per 31 Desember 2016 dibanding saldo piutang per 31 Desember 2015 sebagian besar disebabkan kenaikan jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp3.003.266.452,00 atau sebesar 94,29% dibandingkan total kenaikan total piutang tahun 2016. Kenaikan piutang PBB ini karena ada tambahan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebesar Rp23.831.983.800,00. Rincian piutang pajak PBB-P2 dijelaskan sebagai berikut :

Terbit SKPD	Saldo Awal Per 01/01/2016	Penerbitan SKPD 2016	Total Piutang 2016	Pembayaran / Pelunasan 2016		Saldo Akhir 31/12/2016	Keterangan
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (4)-(5)	
2009	1.309.091.667,00		1.309.091.667,00		34.101.266,00	1.274.990.401,00	BAST RPP Pratama
2010	3.398.139.145,00		3.398.139.145,00		98.459.361,00	3.299.679.784,00	BAST RPP Pratama
2011	2.932.435.362,00		2.932.435.362,00		92.618.907,00	2.839.816.455,00	BAST RPP Pratama
2012	3.878.265.910,00		3.878.265.910,00		162.964.752,00	3.715.301.158,00	BAST RPP Pratama
2013	4.567.996.864,00		4.567.996.864,00		181.713.880,00	4.386.282.984,00	
2014	5.446.821.530,00		5.446.821.530,00		340.810.546,00	5.106.010.984,00	
2015	5.900.447.691,00		5.900.447.691,00		813.012.535,00	5.087.435.156,00	
2016		23.831.983.800,00	23.831.983.800,00		19.105.036.101,00	4.726.947.699,00	
Total	27.433.198.169,00	23.831.983.800,00	51.265.181.969,00		20.828.717.348,00	30.436.464.621,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Jumlah Piutang Pajak berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp6.900.899.962,00 dan Rp10.629.356.546,00 dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan :	31-Des-16	31-Des-15
	Rp	Rp
Piutang Pajak	30.748.784.734,00	27.563.667.758,00
Penyisihan Piutang Pajak	(23.847.884.772,00)	(16.934.311.212,00)
Net Realizable Value (NRV)	6.900.899.962,00	10.629.356.546,00

Perhitungan *Penyisihan* Piutang Pajak tahun 2016 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

NO.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang Pajak (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG				Total (Rp)
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0-1 tahun 0,5%	> 1 - 2 tahun 10%	> 2 - 5 tahun 50%	> 5 tahun 100%	
1	2	3	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
1	Pajak Hotel	96.736.293,00	483.681,47	-	-	-	483.681,00
2	Pajak Restoran	11.989.550,00	59.947,75	-	-	-	59.946,00
3	Pajak Hiburan	11.206.019,00	56.030,10	-	-	-	56.030,00
4	Pajak Reklame	45.702.351,00	228.261,76	5.000,00	-	-	233.262,00
6	PPU	-	-	-	-	-	-
7	Pajak Mineral	1.025.000,00	5.125,00	-	-	-	5.125,00
8	pajak Parkir	6.547.000,00	29.735,00	-	300.000,00	-	329.735,00
10	Pajak Air tanah	139.113.300,00	695.566,50	-	-	-	695.567,00
			PENYISIHAN PIUTANG				Total (Rp)
NO.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang Pajak (Rp)	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0-1 tahun 0,30	> 1 - 2 tahun 0,50	> 2 - 5 tahun 0,80	> 5 tahun 1,00	
11	PBB	30.436.464.621,00	-	2.363.473.849,50	16.907.877.389,50	4.574.670.185,00	23.846.021.424,00
TOTAL		30.748.784.134,00	1.558.346,00	2.363.473.850,00	16.908.177.390,00	4.574.670.186,00	23.847.884.772,00

1.1.9 Piutang Retribusi

Jumlah Piutang Retribusi sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp209.345.931,00 dan Rp224.443.114,00. Terdapat penurunan sebesar Rp15.097.183,00 (6,73%).

Kenaikan tersebut dijelaskan dengan rincian berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Piutang Retribusi	31-Dec-16	31-Dec-15	Kemakanan(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	1.921.903,00	(1.921.903,00)	-
(2) Retribusi Pelayanan Parkir	162.198.000,00	162.198.000,00	-	-
(3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	2.700.000,00	(2.700.000,00)	-
(4) Retribusi Pasar Grosir	17.499.890,00	13.855.890,00	3.644.000,00	26,30
(5) Retribusi terminal	-	5.184.000,00	(5.184.000,00)	-
(6) Retribusi IMB	29.448.041,00	38.583.321,00	(9.135.280,00)	(23,68)
(7) Retribusi Izin Gangguan	200.000,00	-	200.000,00	-
Jumlah	209.345.931,00	224.443.114,00	(15.097.183,00)	(6,73)

Jumlah Piutang Retribusi berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan
(Net Realizable Value) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
sebesar Rp27.941.644,00 dan Rp78.782.261,80 lebih rinci sebagai berikut:

Keterangan :	31-Dec-16	31-Dec-15
	Rp	Rp
Piutang Retribusi	209.345.931,00	224.443.114,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(181.404.287,00)	(145.660.852,20)
Net Realizable Value (NRV)	27.941.644,00	78.782.261,80

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2016 menggunakan
perhitungan sebagai berikut :

PENYISIHAN PIUTANG *									
NO.	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)	Lancar	Kurang lancar	Ditragikan	Macet	Total		
			0-6 bulan	> 6 bln - 1 thn	> 1 - 3 tahun	> 3 tahun	(Rp)		
			0,5%	10%	50%	100%			
1	2	3	5	6	7	8	9 = 5+7+8+9		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-		
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	162.198.000,00	-	-	-	162.198.000,00	162.198.000,00		
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-		
4	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau peternakan	17.499.890,00	-	617.824,00	3.872.000,00	3.577.650,00	8.067.474,00		
5	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	29.448.041,00	-	896.552,00	10.241.261,00	-	11.137.813,00		
6	Retribusi Izin Gangguan	200.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00		
TOTAL		209.345.931,00	1.000,00	1.514.376,00	14.113.261,00	165.775.650,00	181.404.287,00		



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

1.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp4.002.480.940,00 dan Rp11.168.350,00. Piutang tersebut merupakan Piutang BLUD pada Rumah Sakit Bagas Waras.

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp3.981.449.605,00 dan Rp11.089.160,00 dijelaskan sebagai berikut:

	31-Dec-16	31-Dec-15
	Rp	Rp
Keterangan :		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.002.480.940,00	11.168.350,00
Penyisihan Piutang	-21.031.335,00	-79.190,00
Net Realizable Value (NRV)	<u>3.981.449.605,00</u>	<u>11.089.160,00</u>

Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2016 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

NO.	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG *				Total (Rp)
			Lancar 0-6 bulan	Kurang Lancar > 6 bln - 1 thn	Ditragukan > 1 - 3 tahun	Macet > 3 tahun	
			0,5%	10%	50%	100%	
1	2	3	5	6	7	8	9 = 5+7+8+9
1	Lain-lain PAD yang Sah	-	19.999.237,90	71.145,70	960.351,50	-	21.031.335,10
	TOTAL	-	19.999.237,90	71.145,70	960.351,50	-	21.031.335,10

1.1.11 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp3.520.434.114,00 dan Rp3.580.194.114,00. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang ini keseluruhan merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Memperhatikan Huruf B Bab I Buletin Teknis No. 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir. menyatakan dana yang digulirkan oleh satker biasa. tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Dana tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Piutang. Menurut Buletin Teknis No.07 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Satker biasa merupakan satker di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan APBN/APBD. Karakteristik satker biasa antara lain adalah satker tersebut harus menyeter. pendapatan yang diterima oleh satker secepatnya ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan tidak boleh mengelola kas. Jika dana dikelola oleh satker biasa. satker menarik dana dari rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. dengan atau tanpa lembaga perantara. untuk diteruskan kepada masyarakat. Satker menagih kembali dana tersebut dari masyarakat. untuk langsung disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran. satker biasa tidak boleh mempunyai saldo kas. Jika dana tersebut hendak digulirkan kembali kepada masyarakat. satker harus mencantumkannya dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Saldo Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi dan Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (Disperindagkop UMKM) per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.251.514.114.00. Piutang ini telah direklasifikasi pada tahun 2012. Dana bergulir yang dikelola Dinas Pertanian di reklasifikasi menjadi piutang lancar dalam akun Bagian lancar tagihan jangka panjang pada tahun 2016 ini bersaldo sebesar Rp268.920.000,00 per 31 Desember 2016. Penjelasan rinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

NO.	URAIAN	Saldo	Penambahan (Pengurangan)	Saldo
		Per 31-12-2015	Tahun 2015	Per 31-12-2016
1	Pengadaan Pupuk (38 kop) th 2006	143.087.547,00	-	143.087.547,00
2	Modal Awal Padanan (MAP)	-	-	-
1	Tahun 2004 (5 Koperasi)	121.091.515,00	-	121.091.515,00
2	Tahun 2005 (4 Koperasi)	94.847.573,00	-	94.847.573,00
3	Tahun 2006 (4 Koperasi)	200.000.000,00	-	200.000.000,00
3	Perkutan Modal Tahun 2006 (52 Koperasi)	378.065.421,00	-	378.065.421,00
4	Bantuan Modal Tahun 2006 (3 Koperasi)	638.838.532,00	-	638.838.532,00
5	Perkutan Modal Tahun 2007 (22 Kelompok)	499.583.000,00	-	499.583.000,00
6	Bantuan Modal Koperasi Cor Logan Tahun 2007	250.000.000,00	-	250.000.000,00
7	Perkutan modal Tahun 2007 (30 Koperasi)	181.758.050,00	-	181.758.050,00
8	BKM P2KP Th.2007 (93 Kelompok)	749.242.476,00	-	749.242.476,00
9	Sapi Gaduh Dinas Pertanian	328.680.000,00	59.760.000	268.920.000,00
10	mengakui setoran tln 2013	(5.000.000,00)	-	(5.000.000,00)
Jumlah		3.580.194.114,00	59.760.000,00	3.520.434.114,00

Perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang tahun 2016
menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Penyisihan Pinang Tidak Gaduh berdasarkan kondisi pinang Tahun 2014						2015	
URAIAN	Saldo Per 31-12-2016	Lancar	Kurang Lancar	Diperlukan	Maksud	Total	
		5%	10%	50%	100%		
Pengadaan Pupuk (38 kop) th 2006	143.087.547	-	-	-	143.087.547	143.087.547	143.087.547
Modal Awal Padanan (MAP)							
1 Tahun 2004 (5 Koperasi)	121.091.515	-	-	-	121.091.515	121.091.515	121.091.515
2 Tahun 2005 (4 Koperasi)	94.847.573	-	-	-	94.847.573	94.847.573	94.847.573
3 Tahun 2006 (4 Koperasi)	200.000.000	-	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Pengadaan Modal Tahun 2006 (52 Koperasi)	378.065.421	-	-	-	378.065.421	378.065.421	378.065.421
Bantuan Modal Tahun 2006 (3 Koperasi)	638.838.532	-	63.883.833	-	63.883.833	638.838.532	638.838.532
Perkutan Modal Tahun 2007 (22 Kelompok)	499.583.000	-	-	-	499.583.000	499.583.000	499.583.000
Bantuan Modal Koperasi Cor Logan Tahun 2007	250.000.000	-	-	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Perkutan modal Tahun 2007 (30 Koperasi)	181.758.050	-	-	-	181.758.050	181.758.050	181.758.050
BKM P2KP Th.2007 (93 Kelompok)	749.242.476	-	-	-	749.242.476	749.242.476	749.242.476
Sapi Gaduh Dinas Pertanian	268.920.000	-	-	-	268.920.000	268.920.000	268.920.000
Sisa tahun 2013	(5.000.000)	-	-	-	(5.000.000)	(5.000.000)	(5.000.000)
Jumlah	3.530.94.114	-	63.883.833	-	2.677.738.082	2.945.479.435	3.580.194.114



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

1.1.12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebelum dikurangi penyisihan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp456.674.500,00 dan Rp530.324.500,00. Jumlah Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp456.674.500,00 dan Rp530.324.500,00 lebih rinci sebagai berikut:

	31-Dec-16	31-Dec-15
	Rp	Rp
Keterangan :		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	456.674.500,00	530.324.500,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-456.674.500,00	-530.324.500,00
Net Realizable Value (NRV)	0,00	0,00

Keseluruhan jumlah bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah merupakan reklasifikasi dari Tagihan jangka panjang. Tagihan jangka panjang Per 31 Desember 2015 mempunyai saldo Rp530.324.500,00 Terdapat Penghapusan TGR karena Ybs meninggal dunia An. Alm. Soewanto. SH berdasar SK No 950 / 163 Tahun 2016 sebesar Rp35.100.000,00 dan An. Almh. Wihayat Dwi Esti. SH berdasar SK No 950 / 160 Tahun 2016 sebesar Rp38.550.000,00 Sehingga dengan penghapusan dan penyesuaian tersebut saldo bagian lancar TGR per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp.456.674.500,00 (530.324.500-73.650.000)

URAIAN	Penyisihan Piutang Tidak Tergaji berdasarkan kualitas piutang TGR				2015
	Saldo Per 31-12-2016	Lancar	Kurang Lancar	Ditangguhkan	
		5%	10%	50%	100%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	456.674.500,00	-	-	-	456.674.500,00
					530.324.500,00
Jumlah	456.674.500,00	-	-	-	456.674.500,00
					530.324.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

1.1.13 Beban Dibayar Dimuka

Jumlah Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp321.124.429,00 dan Rp318.774.872,00. Rincian mengenai Beban dibayar dimuka sebagai berikut:

	31-Dec-16	31-Dec-15
Beban Dibayar Dimuka	Rp	Rp
Asuransi Kesehatan DPRD	-	-
Asuransi BMD 2015	-	-
Asuransi BMD 2016	288.624.429,00	276.274.872,00
Sewa Pos Galian C dibayar dimuka	32.500.000,00	42.500.000,00
Jumlah	321.124.429,00	318.774.872,00

1.1.14 Persediaan

Jumlah persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp21.515.178.997,45 dan Rp18.480.900.137,20 Rincian mengenai persediaan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

KODE SKPD	SKPD	Saldo Persediaan	
		31/12/2016	31/12/2015
1.01.01.01	Dinas Pendidikan	436.552.857,00	855.299.493,00
1.02.01.01	Dinas Kesehatan	11.585.093.267,95	14.537.926.953,70
1.02.03.01	RSUD Klaten	4.229.467.666,00	
1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.124.208.150,00	
1.06.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.263.000,00	3.669.500,00
1.07.01.01	Dinas Perhubungan	166.823.850,50	186.072.372,50
1.08.01.01	Badan Lingkungan Hidup	719.350,00	3.426.600,00
1.10.01.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	776.208.113,00	1.036.509.350,00
1.11.01.01	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1.338.998.896,00	547.420.245,00
1.13.01.01	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	67.898.500,00	66.654.200,00
1.15.01.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Ker	125.735.250,00	135.494.668,00
1.17.01.01	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	6.635.300,00	5.065.173,00
1.19.01.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.954.350,00	10.647.550,00
1.19.02.01	Satuan Polisi Pamong Praja	1.293.500,00	41.660.390,00
1.20.03.00	Sekretariat daerah	9.089.750,00	7.859.900,00
1.20.04.01	Sekretariat DPRD	1.240.200,00	80.328.000,00
1.20.04.01	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAE	79.711.500,00	810.500,00
1.20.05.01	Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	613.500,00	1.634.600,00
1.20.06.01	Inspektorat Kabupaten Klaten	2.245.900,00	8.401.500,00
1.20.07.01	Badan Kepegawaian Daerah	1.289.000,00	577.068.762,00
1.20.08.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	330.439.462,00	189.000,00
1.20.09.01	Kecamatan Klaten Tengah	0,00	262.500,00
1.20.11.01	Kecamatan Kalikotes	0,00	502.000,00
1.20.13.01	Kecamatan Ngeen	373.200,00	1.092.000,00
1.20.14.01	Kecamatan Ngeen	373.200,00	235.000,00
1.20.15.01	Kecamatan Kebonarum	516.000,00	477.000,00
1.20.18.01	Kecamatan Gantiwaro	298.000,00	
1.20.19.01	Kecamatan Prambanan	660.500,00	
1.20.20.01	Kecamatan Manisrengo	0	
1.20.21.01	Kecamatan Delanggu	126.500,00	242.200,00
1.20.27.01	Kecamatan Juwiring	482.500,00	376.000,00
1.20.28.01	Kecamatan Wonosari	161.400,00	
1.20.29.01	Kecamatan Karangdowo	725.000,00	603.900,00
1.20.32.01	Kecamatan Cawas	441.500,00	480.000,00
1.20.33.01	Kecamatan Trucuk	507.000,00	326.500,00
1.20.34.01	Kecamatan Bayat	127.500,00	201.000,00
1.20.40.01	Kecamatan Klaten	129.000,00	
1.20.41.01	Kecamatan Klaten	976.500,00	189.000,00
1.20.43.01	Kecurahan Mojayan	526.000,00	
1.20.45.01	Kecurahan Barend	331.000,00	
1.20.47.01	Kecurahan Gercunung	87.000,00	352.000,00
1.21.01.01	Kantor Ketahanan Pangan	0,00	332.000,00
1.22.01.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat	12.095.250,00	71.443.000,00
1.24.01.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan	424.500,00	504.900,00
2.01.01.01	Dinas Pertanian	350.800,00	362.800,00
		201.358.485,00	102.500.600,00
	TOTAL PERSediaan	21.515.178.992,45	18.480.900.132,20

1.2 Investasi Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan nilai investasi jangka panjang yang dilakukan

Pemerintah Kabupaten Klaten, meliputi:

	31-Dec-16	31-Dec-15	Tren
Investasi Jangka Panjang:	Rp	Rp	%
1) Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	-
2) Investasi Permanen	123.767.913.031,00	115.598.635.885,14	7,07
Jumlah	123.767.913.031,00	115.598.635.885,14	7,07

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 sebesar Rp123.767.913.031,00 dan Rp115.598.635.885,14 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

1.2.1 Investasi Nonpermanen

Investasi nonpermanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya. Bentuk investasi ini meliputi dana bergulir berupa penggaduhan ternak sapi/kambing yang disalurkan melalui Dinas Pertanian. Pada tahun 2015 akun dana bergulir berupa gaduhan hewan ternak telah direklasifikasi menjadi piutang jangka pendek berupa akun Bagian Lancar Tagihan Jangka Pendek. sehingga saldo investasi nonpermanen per 31 Desember 2015 menjadi nihil dan Saldo investasi nonpermanen per 31 Desember 2016 juga nihil.

1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi Pemerintah Kabupaten Klaten yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya. dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD). PMPD ditetapkan melalui Perda Kabupaten Klaten dan/atau Peraturan Bupati Klaten. yang pelaksanaannya dianggarkan melalui pembiayaan daerah dalam APBD tahun berkenaan.

PMPD Kabupaten Klaten dilakukan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD). lembaga keuangan bank. lembaga keuangan nonbank. dan perusahaan swasta/pihak ketiga lainnya dengan nilai investasi per 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

	31-Dec-16	31-Dec-15	Tren
	Rp	Rp	%
Investasi Permanen (PMPD) pada:			
a) Perusahaan Daerah / BUMD	73.674.650.385,00	69.209.238.124,14	6,45
b) Lembaga Keuangan – Bank	49.793.262.646,00	45.954.397.761,00	8,35
c) Lembaga Keuangan – Nonbank	-	-	-
d) Perusahaan Swasta/Pihak III	300.000.000,00	435.000.000,00	(31,03)
Jumlah	123.767.913.031,00	115.598.635.885,14	7,07

Terdapat kenaikan jumlah investasi permanen yang disebabkan karena penyesuaian karena pemakaian metode ekuitas terhadap pengakuan nilai investasi ini. Terdapat penurunan sebesar Rp135.000.000,00 pada Perusahaan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Swasta/ Pihak III yaitu Pembubaran PT Solo Raya Promosi sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-0000285 tanggal 25 Januari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT SOLO RAYA PROMOSI (dalam likuidasi) dan penetapan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 20/Pdt.P/2016/PN.Skt. Perhitungan Investasi Permanen lebih lengkap sebagai berikut.

NO	METODE	BUMD	PENYERTAAN MODAL S/DTAHUN LALU (2015)	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (2016)	PENYESUAIAN PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (2016)	PENYERTAAN MODAL S/D TAHUN INI (2016)
1	Ekuitas	PD. BPR Bank Pasar	26.610.397.761,00	-	1.582.864.885,00	28.193.262.646,00
2	Ekuitas	P D A M	58.570.955.607,00	3.048.000.000,00	885.339.906,00	62.504.295.513,00
3	Ekuitas	Perusda Aneka Usaha	5.860.461.190,14	-	487.103.205,86	6.392.533.345,00
4	Cost	PD. BPR BKK-BKK	4.777.821.327,00	-	-	4.777.821.327,00
5	Cost	Bank Jateng	19.344.000.000,00	2.256.000.000,00	-	21.600.000.000,00
6	Cost	Swasta/ Pihak III	435.000.000,00	-	135.000.000,00	300.000.000,00
		JUMLAH	115.598.635.885,14	5.304.000.000,00	2.820.307.996,86	123.767.913.031,00

1.3 Aset Tetap

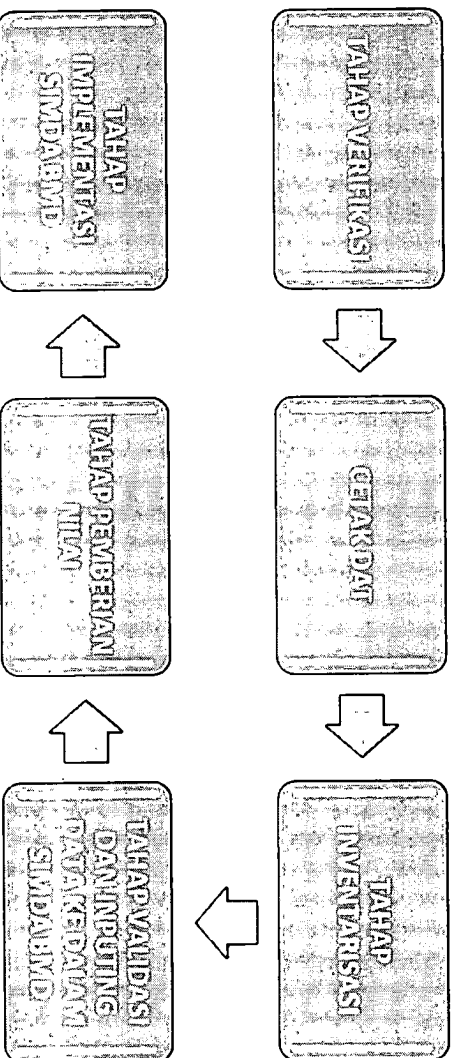
Rekening ini menggambarkan nilai aset tetap atau Barang/Kekayaan Milik Daerah (BMD) Kabupaten. yang telah dilakukan inventarisasi terakhir pada Tahun 2003 dan disajikan dalam Neraca Daerah untuk pertama kalinya per 31 Desember 2003. Sampai dengan tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Klaten belum memiliki neraca awal SKPD. Dalam rangka penyusunan Neraca Awal SKPD yang akan digabung/dikonsolidasikan ke dalam Neraca Daerah. maka Pemerintah Kabupaten Klaten dalam TA 2008 telah menunjuk PT Indoprofit Konsultama untuk melakukan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap/barang milik Pemerintah Daerah.

Pekerjaan meliputi inventarisasi aset tetap sesuai data Tahun 2003 dan mutasi Tahun 2004–2007. serta revaluasi nilai aset tetap per 31 Desember 2007. Pelaksanaan pekerjaan dilkat dengan perjanjian Nomor 256/PPK-PPTK/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Kontrak Kerja Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah Kabupaten Klaten. Nilai pekerjaan sebesar Rp1.314.960.000.00 bersifat lump-sum. dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 1 Agustus 2008 atau berakhir tanggal 28 Desember 2008.



Laporan akhir pihak konsultan telah diterima Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 15 Desember 2008. dan telah beberapa kali diperbaiki (revisi) terakhir dengan surat PT Indoprofta Konsultama Nomor 0161303009 tanggal 13 Maret 2009. Berdasarkan laporan akhir tersebut nilai aset Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2007 sebesar Rp3.036.414.766.000,00 atau turun sebesar Rp1.954.175.669.499,00 dari nilai yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp4.990.590.435.499,00. Nilai aset per 31 Desember 2007 hasil revaluasi tersebut belum ditetapkan Bupati Klaten sampai dengan tahun 2012.

Untuk menindaklanjuti permasalahan aset tersebut pada tahun 2012 Kabupaten Klaten melakukan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap dengan pendampingan dari tim BPKP dan diproses menggunakan bantuan aplikasi dari BPKP. yaitu aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.5 Tahapan inventarisasi aset dijelaskan dengan gambar berikut:



Flowchart Inventarisasi Aset Daerah

Dari gambar bagan alur di atas dapat dijelaskan bahwa proses awal adalah dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap data aset yang hasilnya dituangkan dalam Data Aset Terverifikasi (DAT). Berdasarkan DAT tersebut tim inventarisasi melakukan inventarisasi ke lapangan di semua SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(Satuan Kerja Perangkat Daerah). Hasil inventarisasi kemudian divalidasi sebelum dimasukkan ke aplikasi Simda BMD. Terhadap aset tetap yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi Simda BMD dan ternyata tidak memiliki nilai atau bernilai 1 rupiah diberikan nilai menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Aset Tetap yang ditetapkan dengan SK Bupati.

Proses inventarisasi telah selesai pada tahun 2016 berdasarkan SK Bupati Nomor 030/48 tahun 2016. Hasil Inventarisasi setelah dilakukan proses penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah aset tetap setelah dilakukan inventarisasi adalah sebesar Rp2.828.741.519.158,73 atau turun sebesar Rp. 3.247.459.665.962,36 (53.45%) dibandingkan saldo akhir per 31 Desember 2014 sebelum dilakukan inventarisasi sebesar Rp 6.076.201.185.121,09. Penurunan terutama terjadi pada aset Tanah dengan proporsi sebesar 6,29%. Gedung dan Bangunan sebesar 77,29%. Jalan. Jaringan dan Irigasi sebesar 23,66% serta Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar 5,11% dibandingkan dengan total penurunan aset tetap. Penurunan Aset Tanah dan Gedung dan bangunan terutama disebabkan metode pemberian nilai aset yang digunakan dalam inventarisasi ini yaitu menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003. Sedangkan Penurunan Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan terutama disebabkan karena banyak infrastruktur Jaringan irigasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Setelah hasil proses inventarisasi selesai ternyata masih ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan terutama aset tetap pada Dinas Pendidikan dan aset tanah berupa tanah jalan yang sebelumnya belum tercatat. Berikut adalah tambahan (pengurangan) aset tetap hasil perolehan Tahun anggaran 2015 serta rangkuman data hasil inventarisasi dan perbaikannya :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Aset Tetap	Saldo Hasil Inventarisasi	Mutasi aset 2015	Perbaikan Inventarisasi dan Rekon 2015	Saldo 31-12-2015	Kenaikan/(penurunan)	%
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1) Tanah	582.730.784.923,00	5.063.432.000,00	698.789.673,000	1.286.583.891.923,00	703.853.107.000,00	120,79
2) Peralatan dan Mesin	557.546.176.362,10	78.144.157.317,00	(3.651.140.247)	632.039.193.452,44	74.493.017.070,34	13,36
3) Gedung dan Bangunan	574.580.307.951,00	198.281.335.519,00	1.669.291.008	774.530.954.478,00	199.950.646.527,00	38,12
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	775.504.724.877,00	88.452.216.549,00	8.911.995	863.956.853.421,00	88.461.128.544,00	11,41
5) Aset Tetap Lainnya	236.028.941.256,63	17.250.219.573,00	(10.740.593.232)	242.538.567.597,62	6.509.626.340,99	2,76
6) Komsumsi Dalam Pengerjaan	152.350.583.789,00	(72.322.694.378,00)	-	80.027.889.411,00	-72.322.694.378,00	(47,47)
7) Akumulasi Penyusutan	-1.043.376.122.755,10	(81.369.943.635,00)	(423.300.263.749)	-1.548.046.330.138,64	-504.670.207.383,54	48,37
Jumlah setelah disesuaikan	1.785.365.396.403,63	233.498.742.945,00	262.775.880.775,79	2.281.640.020.124,42	496.274.623.720,79	27,80
Jumlah sebelum penyusutan	2.828.741.519.158,73	314.868.686.580,00	686.076.144.524,33	3.829.686.350.263,06	1.000.944.831.104,33	35,38

Setelah ditambahkan mutasi aset dari Tahun Anggaran 2015 serta hasil perbaikan inventarisasi Saldo aset tetap per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp3.829.686.350.263,06 atau naik sebesar Rp1.000.944.831.104,33 (35,38%). Khusus untuk Aset Tanah hanya dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM yaitu tambahan berupa tanah di bawah jalan raya milik Kabupaten Klaten yang sebelumnya belum tercatat. Selain Tanah, perbaikan data inventarisasi dilakukan hanya pada Dinas Pendidikan untuk aset Peralatan dan Mesin. Gedung dan Bangunan. Jalan. Jaringan. dan Irigasi. serta Aset Tetap Lainnya. Keterangan diatas adalah sekelumit sejara perjalanan awal penataan aset di kabupaten Klaten. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Klaten. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2015 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Rincian Aset Tetap berdasarkan SKPD sebagaimana terlampir. Sedangkan mutasi aset tetap berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

ASET TETAP	31-Des-16	31-Des-15	Tren
	Rp	Rp	
1 Tanah	1.291.905.063.673,00	1.286.583.891.923,00	0,41
2 Peralatan dan Mesin	746.367.762.112,43	639.289.780.243,10	16,75
3 Gedung dan Bangunan	761.362.497.206,18	717.280.367.667,34	6,15
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	888.503.282.799,00	863.965.853.421,00	2,84
5 Aset Tetap Lainnya	260.590.146.677,63	242.538.567.597,63	7,44
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	88.444.314.356,00	80.027.889.411,00	10,52
7 Akumulasi Penyusutan	(1.200.717.606.916,43)	(1.548.046.330.138,64)	-22,44
	2.836.455.459.907,81	2.281.640.020.124,42	24,32



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Penambahan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari Belanja Modal. kapitalisasi. reklasifikasi. mutasi. hibah/donasi. koreksi pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Pengurangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari reklasifikasi. extracomptable (nilai dibawah batas kapitalisasi). mutasi. koreksi pencatatan. dan/atau pengurangan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Rincian masing-masing komponen Aset Tetap berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

ASET TETAP	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan bangunan	Jalan, jembatan, dan Jembatan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan
SALDO PER 31						
DESEMBER 2015	1.286.583.891.923,00	632.039.193.432,44	724.530.954.478,00	863.965.353.421,00	242.538.567.597,62	80.027.889.411,00
BELANJA MODAL	4.601.391.750,00	93.767.955.597,00	8.313.213.884,00	19.636.850.170,00	11.893.555.720,00	82.546.270.162,00
HIBAH	-	6.474.133.312,00	3.180.327.676,44	54.613.355,00	5.841.572.493,00	-
REKLAS +	-	-	-	49.592.900,00	4.309.130.311,00	-
REKLAS -	-	958.765.787,00	-	47.584.028.036,00	3.871.629.796,00	-
(KAPITALISASI)	1.128.885.000,00	15.041.634.940,00	18.226.571.977,00	52.300.612.265,00	5.789.560.872,00	82.216.064.822,00
KOREKSI	1.848.665.000,00	3.610.617,99	43.564.573.144,74	79.788.724,00	5.910.610.519,99	8.086.219.605,00
SALDO PER 31						
DESEMBER 2016	1.291.905.063.673,00	746.367.762.112,43	761.362.497.206,18	888.503.282.799,00	260.590.146.677,63	88.444.314.356,00

1. Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp.1.291.905.063.673,00 mengalami Kenaikan senilai Rp 5.321.171.750,00 Atau 0,41% dari Tahun 2015 senilai Rp1.286.583.891.923,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

	Aset Tanah	31 Desember 2016		31 Desember 2015		Tren %
		Rp		Rp		
1	DINAS PENDIDIKAN	1.369.220.000,00		1.369.220.000,00		0,00
2	TK Negeri	5.000.000,00		5.000.000,00		0,00
3	SNP Negeri se Kabupaten	12.000.346.750,00		12.209.446.750,00		-1,71
4	SMK Negeri se Kabupaten	6.667.313.500,00		6.672.423.500,00		-0,08
5	SMK Negeri se Kabupaten	6.543.058.000,00		6.543.058.000,00		0,00
6	SKB	10.100.000,00		10.100.000,00		0,00
7	Dinas Pendidikan Kecamatan	726.195.000,00		697.395.000,00		4,13
8	DINAS KESEHATAN	2.789.710.000,00		2.789.710.000,00		0,00
9	PUSKESMAS	3.959.027.100,00		3.959.027.100,00		0,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM	1.111.440.496.793,00		1.106.889.034.043,00		0,41
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	819.905.280,00		819.905.280,00		0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	9.723.254.000,00		15.481.958.000,00		-37,20
13	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	373.000.000,00		373.000.000,00		0,00
14	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BEREKONOMI	230.000.000,00		230.000.000,00		0,00
15	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	41.580.000,00		41.580.000,00		0,00
16	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOOPERASI DAN UMKM	41.322.370.300,00		41.322.370.300,00		0,00
17	DINAS KEBUDAYAAN PARWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.220.479.500,00		2.220.479.500,00		0,00
18	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.095.000.000,00		1.095.000.000,00		0,00
19	SEKRETARIAT DAERAH	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		0,00
20	SEKRETARIAT DPRD	16.129.320.750,00		10.365.506.750,00		55,61
21	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.645.000,00		12.645.000,00		0,00
22	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	19.573.514.000,00		17.873.639.000,00		9,51
23	INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN	569.757.000,00		569.757.000,00		0,00
24	KECAMATAN KLATEN UTARA	1.470.000,00		1.470.000,00		0,00
25	KECAMATAN KLATEN TENGAH	411.000.000,00		411.000.000,00		0,00
26	KECAMATAN KLATEN SELATAN	884.000.000,00		884.000.000,00		0,00
27	KECAMATAN KALIKOTES	21.750.000,00		21.750.000,00		0,00
28	KECAMATAN KARANGOMONGKO	25.000.000,00		25.000.000,00		0,00
29	KECAMATAN NGAWEN	191.250.000,00		191.250.000,00		0,00
30	KECAMATAN WONOREJO	93.540.000,00		93.540.000,00		0,00
31	KECAMATAN WEDI	13.500.000,00		13.500.000,00		0,00
32	KECAMATAN JOGONALAN	156.624.000,00		156.624.000,00		-100,00
33	KECAMATAN GANTWARNO	921.000.000,00		921.000.000,00		0,00
34	KECAMATAN PRAMBANAN	32.500.000,00		32.500.000,00		0,00
35	KECAMATAN MANISRENGGO	345.000.000,00		345.000.000,00		0,00
36	KECAMATAN KEMALANG	101.000.000,00		101.000.000,00		0,00
37	KECAMATAN KARANGOMONGKO	122.220.000,00		122.220.000,00		0,00
38	KECAMATAN JATINOM	433.500.000,00		433.500.000,00		0,00
39	KECAMATAN KARANGANOM	105.600.000,00		105.600.000,00		0,00
40	KECAMATAN TULUNG	301.614.000,00		301.614.000,00		0,00
41	KECAMATAN POLANHARJO	900.000.000,00		900.000.000,00		0,00
42	KECAMATAN DELANGGU	573.000.000,00		573.000.000,00		0,00
43	KECAMATAN JUWIRING	1.849.500,00		1.849.500,00		0,00
44	KECAMATAN WONOSARI	28.000,00		28.000,00		0,00
45	KECAMATAN CEPER	415.530.000,00		415.530.000,00		0,00
46	KECAMATAN PEDAN	390.000.000,00		390.000.000,00		0,00
47	KECAMATAN KARANGOMONGKO	388.000,00		388.000,00		0,00
48	KECAMATAN CAWAS	932.000.000,00		8.575.000,00		0,00
49	KECAMATAN TRIDUK	8.575.000,00		8.575.000,00		0,00
50	KECAMATAN BAYAT	600.000,00		600.000,00		0,00
51	KECAMATAN KALUPATEN	67.070.000,00		67.070.000,00		0,00
52	KECAMATAN TONGGALAN	985.900.000,00		985.900.000,00		0,00
53	KECAMATAN MOJAYAN	9.493.052.000,00		9.493.052.000,00		0,00
54	KECAMATAN BUNTALAN	501.500.000,00		501.500.000,00		-44,39
55	KECAMATAN BARENG	4.648.164.000,00		4.648.164.000,00		0,00
56	KECAMATAN BARENG	4.386.667.750,00		4.386.667.750,00		0,41
57	KECAMATAN GAYAMPIT	267.670.000,00		267.670.000,00		0,00
58	KANTOR KETAHANAN PANGAN	1.553.000.000,00		1.553.000.000,00		0,00
59	KANTOR ARSIP DAN PERUSTAKAAN	12.892.549.000,00		12.892.549.000,00		0,00
60	DINAS PERTANIAN	1.291.905.063.673,00		1.286.583.891.923,00		0,41
61	Jumlah					

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp746.367.762.112,43 mengalami kenaikan senilai Rp114.328.568.679,99 atau 18,09% dari Tahun 2015 senilai Rp632.039.193.432,44 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Aset Perawatan dan Mesin	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Tren %
	Rp	Rp	
1. DINAS PENDIDIKAN	16.264.757.143,00	5.300.457.002,00	206,86
2. ITC Negeri	288.883.000,00	288.883.000,00	0,00
3. SMP Negeri se Kabupaten	107.956.916.088,40	91.082.619.042,40	18,53
4. SMA Negeri se Kabupaten	26.666.081.554,84	26.622.191.554,84	0,16
5. SMK Negeri se Kabupaten	43.588.035.256,54	43.574.973.256,54	0,03
6. SKB	355.631.200,00	338.611.200,00	3,16
7. Dinas Pendidikan Kecamatan	235.341.178.185,45	226.315.835.485,45	4,08
8. DINAS KESEHATAN	6.411.781.824,22	19.426.535.495,22	-67,08
9. PUSKESMAS	88.472.145.714,00	54.770.984.198,00	61,50
10. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	58.552.372.496,00	35.874.832.270,00	126,29
11. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM	23.684.356.304,00	19.232.429.703,00	23,02
12. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.124.712.515,00	3.368.323.559,00	22,46
13. DINAS PERUBUANGAN	3.120.891.414,00	2.866.591.434,00	8,87
14. BADAN LINGKUNGAN HIDUP	4.458.017.422,00	3.607.377.429,00	23,58
15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.555.093.577,00	3.848.980.448,00	-7,64
16. KANTOR PEMERIDAYAAN PEREMPUNAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.632.707.547,00	5.019.625.118,00	-4,13
17. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSUMIGRASI	3.408.447.150,00	2.057.196.135,00	27,98
18. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	5.427.016.633,00	3.376.120.493,00	0,96
19. DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLIMPIADA	5.427.016.633,00	5.271.611.332,00	2,95
20. KANTOR KESATUAN BANSA DAN POLITIK	528.247.386,00	440.232.222,00	19,99
21. SATUAN POLISI PAMONG PRALA	1.957.015.591,00	1.671.914.591,00	17,05
22. SEKRETARIAT DAERAH	22.534.921.899,00	17.160.013.172,00	31,32
23. SEKRETARIAT DPRD	7.887.332.703,00	6.338.940.745,00	25,61
24. DINAS PENDIDIKAN PENGELOLAAN KEJANGKARAN ASSET DAERAH	27.841.306.675,99	23.889.210.085,00	16,54
25. KANTOR PERANAMAAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	1.322.827.543,00	1.308.637.543,00	1,08
26. INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN	1.972.850.860,00	1.776.976.894,00	11,02
27. BADAN KEPERAWATAN DAERAH	2.179.440.439,00	2.025.387.235,00	7,61
28. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.863.809.889,00	10.002.767.889,00	8,61
29. KECAMATAN KLATEN UTARA	439.544.084,00	317.789.433,00	38,31
30. KECAMATAN KLATEN TENGAH	408.759.112,00	220.654.461,00	40,63
31. KECAMATAN KLATEN SELATAN	525.305.711,00	423.151.060,00	24,14
32. KECAMATAN KALIKOTES	436.888.432,00	314.734.201,00	30,52
33. KECAMATAN NGAWEN	486.532.073,00	246.223.422,00	97,61
34. KECAMATAN KEBONARUM	708.475.703,00	564.957.654,00	25,50
35. KECAMATAN WEDI	488.768.894,00	374.959.245,00	30,36
36. KECAMATAN JOGOWALAN	466.213.313,00	323.312.664,00	44,20
37. KECAMATAN GANTIWARNO	800.306.214,00	698.151.565,00	14,63
38. KECAMATAN PRAMAMANAN	702.814.059,00	600.659.410,00	17,01
39. KECAMATAN MANISRENGGO	463.145.911,00	353.491.261,00	31,02
40. KECAMATAN REMALANG	539.738.462,00	422.933.810,00	27,62
41. KECAMATAN KARANGMONONGKO	372.241.118,00	270.086.468,00	37,82
42. KECAMATAN JATINDO	410.551.028,00	300.396.766,00	36,67
43. KECAMATAN KARANGANOM	184.541.329,00	282.386.677,00	-36,18
44. KECAMATAN TULUNG	487.886.009,00	381.681.357,00	27,83
45. KECAMATAN POLAHARJO	419.938.912,00	209.434.266,00	40,24
46. KECAMATAN DELANGGU	753.523.312,00	627.269.661,00	20,13
47. KECAMATAN DUWIRING	545.564.196,00	440.020.546,00	23,92
48. KECAMATAN WONOSARI	438.878.012,00	304.400.703,00	44,18
49. KECAMATAN CEMER	543.552.408,00	413.345.258,00	31,50
50. KECAMATAN PEDAN	566.999.790,00	456.955.140,00	24,07
51. KECAMATAN KARANGDOWO	373.740.327,00	271.585.677,00	37,61
52. KECAMATAN CAWAS	888.312.914,00	771.398.264,00	15,16
53. KECAMATAN TRUCUK	511.521.446,00	404.866.796,00	26,34
54. KECAMATAN BAYAT	699.561.571,00	491.606.921,00	41,44
55. KECAMATAN KAGURATEN	113.575.974,00	98.585.274,00	15,21
56. KECAMATAN KLATEN	167.020.841,00	147.425.841,00	13,29
57. KECAMATAN TONGGALAN	81.171.554,00	58.441.554,00	38,89
58. KECAMATAN MOJAYAN	59.581.500,00	59.581.500,00	0,00
59. KECAMATAN BUTALAN	153.622.427,00	153.622.427,00	0,00
60. KECAMATAN BARENG	154.574.847,00	135.134.847,00	14,39
61. KECAMATAN BARENGKOR	134.007.000,00	105.957.000,00	26,47
62. KECAMATAN GERGUNGUNG	81.774.714,00	62.284.714,00	31,29
63. KECAMATAN GAYAMPRIT	121.482.291,00	104.107.291,00	16,69
64. KECAMATAN JATINDO	132.254.107,00	108.204.307,00	22,23
65. KANTOR KETAMBAHAN PANGAN	557.444.214,00	511.319.214,00	9,02
66. BADAN PEMERIDAYAAN MASYARAKAT	1.293.715.503,00	1.103.139.025,00	17,28
67. KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2.075.491.613,00	2.020.506.613,00	1,22
68. DINAS PERTANIAN	10.255.144.288,00	9.523.205.996,00	7,68
Jumlah	746.367.762.112,43	632.039.193.432,44	18,09

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp761.362.497.206,18 mengalami kenaikan senilai Rp36.831.542.728,18 atau (5,08%) dari Tahun 2015 senilai Rp724.530.954.478,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Tren
	Rp	Rp	%
1 DINAS PENDIDIKAN	14.883.848.553,00	7.136.351.470,00	108,56
2 TK Negeri	186.656.400,00	186.656.400,00	0,00
3 SMP Negeri se Kabupaten	93.253.630.479,00	90.251.172.586,00	3,33
4 SMA Negeri se Kabupaten	32.971.061.758,00	32.971.061.758,00	0,00
5 SMK Negeri se Kabupaten	35.251.969.104,00	35.251.969.104,00	0,00
6 SKB	79.761.029,00	79.761.029,00	0,00
7 Dinas Pendidikan Kecamatan	168.123.377.972,18	165.881.111.112,00	1,35
8 DINAS KESEHATAN	6.506.120.610,00	4.569.451.840,00	30,92
9 PUSKESMAS	35.094.818.544,00	29.612.157.963,00	18,51
10 RUWAH SAKIT UMUM DAERAH	104.325.100.113,00	197.851.115,00	52.629,09
11 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM	100.613.700.671,00	239.387.210.235,00	-57,97
12 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	444.475.722,00	444.475.722,00	0,00
13 DINAS PERHUBUNGAN	8.315.146.543,00	8.315.146.543,00	0,00
14 BADAN LINGKUNGAN HIDUP	5.529.444.134,00	5.529.444.134,00	0,00
15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	90.558.000,00	90.558.000,00	0,00
16 KANTOR PEMERDAKIPAN PEREMPUN DAN KELU	2.670.008.222,00	1.908.917.372,00	39,87
17 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	908.524.756,00	908.524.756,00	0,00
18 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI	46.863.188.013,00	45.187.901.213,00	3,71
19 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN O	13.883.788.300,00	11.217.833.200,00	23,77
20 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	167.046.750,00	167.046.750,00	0,00
21 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	539.552.665,00	539.552.665,00	0,00
22 SEKRETARIAT DAERAH	9.099.628.830,00	9.099.628.830,00	0,00
23 SEKRETARIAT DPRD	1.177.173.600,00	997.975.400,00	17,56
24 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN E	47.236.359.073,00	4.469.274.825,00	956,91
25 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TE	901.976.403,00	901.976.403,00	0,00
26 INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN	201.205.000,00	201.205.000,00	0,00
27 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.927.062.551,00	1.927.062.551,00	0,00
28 KECAMATAN KLATEN UTARA	265.276.000,00	265.276.000,00	0,00
29 KECAMATAN KLATEN TENGAH	294.151.000,00	294.151.000,00	0,00
30 KECAMATAN KLATEN SELATAN	214.437.000,00	214.437.000,00	0,00
31 KECAMATAN KAIKOTES	431.520.000,00	431.520.000,00	0,00
32 KECAMATAN NGAWEN	901.041.900,00	901.041.900,00	0,00
33 KECAMATAN KEBONARUM	777.049.600,00	777.049.600,00	0,00
34 KECAMATAN WEDE	527.552.000,00	527.552.000,00	0,00
35 KECAMATAN JOGOWALAN	1.145.488.036,00	323.578.600,00	254,01
36 KECAMATAN GANTIMARNO	414.045.000,00	414.045.000,00	0,00
37 KECAMATAN PRAMBANAN	501.352.500,00	501.352.500,00	0,00
38 KECAMATAN MANISRENGO	702.625.000,00	702.625.000,00	0,00
39 KECAMATAN KEMALANG	1.570.964.560,00	1.372.214.560,00	14,48
40 KECAMATAN KARANGNONGKO	387.495.440,00	387.495.440,00	0,00
41 KECAMATAN LATINOM	571.062.000,00	571.062.000,00	0,00
42 KECAMATAN KARANGANOM	345.451.040,00	345.451.040,00	0,00
43 KECAMATAN TULUNG	232.436.000,00	232.436.000,00	0,00
44 KECAMATAN POLANHARJO	111.765.500,00	111.765.500,00	0,00
45 KECAMATAN DELANGGU	932.195.969,00	932.195.969,00	0,00
46 KECAMATAN LUWIRING	145.998.015,00	145.998.015,00	0,00
47 KECAMATAN WONOSARI	692.912.790,00	692.912.790,00	0,00
48 KECAMATAN CEPER	280.205.000,00	280.205.000,00	0,00
49 KECAMATAN PEDAN	112.472.840,00	112.472.840,00	0,00
50 KECAMATAN KARANDOWO	154.953.320,00	154.953.320,00	0,00
51 KECAMATAN CAWAS	573.325.060,00	573.325.060,00	0,00
52 KECAMATAN TRUCUK	821.250.000,00	821.250.000,00	0,00
53 KECAMATAN BAYAT	292.293.570,00	292.293.570,00	0,00
54 KECAMATAN KABUPATEN	222.325.000,00	222.325.000,00	0,00
55 KECAMATAN KLATEN	557.406.100,00	557.406.100,00	0,00
56 KECAMATAN TONGGALAN	820.357.400,00	820.357.400,00	0,00
57 KECAMATAN MODJAYAN	24.155.634,00	24.155.634,00	0,00
58 KECAMATAN BUNTALAN	52.186.000,00	52.186.000,00	0,00
59 KECAMATAN BARENG	1.253.273.293,00	58.734.000,00	2.035,81
60 KECAMATAN BARENGIOR	273.473.450,00	273.473.450,00	0,00
61 KECAMATAN GERGUNUNG	453.190.000,00	453.190.000,00	0,00
62 KECAMATAN GAYAMPRIT	1.076.320.000,00	1.076.320.000,00	0,00
63 KECAMATAN LATINOM	478.980.966,00	279.133.466,00	71,60
64 KANTOR KETAMAHAN PAANGAN	641.553.260,00	641.553.260,00	0,00
65 BADAN PEMERDAKIPAN MASYARAKAT	227.042.000,00	227.042.000,00	0,00
66 KANTOR ARSIP DAN PERUSTAKAN	351.895.200,00	351.895.200,00	0,00
67 DINAS PERTANIAN	10.285.835.768,00	9.283.245.288,00	10,80
Jumlah	761.362.497.206,18	724.530.954.478,00	5,08



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

4. Jalan Irigasi dan Jembatan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp888.503.282.799,00 mengalami kenaikan senilai Rp24.537.429.378,00 atau 2,84 % dari Tahun 2015 senilai Rp863.965.853.421,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jalan, Jaringan, Irigasi, dan Jembatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Tren %
	Rp	Rp	
1 DINAS PENDIDIKAN	24.108.800,00	-	0,00
2 TK Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3 SMP Negeri se Kabupaten	368.434.519,00	308.204.279,00	19,54
4 SMA Negeri se Kabupaten	973.237.999,00	937.560.000,00	3,81
5 SMK Negeri se Kabupaten	96.824.285,00	84.075.000,00	15,16
6 SKB	500.000,00	500.000,00	0,00
7 Dinas Pendidikan Kecamatan	1.172.646.731,00	1.062.745.201,00	10,34
8 PUSKESMAS	67.066.000,00	67.066.000,00	0,00
9 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	-	0,00
10 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM	872.901.788.190,00	849.761.721.700,00	99,99
11 BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	56.722.264,00	56.722.264,00	99,12
12 DINAS PERHUBUNGAN	500.000,00	500.000,00	378.707,83
13 BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1.894.039.151,00	1.685.055.431,00	87,91
14 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN	203.673.245,00	203.673.245,00	217,20
15 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH	646.042.748,00	646.042.748,00	-72,78
16 SEKRETARIAT DAERAH	175.864.373,00	24.135.373,00	-96,64
17 KECAMATAN KALIKOTES	810.000,00	810.000,00	2.393,65
18 KECAMATAN NGAWEN	20.198.594,00	-	0,00
19 KECAMATAN KEBONARUM	500.000,00	500.000,00	19.777,60
20 KECAMATAN JOGOMALAN	99.388.000,00	-	0,00
21 KECAMATAN GANTIMARNO	200.000,00	200.000,00	200,00
22 KECAMATAN PRAMBANAN	600.000,00	600.000,00	-33,33
23 KECAMATAN LATNOM	400.000,00	400.000,00	75,00
24 KECAMATAN TULUNG	700.000,00	700.000,00	7,14
25 KECAMATAN JUWIRING	750.000,00	750.000,00	-33,33
26 KECAMATAN WONOSARI	500.000,00	500.000,00	-10,00
27 KECAMATAN PEDAN	450.000,00	450.000,00	653,56
28 KECAMATAN TRUCIK	3.400.000,00	3.400.000,00	1.470,13
29 KECAMATAN BAYAT	53.384.430,00	53.384.430,00	667,32
30 KECAMATAN KABUPATEN	409.627.300,00	409.627.300,00	-12,98
31 KECAMATAN KLATEN	336.474.900,00	336.474.900,00	18,15
32 KECAMATAN TONGGALAN	421.177.600,00	421.177.600,00	-38,43
33 KECAMATAN MOJAYAN	239.330.000,00	54.589.000,00	7.402,06
34 KECAMATAN BUNTALAN	4.095.298.500,00	4.095.298.500,00	-92,89
35 KECAMATAN BARENG	291.310.000,00	291.310.000,00	-20,74
36 KECAMATAN BARENGOR	230.893.000,00	230.893.000,00	64,63
37 KECAMATAN GERGINUNG	380.124.000,00	380.124.000,00	-41,06
38 KECAMATAN GAYAMPIT	224.042.500,00	224.042.500,00	130,74
39 KECAMATAN LATNOM	516.946.550,00	427.036.950,00	-99,84
40 BADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT	700.000,00	700.000,00	1.535,71
41 KANTOR ARSIP DAN PERUSTAKAN	11.450.000,00	11.450.000,00	22.067,33
42 DINAS PERTANIAN	2.538.159.220,00	2.158.434.000,00	0,00
Jumlah	888.503.282.799,00	863.965.853.421,00	2,84



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp260.590.146.677,63 mengalami kenaikan senilai Rp 18.051.579.080,01 atau 7,44 % dari Tahun 2015 senilai Rp242.538.567.597,62 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2016		31 Desember 2015		Tren %
	Rp	Rp	Rp		
1 DINAS PENDIDIKAN	4.321.490.129,01	1.614.048.834,00	1.67,74		
2 TK Negeri	106.640.442,00	99.240.442,00	7,46		
3 SMP Negeri se Kabupaten	53.500.423.498,80	48.910.898.124,80	9,38		
4 SMA Negeri se Kabupaten	16.255.450.849,42	16.233.914.261,42	0,13		
5 SMK Negeri se Kabupaten	10.350.473.764,00	10.350.473.764,00	0,00		
6 SKB	11.734.373,00	11.444.373,00	2,53		
7 Dinas Pendidikan Kecamatan	162.414.727.184,41	152.947.846.076,41	6,19		
8 DINAS KESERIHATAN	112.775.883,00	270.528.695,00	-58,31		
9 PUSKESMAS	1.113.854.711,00	900.300.317,00	23,72		
10 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2.868.000,00	184.267.219,00	-98,44		
11 DINAS PERENCANAAN UMUM DAN ESDM	2.105.660.426,00	2.019.078.703,00	4,29		
12 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	980.587.300,00	219.489.850,00	346,76		
13 DINAS PERLUBINGAN	18.543.290,00	68.627.590,00	-72,98		
14 BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1.751.944.785,00	1.547.221.685,00	13,23		
15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	68.435.372,00	67.895.372,00	0,80		
16 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	34.306.801,00	34.016.801,00	0,85		
17 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	17.443.808,00	17.153.808,00	1,69		
18 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOOPERASI DAN UMKM	34.973.129,00	34.683.129,00	0,84		
19 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	190.553.715,00	190.263.715,00	0,15		
20 KANTOR KUSATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.456.690,00	3.166.690,00	9,16		
21 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	97.072.432,00	96.740.432,00	0,34		
22 SEKRETARIAT DAERAH	1.272.764.283,00	1.050.499.628,00	21,16		
23 SEKRETARIAT DPRD	145.700.521,00	126.326.671,00	15,34		
24 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	169.402.366,00	168.242.366,00	0,69		
25 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	8.036.206,00	7.746.206,00	3,74		
26 INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN	130.053.921,00	129.554.021,00	0,39		
27 BADAN KEPENGAWALAN DAERAH	25.464.568,00	-38.951.332,00	-165,38		
28 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.608.000,00	-2.738.794,00	-195,22		
29 KECAMATAN KLATEN UTARA	124.056.940,00	123.683.980,00	0,30		
30 KECAMATAN KLATEN TENGAH	124.767.730,00	124.393.770,00	0,30		
31 KECAMATAN KLATEN SELATAN	57.744.273,00	57.370.313,00	0,65		
32 KECAMATAN KALIKOTES	70.998.866,00	70.624.906,00	0,53		
33 KECAMATAN NGAWEN	43.153.081,00	42.779.121,00	0,87		
34 KECAMATAN KEBONARUM	29.617.217,00	29.243.257,00	1,28		
35 KECAMATAN JOGONALAN	33.105.860,00	32.731.900,00	1,14		
36 KECAMATAN GANTIMARNO	3.759.513,00	3.385.553,00	11,05		
37 KECAMATAN PRAMBANAN	14.974.196,00	14.600.256,00	2,56		
38 KECAMATAN MANISRENGGO	14.584.442,00	14.210.482,00	2,63		
39 KECAMATAN KEMALANG	65.972.907,00	65.598.947,00	0,57		
40 KECAMATAN KARANGNONGKO	9.191.684,00	8.817.724,00	4,24		
41 KECAMATAN JATINOM	44.250.358,00	43.876.396,00	0,85		
42 KECAMATAN KARANGNOM	11.610.770,00	11.236.810,00	3,33		
43 KECAMATAN TULUNG	9.042.810,00	8.668.850,00	4,31		
44 KECAMATAN POLANHARJO	44.166.180,00	43.792.220,00	0,85		
45 KECAMATAN DELANGGU	31.412.242,00	31.038.282,00	1,20		
46 KECAMATAN JUWIRING	66.535.700,00	66.161.740,00	0,57		
47 KECAMATAN WONOSARI	8.130.154,00	7.756.194,00	4,82		
48 KECAMATAN CEPER	28.472.195,00	29.098.235,00	1,29		
49 KECAMATAN PEDAN	6.414.205,00	6.040.245,00	6,19		
50 KECAMATAN KARANGDOWO	73.073.604,00	72.692.644,00	0,51		
51 KECAMATAN KARANGDOWO	60.460.808,00	60.086.848,00	0,62		
52 KECAMATAN CAWUS	41.328.930,00	40.954.970,00	0,91		
53 KECAMATAN TRUCUK	52.812.952,00	52.438.992,00	0,71		
54 KECAMATAN BAYAT	4.543.412,00	4.169.452,00	8,97		
55 KECAMATAN KABUPATEN	67.999.857,00	67.709.857,00	0,43		
56 KECAMATAN KLATEN	4.379.000,00	4.089.000,00	7,09		
57 KECAMATAN TONGGALAN	4.196.128,00	4.096.128,00	7,42		
58 KECAMATAN MOJATAN	10.526.690,00	10.226.690,00	2,83		
59 KECAMATAN BUNTALAN	3.941.570,00	3.651.570,00	7,94		
60 KECAMATAN BARENG	11.771.214,00	11.481.214,00	2,53		
61 KECAMATAN BARENGLOK	9.760.700,00	9.470.700,00	3,06		
62 KECAMATAN GERGUNGUNG	290.000,00	9.292.139,00	0,00		
63 KECAMATAN GA YAMPIT	9.582.139,00	32.416.084,00	3,12		
64 KANTOR KEJAHAN JATINOM	32.706.084,00	78.257.234,00	0,89		
65 KANTOR KEJAHAN KABUPATEN	78.547.234,00	78.257.234,00	0,37		
66 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2.854.840,00	2.438.900,00	17,05		
67 KANTOR ARSIP DAN PERUSTAKAAN	2.231.409.825,00	2.190.215.425,00	1,88		
68 DINAS PERTANIAN	1.799.551.920,00	1.787.965.920,00	0,65		
Jumlah	260.590.146.677,63	242.538.567.597,62	7,44		



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp88.444.314.356,00 mengalami kenaikan senilai Rp8.416.424.945,00 atau 10,52 % dari Tahun 2015 senilai Rp.80.027.889.411,00 dengan rincian sebagai berikut:

Konstruksi Dalam Pengerjaan	31-Des-16	31-Des-15	Tren %
	Rp	Rp	
1 Dinas kesehatan	74.650.000,00	74.650.000,00	-
2 Rumah Sakit Umum Daerah	146.955.000,00	146.955.000,00	-
3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	86.415.042.256,00	78.177.893.711,00	10,54
4 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	974.840.700,00	835.549.300,00	16,67
5 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	174.311.900,00	174.311.900,00	-
6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	376.552.500,00	-	-
7 Satuan Polisi Pamong Praja	39.985.000,00	376.552.500,00	(89,38)
8 Kantor Ketahanan Pangan	47.135.000,00	47.135.000,00	-
9 Kantor Arsip dan Perpustakaan	147.377.000,00	147.377.000,00	-
10 Dinas Pertanian	47.465.000,00	47.465.000,00	-
Jumlah	88.444.314.356,00	80.027.889.411,00	10,52

7. Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

Perhitungan penyusutan aset tetap diterapkan mulai tahun 2015 didasarkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Klaten Saldo Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Akumulasi Penyusutan		31 Desember 2016	31 Desember 2015	Tren
	Rp	Rp	%	
1 DINAS PENDIDIKAN	(7.002.780.074,00)	-114.504.526.706,00	(93,88)	
2 TK Negeri	(359.288.319,00)	-635.421.285,00	(43,46)	
3 SMP Negeri se Kabupaten	(120.923.130.595,40)	-185.555.721.638,63	(34,83)	
4 SMA Negeri se Kabupaten	(36.206.170.313,83)	-57.429.665.963,83	(36,56)	
5 SMK Negeri se Kabupaten	(49.257.888.434,54)	-82.706.373.439,08	(40,44)	
6 SKB	(542.765.786,00)	-936.465.727,00	(42,04)	
7 Dinas Pendidikan Kecamatan	(276.815.626.370,43)	-447.365.075.833,89	(38,12)	
8 DINAS KESEHATAN	(4.797.058.516,22)	-4.465.976.836,22	7,41	
9 PUSKESMAS	(60.018.675.345,00)	-52.276.902.580,00	14,81	
10 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	(13.173.774.819,00)	-2.040.261.059,00	545,69	
11 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM	(507.842.848.011,00)	-491.821.854.050,00	3,26	
12 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(2.818.419.942,00)	-2.238.800.033,00	25,89	
13 DINAS PERHUBUNGAN	(6.285.982.914,00)	-5.337.652.661,00	17,77	
14 BADAN LINGKUNGAN HIDUP	(3.233.306.430,00)	-2.500.199.423,00	29,32	
15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(2.416.987.761,00)	-1.772.608.469,00	36,35	
16 KANTOR PEMERDAKATAN PEREMPUN DAN KELUARGA BERENCANA	(3.250.466.625,00)	-2.530.779.555,00	28,44	
17 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(2.173.316.888,00)	-1.692.988.269,00	28,37	
18 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM	(9.050.957.913,00)	-7.762.619.354,00	16,60	
19 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	(7.840.737.875,00)	-7.735.681.578,00	7,77	
20 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(520.229.357,00)	-400.546.115,00	29,88	
21 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(1.575.070.004,00)	-1.166.927.499,00	34,97	
22 SEKRETARIAT DAERAH	(18.984.756.158,00)	-17.063.010.907,00	11,26	
23 SEKRETARIAT DPRD	(4.673.845.841,00)	-5.612.353.749,00	(16,72)	
24 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(18.407.164.651,00)	-12.957.386.019,00	42,06	
25 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	(1.073.884.735,00)	-953.860.143,00	12,58	
26 INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN	(1.717.659.541,00)	-1.428.993.412,00	20,20	
27 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	(1.656.496.369,00)	-1.588.274.964,00	4,30	
28 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(7.615.141.012,00)	-6.955.788.082,00	9,48	
29 KECAMATAN KLATEN UTARA	(284.535.351,00)	-348.804.566,00	(18,43)	
30 KECAMATAN KLATEN TENGAH	(349.503.385,00)	-412.260.369,00	(15,22)	
31 KECAMATAN KLATEN SELATAN	(408.397.099,00)	-470.465.111,00	(13,99)	
32 KECAMATAN KAIKOTES	(289.818.376,00)	-340.958.500,00	(15,00)	
33 KECAMATAN NGAWEN	(387.587.402,00)	-327.613.728,00	18,31	
34 KECAMATAN KEBONARUMI	(721.344.943,00)	-748.920.341,00	(3,68)	
35 KECAMATAN WEDI	(361.230.120,00)	-420.447.473,00	(14,08)	
36 KECAMATAN JOGONALAN	(218.120.663,00)	-365.264.446,00	(40,28)	
37 KECAMATAN GANTIMWARNO	(655.008.051,00)	-674.900.448,00	(2,95)	
38 KECAMATAN PRAMBANAN	(581.207.697,00)	-634.134.713,00	(8,35)	
39 KECAMATAN MANISRENGGO	(375.334.544,00)	-426.847.163,00	(12,07)	
40 KECAMATAN KEMALANG	(874.848.214,00)	-906.337.231,00	(3,47)	
41 KECAMATAN KARANGONONGKO	(243.021.208,00)	-306.176.503,00	(20,63)	
42 KECAMATAN JATINOM	(438.430.438,00)	-503.998.776,00	(13,01)	
43 KECAMATAN POLANHARJO	(380.739.609,00)	-443.945.333,00	(14,24)	
44 KECAMATAN TULUNG	(283.074.036,00)	-345.547.439,00	(18,08)	
45 KECAMATAN DELANGGU	(243.239.927,00)	-299.905.527,00	(18,89)	
46 KECAMATAN JUMIRING	(1.240.966.155,00)	-1.301.023.315,00	(4,62)	
47 KECAMATAN WONOSARI	(311.040.661,00)	-369.860.546,00	(15,90)	
48 KECAMATAN WONOSARI	(559.230.796,00)	-616.687.288,00	(9,32)	
49 KECAMATAN CEPER	(392.660.454,00)	-457.631.558,00	(14,20)	
50 KECAMATAN PEDAN	(418.501.978,00)	-491.212.639,00	(14,80)	
51 KECAMATAN KARANGDOWO	(267.788.355,00)	-338.956.406,00	(21,00)	
52 KECAMATAN CAMAS	(822.115.376,00)	-856.928.002,00	(4,06)	
53 KECAMATAN TRUCUK	(484.933.340,00)	-536.524.397,00	(9,62)	
54 KECAMATAN BAYAT	(581.565.788,00)	-543.891.451,00	6,93	
55 KECAMATAN KABUPATEN	(261.097.879,00)	-211.315.584,00	23,56	
56 KECAMATAN KLATEN	(414.960.291,00)	-358.388.162,00	15,79	
57 KECAMATAN TONGGALAN	(973.240.685,00)	-956.649.281,00	1,73	
58 KECAMAHAN MOJAYAN	(91.961.215,00)	-82.254.634,00	11,80	
59 KECAMAHAN BUNTALAN	(2.144.005.779,00)	-1.725.835.066,00	24,23	
60 KECAMAHAN BARENG	(285.888.302,00)	-212.169.280,00	34,75	
61 KECAMAHAN BARENGLOR	(196.048.962,00)	-167.296.880,00	17,19	
62 KECAMAHAN GERGUNUNG	(219.608.062,00)	-163.207.374,00	34,56	
63 KECAMAHAN GAYAMPIT	(524.567.716,00)	-476.130.364,00	10,17	
64 KANTOR KETAHANAN LATINOM	(326.950.883,00)	-255.302.012,00	28,06	
65 KANTOR KETAHANAN PANGAN	(599.901.449,00)	-520.989.214,00	15,15	
66 BADAN PEMERDAKATAN MASYARAKAT	(966.035.229,00)	-847.080.363,00	14,04	
67 KANTOR ARSIP DAN PERUSTAKAN	(1.916.717.977,00)	-1.747.260.399,00	9,70	
68 DINAS PERTANIAN	(9.387.947.921,00)	-7.856.282.886,00	19,50	
Jumlah	-1.200.717.606.916,43	-1.548.046.330.138,64	6,08	



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-ESDM) mengadakan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Menara Masjid Agung yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak nomor 602.1/658/17 tanggal 9 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.768.700.000,00. Dalam kontrak disebutkan bahwa jadwal pelaksanaan pekerjaan selama 240(dua ratus empat puluh) hari kalender. terhitung sejak April 2015 sampai dengan 11 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Sampai dengan tanggal 4 April 2016, pelaksanaan pekerjaan menara masjid agung belum selesai dilaksanakan. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan dari PPKom pekerjaan Menara Masjid Agung diperoleh penjelasan bahwa pekerjaan belum selesai karena beberapa kronologi yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan menara masjid belum selesai yaitu:

1. Pada tanggal 23 April 2015 *Pre Construction Meeting* bertempat di Dinas PU dan ESDM;
2. *Uitizet* dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015;
3. Pencairan uang muka (20%) tanggal 30 April 2015 kepada PT. Tirtadhe Addonics Pratama an Dr. Agus Setyawan;
4. Pada risalah rapat Direksi nomor 04.RR/PWS-KP/MKPMMA/V/2015. tanggal 26 Mei 2015 diputuskan untuk melaksanakan perubahan konstruksi *sub structure*. misalnya pembesaran dimensi boorpile dari dia 40cm menjadi 60cm dan lain-lain;
5. Merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 26 ayat (1) "jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencanaan atau pengawas konstruksi. dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain. maka perencanaan atau pengawas konstruksi wajib bertanggungjawab sesuai dengan profesi dan dikenakan ganti "rugi" konsultan pengawas memberikan masukan dengan mempertimbangkan:
 - Lokasi pekerjaan merupakan wilayah lintasan gempa (KRB);
 - Lokasi menara akan difungsikan sebagai area publik/tempat wisata.Untuk dikaji kembali perhitungan struktur dan desain bangunan Menara Masjid Agung.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

6. Atas dasar hal tersebut di atas PPKom mengeluarkan Surat Perintah kepada Konsultan Perencana nomor 600/216/CK/V/2015. perihal perintah pengecekan desain kegiatan pembangunan menara masjid agung;
7. CV Pakar Semi selaku konsultan perencana mengeluarkan kajian teknis hasil pengecekan kembali design dan perhitungan struktur dokumen perencanaan;
8. Pada tanggal 27 Mei 2015 dikeluarkan berita acara perubahan desain nomor 01/BA.DESIGN/PMAA/V/2015. mengenai perubahan dimensi *boorpile* dan besi tulangan;
9. Pada tanggal 1 Juli 2015 dikeluarkan berita acara perubahan design nomor 02/BA.DESIGN/PMAA/VII/2015. mengenai perubahan ketebalan dinding *shear wall* sampai elevasi +11.25m dan elevasi diatas +11.25m;
10. Pada tanggal 8 Juli 2015 Addendum I nomor 601/2566/17.

Dasar perubahan/kronologis:

- Masukan dari Konsultan Supervisi pada meeting kegiatan agar perencana mengecek ulang perhitungan konstruksi bangunan menara;
- PPKom memerintahkan Konsultan Perencana untuk menghitung ulang perhitungan konstruksi;
- Hasil kajian teknis oleh Konsultan Perencana terhadap konstruksi bangunan menara;
- Hasil kajian teknis disetujui PPKom dan dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Design yang ditandatangani Konsultan Perencana. Konsultan Supervisi. Kontraktir. Direksi Teknis (PPKom. Asisten Teknis. Pengawas) dan Ka. Dinas PU & ESDM
- Kontraktor mengajukan perubahan MC-1 kepada PPKom;
- PPKom memerintahkan Konsultan Supervisi untuk melakukan pengecekan dan membuat kajian teknis;
- PPKom memerintahkan Tim Peneliti Kontrak untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi Ajuan MC-1
- Laporan Tim Peneliti Kontrak kepada PPKom;
- Persetujuan PPKom dan penandatanganan Addendum I.



Adapun perubahan/MC I yang disepakati:

- Perubahan dimensi *boorpile shear wall* dari diameter 40cm menjadi 60cm;
- Perubahan dimensi *file cap shear wall* dari dimensi 320x320x70 (digabung);
- Penambahan penulangan pada *shear wall. sloof*. kolom dan balok;
- Pengurangan pekerjaan ornamen GRC;

11. Pada tanggal 12 Agustus 2015 PPKom mengerinkan surat kepada kontraktor tentang keterlambatan laporan administrasi;

12. Pada tanggal 28 September 2015 dilakukan pencairan MC 1.2.3.4.5.6

13. Pada tanggal 1 Oktober 2015 dikeluarkan berita acara perubahan desain nomor 03/BA.DESIGN/PMMAA/X/2015. mengenai perubahan ketebalan dinding *shear wall pit lift* pada elevasi -3.75m s/d +2.25m dan elevasi diatas +2.25m;

14. Pada tanggal 30 Oktober 2015 dikeluarkan berita acara perubahan desain nomor 04/BA.DESIGN/PMMAA/X/2015. mengenai perubahan konstruksi diatas elevasi +35.00m menggunakan struktur baja;

15. Pada tanggal 24 Nopember 2015 pencairan MC-7

16. Pada tanggal 27 November 2015 Addendum II Nomor 601/4010/17. Dasar : kajian teknis dari Konsultan Perencana.

Adapun perubahan/MC II yang disepakati:

- Perubahan ketebalan *shear wall pit lift*:
 - Elevasi -1.75 s/d +2.25 tebal 25cm;
 - Elevasi +7.25 s/d +35.5 tebal 17.5cm
- Penambahan platudukan baja elevasi 35.5 tebal 30cm;
- Perubahan konstruksi elevasi 35.5 s/d 56.70 dari *shear wall* menjadi konstruksi baja:
 - Tangga darurat elevasi -2.25 s/d +29.00
 - Pengurangan ketinggian lift dari 45m menjadi 35.5m;
 - Pengurangan pekerjaan fire alarm;



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

17. Pada tanggal 1 Desember 2015. Addendum III nomor 601/4138/17 perihal perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2015. Dasar : Kontraktor mengajukan penambahan waktu atas perubahan-perubahan desain yang terjadi selama pelaksanaan;
18. Pada tanggal 30 Desember 2015 Addendum IV nomor 601/4392/17 perihal pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dengan denda selama 50 hari dari 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015.
- Kontraktor dibayar 97.124% terdiri atas program pekerjaan dan material on site;
 - Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan s/d/ 100%;
19. Pada tanggal 30 Desember 2015 pihak kontraktor bersedia menyerahkan jaminan berupa cek sebesar Rp1.076.870.000,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
20. Pada tanggal 31 Desember 2015 PPKom mengirim surat kepada kontraktor perihal permintaan Bank Garansi untuk segera diserahkan kepada PPKom;
21. Pada tanggal 14 Januari 2016 PPKom mengirimkan surat teguran kepada kontraktor perihal kegiatan pelaksanaan pembangunan menara masjid agung nomor 600/043/CK/I/2016;
22. Pada tanggal 18 Februari 2016 PPKom mengeluarkan berita acara evaluasi akhir waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan nomor 600/181/CK/II/2016.
23. Pada tanggal 19 Februari 2016 PPKom meminta Kepala Kontraktor agar segera menyerahkan jaminan pemeliharaan.
24. Jaminan pemeliharaan diserahkan kepada PPKom.

1.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.019.210.084,00 dana tersebut digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten tahun 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 5.4.1.4
Rincian Dana Cadangan
Per 31 Desember 2016

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
			Tambah	Kurang		
1	Dana Cadangan	0.00	3.019.210.084,00	0.00	3.019.210.084,00	
	Jumlah	0.00	3.019.210.084,00	0.00	3.019.210.084,00	

1.5 Aset Lainnya

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/dikuasai dan/atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2016 dan 2015 yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

ASET LAINNYA		31-Des-16	31-Des-16	Tren
		Rp	Rp	%
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara	-	-	-
2	Kemitraan Dengan Pihak ketiga	10.138.665.074,00	10.138.665.074,00	-
3	Aset Tidak Berwujud	7.757.994.761,00	4.043.673.966,80	91,855
	Software	1.449.143.595,00	850.105.008,00	70,466
	Kajian	10.435.845.914,00	7.647.067.132,00	36,469
	Akumulasi/ Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(4.126.994.748,00)	(4.453.498.173,20)	(7,331)
4	Aset Lain-lain	92.065.860.207,00	63.132.580.292,00	45,829
	Barang Rusak Berat	172.957.223.419,51	127.747.418.780,51	35,390
	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(80.891.363.212,51)	(64.614.838.488,51)	25,190
	Jumlah	109.962.520.042,00	77.314.919.332,80	42,227

Aset Lainnya sebesar Rp109.962.520.042,00 terdiri dari:

1. Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp0,00 merupakan Tuntutan Ganti Rugi yang sudah jatuh tempo dan di reklasifikasikan ke Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp10.138.665.074,00 merupakan bentuk kerjasama dan nilai-nilai yang tersaji dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2016 dan 2015 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Kemiripan dengan Pihak Ketiga		31 Desember 2016	31 Desember 2015	Tren
		Rp	Rp	%
1	Utang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	10.138.665.074,00	10.138.665.074,00	0,00
Jumlah		10.138.665.074,00	10.138.665.074,00	0,00

Dan dapat di jelaskan lebih rinci sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Ket
1	Pembangunan Pasar Klaten	1.204.935.074,00	1.204.935.074,00	
2	Pembangunan Pasar Delanggu	5.451.030.000,00	5.451.030.000,00	
3	Pembangunan Pasar Pedan	3.482.700.000,00	3.482.700.000,00	
	Jumlah	10.138.665.074,00	10.138.665.074,00	

1. Pembangunan Plaza Klaten

Pembangunan Plaza Klaten dikerjasamakan dengan PT. Inti Griya Prima Sakti (PT. IGPS) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 051/1481/1991 dan Nomor 159/SK/IGPS/VIII/91 tanggal 22 Agustus 1991 tentang Kerjasama Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pelataran Serba Ada (Plasa) Klaten. yang kemudian telah dilakukan perubahan sesuai dengan Adendum Nomor 051/1892/1995 dan Nomor 028/SK/IGPS/XI/1995 tanggal 30 Nopember 1995. Perjanjian dimaksud mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyerahan Modal Daerah pada pihak ketiga. serta peraturan-peraturan. ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

Dalam rangka kerjasama tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan tanah seluas 14.102 M² beserta bangunan bekas Pasar Klaten yang terletak di Jalan Pemuda Klaten. Sedangkan PT. IGPS melaksanakan pembangunan dan menanggung seluruh biayanya. yang meliputi pembuatan kios/los sementara untuk menampung pedagang; terminal angkutan dan bongkar muat barang; lapangan parkir dan jalan lingkungan; gardu retribusi; bangunan ruko (rumah toko); bangunan kios dan los pasar; bangunan plasa; Kantor Pengelola Plasa; serta fasilitas bangunan berupa: air bersih. kamar mandi. WC. musholla. tempat penitipan sepeda. *fire hydrant*. pos satpam. instalasi listrik. eskalator. bak sampah. dan pertamanan.

Tanah yang diserahkan tersebut merupakan bagian dari Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 29 September 1992 seluruhnya seluas 22.348 m². Atas tanah yang diserahkan kepada PT. IGPS tersebut diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 163 tanggal 23 April 1993 selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 3 Pebruari 1993 dan berakhir tanggal 3 Pebruari 2023. Sedangkan sesuai adendum perjanjian tanggal 30 Nopember 1995 tersebut. jangka waktu perjanjian ditetapkan selama 25 tahun terhitung sejak perjanjian awal tanggal 22 Agustus 1991 dan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

berakhir pada tanggal 22 Agustus 2016 atau tujuh tahun sebelum HGB tersebut berakhir. Namun Pasal 4 menyebutkan Kepada PT. IGPS diberikan hak guna bangunan (HGB) selama 25 (dua puluh lima) tahun diatas HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten. terhitung sejak dikeluarkannya keputusan tentang Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tanggal 23 April 1993 no. 163. Sehingga 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak dikeluarkannya keputusan tentang Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tanggal 23 April 1993 no. 163 akan berakhir pada tanggal 23 April 2018. Pada saat perjanjian berakhir PT. IGPS wajib menyerahkan tanah (HGB) dan bangunan yang dibangun kepada Pemerintah Kabupaten Klaten.

Nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten dihitung berdasarkan nilai tanah dan bangunan bekas pasar. Tanah tersebut ditaksir berharga Rp75.000,00 per m² atau seluruhnya senilai Rp1.057.650.000,00 (14.102 m² x Rp75.000,00/m²) dan bangunan bekas pasar ditaksir senilai Rp147.285.074,00. Dengan demikian nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten seluruhnya sebesar Rp1.204.935.074,00 (Rp1.057.650.000,00 + Rp147.285.074,00). Sedangkan nilai saham PT IGPS dihitung berdasarkan jumlah biaya untuk membangun bangunan dan kelengkapannya tersebut. yang ditaksir sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruhnya sebesar Rp12.366.700.000,00 yang kemudian diubah sesuai adendum tanggal 30 Nopember 1995 menjadi sebesar Rp13.610.259.000,00.

Penilaian dan penyajian kerjasama kemitraan dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan metode ekuitas. yaitu seluruh nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp1.204.935.074,00.

2. *Pembangunan Pasar Delanggu*

Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT. KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2007 dan Nomor 11/ADM-SPK/KBBP/11/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m² di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m² di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m². Tanah tersebut diserahkan kepada pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama. Berdasarkan NJOP tanah per m² pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp702.000,00 per m² maka nilai tanah Pasar Delanggu adalah sebesar Rp5.451.030.000,00 (7.765 m² x Rp702.000,00). Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Delanggu dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2013. Sedangkan PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

beserta fasilitasnya di Pasar Delangu sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp17.074.948.000,00.

3. *Pembangunan Pasar Pedan*

Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan (PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas 4.230 m² dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m² keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m² (4.230 m² + 7.990 m²). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun. Perhitungan nilai atas tanah yang dikerjakamkan tersebut didasarkan atas NJOP tanah per m² pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp285.000,00. Sehingga nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp3.482.700.000,00 (12.220 m² x Rp285.000,00). Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Pedan dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2013. Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m² dan 785 los seluas 2.622,91 m² beserta fasilitasnya di Pasar Pedan sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp36.965.910.000,00.

3. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset tak berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2016 senilai Rp 7.757.994.761,00 berupa aplikasi atau *software*. *Kajian dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud* dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Tren
	Rp	Rp	%
1 <i>Software</i>	1.449.143.595,00	880.105.000,00	70,47
2 <i>Kajian</i>	10.453.845.914,00	7.647.067.132,00	36,47
3 <i>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</i>	(4.126.994.748,00)	(4.453.498.172,20)	-7,23
Jumlah	7.757.994.761,00	4.033.573.966,80	91,86

1) *Software*

Software per 31 Desember 2016 senilai Rp1.449.143.595,00 mengalami kenaikan senilai Rp599.038.587,00 atau 70,47% dibandingkan per 31 Desember 2015 senilai Rp850.105.008,00 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Salvare	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Tren %
	Rp	Rp	
1 DINAS PENDIDIKAN	93.210.000,00	93.210.000,00	0,00
2 DINAS KESERAHAN	24.753.188,00	24.753.188,00	0,00
3 PUSKESMAS	310.672.349,00	148.072.349,00	150,33
4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	147.417.687,00	0,00	0,00
5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	60.872.250,00	0,00	0,00
6 DINAS PERBURUHAN	100.783.500,00	52.399.500,00	92,34
7 BADAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00
8 SEKRETARIAT DAERAH	179.148.645,00	155.828.995,00	15,09
9 DINAS PENDAPATAN, PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	247.735.162,00	247.735.162,00	0,00
10 KANTOR PEMANAJAN MODAL DAN PERENCANAAN TERPADU	96.290.000,00	0,00	0,00
11 BADAN PENGAWASAN DAERAH	123.049.020,00	123.049.020,00	0,00
12 BADAN PENGANGKUTAN BERKAWA DAERAH	5.058.799,00	5.058.799,00	0,00
Jumlah	1.449.143.595,00	850.046.008,00	70,47

2) Kajian

Kajian per 31 Desember 2016 senilai Rp10.435.845.914,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.788.778.782,00 atau 36,47% dibandingkan per 31 Desember 2015 senilai Rp7.647.067.132,00 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

Kajian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Tren %
	Rp	Rp	
1 DINAS KESEHATAN	0,00	527.670.250,00	-100,00
2 PUSKESMAS	112.794.450,00	0,00	0,00
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	759.239.502,00	0,00	0,00
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.492.391.032,00	6.552.572.932,00	35,18
5 DINAS PERBURUHAN	551.418.000,00	301.831.100,00	82,69
6 BADAN LINGKUNGAN HIDUP	433.797.050,00	433.797.050,00	0,00
7 DINAS PENDAPATAN, PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	34.056.000,00	34.056.000,00	0,00
8 BADAN PENGANGKUTAN BERKAWA DAERAH	97.139.800,00	97.139.800,00	0,00
Jumlah	10.435.845.914,00	7.647.067.132,00	36,47

3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2016 senilai Rp4.126.994.748,00 mengalami penurunan senilai Rp326.503.425,20 atau 7,33% dibandingkan per 31 Desember 2015 senilai Rp(4.453.498.173,20) dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2016		31 Desember 2015		Tren %
	Rp		Rp		
1 DINAS PENDIDIKAN		(31.264.000,00)		(31.264.000,00)	0,00
2 DINAS KESEHATAN		-		(326.503.425,20)	-100,00
3 PUSKESMAS		(59.228.939,60)		(59.228.939,60)	0,00
4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		-		-	0,00
5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		(3.227.604.461,20)		(3.227.604.461,20)	0,00
6 DINAS PERUBUHAN		(192.321.740,00)		(192.321.740,00)	0,00
7 BADAN LINGKUNGAN HIDUP		(234.530.610,00)		(234.530.610,00)	0,00
8 SEKRETARIAT DAERAH		(62.231.598,00)		(62.231.598,00)	0,00
9 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		(211.810.529,60)		(211.810.529,60)	0,00
10 KANTOR PEMERINTAHAN MODAL DAN PERENCANAAN TERPADU		-		-	0,00
11 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		(61.004.232,00)		(61.004.232,00)	0,00
12 BADAN PEMBANGUNANGAN BENCANA DAERAH		(40.878.637,60)		(40.878.637,60)	0,00
		(4.126.594.748,00)		(4.433.998.173,20)	(7,33)
Jumlah					

4. Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kejadian atau transaksi yang menyebabkan timbulnya saldo aset lain-lain. Saldo Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 senilai Rp 62.396.056.895,00 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lain-lain		31 Desember 2016	31 Desember 2015	Tren
		Rp	Rp	%
1	Barang Rusak berat	172.957.223.419,51	127.747.418.780,51	35,39%
2	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	- 80.891.363.212,51	- 64.614.838.488,51	25,19%
Jumlah		92.065.860.207,00	63.132.580.292,00	45,83%

1) Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2016 senilai Rp.172.957.223.419,51 mengalami kenaikan senilai Rp 45.209.804.639,00 atau 35,39% dibandingkan per 31 Desember 2015 senilai Rp.127.747.418.780,51 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

Barang Rusak Berat	31 Desember 2016	31 Desember 2015	Tren
	Rp	Rp	%
1 DINAS PENDIDIKAN	104.092.104,00	104.062.104,00	0,03%
2 TK Negeri	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00%
3 SMP Negeri se Kabupaten	19.178.267.238,96	18.266.941.381,96	4,99%
4 SMA Negeri se Kabupaten	3.954.398.886,00	3.954.398.282,00	0,00%
5 SMK Negeri se Kabupaten	4.830.583.511,00	4.830.583.511,00	0,00%
6 SKB	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00%
7 Dinas Pendidikan Kecamatan	35.653.035.753,56	35.653.036.427,56	0,00%
8 DINAS KESEHATAN	982.169.675,00	1.006.922.863,00	-2,46%
9 PUSKESMAS	45.132.516.784,00	45.269.220.501,00	-0,30%
10 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM	53.299.450.564,00	5.863.432.428,00	809,01%



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	316.729.917,00	2.936.426.407,00	-89,21%
12	DINAS PERHUBUNGAN	162.019.357,00	263.102.457,00	-38,42%
13	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	333.877.455,00	462.615.555,00	-27,83%
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	444.620.286,00	444.620.286,00	0,00%
15	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	54.305.600,00	54.305.600,00	0,00%
16	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	331.444.800,00	331.444.800,00	0,00%
17	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM	507.913.429,00	507.913.429,00	0,00%
18	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	818.935.860,00	818.935.860,00	0,00%
19	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.309.119,00	18.309.119,00	0,00%
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	200.010.803,00	200.010.803,00	0,00%
21	SEKRETARIAT DAERAH	1.426.341.062,00	1.586.970.057,00	-10,12%
22	SEKRETARIAT DPRD	94.629.103,00	94.629.103,00	0,00%
23	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	823.812.209,00	720.595.209,00	14,32%
24	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	95.995.106,00	95.995.106,00	0,00%
25	INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN	205.369.817,00	205.369.817,00	0,00%
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	118.588.259,00	182.714.159,00	-35,10%
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	474.318.399,00	479.375.193,00	-1,05%
28	KECAMATAN KLATEN UTARA	67.131.783,00	67.131.783,00	0,00%
29	KECAMATAN KLATEN TENGAH	36.045.000,00	36.045.000,00	0,00%
30	KECAMATAN KLATEN SELATAN	57.978.900,00	57.978.900,00	0,00%
31	KECAMATAN KALIKOTES	21.765.485,00	21.765.485,00	0,00%
32	KECAMATAN NGAWEN	57.556.005,00	57.556.005,00	0,00%
33	KECAMATAN KEBONARUM	44.175.000,00	44.175.000,00	0,00%
34	KECAMATAN WEDI	30.349.476,00	30.349.476,00	0,00%
35	KECAMATAN JOGONALAN	35.809.585,00	35.809.585,00	0,00%
36	KECAMATAN PRAMBANAN	68.816.000,00	68.816.000,00	0,00%
37	KECAMATAN MANISRENGGO	43.298.725,00	43.298.725,00	0,00%
38	KECAMATAN KEMALANG	201.566.355,00	201.566.355,00	0,00%
39	KECAMATAN KARANGNONGKO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%
40	KECAMATAN JATINOM	26.093.000,00	26.093.000,00	0,00%
41	KECAMATAN KARANGANOM	31.320.000,00	31.320.000,00	0,00%
42	KECAMATAN TULUNG	22.336.476,00	22.336.476,00	0,00%
43	KECAMATAN POLANHARJO	23.776.450,00	23.776.450,00	0,00%



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

44	KECAMATAN DELANGU	92.386.070,00	92.386.070,00	0,00%
45	KECAMATAN JUWIRING	50.228.866,00	50.228.866,00	0,00%
46	KECAMATAN WONOSARI	175.765.680,00	175.765.680,00	0,00%
47	KECAMATAN CEPER	30.738.477,00	30.738.477,00	0,00%
48	KECAMATAN PEDAN	42.325.700,00	42.325.700,00	0,00%
49	KECAMATAN KARANGDOWO	21.004.500,00	21.004.500,00	0,00%
50	KECAMATAN CAWAS	93.074.625,00	93.074.625,00	0,00%
51	KECAMATAN TRUCUK	67.299.793,00	67.299.793,00	0,00%
52	KECAMATAN BAYAT	141.211.640,00	141.211.640,00	0,00%
53	KELURAHAN KABUPATEN	28.559.580,00	28.559.580,00	0,00%
54	KELURAHAN KLATEN	7.060.715,00	7.060.715,00	0,00%
55	KELURAHAN TONGGALAN	17.971.375,00	17.971.375,00	0,00%
56	KELURAHAN MOJAYAN	5.969.000,00	5.969.000,00	0,00%
57	KELURAHAN BUNTALAN	406.080.000,00	406.080.000,00	0,00%
58	KELURAHAN BARENG	39.128.668,00	39.128.668,00	0,00%
59	KELURAHAN BARENGLOR	990.000,00	990.000,00	0,00%
60	KELURAHAN GERGUNUNG	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00%
61	KELURAHAN GAYAMPIT	110.000,00	110.000,00	0,00%
62	KELURAHAN JATINOM	223.000,00	223.000,00	0,00%
63	KANTOR KETAHANAN PANGAN	38.934.004,00	38.934.004,00	0,00%
64	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	89.302.300,00	89.302.300,00	0,00%
65	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	118.250.256,00	118.250.256,00	0,00%
66	DINAS PERTANIAN	1.123.270.833,00	1.123.270.833,00	0,00%
Jumlah		172.139.535.726,51	127.747.418.780,51	35,39%

2) Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat

Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2016 senilai Rp80.891.363.212,51. bertambah sebesar Rp16.276.524.724,00 nilai dibandingkan per 31 Desember 2015 senilai Rp64.614.838.488,51 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat		31 Desember 2016	31 Desember 2015	Tren
Rp		Rp	Rp	%
1	DINAS PENDIDIKAN	(98.801.909,00)	(98.801.909,00)	0,00
2	TK Negeri	(20.700.000,00)	(20.700.000,00)	0,00
3	SMP Negeri se Kabupaten	(11.928.154.189,96)	(11.928.154.189,96)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

4	SMA Negeri se Kabupaten	(2.599.942.775,00)	(2.599.942.775,00)	0,00
5	SMK Negeri se Kabupaten	(2.973.826.444,00)	(2.973.826.444,00)	0,00
6	SKB	(4.075.000,00)	(4.075.000,00)	0,00
7	Dinas Pendidikan Kecamatan	(20.846.487.462,55)	(20.846.487.462,55)	0,00
8	DINAS KESEHATAN	(959.014.760,00)	(959.014.760,00)	0,00
9	PUSKESMAS	(14.162.887.271,00)	(14.162.887.271,00)	0,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM	(18.678.021.014,00)	(2.401.496.290,00)	677,77
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(283.424.176,00)	(283.424.176,00)	0,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	(150.477.980,00)	(150.477.980,00)	0,00
13	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	(329.179.706,00)	(329.179.706,00)	0,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	(419.619.139,00)	(419.619.139,00)	0,00
15	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(54.305.600,00)	(54.305.600,00)	0,00
16	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(331.444.800,00)	(331.444.800,00)	0,00
17	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMMK	(492.130.219,00)	(492.130.219,00)	0,00
18	DINAS KEBUDAYAAN PARAWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	(811.887.147,00)	(811.887.147,00)	0,00
19	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(10.692.630,00)	(10.692.630,00)	0,00
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(178.231.410,00)	(178.231.410,00)	0,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	(1.315.209.856,00)	(1.315.209.856,00)	0,00
22	SEKRETARIAT DPRD	(89.330.006,00)	(89.330.006,00)	0,00
23	DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(701.980.468,00)	(701.980.468,00)	0,00
24	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	(86.241.423,00)	(86.241.423,00)	0,00
25	INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN	(200.206.175,00)	(200.206.175,00)	0,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	(106.803.400,00)	(106.803.400,00)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(447.699.593,00)	(447.699.593,00)	0,00
28	KECAMATAN KLATEN UTARA	(62.359.668,00)	(62.359.668,00)	0,00
29	KECAMATAN KLATEN TENGAH	(35.775.545,00)	(35.775.545,00)	0,00
30	KECAMATAN KLATEN SELATAN	(57.978.900,00)	(57.978.900,00)	0,00
31	KECAMATANKALIKOTES	(15.565.176,00)	(15.565.176,00)	0,00
32	KECAMATAN NGAWEN	(56.491.796,00)	(56.491.796,00)	0,00
33	KECAMATAN KEBONARUM	(44.132.500,00)	(44.132.500,00)	0,00
34	KECAMATAN WEDI	(26.859.271,00)	(26.859.271,00)	0,00
35	KECAMATAN JOGONALAN	(24.238.064,00)	(24.238.064,00)	0,00
36	KECAMATAN PRAMBANAN	(67.790.250,00)	(67.790.250,00)	0,00
37	KECAMATAN MANISRENGGO	(43.275.808,00)	(43.275.808,00)	0,00
38	KECAMATAN KEMALANG	(197.741.355,00)	(197.741.355,00)	0,00
39	KECAMATAN KARANGNONGKO	(3.300.000,00)	(3.300.000,00)	0,00
40	KECAMATAN JATINOM	(25.309.667,00)	(25.309.667,00)	0,00
41	KECAMATAN KARANGANOM	(31.320.000,00)	(31.320.000,00)	0,00
42	KECAMATAN TULUNG	(21.161.500,00)	(21.161.500,00)	0,00
43	KECAMATAN POLANHARJO	(21.988.742,00)	(21.988.742,00)	0,00
44	KECAMATAN DELANGGU	(69.414.520,00)	(69.414.520,00)	0,00
45	KECAMATAN JUWIRING	(44.971.783,00)	(44.971.783,00)	0,00
46	KECAMATAN WONOSARI	(106.876.810,00)	(106.876.810,00)	0,00
47	KECAMATAN CEPER	(29.784.600,00)	(29.784.600,00)	0,00
48	KECAMATAN PEDAN	(41.715.617,00)	(41.715.617,00)	0,00
49	KECAMATAN KARANGDOWO	(20.998.750,00)	(20.998.750,00)	0,00
50	KECAMATAN CAWAS	(80.073.247,00)	(80.073.247,00)	0,00
51	KECAMATAN TRUCUK	(65.415.462,00)	(65.415.462,00)	0,00
52	KECAMATAN BAYAT	(138.685.190,00)	(138.685.190,00)	0,00
53	KELURAHAN KABUPATEN			0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

		(7.875.000,00)	(7.875.000,00)	
54	KELURAHAN KLATEN	(6.036.736,00)	(6.036.736,00)	0,00
55	KELURAHAN TONGGALAN	(17.971.375,00)	(17.971.375,00)	0,00
56	KELURAHAN MOJAYAN	(605.000,00)	(605.000,00)	0,00
57	KELURAHAN BUNTALAN	(137.035.500,00)	(137.035.500,00)	0,00
58	KELURAHAN BARENG	(33.110.000,00)	(33.110.000,00)	0,00
59	KELURAHAN BARENGLOR	(990.000,00)	(990.000,00)	0,00
60	KELURAHAN GERGUNUNG	(9.510.000,00)	(9.510.000,00)	0,00
61	KELURAHAN GAYAMPRI	(110.000,00)	(110.000,00)	0,00
62	KELURAHAN JATINOM	(211.083,00)	(211.083,00)	0,00
63	KANTOR KETAHANAN PANGAN	(31.116.652,00)	(31.116.652,00)	0,00
64	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	(77.748.387,00)	(77.748.387,00)	0,00
65	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	(117.633.146,00)	(117.633.146,00)	0,00
66	DINAS PERTANIAN	(837.411.559,00)	(837.411.559,00)	0,00
	Jumlah	(80.891.363.212,51)	(64.614.838.488,51)	0,00

2. Kewajiban

Akun kewajiban per 31 Desember 2016 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek.

2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.050.386.150,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 5.4.2.1
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2016

No	Uraian	Mutasi			Saldo Akhir
		Saldo Awal	Tambah	Kurang	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	13.644.613,00	175.896.476.318,00	175.894.819.116,00	15.301.815,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	698.946.645,00	853.383.637,00	698.946.645,00	853.383.637,00
3	Utang beban	3.443.178.289,00	1.902.189.534.592,00	1.901.707.635.018,00	3.924.461.621,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	112.794.165,00	3.249.840.862,00	105.395.950,00	3.257.239.077,00
Jumlah		4.268.563.712,00	2.082.189.235.409,00	2.078.406.796.729,00	8.050.386.150,00

2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp15.301.815,00 merupakan utang pemerintah Kabupaten Klaten kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.1
Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2016

No	Ketiga (PFK)	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
1	PPh Pasal 21	112.500,00	2.527.415,00	112.500,00	2.527.415,00
2	PPh Pasal 22				0,00
3	PPh Pasal 23	300.463,00		300.463,00	0,00
4	PFK Lainnya	13.231.650,00	0,00	457.250,00	12.774.400,00
Jumlah		13.644.613,00	2.527.415,00	870.213,00	15.301.815,00

2.1.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 merupakan utang jangka panjang pemerintah Kabupaten Klaten kepada pihak lain yang yang



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka sebesar Rp853.383.637,00 merupakan Pendapatan diterima di muka atas pajak reklame permanen dan insidental.

2.1.4. Utang Beban

Utang beban sebesar Rp3.924.461.621,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Klaten menerima hak atas barang/jasa. termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.1.4
Rincian Utang Beban
Per 31 Desember 2016

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
			Tambah	Kurang		
1	Utang beban Pegawai	1.248.801.766,00	1.239.060.799.332,00	1.239.932.757.081,00	376.227.775,00	
2	Utang beban barang jasa	2.194.376.523,00	97.638.099.555,00	96.284.242.232,00	3.548.233.846,00	
	Jumlah	3.443.178.289,00	1.902.189.534.592,00	1.901.707.635.018,00	3.924.461.621,00	

Rincian Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang Jasa per SKPD/
Bagian dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

NO	Nama SKPD/ Bagian	Jumlah Utang Beban Pegawai
1	Dinas Pendidikan	230.756.439,00
2	Dinas Kesehatan	39.382.858,00
3	RSUD Klaten	28.887.582,00
4	Dinas Perhubungan	4.232.347,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	597.927,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	16.097.171,00
7	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.580.300,00
8	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	421.281,00
9	Badan Kepegawaian Daerah	44.446.892,00
10	Kecamatan Prambanan	899.580,00
11	Kecamatan Karanganyar	849.451,00
12	Kecamatan Delanggu	321.072,00
13	Kecamatan Wonosari	857.231,00
14	Kecamatan Karangdowo	1.198.328,00
15	Kecamatan Trucuk	355.000,00
16	Kecamatan Bayat	608.556,00
17	Dinas Pertanian	4.735.760,00
	Jumlah	376.227.775,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

NO	Nama SKPD/ Bagian	Jumlah Utang Beban Barang dan Jasa
1	Dinas Pendidikan	29.303.118,00
2	Dinas Kesehatan	13.087.552,00
3	RSUD Klaten	1.603.131.543,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	1.658.483.632,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.007.120,00
6	Dinas Perhubungan	8.566.516,00
7	Badan Lingkungan Hidup	846.494,00
8	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1.539.560,00
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	10.677.370,00
10	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	7.453.143,00
11	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.292.253,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	1.315.504,00
13	Bagian Kesra	1.973.800,00
14	Bagian Humas	85.500,00
15	Bagian Umum	126.430.857,00
16	Sekretariat DPRD	13.076.769,00
17	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.542.793,00
18	Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	3.757.450,00
19	Inspektorat Kabupaten Klaten	3.252.691,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.570.615,00
21	Kecamatan Klaten Utara	1.244.034,00
22	Kecamatan Klaten Selatan	927.204,00
23	Kecamatan Kalikotes	313.176,00
24	Kecamatan Ngawen	386.942,00
25	Kecamatan Kebonarum	815.841,00
26	Kecamatan Wedi	1.012.824,00
27	Kecamatan Gantiwarno	472.999,00
28	Kecamatan Prambanan	1.532.169,00
29	Kecamatan Kemalang	2.083.012,00
30	Kecamatan Karangnongko	352.240,00
31	Kecamatan Jatimom	1.187.867,00
32	Kecamatan Karangnom	1.262.787,00
33	Kecamatan Polanharjo	1.055.391,00
34	Kecamatan Delanggu	1.657.927,00
35	Kecamatan Juwiting	1.449.153,00
36	Kecamatan Wonosari	976.639,00
37	Kecamatan Pedan	1.037.135,00
38	Kecamatan Karangdowo	1.048.191,00
39	Kecamatan Cawas	1.271.922,00
40	Kecamatan Trucuk	544.444,00
41	Kecamatan Bayat	1.057.556,00
42	Kelurahan Kabupaten	735.132,00
43	Kelurahan Klaten	1.035.846,00
44	Kelurahan Tonggolan	445.839,00
45	Kelurahan Mojayan	277.470,00
46	Kelurahan Buntalan	44.650,00
47	Kelurahan Barend	288.800,00
48	Kelurahan Barendjor	648.733,00
49	Kelurahan Gergunung	296.184,00
50	Kelurahan Jatnom	402.452,00
51	Kantor Ketahanan Pangan	1.048.700,00
52	Badan Pemberdayaan Masyarakat	1.647.124,00
53	Kantor Arsip dan Perpustakaan	2.709.205,00
54	Dinas Pertanian	12.569.978,00
	Jumlah	3.548.233.846,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya 2016 sebesar Rp3.257.239.077,00 meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp112.794.165,00 merupakan utang bagi hasil pendapatan Pajak dan Retribusi yang belum dibayar.

Tabel 5.4.2.1.5
Rincian Utang Bagi Hasil Pendapatan
Per 31 Desember 2016

N o	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
			Tambah	Kurang		
1	Bagi Hasil Pajak	0,00	3.249.840.862,00	0,00	3.249.840.862,00	
2	Bagi Hasil Retribusi	112.794.165,00	0,00	105.395.950,00	7.398.215,00	
	Jumlah	112.794.165,00	3.249.840.862,00	105.395.950,00	3.257.239.077,00	

2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00

3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.475.537.595,081,42 dengan uraian sebagai berikut:

URAIAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	2.908.051.790.505,36	6.530.222.521.810,67
SURPLUS/DEFISI-LO	117.131.245.535,65	-83.454.501.612,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	18.917.300,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	450.354.559.040,41	-3.538.735.146.993,31
EKUITAS AKHIR	3.475.537.595.081,42	2.908.051.790.505,36

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

D. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2016. LO tahun 2016 disajikan dengan perbandingan laporan tahun 2015.

1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.179.758.785.750,23 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.1
Realisasi Pendapatan – LO
Tahun 2016

(dalam Rupiah)

No	*Pendapatan – LO	2016	2015	Selisih
1	PAD– LO	233.639.324.203,05	207.861.407.887,45	25.777.916.315,60
2	Transfer– LO	1.790.540.797.124,00	1.876.743.453.129,00	- 86.202.656.005,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	155.578.664.423,18	271.410.752.704,00	- 115.832.088.280,82
	Jumlah	2.179.758.785.750,23	2.356.015.613.720,45	- 176.256.827.970,22

1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp233.639.324.203,05 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO
Tahun 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2016	2015	Selisih
	Pendapatan Asli Daerah	233.639.324.203,05	115.006.438.180,00	118.632.886.023,05
1	Pajak Daerah - LO	78.605.427.213,00	85.601.807.254,00	- 6.996.180.041,00
	1. Pajak Hotel - LO	950.795.088,00	799.553.643,00	151.231.445,00
	2. Pajak Restoran - LO	3.007.675.968,00	3.028.809.684,00	- 21.133.716,00
	3. Pajak Hiburan - LO	605.418.605,00	550.865.642,00	54.552.963,00
	4. Pajak Reklame - LO	3.192.244.547,00	2.049.441.916,00	1.142.802.631,00
	5. Pajak Penjualan Jalan - LO	31.511.746.370,00	29.629.973.048,00	1.881.773.322,00
	6. Pajak Pakir - LO	885.723.050,00	417.692.575,00	468.030.475,00
	7. Pajak Air Tanah - LO	1.403.955.300,00	1.408.719.128,00	- 4.763.828,00
	8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	3.704.434.000,00	2.209.433.250,00	1.495.000.750,00
	9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	23.831.983.800,00	35.539.941.682,00	- 11.707.957.882,00
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) LO	9.511.450.485,00	9.967.166.686,00	- 455.716.201,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2016	2015	Selisih
2	Retribusi Daerah - LO	22.006.365.687,00	21.926.879.886,00	79.485.801,00
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	9.004.577.875,00	9.259.495.937,00	254.918.062,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	399.448.130,00	391.833.760,00	7.614.370,00
3.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat - LO	2.840.000,00	4.650.000,00	1.810.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pakir di Tepi Jalan Umum - LO	872.782.000,00	861.673.000,00	11.107.000,00
5.	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	3.207.417.176,00	2.924.185.921,00	283.231.255,00
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	971.713.370,00	969.789.240,00	1.924.130,00
7.	Pemertkasan Alat Pemadam Kebakaran	6.300.000,00		6.300.000,00
8.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	41.600.000,00	40.100.000,00	1.500.000,00
9.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	934.192.100,00	782.548.200,00	151.643.900,00
10.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perikanan - LO	451.074.124,00	438.272.984,00	12.801.140,00
11.	Retribusi Terminal - LO	444.331.500,00	414.540.000,00	29.791.500,00
12.	Retribusi Rumah Polong Hewan - LO	84.865.000,00	84.930.000,00	65.000,00
13.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	1.071.879.500,00	977.685.500,00	94.194.000,00
14.	Retribusi Penjualan Produkksi Usaha Daerah - LO	64.300.000,00	65.245.000,00	945.000,00
15.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	3.147.501.412,00	3.427.495.844,00	279.994.432,00
16.	Retribusi Izin Gangguan - LO	1.195.935.500,00	1.279.782.500,00	83.847.000,00
17.	Retribusi Izin Trayek - LO	2.555.000,00	4.650.000,00	2.095.000,00
18.	Retribusi Perpanjangan Izin Memperjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	103.053.000,00		103.053.000,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disihkan - LO	11.981.189.864,86	7.477.951.040,00	4.503.218.824,86
1.	PT Bank Jateng	4.935.742.486,00	4.234.524.756,00	701.217.740,00
2.	PDAM	3.328.975.906,00	2.415.026.000,00	913.949.906,00
3.	PD BPR Bank Klaten	3.070.259.385,00	709.646.000,00	2.360.613.385,00
4.	PD BPR BKK TULUNG	159.088.672,00	118.754.284,00	40.334.388,00
5.	PD Aneka Usaha	487.103.205,86		
4	Lain-lain PAD yang Sah - LO	121.046.361.638,19	92.854.989.707,45	28.191.391.930,74
1.	Hasil Penjualan Asat Daerah Yang Tidak Disihkan - LO	64.250.000,00	10.000.000,00	54.250.000,00
2.	Hasil Penjualan Asat Lainnya - LO	109.937.600,00	294.713.220,00	184.775.620,00
3.	Penerimaan Jasa Giro - LO	18.132.107.135,00	16.888.469.102,00	1.243.638.033,00
4.	Pendapatan Bunga - LO	13.022.497.721,00	13.626.198.564,00	603.700.843,00
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Peleaksanaan Pekerjaan - LO	82.492.797,00	363.277.259,00	280.784.462,00
6.	Pendapatan Denda Pajak - LO	413.630.832,00	382.315.617,00	31.315.215,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi - LO	3.912.278,00	6.732.389,00	2.820.111,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian -LO	54.607.532,00	346.732.727,45	292.125.195,45
9.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	240.769.625,00	109.629.000,00	131.140.625,00
10.	Pendapatan BLUD - LO	24.449.631.927,19		24.449.631.927,19
11.	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	17.483.789.862,00	17.807.672.973,00	323.883.111,00

1.2 Pendapatan Transfer- LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.790.540.797.124,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 5.5.1.2
Realisasi Pendapatan Transfer – LO
Tahun 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2016	2015	Selisih
1	Transfer Pemerintah Pusat – dana Pertimbangan- LO	1.573.615.108,481,00	1.377.880.443,068,00	195.734.665,413,00
	1. Bagi Hasil Pajak - LO	48.990.111,797,00	37.426.203,568,00	11.563.908,229,00
	2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.285.821,476,00	98.878,671,500,00	97.592.850,024,00
	3. Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.204.344,586,098,00	1.164.186,398,000,00	40.148.188,098,00
	4. Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	318.984,589,110,00	77.379,170,000,00	241.615,419,110,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	-	-	-
	1. Dana Penyesuaian - LO	-	413.181,317,000,00	413.181,317,000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya - LO	143.325,208,463,00	-	143.325,208,463,00
	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	143.325,208,463,00	142.333,018,338,00	992.190,125,00
4	Bantuan Keuangan - LO	73.600,480,000,00	-	73.600,480,000,00
	1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	73.600,480,000,00	41.238,569,508,00	32.361,920,492,00

1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO
 Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp155.578.664.428,18 meningkat dibanding Tahun 2015 sebesar Rp271.410.752.704,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.1.3
Realisasi Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO
Tahun 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2016	2015	Selisih
	Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	155.578.664,423,18	271.410,752,704,00	115.832,088,280,82
1	Pendapatan Hibah – LO	155.578.663,423,18	162.735,783,704,00	7.157,120,280,82
	1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	148.960,237,683,18	162.366,080,985,00	12.405,843,301,82
	2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	-	134.450,900,00	134.450,900,00
	3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO	275.394,715,00	216.000,000,00	59.394,715,00
	4. Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/pelembagaan - LO	5.343,031,025,00	19.251,819,00	53.323,779,206,00
2	Pendapatan Lainnya – LO	1.000,00	108.674,969,000,00	108.674,968,000,00

2. Beban
 Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.062.295.717.701,58 meningkat dibandingkan Tahun 2015 Rp2.439.470.115.332,25. Berdasarkan contoh format dalam Peraturan Pemerintah Menurut Permendagri 64 Tahun 2013 beban dapat dirinci dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 5.5.2
Realisasi Beban
Tahun 2016

(dalam Rupiah)

No	Beban	2016		2015		Selisih
1	Beban Pegawai - LO	1.238.950.544,052,00	1.181.016.784,318,45	57.933.759.733,55		
2	Beban Barang dan Jasa	382.445.336.704,28	350.817.498.862,59	31.627.837.841,69		
3	Beban Hibah	56.542.054.914,00	81.083.884.277,00	-24.541.829.363,00		
4	Beban Bantuan Sosial	11.810.425.000,00	10.174.075.000,00	1.636.350.000,00		
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	107.618.940.197,00	536.009.998.786,21	-428.391.058.588,21		
6	Beban Penyisihan Piutang	7.195.298.799,80	10.132.591.334,70	-2.937.292.534,90		
7	Beban lain-lain	720.028.617,50	-	720.028.617,50		
8	Beban Transfer bagi Hasil Pajak Daerah	4.230.712.899,00	-	4.230.712.899,00		
9	Beban Transfer bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.740.053.084,00	575.318.804,50	4.164.734.279,50		
10	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	247.082.297.084,00	268.970.035.600,00	-21.887.738.516,00		
11	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	960.026.350,00	689.928.350,00	270.098.000,00		
	Jumlah	2.062.295.717.701,58	2.439.470.115.332,45	-377.174.397.630,87		

Beban-beban di atas disajikan rinci per SKPD dalam tabel berikut ini.

2.1 Beban Pegawai

Realisasi beban pegawai periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.238.950.544.052 meningkat dari Tahun 2015 sebesar Rp1.181.016.784.318,45 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 5.5.2.1
Realisasi Beban Pegawai
Tahun 2016

(dalam Rupiah)

No.	Nama SKPD	Jumlah Beban Pegawai		Jumlah Beban Pegawai		Selisih
		2016	(Rp)	2016	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan	950.457.870.255,00	920.824.405.910,45	29.633.464.344,55		
2	Dinas Kesehatan	83.078.569.476,00	72.819.134.244,00	10.259.435.232,00		
3	Dinas Pekerjaan Umum	21.708.433.676,00	20.071.016.793,00	1.637.416.883,00		
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.993.323.008,00	3.511.398.426,00	481.924.582,00		
5	Dinas Pertubungan	6.001.465.912,00	5.548.224.849,00	453.241.063,00		
6	Badan Lingkungan Hidup	1.886.625.612,00	1.773.808.308,00	112.817.304,00		
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.248.162.830,00	3.174.181.946,00	73.980.884,00		
8	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	7.023.443.700,00	6.666.042.047,00	357.401.653,00		
9	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	5.288.527.470,00	5.094.647.695,00	193.879.775,00		
10	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKI	12.509.108.073,00	11.686.576.411,00	822.631.662,00		
11	Dinas Kebudayaan Pariwisata	3.775.023.074,00	3.366.370.392,00	408.654.632,00		
12	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.393.149.994,00	1.174.757.806,00	218.392.188,00		
13	Satuan Polisi Pamong Praja	3.959.778.777,00	3.489.190.913,00	470.587.864,00		
14	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	11.298.560.486,00	755.784.904,00	1.613.059.112,00		
15	Bupati dan Wakil Bupati	16.506.231.972,00	15.328.744.881,00	1.177.487.091,00		
16	Sekretariat Daerah	3.745.281.325,00	3.433.662.349,00	311.618.976,00		
17	Sekretariat DPRD	14.083.790.828,00	13.003.325.457,00	1.080.465.371,00		
18	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Ase	-	1.079.552.561,00	440.698.820,00		
19	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1.520.251.381,00	1.421.818.217,00	3.627.554.291,00		
20	Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	5.049.372.508,00	4.089.422.122,00	81.451.906,00		
21	Inspektori Kabupaten Klanten	3.277.970.216,00	2.931.164.100,00	270.325.007,00		
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.201.489.107,00	2.422.030.426,00	-676.531.067,00		
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.745.499.359,00	1.553.943.084,00	-412.870.083,00		
24	KECAMATAN KLATEN UTARA	1.141.073.001,00	1.148.753.901,00	194.812.705,00		
25	KECAMATAN KLATEN TENGAH	1.343.566.606,00	1.185.614.650,00	275.791.095,00		
26	KECAMATAN KLATEN SELATAN	1.461.405.745,00	1.298.998.439,00	452.033.477,00		
27	KECAMATAN KALIKOTES	1.751.031.916,00	1.603.154.383,00	-207.692.440,00		
28	KECAMATAN NGAWEN	1.395.461.943,00	1.233.742.940,00	-604.507.181,00		
29	KECAMATAN KEBONARUM	1.652.367.763,00	1.730.183.489,00	-77.815.726,00		
30	KECAMATAN WEDI	1.838.250.121,00	1.523.893.488,00	182.506.550,00		
31	KECAMATAN JOGONALAN	1.652.367.763,00	1.704.185.924,00	219.531.716,00		
32	KECAMATAN PRAMBANAN	1.706.405.038,00	1.611.524.667,00	129.812.513,00		
33	KECAMATAN MANISRENGGO	1.923.717.640,00	1.488.113.758,00	169.690.474,00		
34	KECAMATAN KEMALANG	1.741.337.170,00	1.486.993.934,00	165.849.171,00		
35	KECAMATAN KARANGNONGKO	1.657.804.232,00	1.486.754.990,00	217.494.816,00		
36	KECAMATAN KARANGNONGKO	1.652.743.005,00	1.535.367.305,00	-13.227.391,00		
37	KECAMATAN KARANGNOM	1.704.249.721,00	1.535.693.436,00	546.391.420,00		
38	KECAMATAN KARANGNOM	1.522.139.914,00	1.693.726.306,00	94.849.052,00		
39	KECAMATAN POLANHARJO	1.902.084.856,00	1.734.190.237,00	177.502.440,00		
40	KECAMATAN DELANGGU	1.788.575.358,00	1.597.799.566,00	215.295.281,00		
41	KECAMATAN JUMWIRING	1.911.692.677,00	1.781.605.729,00	591.496.674,00		
42	KECAMATAN WONOSARI	1.813.094.847,00	2.094.469.769,00	-388.173.451,00		
43	KECAMATAN CEPER	2.373.102.403,00	1.593.674.855,00	86.824.905,00		
44	KECAMATAN PEDAN	1.706.296.318,00	1.530.399.576,00	350.034.761,00		
45	KECAMATAN KARANGDOWO	1.680.499.760,00	1.667.231.839,00	94.696.202,00		
46	KECAMATAN KARANGDOWO	1.880.494.357,00	1.588.567.481,00	371.028.430,00		
47	KECAMATAN KARANGDOWO	1.761.928.041,00	1.769.136.161,00	-47.842.489,00		
48	KECAMATAN KARANGDOWO	1.959.595.911,00	1.462.043.937,00	-1.043.653.890,00		
49	KECAMATAN KARANGDOWO	1.721.293.662,00	363.695.259,00	211.159.142,00		
50	KECAMATAN KARANGDOWO	418.390.047,00	514.131.585,00	-54.190.262,00		
51	KECAMATAN KARANGDOWO	574.854.401,00	488.282.892,00	-47.152.846,00		
52	KECAMATAN KARANGDOWO	459.941.323,00	273.869.144,00	201.266.834,00		
53	KECAMATAN KARANGDOWO	441.130.046,00	312.733.975,00	320.089.062,00		
54	KECAMATAN KARANGDOWO	475.135.978,00	457.622.911,00	-163.646.962,00		
55	KECAMATAN KARANGDOWO	632.823.037,00	273.228.190,00	103.003.805,00		
56	KECAMATAN KARANGDOWO	293.975.949,00	365.384.550,00	147.946.131,00		
57	KECAMATAN KARANGDOWO	376.232.995,00	451.039.062,00	-57.305.772,00		
58	KECAMATAN KARANGDOWO	513.330.681,00	280.725.470,00	1.420.664.981,00		
59	KECAMATAN KARANGDOWO	393.723.290,00	1.478.599.074,00	1.173.401.258,00		
60	KECAMATAN KARANGDOWO	1.701.390.451,00	2.278.731.336,00	-643.890.470,00		
61	KECAMATAN KARANGDOWO	2.652.000.332,00	1.406.187.707,00	18.506.525.215,00		
62	KECAMATAN KARANGDOWO	1.634.840.866,00	18.262.161.393,00	1.220.688.382.659,00		
63	KECAMATAN KARANGDOWO	19.911.712.922,00	1.181.016.784.318,45	57.933.759.733,55		
	Dinas Pertanian	1.238.950.644.062	1.181.016.784.318,45			
	Jumlah	1.238.950.644.062	1.181.016.784.318,45			

2.2 Beban Barang dan Jasa

Realisasi beban barang dan jasa periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp382.445.336.704,28 meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp350.817.498.862,59 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 5.5.2.2
Realisasi Beban Barang dan Jasa
Tahun 2016

(dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah Beban Barang & Jasa 2016	Jumlah Beban Barang & Jasa 2015	Selisih
1	Urusan Wajib Pendidikan	149.821.112.946,00	148.057.066.282,00	1.764.043.664,00
2	Urusan Wajib Kesehatan	89.303.217.953,78	51.587.327.543,09	37.715.890.410,69
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM	44.190.502.291,00	35.289.184.489,00	8.921.317.802,00
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.428.418.175,00	4.067.530.989,00	(639.112.814,00)
5	DINAS PERUBUHAN	3.079.048.914,50	3.590.423.675,00	(511.374.761,00)
6	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	852.735.133,00	(342.608.890,00)	1.195.344.023,00
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.539.919.689,00	2.373.001.687,00	(833.082.178,00)
8	KANTOR PEMERDAKIPAN PEREMPUNAN DAN KELUARGA BERENCANA	62.592.210,00	1.769.629.188,00	(1.707.036.978,00)
9	DINAS SOSIAL	2.080.698.373,00	1.791.067.211,00	289.631.162,00
10	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOOPERASI DAN UMUM	2.666.912.004,00	3.520.611.021,00	(853.699.017,00)
11	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.715.557.165,00	1.177.965.467,00	537.591.708,00
12	KANTOR KESATUHAN BANGSA DAN POLITIK	1.861.914.738,00	3.020.146.540,00	(1.158.231.802,00)
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	21.293.405.049,00	20.502.828.833,00	790.576.216,00
14	SEKRETARIAT DAERAH	17.420.834.931,00	10.928.479.613,00	6.492.455.318,00
15	SEKRETARIAT DPRD	8.662.619.701,00	9.389.951.086,00	(727.331.384,00)
16	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	503.605.282,00	693.203.511,00	(189.598.229,00)
17	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	3.634.015.965,00	2.713.296.900,00	920.719.065,00
18	INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN	2.894.190.552,00	5.042.615.567,00	(2.148.425.015,00)
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.289.837.693,00	3.498.921.829,00	(1.199.084.136,00)
20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	260.161.051,00	412.697.925,00	(152.726.874,00)
21	KECAMATAN KLATEN UTARA	267.167.466,00	378.258.556,00	(111.131.090,00)
22	KECAMATAN KLATEN TENGAH	284.453.409,00	426.399.720,00	(141.946.311,00)
23	KECAMATAN KLATEN SELATAN	261.931.972,00	328.952.628,00	(67.020.656,00)
24	KECAMATAN KALIKOTES	335.651.325,00	489.232.360,00	(153.581.025,00)
25	KECAMATAN NGAWEN	274.896.279,00	397.103.043,00	(122.206.764,00)
26	KECAMATAN KEBONARUM	299.846.970,00	508.632.172,00	(208.785.202,00)
27	KECAMATAN WEDI	297.282.190,00	473.174.942,00	(175.892.752,00)
28	KECAMATAN JOGONALAN	304.802.011,00	430.809.681,00	(126.007.570,00)
29	KECAMATAN GANTIMARNO	323.842.396,00	555.394.086,00	(231.551.687,00)
30	KECAMATAN PRAMBANAN	269.643.423,00	334.466.216,00	(64.822.793,00)
31	KECAMATAN MANISRENGGO	297.309.262,00	473.944.132,00	(176.634.870,00)
32	KECAMATAN KEMALANG	315.164.760,00	452.691.520,00	(137.526.760,00)
33	KECAMATAN KARANGMONGKO	423.471.169,00	542.681.792,00	(119.210.623,00)
34	KECAMATAN JATINOM	298.521.016,00	446.741.986,00	(148.220.969,00)
35	KECAMATAN KARANGANOM	287.524.705,00	338.237.519,00	(50.712.814,00)
36	KECAMATAN TULUNG	325.308.965,00	538.760.703,00	(213.451.738,00)
37	KECAMATAN POLANHARJO	272.559.968,00	421.514.011,00	(148.954.045,00)
38	KECAMATAN DELANGGU	277.270.231,00	424.761.515,00	(147.491.284,00)
39	KECAMATAN JUWIRING	340.393.482,00	487.690.047,00	(147.296.565,00)
40	KECAMATAN WONOSARI	402.239.313,00	534.370.087,00	(132.130.774,00)
41	KECAMATAN CEPER	322.082.784,00	588.551.290,00	(266.551.290,00)
42	KECAMATAN PEDAN	327.275.396,00	482.157.830,00	(154.882.434,00)
43	KECAMATAN KARANGDOWO	326.323.550,00	517.794.004,00	(191.470.454,00)
44	KECAMATAN CAMAS	286.785.701,00	393.068.923,00	(106.283.222,00)
45	KECAMATAN TRUCUK	257.712.863,00	554.061.535,00	(296.348.672,00)
46	KECAMATAN BAYAT	168.983.640,00	175.260.392,00	(6.266.752,00)
47	KEKURAHAN KABUPATEN	140.777.235,00	154.428.360,00	(13.651.145,00)
48	KEKURAHAN KLATEN	139.148.121,00	182.428.573,00	(43.280.452,00)
49	KEKURAHAN TONGGALAN	169.416.712,00	259.675.661,00	(70.258.949,00)
50	KEKURAHAN MOLAYAN	205.109.873,00	239.768.684,00	(34.659.811,00)
51	KEKURAHAN BUNTALAN	162.364.331,00	193.570.512,00	(31.176.181,00)
52	KEKURAHAN BARENG	234.094.414,00	226.377.175,00	7.717.239,00
53	KEKURAHAN BARENGLOK	175.766.632,00	199.719.107,00	(23.952.475,00)
54	KEKURAHAN GERGUNUNG	158.472.320,00	282.919.189,00	(104.446.869,00)
55	KEKURAHAN GAYAMPRIIT	173.956.157,00	150.139.031,00	23.817.126,00
56	KEKURAHAN JATINOM	880.543.496,00	(1.286.228,00)	881.829.714,00
57	KANTOR KETAHANAN PANGAN	2.838.789.794,00	4.040.158.157,00	(1.201.368.373,00)
58	BADAN PEMERDAKIPAN MASYARAKAT	800.472.860,00	927.685.086,00	(327.212.406,00)
59	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5.830.927.969,00	(20.987.341.603,00)	26.818.269.572,00
60	DINAS PERTANIAN	382.445.336.704,28	311.899.696.341,59	70.545.640.362,69

2.3 Beban Hibah

Realisasi beban hibah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar RP56.542.054.914,00 meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp81.083.884.277,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 5.5.2.3
Realisasi Beban Hibah
Tahun 2016
(dalam Rupiah)

NO	Nama SKPD	Jumlah Beban		Jumlah Beban		Salah
		Hibah 2016	Hibah 2015	Hibah 2015	Hibah 2015	
1	Dinas Pendidikan	2.431.968.500	3.393.907.450,00	9.500.000,00	(961.948.950,00)	
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	8.417.572.378,00	6.537.712.086,00	19.530.000,00	1.879.860.292,00	
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.500.000,00	19.530.000,00	1.366.000,00	(10.030.000,00)	
5	Dinas Perhubungan	25.500.000,00	1.366.000,00	24.134.000,00	24.134.000,00	
6	Badan Lingkungan Hidup	72.449.000,00	1.144.654.500,00	37.517.560,00	(1.072.205.500,00)	
7	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	
8	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.573.000,00	88.495.000,00	13.055.440,00	13.055.440,00	
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha	-	267.493.375,00	194.105.000,00	194.105.000,00	
10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	282.600.000,00	6.000.000,00	32.780.740.836,00	32.780.740.836,00	
11	Sekretariat Daerah	280.900.000,00	31.150.000,00	(27.450.000,00)	(27.450.000,00)	
12	Bagian Kesra	-	13.500.000,00	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)	
13	Bagian Humas	-	43.174.386.818,00	(43.166.886.818,00)	(43.166.886.818,00)	
14	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	
15	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	32.786.740.836,00	(133.591.562,00)	146.341.562,00	146.341.562,00	
16	Badan Kepegawaian Daerah	3.700.000,00	-	5.600.000,00	5.600.000,00	
17	Kecamatan Klaten Utara	7.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
18	Kecamatan Klaten Tengah	7.500.000,00	13.952.000,00	(4.452.000,00)	(4.452.000,00)	
19	Kecamatan Klaten Selatan	7.500.000,00	5.000.000,00	6.939.500,00	6.939.500,00	
20	Kecamatan Kalkikotes	-	7.928.000,00	(428.000,00)	(428.000,00)	
21	Kecamatan Kebonarum	12.750.000,00	3.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
22	Kecamatan Wedi	5.600.000,00	-	18.600.000,00	18.600.000,00	
23	Kecamatan Jogonelan	2.500.000,00	-	8.500.000,00	8.500.000,00	
24	Kecamatan Gantivarno	9.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
25	Kecamatan Prambanan	-	1.200.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	
26	Kecamatan Manisrenggo	11.939.500,00	24.730.000,00	(17.230.000,00)	(17.230.000,00)	
27	Kecamatan Kemalang	7.500.000,00	-	9.600.000,00	9.600.000,00	
28	Kecamatan Karangponoko	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
29	Kecamatan Jatinom	18.600.000,00	62.500.000,00	(55.000.000,00)	(55.000.000,00)	
30	Kecamatan Polanharjo	8.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
31	Kecamatan Delanggu	7.500.000,00	-	6.500.000,00	6.500.000,00	
32	Kecamatan Juwiring	22.700.000,00	-	11.109.500,00	11.109.500,00	
33	Kecamatan Wonosari	7.500.000,00	-	(40.282.000,00)	(40.282.000,00)	
34	Kecamatan Tulung	-	47.782.000,00	(812.500,00)	(812.500,00)	
35	Kecamatan Cepur	9.600.000,00	11.000.000,00	61.381.000,00	61.381.000,00	
36	Kecamatan Pedan	7.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
37	Kecamatan Karangdowo	7.500.000,00	-	11.382.000,00	11.382.000,00	
38	Kecamatan Cawas	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
39	Kecamatan Trucuk	7.500.000,00	-	23.418.000,00	23.418.000,00	
40	Kecamatan Bayat	6.500.000,00	4.198.000,00	(9.081.200,00)	(9.081.200,00)	
41	Kelurahan Klaten	11.109.500,00	14.186.200,00	476.543.000,00	476.543.000,00	
42	Kelurahan Tonggolan	7.500.000,00	3.445.000,00	73.487.200,00	73.487.200,00	
43	Kelurahan Mojayan	10.187.500,00	-	11.211.013.500,00	11.211.013.500,00	
44	Kelurahan Buntalan	61.381.000,00	74.082.000,00	56.537.054.914,00	56.537.054.914,00	
45	Kelurahan Boreng	9.500.000,00	5.000.000,00	(10.654.700,00)	(10.654.700,00)	
46	Kelurahan Banteng	11.382.000,00	10.654.700,00	(12.500.000,00)	(12.500.000,00)	
47	Kelurahan Gunggunung	7.500.000,00	12.500.000,00	56.926.956.548,00	56.926.956.548,00	
48	Kelurahan Gayamsari	27.616.000,00	7.200.000,00	(18.383.000,00)	(18.383.000,00)	
49	Kelurahan Jatimom	5.125.000,00	18.383.000,00	(997.170.634,00)	(997.170.634,00)	
50	Kantor Kelahanan Pangan	479.988.000,00	505.069.000,00	-	-	
51	Badan Pemberdayaan Masyarakat	73.487.200,00	25.647.153.150,00	(25.647.153.150,00)	(25.647.153.150,00)	
52	Dinas Pertanian	11.285.095.500,00	81.083.884.277,00	88.642.280.465,00	88.642.280.465,00	
		56.542.054.914	81.083.884.277,00			



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

2.4 Beban Bantuan Sosial

Realisasi beban bantuan sosial periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp11.810.425.000,00 meningkat dibanding tahun 2015 sebesar Rp10.174.075.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.2.4
Realisasi Beban Bantuan Sosial
Tahun 2016

(dalam Rupiah)

No.	Nama SKPD	2016	2015	Selisih
1	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			-
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	11.810.425.000,00	10.174.075.000,00	1.636.350.000,00
	Jumlah	11.810.425.000,00	10.174.075.000,00	1.636.350.000,00

2.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp107.618.940.197,00 meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp536.009.998.785,21 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.2.5
Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2016

(dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	2016	2015	Selisih
1	Dinas Pendidikan	36.754.651.797,00	477.431.683.377,21	440.677.031.580,21
2	Dinas Kesehatan	567.332.379,00	865.929.312,60	298.596.933,60
3	Puskemas	8.107.281.366,00	4.614.609.199,80	3.592.672.166,20
4	RSUD Klaten	10.046.595.329,00	2.630.772.636,00	7.415.822.693,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	34.739.305.798,00	32.166.215.925,00	2.573.089.873,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	328.619.920,00	1.571.893.167,40	1.242.273.247,40
7	Dinas Lingkungan Hidup	692.571.642,00	1.759.391.198,00	1.066.819.556,00
8	Badan Lingkungan Hidup	627.707.394,00	923.900.176,00	296.192.782,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	491.256.039,00	472.851.432,00	18.404.607,00
10	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	755.090.464,00	650.545.267,00	104.545.197,00
11	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	284.553.990,00	393.663.471,00	109.109.481,00
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,	1.455.408.782,00	919.628.489,00	535.780.293,00
13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan C	415.561.686,00	366.607.613,00	48.954.073,00
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	56.183.968,00	92.476.319,00	36.292.351,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	152.042.504,00	286.252.208,00	134.209.704,00
16	Sekretariat Daerah	2.565.819.703,00	2.354.510.105,00	211.309.598,00
17	Sekretariat DPRD	613.648.354,00	471.126.896,00	142.522.456,00
18	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUA	2.928.386.359,00	2.028.820.097,40	899.566.261,60
19	Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terp	141.204.594,00	127.049.221,00	14.155.373,00
20	Inspektorat Kabupaten Klaten	190.191.117,00	132.484.672,00	57.706.445,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	182.415.913,00	182.322.556,00	93.357,00
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	910.875.013,00	1.031.963.443,80	120.988.430,80
23	Kecamatan Klaten Utara	29.390.157,00	220.517.872,00	191.127.715,00
24	Kecamatan Klaten Tengah	30.902.386,00	70.053.455,00	39.151.069,00
25	Kecamatan Klaten Selatan	31.591.360,00	35.233.030,00	3.643.670,00
26	Kecamatan Kalikotes	42.519.251,00	55.742.734,00	13.223.483,00
27	Kecamatan Ngawen	66.010.449,00	68.581.238,00	3.570.789,00
28	Kecamatan Kebonarum	71.983.973,00	64.134.835,00	7.849.138,00
29	Kecamatan Wedi	34.442.019,00	50.926.010,00	16.483.991,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

30. Kecamatan Jogonalan	185.334.596,00	39.179.224,00	146.155.372,00
31. Kecamatan Gantiw armo	36.911.144,00	58.094.822,00	(21.183.678,00)
32. Kecamatan Prambanan	40.732.362,00	60.370.753,00	(19.638.391,00)
33. Kecamatan Manisrengo	42.146.753,00	72.126.956,00	(29.980.203,00)
34. Kecamatan Kernalang	62.170.356,00	56.677.087,00	5.493.269,00
35. Kecamatan Karangnongko	30.504.077,00	35.203.031,00	(4.698.954,00)
36. Kecamatan Jatinom	28.091.035,00	27.987.302,00	103.733,00
37. Kecamatan Karangnom	30.453.645,00	46.763.214,00	(16.309.569,00)
38. Kecamatan Tulung	31.185.970,00	43.877.689,00	(12.691.719,00)
39. Kecamatan Polanharjo	36.993.772,00	52.572.322,00	(15.578.550,00)
40. Kecamatan Delanggu	33.602.214,00	102.972.318,00	(69.370.104,00)
41. Kecamatan Juwiring	34.839.488,00	52.203.610,00	(17.364.122,00)
42. Kecamatan Wonosari	36.202.881,00	53.596.652,00	(17.393.771,00)
43. Kecamatan Ceper	24.588.269,00	52.546.412,00	(27.958.143,00)
44. Kecamatan Pedan	20.948.711,00	47.913.281,00	(26.964.570,00)
45. Kecamatan Karangdowo	22.491.321,00	38.356.248,00	(15.864.927,00)
46. Kecamatan Cawas	50.915.913,00	109.124.531,00	(58.208.618,00)
47. Kecamatan Trucuk	42.068.314,00	59.432.633,00	(17.364.319,00)
48. Kecamatan Bayat	37.233.704,00	47.243.901,00	(10.010.197,00)
49. Kelurahan Kabupaten	49.782.295,00	67.446.352,00	(17.664.057,00)
50. Kelurahan Klaten	56.847.128,00	85.036.380,00	(28.189.252,00)
51. Kelurahan Tonggalan	16.591.405,00	12.514.610,00	4.076.795,00
52. Kelurahan Mojayan	9.706.580,00	11.802.963,00	(2.096.383,00)
53. Kelurahan Buntalan	418.170.714,00	429.171.072,00	(11.000.358,00)
54. Kelurahan Bareng	68.782.730,00	29.409.612,00	39.373.118,00
55. Kelurahan Baranglor	28.752.082,00	43.953.203,00	(15.201.121,00)
56. Kelurahan Gergunung	56.400.688,00	242.191.328,00	(185.790.640,00)
57. Kelurahan Gayampri	91.799.361,00	246.213.789,00	(154.414.428,00)
58. Kelurahan Jatinom	71.648.874,00	149.244.233,00	(77.595.359,00)
59. Kantor Ketahanan Pangan	73.217.238,00	99.619.793,00	(26.402.555,00)
60. Badan Pemberdayaan Masyarakat	118.954.870,00	88.677.779,00	30.277.091,00
61. Kantor Arsip dan Perpustakaan	169.457.598,00	182.506.449,00	(13.048.851,00)
62. Dinas Pertanian	2.247.770.403,00	1.326.082.278,00	921.688.125,00
	107.618.940.197,00	536.009.998.785,21	(428.391.058.588,21)

2.6 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp7.195.298.799,80 meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp10.132.591.334,70 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 5.5.2.6
Realisasi Beban Penyesihan Piutang
Tahun 2016

		(dalam Rupiah)
1	RSUD Klaten	21.021.725,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	9.610,00
3	Dinas Perhubungan	(3.156.013,00)
4	Badan Lingkungan Hidup	11.628.523,00
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(5.103.022,30)
6	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	(2.496.139,00)
7	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	10.022.849.863,00
8	Dinas Pertanian	3.109.276.303,00
	Jumlah	105.702.500,00
		105.702.500,00
		10.132.591.334,70
		2.937.292.534,90

2.7 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp720.028.617,50 meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp720.028.617,50 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.2.7
Realisasi Beban Lain-lain
Tahun 2016

No	Jenis Beban Transfer	2016	2015	Selisih
1	Dinas Kesehatan	3.547.500,00	0,00	3.547.500,00
2	Dinas Perhubungan	169.060.872,50	0,00	169.060.872,50
3	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	547.420.245,00	0,00	547.420.245,00
		720.028.617,50	0,00	720.028.617,50

2.8 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.230.712.899,00 meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp 0, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.2.8
Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Tahun 2016

No	Jenis Beban Transfer	2016	2015	Selisih
1	Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset	4.230.712.899,00	-	4.230.712.899,00
		4.230.712.899,00	0,00	4.230.712.899,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

2.9 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp.4.740.053.084,00 meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp575.318.804,50, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.2.9
Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Hasil Pendapatan Lainnya
Tahun 2016

No	Jenis Beban Transfer	(dalam Rupiah)		
		2016	2015	Selisih
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	4.740.053.084,00	575.318.804,50	4.164.734.279,50
		4.740.053.084,00	575.318.804,50	4.164.734.279,50

2.10 Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp247.082.297.084,00 meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp268.970.035.600,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.2.10
Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa
Tahun 2016

No	Jenis Beban Transfer	(dalam Rupiah)		
		2016	2015	Selisih
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	247.082.297.084,00	268.970.035.600,00	(39.887.738.516,00)
		247.082.297.084,00	268.970.035.600,00	-39.887.738.516,00

2.11 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp960.026.350,00 meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp689.928.350, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.2.11
Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Tahun 2016

No	Jenis Beban Transfer	(dalam Rupiah)		
		2016	2015	Selisih
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	960.026.350,00	689.928.350,00	270.098.000,00
		960.026.350,00	689.928.350,00	270.098.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

3. Surplus Defisit Non Operasional

Surplus Defisit Non Operasional tahun 2016 sebesar Rp71.768.313,00 merupakan Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO atas likuidasi PT Solo Raya Promosi dibanding dengan tahun 2015 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 sama dengan tahun 2015 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.3.1
Surplus Penjualan Aset Non Lancar
Tahun 2016

No	Uraian	2016	2015	Selisih
1	Penjualan Aset Tanah	0	0	0
2	Penjualan Aset Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Penjualan Aset Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
5	Penjualan Aset Lain-lain	0	0	0
6	Pelepasan Investasi Jangka Panjang	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

(dalam Rupiah)

3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 sama dengan tahun 2015 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.3.2
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Tahun 2016

No	Uraian	2016	2015	Selisih
1	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	0	0	0
2	Utang Dalam Negeri Lembaga	0	0	0
3	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

(dalam Rupiah)



3.3 Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus kegiatan non operasional lainnya periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.3.3
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2016

		<i>(dalam Rupiah)</i>		
No	Uraian	2016	2015	Selisih
1	Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00		0
	Jumlah	0,00		0

3.4 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit penjualan aset non lancar periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp71.768.313,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.3.4
Defisit Penjualan Aset Non Lancar
Tahun 2016

		<i>(dalam Rupiah)</i>	
No	Uraian	Defisit	
1	Penjualan Aset Tanah	0,00	
2	Penjualan Aset Peralatan dan Mesin	0,00	
3	Penjualan Aset Gedung dan Bangunan	0,00	
4	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	
5	Penjualan Aset Lain-lain	0,00	
6	Pelepasan Investasi Jangka Panjang	71.768.313,00	
	Jumlah	71.768.313,00	

3.5 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Tabel 5.5.3.5
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Tahun 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Defisit
1	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	0
2	Utang Dalam Negeri Lembaga	0
3	Utang Dalam Negeri – Obligasi	0
	Jumlah	0

3.6 Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit kegiatan non operasional lainnya periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5.3.6
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Defisit
1	-	0
2		
	Jumlah	0

4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2016 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Terjadi defisit pada Pos Luar Biasa sebesar Rp 260.054.200,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Pendapatan Luar Biasa	Rp 0
Pendapatan.....	Rp 0
Pendapatan.....	Rp 0+
Pendapatan Luar Biasa	Rp 0
4.2 Beban Luar Biasa	Rp 0
Beban Bencana Alam	Rp 0
Beban Luar Biasa Lainnya	Rp 260.054.200,00+
Beban Luar Biasa	Rp 260.054.200,00



E. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2016 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi/investasi aset non anggaran, pendanaan/pembiayaan, dan transitoris/non anggaran.

1. Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp196.858.908.789,16 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.258.430.443.005,19 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.258.604.630.605,19 di luar Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp174.187.600,00.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.061.571.534.216,03 merupakan Laporan Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi sebesar Rp1.563.576.411.511,03, Belanja Tak Terduga sebesar Rp260.054.200,00 dan Transfer sebesar Rp497.735.068.505,00.

2. Aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi/investasi aset non anggaran per 31 Desember 2016 defisit sebesar Rp228.825.817.996,00. Arus kas dari aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran berupa:

- Arus kas masuk sebesar Rp237.419.287,00 terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang dikelompokkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp174.187.600,00 dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp63.231.687,00 pada Laporan Realisasi Anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

- Arus kas keluar sebesar Rp229.063.237.283,00 terdiri dari:
 - Belanja Modal Rp220.759.237.283,00
 - Pembentukan Dana Cadangan Rp3.000.000.000,00
 - Penyertaan Modal Rp5.304.000.000,00
- Jumlah Rp229.063.237.283,00
- pada Laporan Realisasi Anggaran.

3. Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Saldo Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 . Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat dilihat sebagai berikut.

- Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 merupakan Penerimaan Kembali Piutang pada Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 merupakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran di luar Penyertaan Modal dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen.

4. Aktivitas Transitoris/Non anggaran

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris berasal dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp178.429.252.776,00 dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris berasal dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp108.892.881.490,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.4
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2016

N0	Uraian PFK	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	PFK - IWP	63.947.888.980,00	63.947.888.980,00	0,00
2	PFK - JKK	1.891.220.249,00	1.891.220.249,00	0,00
3	PFK - Jaminan Kematian	2.364.009.592,00	2.364.009.592,00	0,00
4	PFK - Askes	19.300.527.485,00	19.300.527.485,00	0,00
5	PFK - Askes 2 %	77.448.473,00	77.448.473,00	0,00
6	PFK - PPh Ps. 21	56.424.698.009,00	56.422.283.094,00	2.414.915,00
7	PFK - PPh Ps. 22	2.009.764.308,00	2.009.764.308,00	0,00
8	PFK - PPh Ps. 23	1.038.012.518,00	1.038.236.981,00	-224.463,00
9	PFK - PPh Ps. 4	3.105.306.143,00	3.105.306.143,00	0,00
10	PFK - PPh Ps. 15	21.000,00	21.000,00	0,00
11	PFK - PPh Ps. 126	4.467.650,00	4.467.650,00	0,00
12	PFK - PPh Pusat	26.981.326.318,00	26.981.326.318,00	0,00
13	PFK - Tapeun	1.282.696.000,00	1.282.696.000,00	0,00
14	PFK - Lainnya	0	533.250,00	-533.250,00
15	PFK - Askes 2 %	1.866.051,00	1.866.051,00	0,00
	Jumlah	178.429.252.776,00	178.427.595.574,00	1.657.202,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2016 surplus sebesar Rp1.657.202,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2016 surplus sebesar Rp1.657.202,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Arus Kas Masuk	
• Utang PFK- PPh 21	Rp2.527.415,00
- Arus Kas Keluar	
• Pengembalian Utang PFK- PT Cenerico	Rp533.250,00
• Pembayaran Utang PFK-SKPD	<u>Rp336.963,00</u>
Jumlah	Rp870.213,00

Dari penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris, kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di BUD/SILPA LRA dan Kas Di Bendahara Pengeluaran menjadi sebesar Rp374.247.256.501,16.

Saldo akhir kas di BUD dan Kas Di Bendahara Pengeluaran jika dijumlahkan dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara FKTP - JKN, dan *Deposito on Call* menjadi saldo akhir kas sebesar Rp391.075.086.554,16 sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca.

Perbedaan Saldo akhir kas di Laporan Arus Kas dengan SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp16.843.131.868,00 disebabkan karena adanya Kas Lainnya – BOS sebesar Rp16.827.830.053,00 dan utang PFK sebesar Rp15.301.815,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

F. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Ekuitas:	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	(%)
1) Ekuitas Awal	2.908.051.790.505,36	6.530.222.521.810,67	(3.622.170.731.305,31)	(55,47)
Jumlah	2.908.051.790.505,36	6.530.222.521.810,67	(3.622.170.731.305,31)	(55,47)

Berdasarkan data di atas terdapat penurunan ekuitas awal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2016 dibandingkan dengan ekuitas awal tahun 2015 sebesar Rp 3.622.170.731.305,31 (55,47%). Penjelasan lebih rinci atas perubahan tersebut disampaikan sebagai berikut:

1.1 Surplus/Defisit-LO

Penurunan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO tahun 2015 senilai Rp83.454.501.612,00

1.2 Revaluasi Aset Tetap

Penambahan ekuitas karena adanya koreksi nilai persediaan tahun 2015 senilai Rp18.917.300,00

1.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Penurunan ekuitas karena adanya koreksi ekuitas tahun 2015 sebesar Rp 3.538.735.146.993,31. Koreksi tersebut terdiri dari koreksi aset akibat inventarisasi aset yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten, koreksi karena dampak perubahan standar akuntansi yang dipakai sebagai pedoman pembuatan laporan keuangan dari basis *cash toward accrual* (CTA) menjadi berbasis akrual, serta koreksi lainnya yang dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

<i>Koreksi Ekuitas lainnya</i>	<i>Jumlah (Rp)</i>
1) Koreksi aset tetap hasil inventarisasi	(4.185.430.481,403,62)
2) Koreksi Penyisihan Piutang 2014	(770.444.803,00)
3) Penyesuaian penyertaan modal BUMD metoda ekuitas	5.302.458.545,85
4) Koreksi aset tetap hasil rekonsiliasi 2015	691.937.833.183,33
5) Koreksi utang beban pegawai 2014	(2.115.164.332,00)
6) Koreksi utang beban barang dan jasa 2014	(2.516.526.918,00)
7) Koreksi Aset lainnya	15.273.717.481,67
8) Koreksi Utang Jangka Pendek lainnya	(150.479.637,50)
9) Koreksi Penyusutan Aset Tetap	7.102.843.123,67
10) Koreksi Amortisasi Aset tidak berwujud	(2.754.063.745,20)
11) Koreksi Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(64.614.838.488,51)
Total Koreksi Ekuitas lainnya	(3.538.735.146.993,31)

2 Surplus/Defisit-LO

<i>Ekuitas:</i>	<i>31-Des-16</i>	<i>31-Des-15</i>	<i>Kenaikan(Penurunan)</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp (%)</i>
1) Surplus/Defisit-LO	117.131.245.535,65	(83.454.501.612,00)	200.585.747.147,65 (240,35)
Jumlah	117.131.245.535,65	(83.454.501.612,00)	200.585.747.147,65 (240,35)

Berdasarkan data di atas terdapat kenaikan ekuitas surplus defisit-LO yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2016 dibandingkan dengan surplus defisit-LO tahun 2015 sebesar Rp200.585.747.174,65 (240,35%)

2.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Persediaan

Tidak ada koreksi nilai persediaan sepanjang tahun 2016. Koreksi nilai persediaan pada tahun 2015 sebesar Rp18.917.300,00 .

2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Penilaian kembali aset tetap sebesar Rp 0,00 baik pada tahun 2016 dan tahun 2015

3. Koreksi Ekuitas Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Akun Koreksi Ekuitas Lainnya dirinci sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas lainnya	2016	2015
	(Rp)	(Rp)
1) koreksi kas lainnya (Dana BOS)	1.579.371,097,00	
2) Koreksi Piutang	539.497.750,00	
3) Koreksi Penyisihan Piutang		(770.444.803,00)
4) Penyesuaian penyertaan modal BUMD metoda ekuitas	3.004.564.148,86	5.302.458.545,85
5) Koreksi aset tetap	22.000.852.483,00	(3.493.492.648.220,29)
6) Koreksi Penyusutan Aset Tetap	425.789.612.238,21	7.102.843.123,67
7) Koreksi Aset lainnya	201.076.500,00	15.273.717.481,67
8) Koreksi Amortisasi Aset tidak berwujud	326.503.425,20	(2.754.063.745,20)
9) Koreksi Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat		(64.614.838.488,51)
10) Koreksi Utang jangka Pendek lainnya	(128.853.000,00)	(150.479.637,50)
11) Koreksi pendapatan hibah (BOS)		
12) Koreksi utang beban	1.529.378,00	(4.631.691.250,00)
13) Koreksi Bagian laba BUMD	(2.959.594.999,86)	
Total Koreksi Ekuitas lainnya	450.354.559.040,41	(3.538.735.146.993,31)

3 Ekuitas Akhir

Ekuitas:	31-Des-16	31-Des-15	Kenaikan/ Penurunan	
	Rp	Rp	Rp	(%)
1) Ekuitas Akhir	3.475.537.595.081,42	2.908.051.790.505,36	567.485.804.576,06	19,51
Jumlah	3.475.537.595.081,42	2.908.051.790.505,36	567.485.804.576,06	19,51

Berdasarkan data di atas terdapat kenaikan ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2016 dibandingkan dengan ekuitas awal tahun 2015 sebesar Rp567.485.804.576,06 (19,51%)



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

**BAB VI
INFORMASI TAMBAHAN**

A. KOMITMEN DAN KONTINGJENSI

Komitmen adalah kesanggupan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan kegiatan Pemerintahan, baik karena ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah maupun ikatan perjanjian tertulis (kontrak) dengan pihak ketiga. Sedangkan kontinjensi adalah suatu kemungkinan besar (*probable*) terjadinya kewajiban, terkait dengan masalah hukum dan/atau perikatan (kontrak). Komitmen dan kontinjensi dapat menyebabkan pengeluaran uang daerah yang membebani APBD Kabupaten Klaten di masa yang akan datang.

1. Komitmen Pemerintah Daerah

a. Kerjasama antar Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi anggota forum “Subsukawonosraten” yang dibentuk bersama dengan Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

Sebagai tambahan informasi, forum dimaksud telah mendirikan usaha bersama yang diberi nama PT Solo Raya Promosi sesuai Akta Notaris Sri Hartini, SH Nomor 45 tanggal 12 Juli 2006. Berkenaan dengan pendirian perusahaan ini Pemerintah Kabupaten Klaten telah menempatkan dan menyertakan modal sebanyak 70 lembar saham biasa senilai Rp35.000.000,00 atau 14,00% dari seluruh modal disetor. Selain itu untuk operasi awal Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan bantuan keuangan sebesar Rp100.000.000,00 yang dialokasikan dalam Perubahan APBD TA 2005 dan telah disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Klaten tanggal 25 Mei 2005.

Usaha pokok PT Solo Raya Promosi adalah memberikan jasa promosi bagi Pemerintah Daerah yang menjadi anggotanya, dalam rangka memperkenalkan daerah dan produk-produk daerah termasuk lokasi wisata. Namun demikian sampai dengan Tahun 2014 PT Solo Raya Promosi tidak memberikan laporan kegiatan dan hasil usahanya.

PT Solo Raya Promosi sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-0000285 tanggal 25 Januari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT SOLO RAYA PROMOSI (dalam likuidasi) dan penetapan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 20/Pdt.P/2016/PN.Skt



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

b. Keanggotaan dalam APKASI/BKKSII dan ADKASI

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi salah satu anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI/BKKSII). Berkenaan dengan keanggotaan ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dibebani iuran tahunan yang besarnya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Selain itu DPRD Kabupaten Klaten menjadi anggota Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Asosiasi ini mewajibkan anggotanya membayar iuran sebesar Rp10.000.000,00 per tahun yang dibebankan pada APBD Kabupaten Klaten.

Beban iuran ini akan tetap ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dan dibebankan dalam APBD, sepanjang masih menjadi Anggota APKASI/BKKSII dan ADKASI.

2. Kontinjensi

a. Kerjasama Kenitraan Pembangunan Plaza Klaten

Pembangunan Plaza Klaten dikerjasamakan dengan PT. Inti Griya Prima Sakti (PT. IGPS) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 051/1481/1991 dan Nomor 159/SK/IGPS/III/91 tanggal 22 Agustus 1991 tentang Kerjasama Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pelataran Serba Ada (Plasa) Klaten, yang kemudian telah dilakukan perubahan sesuai dengan Adendum Nomor 051/1892/1995 dan Nomor 028/SK/IGPS/XI/1995 tanggal 30 Nopember 1995. Perjanjian dimaksud mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyerahan Modal Daerah pada pihak ketiga, serta peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

Dalam rangka kerjasama tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan tanah seluas 14.102 m2 beserta bangunan bekas Pasar Klaten yang terletak di Jalan Pemuda Klaten. Sedangkan PT. IGPS melaksanakan pembangunan dan menanggung seluruh biayanya, yang meliputi pembuatan kios/los sementara untuk menampung pedagang; terminal angkutan dan bongkar muat barang; lapangan parkir dan jalan lingkungan; gardu retribusi; bangunan ruko (rumah toko); bangunan kios dan los pasar; bangunan plasa; Kantor Pengelola Plasa; serta fasilitas bangunan berupa : air bersih, kamar mandi, WC, Musholla, tempat penitipan sepeda, *fire hydrant*, pos satpam, instalasi listrik, eskalator, bak sampah, dan pertamanan.

Nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten dihitung berdasarkan nilai tanah dan bangunan bekas pasar. Tanah tersebut ditaksir seharga Rp75.000,00 per m2 atau senilai Rp1.057.650.000,00 (14.102 m2 x Rp75.000,00/m2) dan bangunan bekas pasar ditaksir senilai Rp147.285.074,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.204.935.074.000 (Rp1.057.650.000,00 + Rp147.285.074,00). Sedangkan nilai saham PT. IGPS dihitung berdasarkan besarnya biaya untuk membangun bangunan dan kelengkapannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu sebesar Rp12.366.700.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Pembagian tempat usaha menetapkan Pemerintah Kabupaten Klaten berhak untuk memanfaatkan dan mengelola terminal angkutan seluas ± 2.100 m²; bongkar muat barang seluas ± 1.050 m²; lapangan parkir dan jalan lingkungan seluas ± 3.180 m²; gardu retribusi sebanyak 5 buah; kamar mandi dan WC sebanyak 7 unit; Kantor Pengelola Plasa seluas ± 32 m²; Los di lantai dasar (basement) seluas ± 150 m²; tempat penitipan sepeda seluas ± 70 m²; dan pertamanan. Sedangkan PT. IGPS menerima bagian dengan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun, meliputi : seluruh bangunan ruko; seluruh bangunan kios-kios dan los pasar kecuali los pasar di lantai dasar seluas 150 m²; seluruh bangunan plasa 3 (tiga) lantai. Selain itu PT. IGPS berhak untuk memanfaatkan dan mengelola pemasangan reklame/iklan di seluruh bagian bangunan Plasa Klaten.

Sesuai addendum perjanjian tanggal 30 Nopember 1995 tersebut di atas, jangka waktu perjanjian disepakati selama 25 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian 22 Agustus 1991 atau berakhir pada tanggal 22 Agustus 2016. Sedangkan sesuai sertifikat atas tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor 163 tanggal 23 April 1993, PT. IGPS diberikan HGB atas tanah seluas 14.102 m² selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 3 Pebruari 1993 dan berakhir pada tanggal 3 Pebruari 2023. Dengan demikian terjadi selisih jangka waktu pelaksanaan perjanjian dengan masa HGB selama 7 (tujuh) tahun. Atas selisih jangka waktu ini kedua belah pihak belum membuat kesepakatan untuk menyelesaikannya.

Namun Pasal 4 menyebutkan Kepada PT. IGPS diberikan hak guna bangunan (HGB) selama 25 (dua puluh lima) tahun diatas HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten, terhitung sejak dikeluarkannya keputusan tentang Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tanggal 23 April 1993 no. 163. Sehingga 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak dikeluarkannya keputusan tentang Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tanggal 23 April 1993 no. 163 akan berakhir pada tanggal 23 April 2018. Pada saat perjanjian berakhir PT. IGPS wajib menyerahkan tanah (HGB) dan bangunan yang dibangun kepada Pemerintah Kabupaten Klaten.

Nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten dihitung berdasarkan nilai tanah dan bangunan bekas pasar. Tanah tersebut ditaksir harga Rp75.000,00 per m² atau seluruhnya senilai Rp1.057.650.000,00 (14.102 m² x Rp75.000,00/m²) dan bangunan bekas pasar ditaksir senilai Rp147.285.074,00. Dengan demikian nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten seluruhnya sebesar Rp1.204.935.074,00 (Rp1.057.650.000,00 + Rp147.285.074,00). Sedangkan nilai saham PT IGPS dihitung berdasarkan jumlah biaya untuk membangun bangunan dan kelengkapannya tersebut, yang ditaksir sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruhnya sebesar Rp12.366.700.000,00 yang kemudian diubah sesuai addendum tanggal 30 Nopember 1995 menjadi sebesar Rp13.610.259.000,00.

Penilaian dan penyajian kerjasama kemitraan dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan metode ekuitas, yaitu seluruh nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp1.204.935.074,00.



b. *Kerjasama Kemitraan Pembangunan Pasar Delanggu*

Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 11/ADM-SPK/KBBP/11/2008 tanggal 7 Maret 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m² di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m² di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m². Tanah tersebut diserahkan kepada pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama. Berdasarkan NJOI tanah per m² pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp702.000,00 per m² maka nilai tanah Pasar Delanggu adalah sebesar Rp5.451.030.000,00 (7.765 m²xRp702.000,00). Nilai ini kemudian dijadikan dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2014.

PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los beserta fasilitasnya di Pasar Delanggu sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp17.074.948.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 202 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Maret 2008 atau berakhir pada tanggal 25 September 2008. Atas bangunan kios dan los yang telah dibangun tersebut telah dipasarkan kepada para pedagang di Pasar Delanggu.

Sesuai keputusan Bupati Nomor 900/2146/2008 tanggal 14 Nopember 2008 Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan bantuan kepada 889 pedagang lama untuk membeli kios/los Pasar Delanggu senilai Rp6.240.243.950,00. Bantuan dibedakan menurut kelompok pedagang, yaitu bagi pedagang lama yang sebelumnya telah memiliki kios/los diberikan bantuan sebesar 50% dari harga kios/los baru; dan bagi pedagang lama yang tidak memiliki atau sewa kios/los diberikan bantuan sebesar 20% dari harga kios/los baru. Sampai dengan 31 Desember 2014 seluruh bantuan kios untuk para pedagang telah terealisasi.

c. *Kerjasama Kemitraan Pembangunan Pasar Pedan*

Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan (PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas 4.230 m² dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m² keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m² (4.230 m² + 7.990 m²). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun. Perhitungan nilai atas tanah yang dikerjasamakan tersebut didasarkan atas NJOI tanah per m² pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp285.000,00. Sehingga nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp3.482.700.000,00 (12.220 m²xRp285.000,00). Nilai ini



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

kemudian Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m² dan 785 los seluas 2.622,91 M² beserta fasilitasnya di Pasar Pedan sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp36.965.910.000,00.

Kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dapat menimbulkan kontijensi, khususnya terkait dengan permasalahan berikut:

- a. Sebagian bangunan Plaza Klaten yang dibangun oleh PT. IGPS di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten telah dijual kepada masyarakat dan/atau pedagang, berikut dan beserta tanahnya dengan pengalihan/pemecahan HGB induk. Pembeli tidak dikat perjanjian dan/atau tidak mengetahui isi perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT. IGPS, yang mewajibkan penyerahan bangunan berikut tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Klaten setelah jangka waktu perjanjian berakhir yaitu tanggal 22 Agustus 2016. Selain itu selisih waktu antara berakhirnya perjanjian (22 Agustus 2016) dengan jangka waktu HGB Nomor 163 yaitu tanggal 3 Pebruari 2023 dapat menimbulkan sengketa, baik antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT. IGPS maupun dengan masyarakat yang telah membeli bangunan dari PT. IGPS tersebut;

- b. Meskipun Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan bantuan kepada para pedagang lama Pasar Delanggu untuk membayar uang muka bangunan kios/los baru yang dibangun oleh PT. KBBP, namun sebagian besar pedagang lama belum bersedia menempati kios/los baru dimaksud. Alasan mereka tidak mau pindah selain karena harganya mahal, kualitas bangunannya dinilai tidak memenuhi standar. Permasalahan ini pernah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Klaten, namun belum memuaskan para pedagang. Selain itu Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah memberikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai surat Nomor LBHJT.08.11/323 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Dugaan Tipikor, yang ditembuskan kepada Ketua BPK-RI.

- c. Pada saat ini Pasar Pedan telah selesai dibangun. Meskipun pembangunan Pasar Pedan telah selesai dilaksanakan, namun para pedagang belum bisa menempati los/kios dimaksud. Dis

- d. Kondisi tersebut menimbulkan kemungkinan adanya biaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat/pedagang dan/atau mitra kerjasama, yang mungkin tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Kontijensi ini dapat membebani APBD Kabupaten Klaten di tahun-tahun mendatang. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Klaten akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak sosial dan menekan biaya yang membebani APBD tersebut.

- B. Aset SMA dan SMK pada tahun 2016 masih tercatat di Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten disebabkan Pemerintah Kabupaten Klaten belum menerima |Berita Acara Serah Terima Aset SMA dan SMK yang pada tanggal 26 September telah dilakukan serah terima ke Pemerintah Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Jawa Tengah yang ditandatangani Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Klaten tetapi sampai dengan Laporan Keuangan disusun baik Berita Acara Asli maupun salinan Berita acara dan lampirannya belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Klaten.

Adapun rincian dari aset tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Aset	SMA	SMK	Jumlah
1	Tanah	6.672.423.500,00	6.543.058.000,00	13.215.481.500,00
2	Peralatan dan Mesin	26.622.191.554,84	43.886.073.256,54	70.508.264.811,37
3	Gedung dan Bangunan	32.971.061.758,00	35.251.969.104,00	68.223.030.862,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	937.560.000,00	84.075.000,00	1.021.635.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	16.233.914.261,42	10.350.473.764,00	26.584.388.025,42
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00

C. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Pemerintah Kabupaten Klaten menjamin tidak terdapat kejadian setelah tanggal Neraca per 31 Desember 2016 yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kewajaran LKPD Kabupaten Klaten TA 2016, kecuali atas dampak dari kejadian sebagai berikut:

Pengembalian Sisa Uang di Bendahara Pengeluaran

Terkait dengan saldo Kas Daerah pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp18.419.366,00 yang terdiri dari saldo bendahara pengeluaran di SKPD DPU sebesar Rp432.000,00 KPPKB sebesar Rp52.055,00 Disperindagkop sebesar Rp13.754.811,00 Kesbangpol sebesar Rp180.000,00 Inspektorat sebesar Rp500,00 dan BKD sebesar Rp4.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

VII. PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang diuangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK). Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016.

BUPA
Klaten, Mei 2017
Plt. BUPATI KLATEN,

K L A T E N
RUMOLYANI

LAMPIRAN

Ikhtisar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kab. Klaten TA 2016

Laporan Keuangan BUMID

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
"PDAM TIRTA MERAPI"
KABUPATEN KLATEN**

LAPORAN KEUANGAN

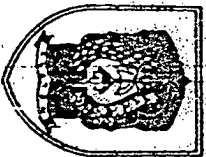
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

Halaman	
i	Pernyataan Direksi
ii	Laporan Auditor Independen
1 - 2	Laporan Posisi Keuangan
3	Laporan Laba Rugi
4	Laporan Perubahan Ekuitas
5	Laporan Arus Kas
	Catatan Atas Laporan Keuangan
6 - 7	A. Umum
7 - 9	B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
10 - 19	C. Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan
	Lampiran 1 - Perhitungan Taksiran Pajak Badan
	Lampiran 2 - Daftar Rincian Surat Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2013.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
“PDAM TIRTA MERAPI”

Jl. Tentara Pelajar, Gayamsprit, Klaten Selatan. Telp. (0272) 321834 Faks. 320507
K L A T E N

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN
PDAM TIRTA MERAPI
Nomor : 900/0149/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

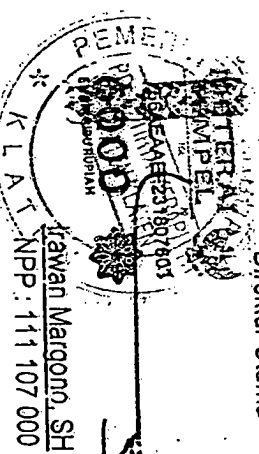
Nama	: Irawan Margono, SH
NPP	: 111 107 000
Jabatan	: Direktur Utama
Instansi	: PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten
Alamat	: Jl. Tentara Pelajar, Klaten Selatan

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
2. Laporan Keuangan PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku di Indonesia.
3. a) Semua Informasi dalam Laporan Keuangan PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah disajikan, secara lengkap dan benar.
b) Laporan Keuangan PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar.
4. Bertanggungjawab atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar digunakan seperlunya.

Klaten, 03 Maret 2017
PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten
Direktur Utama





DRS. CHAERONI & REKAN

Registered Public Accountants
Management, Finance & Tax
Advisory Services
Jln Usaha No. 9/KM. 1/20C 7

No. : LAP-024/MCI-AK/1703

Jl. Angrek Nelimurni II/C - 5, Slipi, Jakarta Barat - 11480 Indonesia
Telephone : (02-) 5321037 (Hunting)
Facsimile : 62 (021) 3356669
Website : www.kapmci.com, E-mail : kep_mci@yahoo.com

Jakarta, 03 Maret 2017.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Merapi Kabupaten Klaten

Laporan Atas Laporan Keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Merapi Kabupaten Klaten terlampir, yang terdiri dari neraca per 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelas lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

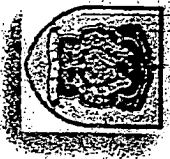
Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Merapi Kabupaten Klaten tanggal 31 Desember 2016 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku di Indonesia.

KAP DRS. CHAERONI & REKAN



DRS. MOCHA CHAERONI, AK, CA, BKP, CPA.
NRAP : AP.0163



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PDAM TIRTA MERAPI

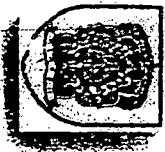
Jln. Tentara Pelajar, Gayamsri, Klaten Selatan Telp. 321.831 faks 320507

KLATEN

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam Rupiah)

	Catatan	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	1	16.699.914.319	11.936.382.898
Investasi Jk Pendek	2	7.228.000.000	8.368.000.000
Piutang Usaha		5.844.832.456	5.082.203.150
Penyisihan Piutang		(1.396.401.231)	(1.059.205.553)
Nilai Buku Piutang Usaha	3	4.448.431.225	4.022.997.597
Piutang Lain-Lain	4	6.406.250	
Persediaan		4.172.008.227	4.559.839.924
Penurunan Nilai Persediaan		(296.993.317)	(296.993.317)
Nilai Buku Persediaan	5	3.875.014.910	4.262.846.607
Pembayaran Dimuka	6	229.230.667	455.847.331
Jumlah Aset Lancar		32.486.997.371	29.046.074.433
ASET TIDAK LANCAR			
Harga Perolehan Aset Tetap		95.851.930.680	87.270.614.675
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	7	(57.508.916.925)	(51.022.944.533)
Nilai Buku Aset Tetap		38.343.013.755	36.247.670.142
Aset Tetap Dalam penyelesaian	8		1.608.310.470
Jumlah Aset Tidak Lancar		38.343.013.755	37.855.988.612
JUMLAH ASET		70.830.011.126	66.902.063.045
KEMAJIBAN DAN EKUITAS			
KEMAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang Usaha	9	441.190.568	
Biaya YMH Dibayar	10	146.644.341	92.286.650
Pendapatan Diteima Dimuka	11	258.390.418	225.592.763
Hutang Pajak	12	954.384.825	360.744.933
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.800.610.152	678.624.346
KEMAJIBAN LAJIN-LAJIN			
Cadangan Dana	13	6.525.105.461	7.652.483.092
Jumlah Kewajiban Lain-Lain		6.525.105.461	7.652.483.092
JUMLAH KEMAJIBAN		8.325.715.613	8.331.107.438

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PDAM TIRTA MERAPI

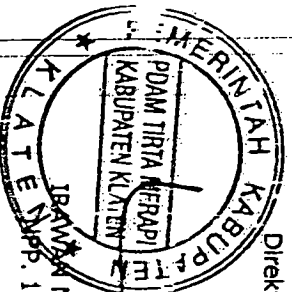
Jln. Tentara Pelajar, Gayamsih, Klaten Selatan Telp. 321834 faks 320507
KLATEN

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam Rupiah)

	Catatan	2016	2015
EKUITAS			
Modal			
Kekayaan Pemda Yang Dipsihkan	14	21.988.329,000	18.940.329,000
Modal Hibah	15	513.215,431	513.215,431
Jumlah Modal		22.501.544,431	19.453.544,431
Penyertaan			
Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan	16	22.797.988,274	20.797.988,274
Penyertaan Pemerintah Pusat	17	10.816.253,251	10.816.253,251
Jumlah Penyertaan		31.614.241,525	31.614.241,525
Cadangan			
Cadangan tujuan	18	123.303,080	123.303,080
Cadangan umum	19	3.603.336,571	2.936.890,934
Jumlah Cadangan		3.726.639,651	3.060.194,014
Saldo Laba			
Labanya Ditahan			
Labanya (Rugi) Tahun Berjalan		4.661.869,906	4.442.975,637
Jumlah Saldo Laba		4.661.869,906	4.442.975,637
JUMLAH EKUITAS		62.504.295,513	58.570.955,607
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		70.830.011,126	66.902.063,045

Klaten, 03 Maret 2017.

Disahkan Oleh:
Direktur Utama



IBRAM MARGONO, SH
NPP. 111 107 000

Disetujui Oleh:
Direktur Adm. & Keuangan

Dibuat Oleh:
Kabag Keuangan

SRI MULYONO, SE
NPP. 029 046 488

SRI SUTARTO, SE
NPP. 085 017 195



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PDAM TIRTA MERAPI

Jln. Tentara Pelajar, Geyampit, Klaten Selatan Telp. 321834 faks 320507

KLATEN

LAPORAN LABA RUGI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam Rupiah)

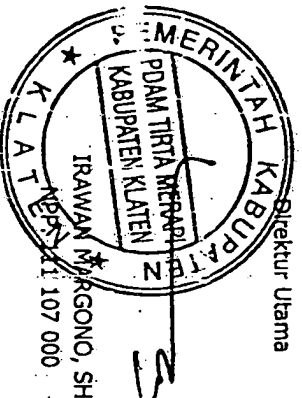
	Catatan	2016	2015
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Air	20	32.817.319,850	30.818.717,050
Pendapatan Non Air	21	2.477.880,153	1.775.612,831
Pendapatan Lain-lain	22	1.741.420,578	1.460.521,368
Jumlah Pendapatan Usaha		37.036.620,581	34.054.851,249
Beban LANGSUNG USAHA			
Beban Pegawai	23	11.894.901,097	9.324.563,798
Beban Air Baku	24	205.510,570	200.980,500
Beban Bahan Kimia	25	118.917,656	132.348,908
Beban Listrik	26	1.264.401,208	1.235.261,699
Beban Telepon	27	124.143,467	83.239,026
Beban Air minum	28	69.670,250	77.253,000
Beban Bahan Bakar	29	176.391,477	265.870,904
Beban Pemeliharaan	30	1.373.126,275	1.549.080,479
Beban Operasi Lainnya	31	5.645.301,918	4.397.485,996
Beban Kantor	32	1.395.566,955	1.386.436,613
Beban Hubungan Langganan	33	1.441.129,704	1.546.152,013
Beban Penelitian dan Pengembangan	34	318.116,750	714.606,150
Beban Penyisihan	35	337.195,678	183.450,042
Beban Penyusutan	36	6.485.972,392	6.101.211,938
Beban Biaya Rupa-rupa	37	302.372,275	1.320.335,676
Beban Lain - lain	38	1.297,000	4.862,200
JUMLAH BEBAN USAHA		31.154.044,652	28.523.138,942
LABA / RUGI OPERASI			
PADAK PENGHAKITAN BADAN		5.882.575,929	5.531.712,307
LABA RUGI SETELAH PAJAK		1.220.706,023	1.088.736,670
		4.661.869,906	4.442.975,637

Klaten, 03 Maret 2017.

Disahkan Oleh:
Direktur Utama

Dicetuyul Oleh:
Direktur Adm. & Keuangan

Dibuat Oleh:
Kabag Keuangan



SRI MULYONO, SE
NPP. 029 046 488

SRI SUTARTO, SE
NPP. 085 017 195



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PDAM TIRTA MERAPI

Jln. Tentara Pelajar, Gayamsprit, Klaten Selatan Telp. 321834 faks 320507
KLATEN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam Rupiah)

Uraian	Modal		Penyertaan		Saldo Laba			Jumlah
	Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	Modal Hibah	Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya	Penyertaan Pemerintah Pusat	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Labanya Yang Belum Dibagi (Akm. Kerugian)	
Desember 2014	18.940.329.000	513.215.431	20.797.988.274	10.816.253.251	123.303.080	2.278.249.878	4.390.955.056	57.860.293.970
a. Selama Tahun 2015								-
ke DAU Pemkab						658.641.056	(2.415.026.000)	(2.415.026.000)
untuk							(658.641.056)	-
pendidikan							(439.096.000)	(439.096.000)
untuk Pensiun dan Jukong							(439.096.000)	(439.096.000)
							(439.096.000)	(439.096.000)
Desember 2015	18.940.329.000	513.215.431	20.797.988.274	10.816.253.251	123.303.080	2.936.890.934	-	54.127.979.970
Saldo Awal 2015							4.442.975.637	4.442.975.637
Desember 2015	18.940.329.000	513.215.431	20.797.988.274	10.816.253.251	123.303.080	2.936.890.934	4.442.975.637	58.570.955.607
a. Selama Tahun 2015								-
ke DAU Pemkab						666.445.637	(2.443.636.000)	(2.443.636.000)
untuk							(666.445.637)	-
pendidikan							(444.298.000)	(444.298.000)
untuk Pensiun dan Jukong							(444.298.000)	(444.298.000)
							(444.298.000)	(444.298.000)
Desember 2015	18.940.329.000	513.215.431	20.797.988.274	10.816.253.251	123.303.080	3.603.336.571	-	54.794.425.607
Saldo Awal 2016	3.048.000.000							3.048.000.000
Desember 2016	21.988.329.000	513.215.431	20.797.988.274	10.816.253.251	123.303.080	3.603.336.571	1.661.869.906	62.504.295.513

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PDAM TIRTA MERAPI

In. Tertara Pelajar, Gayampit, Klaten Selatan Telp. 32.1834 faks 320507
KLATEN

Laporan Arus Kas
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

U R A I A N	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Rugi Bersih	4.661.869.906	4.442.975.637
Koreksi Saldo Laba Rugi		
Penyesuaian untuk :		
Beban Penyisihan Piutang	337.195.678	183.450.042
Beban Penyusutan Aset Tetap	6.485.972.392	6.101.211.938
Kerugian Penurunan Nilai		
Laba Ditahan	(4.442.175.037)	(4.390.955.056)
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	7.042.062.339	6.336.682.561
Perubahan Modal Kerja :		
Penurunan (Kenaikan) Deposito	1.140.000.000	1.115.000.000
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	(762.629.306)	290.679.301
Penurunan (Kenaikan) Piutang Non Usaha	(6.406.250)	594.400
Penurunan (Kenaikan) Persediaan	387.831.697	(852.304.401)
Penurunan (Kenaikan) Pembayaran Dimuka	226.616.664	(279.508.566)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek	1.121.985.806	(1.154.690.149)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lainnya	(1.127.377.631)	(4.133.397.503)
Jumlah Perubahan Modal Kerja	980.020.980	(4.813.624.918)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	8.022.083.319	1.523.057.643
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian/Penjualan Aset Tetap	(8.581.316.005)	(4.084.807.323)
Aset Dalam Penyelesaian	1.608.318.470	(1.477.840.490)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(6.972.997.535)	(5.562.447.816)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Penyerahan Pemda YDPS	3.048.000.000	-
Kenaikan (Penurunan) Modal dan Cadangan	666.415.637	658.641.056
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	3.714.415.637	658.641.056
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	4.763.531.421	(3.380.749.117)
Kas dan Setara Kas Awal Periode	11.936.382.898	15.317.132.015
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	16.699.914.319	11.936.382.898

**LAPORAN KEUANGAN
PD. ANEKA USAHA
KABUPATEN KLATEN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016
SERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN KLATEN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2016**

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi

Halaman

Laporan Auditor Independen

1

Laporan Keuangan:

Neraca

2

Laporan Laba Rugi

3

Laporan Perubahan Ekuitas

4

Laporan Arus Kas

5

Catatan Atas Laporan Keuangan:

I. Gambaran Umum

6

II. Kebijakan Akuntansi

7

III. Penjelasan Pos-pos Neraca

10

IV. Penjelasan Pos-pos Laba Rugi

14

Lampiran :

Lampiran I : Daftar Piutang Usaha

Lampiran II : Daftar Aset Tetap dan Inventaris

Lampiran III : Analisis Rasio Keuangan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
PERUSAHAAN NO. 179 - 181 TELP. 321173, 322534 KLATEN 57411

PERCETAKAN & ATK
APOTEK SIDOWAYAH FARMA
FOTO COPY
PERDAGANGAN UMUM

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2016
PERUSADA ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN

Kesin yang bertanda tangan di bawah ini :

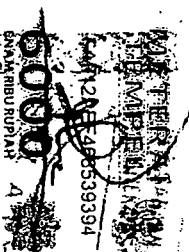
Nama : H. Sukardi, SE, M.Si
Jabatan : Direktur Utama
Alamat kantor : Jalan Pemuda No. 179-181 Klaten

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PERUSDA ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN;
2. Laporan keuangan PERUSDA ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) ;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PERUSDA ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan PERUSDA ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas system pengendalian internal dalam PERUSDA ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Klaten, 31 Maret 2017



(H. Sukardi, SE, M.Si)
Direktur Utama

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.

Direktur

PD. ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN

Di

Klaten

Kami telah mengaudit laporan keuangan PD. ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka - angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



KAP SODIKIN & HARIJANTO
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS AND CONSULTANTS

Nomor : 629/KM.1/2013 & 700/KM.1/2013

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PD. ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

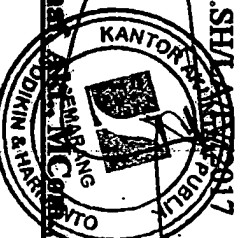
Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik lain dengan Pendapat Wajar Dengan Pengecualian.

KAP SODIKIN & HARIJANTO

Semarang, 19 April 2017

Nomor : 398/KAP.SH/1/2017


Dra. Sodikin Manat Ariyanti, CPA, CA

NIAP : 0878

Nomor Ijin Usaha: 629/KM.1/2013

LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN
NERACA

31 Desember 2016

Dengan Angka Perbandingan Tahun 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
		(Rp)	(Rp)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2d, 3	2.710.282.092	6.126.291.371
Pinutang Usaha	2e, 4	267.389.848	184.068.033
Pinutang Lain-Lain	5	35.093.418	856.962.181
Persediaan	2f, 6	97.084.624	25.275.582
Jumlah Aset Lancar		3.109.849.982	7.192.597.166
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	2g, 7		
Harga Perolehan		588.869.000	549.083.700
Akumulasi Penyusutan		(410.919.443)	(337.136.170)
Jumlah Aset Tetap		177.949.557	211.947.530
Aset Lain - lain	8	3.544.216.240	2.759.239.042
UMLAH ASET		6.832.015.779	10.163.783.738
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Lancar			
Hutang Usaha	9	49.382.750	27.254.500
Hutang Bank	10	-	315.999.604
Hutang Lainnya	11	390.099.484	3.893.647.774
Jumlah Kewajiban Lancar		439.482.234	4.236.901.878
Kewajiban Tidak Lancar			
Hutang Bank	12	-	66.420.670
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		-	66.420.670
Jumlah Kewajiban		439.482.234	4.303.322.548
Ekuitas			
Modal Disetor	1c, 13	7.835.928.694	7.835.928.694
Cadangan	14	611.008.246	377.684.618
Saldo Laba	15	(2.054.403.395)	(2.353.152.122)
Jumlah Ekuitas		6.392.533.545	5.860.461.190
UMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.832.015.779	10.163.783.738

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN
LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2016
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	1 Januari s/d Catatan 31 Desember 2016 (Rp)	1 Januari s/d 31 Desember 2015 (Rp)
PENDAPATAN DAN BEBAN USAHA		
Pendapatan	2h, 17 1.438.895.403	1.144.083.797
Harga Pokok Penjualan	2h, 18 (187.413.152)	(243.032.610)
LABA (RUGI) KOTOR	1.251.482.251	901.051.187
Beban Operasional		
Beban Penjualan	2h, 19 26.338.322	32.892.356
Beban Administrasi dan Umum	2h, 20 847.585.506	555.068.868
Jumlah Beban Operasional	873.923.828	587.961.224
LABA (RUGI) OPERASIONAL	377.558.424	313.089.963
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 2h, 21		
Pendapatan Non Operasional	511.067.716	197.796.138
Beban Non Operasional	(297.729.686)	(18.223.679)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	213.338.030	179.572.459
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK TAHUN BERJALAN	590.896.453	492.662.422
Pajak Penghasilan Badan	(14.388.807)	(260.000)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK TAHUN BERJALAN	576.507.646	492.402.422

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KILATEN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2016

Dengan Angka Perbandingan Tahun 2015

Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Cadangan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Modalan	7.835.928.694	-	-	7.835.928.694
ngan	-	377.684.618	-	377.684.618
nsuaian	-	-	(1.150.398)	(1.150.398)
(Rugi) Tahun Lalu	-	-	(2.844.404.146)	(2.844.404.146)
(Rugi) s.d 31 Desember 2015		-	492.402.422	492.402.422
per 31 Desember 2015	7.835.928.694	377.684.618	(2.353.152.122)	5.860.461.190
ngan	-	233.323.628	-	233.323.628
nsuaian	-	-	(277.758.919)	(277.758.919)
(Rugi) s.d 31 Desember 2016	-	-	576.507.646	576.507.646
per 31 Desember 2016	7.835.928.694	611.008.246	(2.054.403.395)	6.392.533.545

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KLATEN

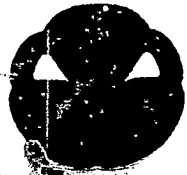
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2016
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	1 Januari s/d 31 Desember 2016	1 Januari s/d 31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	738.546.948	(725.176.573)
Pembayaran Kas Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya	(49.680.793)	(11.217.717)
Pembayaran Kas Kepada Karyawan, Direksi dan Komisaris	532.072.355	419.174.679
Kas berasal dari (digunakan untuk) kegiatan operasi	<u>1.220.938.511</u>	<u>(317.219.610)</u>
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap Tahun Berjalan	33.997.973	54.303.795
Perolehan aset Lainnya	(784.977.198)	(1.152.229.540)
Kas berasal dari (digunakan untuk) kegiatan investasi	<u>(750.979.226)</u>	<u>(1.097.925.745)</u>
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Penambahan Hutang Lain-lain	(3.503.548.290)	3.785.271.918
Hutang Bank	(382.420.274)	(16.992.800)
Tambahan setoran modal	<u>(3.885.968.564)</u>	<u>3.000.000.000</u>
Kas berasal dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan		<u>6.768.279.118</u>
Ternaikan (penurunan) kas bersih dan setara kas	<u>(3.416.009.279)</u>	<u>5.353.133.763</u>
Kas dan setara kas pada awal tahun	6.126.291.371	773.157.608
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u><u>2.710.282.092</u></u>	<u><u>6.126.291.371</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PD BPR

BANK KLATEN

KABUPATEN KLATEN

Jl. Veteran No. 140, Telp. (0272) 322161 (Hunting), Fax. (0272) - 321531 K L A T E N 57431
Email : bankklaten@ymail.com

SURAT PERNYATAAN

TENTANG

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**

31 Desember 2016

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tulus Yudianto, SE

Perusahaan : PD BPR Bank Klaten

Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, dengan kriteria :
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material;
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern perusahaan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Klaten, 6 Maret 2017



K.A.R. Tulus Yudianto, SE

Direktur Utama

>>>...

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

<<<...

Kantor Akuntan Publik
RACHMAD WAHYUDI
Jl. Cipto Mangunkusumo No.3A Solo, Jawa Tengah
Telp/Fax. (0271) 718999 e-mail:kap_rw@yahoo.co.id

tin Akuntan Publik No. AP. 0422
Kep. Menteri. KEP.1423/KM.1/2016
tin Usaha Kantor Akuntan Publik No. 98.2.0231
(Kep. Menteri. No. 1027/KM.17/1998)



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Hasil Audit (LHA). No. 132.17

Kepada Yth.
Dewan Pengawas dan Direksi
PD. BPR BANK KLATEN

Kami telah mengaudit laporan Neraca PD. BPR BANK KLATEN tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Register Akuntan. No. D.10.692

Kantor Akuntan Publik Tendaftar No. Kep.1027/KM.17/1998

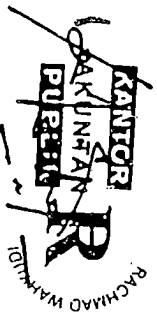
Opini

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PD. BPR BANK KLATEN tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, laporan laba (rugi), perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Hal lain

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Informasi di dalam lampiran-lampiran yang disertakan pada laporan ini disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan pokok yang diharuskan. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern perusahaan yang disajikan dalam laporan tersendiri (*management letter*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
RACHMAD WAHYUDI



Rachmad Wahyudi, SE, Akt. CA, CPA

Register Negara D.10.692

AP. 98.1.0462, KAP. 98.2.0231

Surakarta, 06 Maret 2016

Register Akuntan, No. D.10.692

Kantor Akuntan Publik Tendaftar No. Kep.1027/KM.17/1998

>>>...

LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

<<<...

PD. BPR BANK KLATEN

NERACA

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Dengan angka perbandingan per 31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2015
Kas dan Setara Kas	Enk.A.2a.2b.3	299.339.356	839.524.407
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	2d.4	2.109.824.245	1.496.893.311
Penempatan Pada Bank Lain	2e.5	77.519.808.347	58.626.783.582
Penyisihan Kerugian	2e.5	(369.651.016)	(279.887.364)
Total		77.150.157.331	58.346.896.218
Kredit Yang Diberikan	2f.6	190.454.835.548	146.573.050.034
Provisi dan Administrasi	2f.6	(3.621.268.403)	(2.653.940.399)
Penyisihan Kerugian	2d.6	(3.340.664.514)	(3.174.102.228)
Total		183.492.902.631	140.745.007.407
Agunan Yang Diambil Alih	7	640.000.000	-
Aset Tetap dan Inventaris	2h.8	5.257.708.337	5.067.806.958
Akumulasi Penyusutan	2h.8	(3.752.395.880)	(3.675.317.837)
Total		1.505.312.457	1.392.489.121
Aset Tidak Berwujud	9	3.132.187	-
Aset Lain	2i.10	2.177.961.733	1.149.041.175
Jumlah Aset		267.378.629.941	203.969.851.638
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	2j.11	412.659.020	299.298.086
Utang Bunga	2k.12	336.420.793	260.057.655
Utang Pajak	2l.13	43.885.452	431.905.219
Simpangan	2m.14	209.169.314.259	167.989.800.379
Simpangan Dari Bank Lain	2m.15	1.522.306.582	2.073.342.656
Pinjaman Diterima	2n.16	25.098.606.895	5.688.886.665
Kewajiban Imbalan Kerja	17	2.586.416.273	600.402.673
Kewajiban Lain-lain	18	15.758.021	15.760.544
Jumlah Kewajiban		239.185.367.295	177.359.453.878
EKUITAS			
Modal			
Modal Disetor	Enk.A.1e.19	9.942.682.817	9.942.682.817
Saldo laba			
Cadangan Tujuan	Enk.A.19	5.896.954.190	5.450.735.840
Cadangan Umum	Enk.A.19	8.688.408.454	8.242.189.546
Belum Dientukan Tujuannya	Enk.A.19	3.665.217.185	2.974.789.558
Total		18.250.579.829	16.667.714.944
Jumlah Ekuitas		28.193.262.646	26.610.397.761
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		267.378.629.941	203.969.851.638

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAPORAN LABA RUGI

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Dengan angka perbandingan per 31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	20,20	31.997.427,508	26.352.036,408
Bunga Kontraktual	20	2.903.440,677	2.265.227,653
Provisi dan Komisi		818.133,069	661.390,202
Biaya Transaksi		35.719.001,254	29.278.654,263
Total		(12.066.542,507)	(10.370.131,009)
Beban Bunga	20,21	23.652.458,748	18.908.523,254
Pendapatan Bunga Neto	20,22	1.044.144,609	706.584,532
Pendapatan Operasional Lainnya		24.696.603,357	19.615.107,786
Jumlah Pendapatan Operasional	20,23	19.709.475,671	15.182.960,284
Beban Operasional Lainnya		4.987.127,686	4.432.147,502
Beban Penyisihan Kerugian/ Penyusutan		1.343.297,065	778.920,699
Beban Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif		405.911,326	403.046,750
Beban Penyusutan dan Amortisasi		320.967,380	334.361,712
Beban Pemasaran		17.639.799,900	13.666.631,123
Beban Administrasi Umum		19.709.475,671	15.182.960,284
Jumlah Beban Operasional		4.987.127,686	4.432.147,502
Labar (Rugi) Operasional		28.736.800	53.578.599
Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional	24	(141.653,301)	(105.983,000)
Pendapatan Non Operasional	24	(112.916,501)	(52.404,401)
Beban Non Operasional		4.874.211,185	14.379.743,101
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional		1.208.994,000	1.404.953,544
Labar (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	24	3.665.217,185	2.974.789,558
Taksiran Pajak Penghasilan			
Labar (Rugi) Neto			

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Dengan angka perbandingan per 31 Desember 2015

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Disetor	Cadangan Tujuan	Saldo Laba Cadangan Umum	Belum Ditentukan Tujuannya	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2014	9.942.682.817	5.237.842.040	8.029.295.322	1.419.292.424	24.629.112.603
Penyesuaian Cadangan Umum	-	-	212.894.224	-	212.894.224
Penyesuaian Cadangan Tujuan	-	212.893.800	-	-	212.893.800
Penyesuaian Laba (Rugi) tahun 2014	-	-	-	(1.419.292.424)	(1.419.292.424)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	2.974.789.558	2.974.789.558
Saldo per 31 Desember 2015	9.942.682.817	5.450.735.840	8.242.189.546	2.974.789.558	26.610.397.761
Penyesuaian Cadangan Umum	-	-	446.218.908	-	446.218.908
Penyesuaian Cadangan Tujuan	-	446.218.350	-	-	446.218.350
Penyesuaian Laba (Rugi) tahun 2015	-	-	-	(2.974.789.558)	(2.974.789.558)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	3.665.217.185	3.665.217.185
Saldo per 31 Desember 2016	9.942.682.817	5.896.954.190	8.688.408.454	3.665.217.185	28.193.262.646

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

Enk. B
PD. BPR BANK KLATEN
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2016

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

	2016	2015
Labu (rupai) bersih	3.665.217.185	2.974.789.558
Pemindahan untuk merekonsiliasi labu (rupai) bersih menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
- Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(612.930.935)	106.759.617
- Penyusutan Aktiva Tetap	77.078.043	391.644.490
- Penyusutan Aktiva Tak Berwujud	867.813	11.402.280
- Penyisihan kerugian (pemulihan atas penyisihan) untuk :		
Penyisihan Pemecatan Pada Bank Lain	89.763.652	56.238.023
Penyisihan Pemecatan Aktiva Produktif	166.562.286	(151.806.604)
- Provisi dan Administrasi Kredit	967.328.004	364.311.145
Pemecatan aset dan kewajiban operasi :		
Pemecatan Pada Bank Lain	(18.893.024.765)	(2.894.118.437)
Kredit Yang Dibekukan	(43.881.785.514)	(15.631.825.867)
Agunan diambil alih	(640.000.000)	29.166.500
Aktiva lain-lain	(1.028.920.558)	25.740.378
Kewajiban Segera	113.360.934	(373.385.311)
Hutang Bunga	76.363.138	40.571.766
Hutang Pajak	(388.019.767)	423.729.094
Simpanan	41.179.513.880	33.656.408.204
Simpanan Dari Bank Lain	(551.036.074)	(3.479.755.746)
Pinjaman Diterima	19.409.720.230	(15.571.281.659)
Kewajiban Imbalan Kerja	1.986.013.600	500.677.173
Kewajiban lain-lain	(2.523)	(374.239.456)
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas operasi	1.736.068.628	104.823.187

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pelepasan (pemerolehan) aset tetap

2. Pelepasan (pemerolehan) aset tidak berwujud

Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas investasi

	(189.901.379)	(426.911.391)
	(4.000.000)	
	(193.901.379)	(426.911.391)

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perubahan Cadangan Tujuan

Perubahan Cadangan Umum

Perubahan Laba Ditahan

Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas pendanaan

	446.218.350	212.893.800
	446.218.908	212.894.224
	(2.974.789.558)	(1.419.292.424)
	(2.082.352.300)	(993.504.400)

KEMAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS

	(540.185.051)	(1.315.592.604)
--	---------------	-----------------

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

	839.524.406	2.155.117.010
--	-------------	---------------

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

	299.339.356	839.524.406
--	-------------	-------------

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

TANGGAL 31 DESEMBER 2016

AKTIVA

NO	POS - POS	SANDI	JUMLAH RP
1	Kas	100	
2	Kas dalam valuta asing	102	690.129.750
3	Surat berharga	110	
4	Pendapatan bunga yg akan di terima	120	1.245.784.465
5	Penempatan pada bank lain	130	12.284.612.116
6	-/- Penyisihan penghapusan aset Produktif	131	(26.935.061)
7	Kredit yang diberikan	140	
	a. kredit yang di berikan Pokok		75.039.013.000
	b. kredit yang di berikan Provisi		(990.444.076)
8	-/- Penyisihan penghapusan aaset produktif	141	(2.108.504.695)
9	Agunan yang di ambil alih	200	737.541.000
10	Aset tetap dan inventaris	210	4.690.093.039
11	-/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	211	(1.269.225.526)
12	Aset tidak berwujud	220	42.375.000
13	-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	221	(26.640.084)
14	Aset antar kantor	230	
15	Aset Lain - lain	270	551.752.054
JUMLAH AKTIVA			90.859.550.982

PASIVA

NO	POS - POS	SANDI	JUMLAH RP
1	Kewajiban segera dibayar	300	96.153.200
2	Utang bunga	310	171.341.715
3	Utang Pajak	320	320.618.992
4	Simpanan		
5	a. Tabungan	330	25.349.269.815
6	b. Deposito	340	34.493.500.000
7	Simpanan dari bank lain	360	3.791.554.311
8	Pinjaman yang di terima	370	16.793.734.783
9	Dana setoran modal - kewajiban	400	
10	Kewajiban Imbalan kerja	410	15.000.000
11	Pinjaman sub ordinasi	420	
12	Model Pinjaman	430	
13	Kewajiban antar kantor	440	
14	Kewajiban lain lain	470	
15	Ekuitas		
	Modal		
	a. Modal dasar	501	
	b. Modal yang belum disetor -/-	502	30.000.000.000
	c. Agio	503	(23.160.000.000)
	d. Disagio -/-	504	
	e. Modal Sumbangan	505	
16	Dana setoran modal - ekuitas	510	
17	Laba/ Rugi yang belum di realisasi	520	
18	Surplus revaluasi aset tetap	530	
19	Saldo laba		
	a. Cadangan Umum	541	911.070.130
	b. Cadangan Tujuan	542	850.903.633
	c. Laba / Rugi		
	1. Tahun tahun yang lalu		
	i. Laba	543	
	ii. Rugi	544	
	2. Tahun berjalan		
	i. Laba	545	1.226.403.463
	ii. Rugi	546	
JUMLAH PASIVA			90.859.549.982

Klaten, 6 Februari 2017

PD BPR BKK TULUNG

Klaten Klaten



REKENING - REKENING

SANDI

JUMLAH RP

A. Pendapatan Operasional	100	14.031.812,346
1. Pendapatan bunga		
a. Bunga Kontraktual		
i. Surat berharga	111	
ii. Penempatan pada bank lain		
Giro		
Tabungan	112	364.301,140
Deposito	113	72.828,996
Sertifikat Deposito	114	166.937,852
iii. Kredit yang di berikan	115	
Kepada bank lain	116	
Kepada pihak ketiga bukan bank	117	11.302.727,070
b. Provisi kredit		
i. Kepada bank lain	123	
ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	124	1.403.782,513
c. Biaya transaksi -/-		
i. Surat berharga	125	
ii. Kredit yang di berikan		
Kepada bank lain	126	
Pendapatan lainnya		
a. Pendapatan jasa transaksi	132	
b. Keuntungan penjualan valuta asing	133	
c. Keuntungan penjualan surat berharga	134	
d. Penerimaan kredit yang di hapusbuku	136	9.908,000
e. Pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif	137	484.617,077
f. Lainnya	139	226.709,698
B. Biaya Operasional		12.301.553,973
1. Beban bunga		
a. Beban bunga kontraktual		
i. Tabungan	161	823.830,242
ii. Deposito	162	2.827.194,599
iii. Simpanan dari bank lain	163	322.615,332
iv. Pinjaman yang diterima		
Dari bank Indonesia	164	
Dari bank lain	165	1.454.047,941
Dari pihak ketiga bukan bank	166	131.391,671
v. Pinjaman subordinasi	167	
vi. Lainnya	168	330.252,289
b. Biaya Transaksi		
i. Kepada bank lain	169	
ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	170	35.940,713
c. Koreksi atas pendapatan bunga	171	19.299,000
2. Beban kerugian restrukturisasi kredit	172	
3. Beban penyisihan penghapusan aset produktif		
a. Surat berharga	173	
b. Penempatan pada bank lain	174	20.295,065
c. Kredit yang di berikan		
i. Kepada bank lain	175	
ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	176	881.684,801
4. Beban pemasaran	180	66.153,800
5. Beban penelitian dan pengembangan	190	
6. Beban administrasi dan umum		
a. Beban tenaga kerja		
i. Gaji dan upah	201	2.912.512,384
ii. Honorarium	202	161.682,048
iii. Lainnya	203	23.246,719
b. Beban pendidikan dan pelatihan	204	135.937,800
c. Beban sewa		
i. Gedung kantor	205	67.934,764
ii. Lainnya	206	214.350,000
d. Beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap dan Inventaris	207	281.413,858
e. Beban amortisasi aset tidak berwujud	208	3.723,423

REKENING - REKENING		SANDI	JUMLAH RP
h. Beban barang dan jasa		211	1,223,287,734
l. Pajak pajak		212	5,200,559
7 Beban Lainnya			
a. Kerugian penjualan valuta asing		221	-
b. Kerugian penjualan surat berharga		222	-
c. Lainnya		223	37,771,773
C. Laba Operasional		250	1,730,258,373
Rugi Operasional		260	-
D. Pendapatan Non Operasional		300	2,965,792
1 Keuntungan Penjualan			
a. Aset tetap dan Inventaris		311	-
b. AYDA		312	-
2 Pemulihan penurunan nilai			
a. Aset tetap dan Inventaris		313	-
b. AYDA		314	-
3 Pendapatan ganti rugi asuransi		315	-
4 Bunga antar kantor		316	-
5 Selsih kurs		317	-
6 Lainnya		318	2,965,792
E. Beban Non Operasional		350	186,201,771
1 Kerugian penjualan/kehilangan			
a. Aset tetap dan Inventaris		351	-
b. AYDA		352	-
2 Kerugian penurunan nilai			
a. Aset tetap dan inventaris		353	-
b. AYDA		354	-
3 Bunga antar kantor		356	-
4 Selsih kurs		357	-
5 Lainnya		359	-
F. Laba Non Operasional		360	186,201,771
Rugi Non Operasional		370	(183,235,979)
G. Laba tahun berjalan		380	1,547,022,394
Rugi Tahun berjalan		390	-
H. Taksiran Pajak Penghasilan		400	320,618,932
I. Jumlah Laba		410	1,226,403,462
Jumlah Rugi		420	-



Direktur utama

Klaten, 6 Februari 2017
PD.BPR BKK TULUNG

Kabupaten Klaten

PD. BKK KLATEN KANTOR PUSAT
 Pac.Tanggal 31 Desember 2016

Kas	100	2.415.881.580,00	Kewajiban segera	300	125.219.530,00
Kas dalam valuta asing	102	0,00	Utang bunga	310	188.844.479,00
Surat Berharga	110	0,00	Utang pajak	320	0,00
Pendapatan bunga yang akan diterima	120	1.151.603.386,68	Simpunan		0,00
Penempatan pada bank lain	130	27.178.382.533,00	a. Tabungan	330	88.827.244.054,89
-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	131 *	-135.455.846,00	b. Deposito	340	56.862.650.000,00
Kredit yang diberikan	140	114.179.149.013,97	Simpunan dari bank lain	360	9,00
-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	141	-33.475.530.345,00	Pinjaman diterima	370	0,00
Akruan yang diambil alih	200	0,00	Dana setoran modal -kewajiban	400	0,00
Aset tetap dan inventaris	210	6.788.969.444,26	Kewajiban imbalan kerja	410	0,00
-/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	211	-4.890.655.132,20	Pinjaman subordinasi	420	0,00
Aset tidak berwujud	220	0,00	Modal pinjaman	430	0,00
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	221	0,00	Kewajiban antar kantor	440	0,00
Aset antar kantor	230		Kewajiban lain-lain	470	1.113.787.608,46
Aset lain-lain	270	7.756.047.909,60	Modal		0,00
		0	a. Modal dasar	501	25.000.000.000,00
		0	b. Modal yang belum disetor -/-	502	-15.482.170.000,00
		0	c. Agio	503	0,00
		0	d. Disagio -/-	504	0,00
		0	e. Modal sumbangan	505	0,00
		0	Dana setoran modal -ekuitas	510	0,00
		0	Labai/Rugi yang belum direalisasi	520	0,00
		0	Surplus revaluasi aset tetap	530	0,00
		0	Saldo laba		0,00
		0	a. Cadangan umum	541	383.801.777,00
		0	b. Cadangan tujuan	542	103.802.587,00
		0	c. Labai/Rugi		0,00
		0	1) Tahun-tahun yang lalu		0,00
		0	i. Laba		0,00
		0	ii. Rugi -/-	544	-36.394.490.041,94
		0	2) Tahun berjalan		0,00
		0	i. Laba	545	219.702.540,90
		0	ii. Rugi -/-	546	0,00
Jumlah Aktiva		120.948.392.544,98	Jumlah Pasiva		120.948.392.544,98

Klaten, 31 Desember 2016
 PD. BKK KLATEN KABUPATEN KLATEN
 PD. BKK KLATEN KANTOR PUSAT



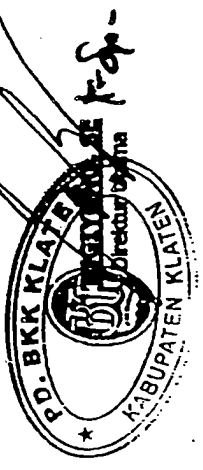
PD. BKK KLATEN KANTOR PUSAT

Per Tanggal 31 Desember 2016

Rekening-rekening	Saldo	Saldo	Rekening-rekening	Saldo	Saldo
Pendapatan Operasional	100	20.411.418,798,7	Beban Operasional	150	20.070.896.082,48 ⁰
1. Pendapatan bunga			1. Beban Bunga		
a. Bunga kontraktual			a. Beban Bunga Kontraktual		
I. Surat berharga	111	-	I. Tabungan	161	3.734.156.116,00
II. Penempatan pada bank lain			II. Deposito	162	4.412.871.810,00
Giro	112	-	III. Simpanan dari bank lain	163	-
Tabungan	113	609.701.577,0	IV. Pinjaman yang diterima		
Deposito	114	910.641.862,0	Dari Bank Indonesia	164	-
Sertifikat deposito	115	-	Dari Bank Lain	165	-
III. Kredit Yang diberikan			Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	166	-
Kepada bank lain	116	-	V. Pinjaman Subordinasi	167	-
Kepada pihak ketiga bukan bank	117	15.229.452.764,1	VI. Lainnya	168	-
b. Provisi/kredit			Biaya Transaksi		
I. Kepada bank lain	123	-	I. Kepada bank lain	169	-
II. Kepada pihak ketiga bukan bank	124	1.571.623.100,0	II. Kepada pihak ketiga bukan bank	170	-
c. Biaya transaksi +/-			c. Koreksi atas pendapatan bunga	171	-
I. Surat berharga	125	-	2. Beban kerugian restrukturisasi/kredit	172	-
II. Kredit yang diberikan			3. Beban penyisihan penghapusan aset produktif		
Kepada bank lain	126	-	a. Surat berharga	173	-
Kepada pihak ketiga bukan bank	127	-	b. Penempatan pada bank lain	174	44.505.917,00
2. Pendapatan Lainnya			c. Kredit yang diberikan		
a. Pendapatan jasa transaksi	132	886.759.262,8	I. Kepada bank lain	175	-
b. Keuntungan penjualan valuta asing	133	-	II. Kepada pihak ketiga bukan bank	176	496.535.576,00
c. Keuntungan penjualan surat berharga	134	-	4. Beban pemisahan	180	-
d. Penarikan kredit yang dipasutuku	135	73.542.500,0	5. Beban penilaian dan pengurangan	180	-
a. Pemilihan penyisihan penghapusan aset produktif	137	1.251.086.489,0	6. Beban administrasi dan umum		
f. Lainnya	139	49.609.234,0	a. Beban tenaga kerja		
			I. Gaji dan Upah	201	6.533.442.098,00
			II. Honorarium	202	-
			III. Lainnya	203	-
			b. Beban pendidikan dan pelatihan	204	221.894.159,00
			c. Beban sewa	205	-
			I. Gedung Kantor	206	229.954.611,00
			II. Lainnya	207	-
			d. Beban penyusutan/penghapusan atas aset	208	667.148.079,88
			a. Beban amortisasi aset tidak berwujud	209	-
			I. Beban premi asuransi	210	798.508.414,00
			g. Beban pemeliharaan dan perbaikan	211	500.846.612,00
			h. Beban barang dan jasa	212	1.415.348.338,00
			i. Pajak-pajak	212	29.451.924,00
			7. Beban Lainnya		
			a. Kerugian penjualan valuta asing	221	-
			b. Kerugian penjualan surat berharga	222	-
			c. Lainnya	223	987.135.037,80
			Laba Operasional	250	-
			Rugi Operasional	260	(340.420.706,16)
			Pendapatan Non Operasional	300	34.802.201,72

Rekening-rekening		Sandi	Saldo	Rekening-rekening		Sandi	Saldo
				1. Keuntungan penjualan			
				a. Aset tetap dan Inventaris		311	28.218.700,00
				b. AYDA		312	
				2. Pemulihan penurunan nilai		313	
				a. Aset tetap dan Inventaris		314	
				b. AYDA		315	
				3. Pendapatan ganti rugi asuransi		316	
				4. Bunga antar kantor		317	
				5. Selisih kurs		318	5.585.441,72
				6. Lainnya		350	155.124.387,00
				Beban Non Operasional			
				1. Kerugian penjualan/kahilangan			
				a. Aset tetap dan Inventaris		351	
				b. AYDA		352	
				2. Kerugian penurunan nilai			
				a. Aset tetap dan Inventaris		353	
				b. AYDA		354	
				3. Bunga antar kantor		356	
				4. Selisih kurs		357	
				5. Lainnya		359	155.124.387,00
				Labas Non Operasional		360	
				Rugi Non Operasional		370	120.322.105,28
				Labas tahun berjalan		380	220.098.640,90
				Rugi tahun berjalan		380	
				Tekanan Pajak Penghasilan		400	398.000,00
				Jumlah Laba		410	219.702.540,90
				Jumlah Rugi		420	
						0	

Klaten, 31 Desember 2016
PD. BKK Klaten Kantor Pusat



LAPORAN MUTASI
Per 31 Desember 2016

A. LAPORAN KOLEKTIBILITAS KREDIT

NO	PERKIRAAN	BULAN LAJU		%	MUTASI		BULAN INI		%
		ORANG	SALDO DEBIT		DEBIT	KREDIT	ORANG	SALDO DEBIT	
1	KURANG LANCAR	279	3.150.676.131	2,7%	0	705.799.574	262	2.444.876.557	2,12
2	DIRAGUKAN	195	2.558.640.783	2,2%	119.289.262	0	198	2.677.930.045	2,33
3	MAC ET	7.831	41.318.118.055	35,7%	0	331.909.078	7.786	40.986.208.977	35,62
	SUB TOTAL	8.305	47.027.434.969	40,7%	119.289.262	1.037.708.652	8.248	46.109.015.579	40,07
4	LANCAR	5.544	68.591.599.802	59,3%	7.465.150.000	7.096.931.831	5.549	68.959.817.971	59,93
	JUMLAH	13.849	115.619.034.771	100,0%	7.584.439.262	8.134.640.483	13.795	115.068.833.550	100
	TK KESEHATAN								

B. LAPORAN DATA MASYARAKAT

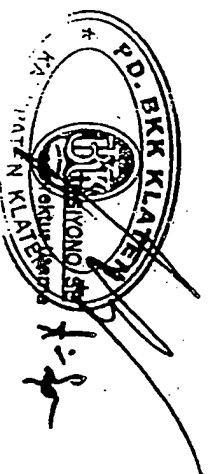
NO	PERKIRAAN	BULAN LAJU		MUTASI		BULAN INI	
		RP	ORANG	DEBIT	KREDIT	RP	ORANG
1	TABUNGAN WAJIB	478.528.907	6.230	650.782.800	644.847.203	470.594.310	6.264
2	TAMADES SERI A	87.824.331.364	20.861	31.237.484.595	31.748.712.662	88.335.549.431	20.512
4	TAMADES SERI B	56.160.650.000	3.427	2.844.000.000	3.546.000.000	56.862.650.000	3.416
5	TABUNGAN PROMO	532.108.682	2	511.111.459	105.091	21.100.314	1
JUMLAH		144.993.617.953	30.320	35.243.388.854	35.939.664.956	145.689.694.055	30.193

C. RASIO-RASIO

NO	PERKIRAAN	RASIO	KETERANGAN
1	CAR	(18,77)	Tidak Sehat
2	KAP	31,08	Tidak Sehat
3	PPAP	100,00	Sehat
4	ROA	(0,01)	Tidak Sehat
5	BOPO	88,81	Tidak Sehat
6	LIKUIDITAS	20,31	Sehat
7	LDR	96,36	Cukup Sehat
8	NIM	8,05	
9	NPL	40,07	
10	ROE	(0,89)	
11	HTI	19,73	

31.Des-16

PD. BKK KLATEN KABUPATEN KLATEN



SIRKULASI PINJAMAN PER BULAN

SIRKULASI PINJAMAN PER BULAN					Tamadas A & Tamadas B s/d bulan ini	
Jenis Kelamin	Jumlah Rp (000)	Pinjaman			Tamadas A	Tamadas B
		Jumlah Orang		Peminjam Baru		
			Jumlah	Rp (000)	Orang	Orang
Laki-Laki						
Perempuan					26.776	3.416

KLASIFIKASI PINJAMAN		Rp.	Orang	Jumlah Pegawai	
Lancar					
		68.959.817.971	5.549		
Kurang Lancar				Laki-laki	
		2.444.876.557	262		
Diragukan				Wanita	
		2.677.930.045	198		
Macet					
		40.986.208.977	7.786		
Jumlah pinjaman yang diberikan (SUDO)				Total Dasa	
		115.068.833.550	13.795	Jumlah Pos	
Penghapusan kredit macet bulan ini					

MANAGEMENT SKOR:

MANAGEMENT SKOR:		Maksimal	Nilai
1. Penilaian Management dari Bank Indonesia			
2. Penilaian kondisi BPR-BKK dari Pengawas:			
a. Penampilan			
b. Kondisi			
c. Keamanan			
Jumlah			

Dilal nilai terakhir jika Bi belum mengavalusi

31-Dec-16

PD. BKK KLATEN KABUPATEN KLATEN





NO.	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
1	ANTAR BANK AKTIVA TABUNGAN	27.178.382	1	Tabungan Simpeda Bank Jateng	486.916
			2	Tabungan Mega Utama	156.259
			3	Tabungan Bima Platinum Bank Jateng	8.105.639
			4	Tabungan Prima Bank Muamalat	429.568
			5	Deposito Bank Muamalat	8.000.000
			6	Deposito Bank Jateng	10.000.000
JUMLAH		27.178.382	JUMLAH		27.178.382

PD. BKK KLATEN KABUPATEN KLATEN
DAFTAR AKTIVA LAIN (RUPA-RUPA AKTIVA)
Per 31 Desember 2016

NO.	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
1	RUPA RUPA AKTIVA	7.756.048	1	KANTOR PUSAT	4.686.009
			2	KPO	10.786
			3	KC.WEDI	1.349
			4	KC. DELANGGU	30.680
			5	KC. WONOSARI	75.358
			6	KC. MANISRENGGO	72.139
			7	KC. BAYAT	283.400
			8	KC. JATINOM	367.617
			9	KC. CEPER	52.395
			10	KC. PRAMBANAN	99.403
			11	KC. KEBONARUM	4.865
			12	KC. KLATEN SELATAN	2.072.048
TOTAL		7.756.048	TOTAL		7.756.048

PD. BKK KLATEN KABUPATEN KLATEN
RUPA-RUPA PASSIVA
Per 31 Desember 2016

NO.	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
1	RUPA RUPA PASSIVA	1.113.787	1	KANTOR PUSAT	1.054.048
			2	KPO	
			3	CABANG WEDI	
			4	CABANG JATINOM	40.300
			5	CABANG CEPER	
			6	CABANG WONOSARI	
			7	CABANG MANISRENGGO	
			8	CABANG BAYAT	
			9	CABANG PRAMBANAN	
			10	CABANG KEBONARUM	
			11	CABANG KLATEN SELATAN	19.439
TOTAL		1.113.787	TOTAL		1.113.787

31-Des-16

PD. BKK KLATEN
KABUPATEN KLATEN



PROGRESS REPORT PH KREDIT

J U N I A - H

PD. BKK KLATEN KABUPATEN KLATEN



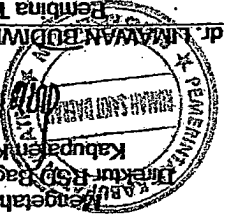
Laporan Keuangan BLUD

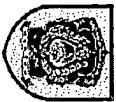


PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Urusan Pemerintahan	: 1	Usman Wajib
Pidang Pemerintahan	: 1.02	Kesehatan
Unit Organisasi	: 1.02.03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
4	PENDAPATAN - LRA	25.000.000,000,00	20.449,072.890,19	81,80	735.557.434,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	25.000.000,000,00	20.449,072.890,19	81,80	735.557.434,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	735.557.434,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	25.000.000,000,00	20.449,072.890,19	81,80	0,00
5	BELANJA	78.513,652,000,00	64.389,592,176,03	82,01	34.494.852,176,00
5.1	BELANJA OPERASI	42.148,057,000,00	30.853,028,573,03	73,44	8.459,932,206,00
5.1.1	Belanja Pegawai	6.081,402,000,00	5.557,820,745,00	91,39	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.066,655,000,00	25.395,207,828,03	70,41	8.459,932,206,00
5.2	BELANJA MODAL	36.365,595,000,00	33.436,563,603,00	91,95	26.034.919,970,00
5.2.2	Belanja Model Perlatan dan Mesin	35.651,127,000,00	32.762,382,746,00	91,90	25.773,013,170,00
5.2.3	Belanja Model Gedung dan Bangunan	624.468,000,00	613,677,607,00	98,27	216,572,000,00
5.2.4	Belanja Model Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	42.763,000,00
5.2.5	Belanja Model Asst Tetap Lainnya	90.000,000,00	60.503,250,00	67,23	2.571,800,00
SURPLUS / (DEFISI)		(53.513,652,000,00)	(43.940,519,285,84)	82,11	(33.759,294,742,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLIPA)		(53.513,652,000,00)	(43.940,519,285,84)	82,11	(33.759,294,742,00)

Mengetahui :
Direktur RUP Bagas Waras
Kabupaten Klanten

Dr. LILIYAWAN BUDIWIROWO, M.Kes.
Pembina TK I
NIP. 19660103 199602 1 002

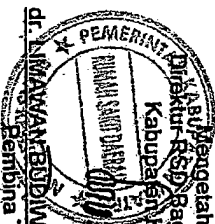


NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1.02		Urusan Wajib Kesehatan	
Unit Organisasi : 1.02.03		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
URUTAN		2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Berdebara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Berdebara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		4.681.693.714,16	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pendapatan		4.002.480.940,00	1.921.903,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		(21.031.383,00)	(9.610,00)
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		4.229.467.666,00	2.476.268.832,00
JUMLAH ASET LANCAR		12.892.610.985,16	2.476.181.125,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergilir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		0,00	0,00
Peralatan dan Mesin		58.552.372.496,00	25.674.832.270,00
Gedung dan Bangunan		104.325.100.313,00	197.851.115,00
Jalan, Jirigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		2.868.000,00	184.267.219,00
Kontribusi Dalam Perserjiaan		146.955.000,00	146.955.000,00
Akumulasi Penyusutan		(13.173.774.819,00)	(2.040.261.059,00)
JUMLAH ASET TETAP		149.853.520.990,00	24.363.644.595,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		901.662.269,00	0,00
Aset lain-lain		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		901.662.269,00	0,00
JUMLAH ASET		163.647.794.244,16	26.841.825.670,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancer Utang Jangka Panjang		0,00	0,00

Unsur Penerimaan : 1.02 Unsur Wajib Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
URAIAN		2016	2015
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	
Utang Beban	1.632.019.125,00	147.455.181,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH KEMAJIBAN JANGKA PENDEK	1.632.019.125,00	147.455.181,00	
KEMAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH KEMAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	
JUMLAH KEMAJIBAN	1.632.019.125,00	147.455.181,00	
EKUITAS			
EKUITAS	162.015.775.119,16	26.694.370.489,00	
JUMLAH KEMAJIBAN DAN EKUITAS DANA	163.647.794.244,16	26.841.825.670,00	



 Mengetahui :
 Direktur RSUD Bagas Wairas
 Kabupaten Klaten
 dr. MAYAN BUDIWIOWO, M.Kes
 Bendahara Tk. I
 NIP. 19660103 198602 1 002

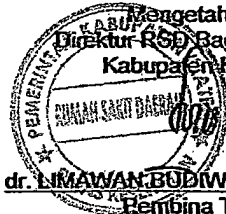


PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2016	SALDO 2015	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	24.449.631.927,19	953.479.337,00	23.496.152.590,19	2.464,25
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	24.449.631.927,19	737.479.337,00	23.712.152.590,19	3.215,30
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	737.479.337,00	(737.479.337,00)	(100,00)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	24.449.631.927,19	0,00	24.449.631.927,19	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	216.000.000,00	(216.000.000,00)	(100,00)
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	216.000.000,00	(216.000.000,00)	(100,00)
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	40.614.669.137,03	8.436.110.457,00	32.178.558.680,03	381,44
9.1.1	Beban Pegawai - LO	5.509.719.153,00	57.062.500,00	5.452.656.653,00	9.555,59
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	25.037.332.930,03	5.748.265.711,00	19.289.067.219,03	335,56
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.046.595.329,00	2.630.772.636,00	7.415.822.693,00	281,89
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	21.021.725,00	9.610,00	21.012.115,00	218.648,44
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
 Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
 Unit Organisasi : 1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2016	SALDO 2015	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(16.165.037.209,84)	(7.482.631.120,00)	(8.682.406.089,84)	116,03
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(16.165.037.209,84)	(7.482.631.120,00)	(8.682.406.089,84)	116,03
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(16.165.037.209,84)	(7.482.631.120,00)	(8.682.406.089,84)	116,03

Mengetahui :
 Direktur RSUD Bagas Waras
 Kabupaten Klaten

 dr. NAWAN BUDIWIOWO, M.Kes
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660103 199602 1 002

